LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

(LKPJ)

BUPATI SIDOARJO

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Nomor : 100.1.6.1/2783/438.1.2.2/2024

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan tepat waktu.

Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan LKPJ menggunakan format dan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Oleh karenanya, format, sistematika, serta substansi penyusunan LKPJ Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Melalui LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, diharapkan DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bupati Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2023, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan strategis tahun selanjutnya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur keberhasilan kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya

penyelesaian setiap urusan. Termasuk juga pelaksanaan 17 Program Prioritas Bupati Sidoarjo, Capaian Indikator Kinerja Utama, Capaian Indikator Kinerja Daerah, serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2022. Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak target kinerja yang tercapai, namun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2023 sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2023, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

BUPATI SIDOARJO,

Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

H. AHMAD MUHDLOR ALI, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum 1

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 4

C. Gambaran Umum Daerah 11

1. Kondisi Geografis Daerah 11

2. Gambaran Umum Demografis 15

3. Kondisi Perekonomian 18

D. Sumber Daya PNS 21

E. Pengelolaan Pendapatan Daerah 22

F. Pengelolaan Belanja Daerah 27

G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 31

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 32

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 43

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 43

B. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2023 56

C. Capaian Pelaksanaan Program Prioirtas Tahun 2023 125

D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 154

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 154

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 169

3. Urusan Pilihan 197

4. Unsur Penunjang Pemerintahan 207

E. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan 251

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Tahun Sebelumnya 256

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 285

BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN 286

BAB VI PENUTUP 291

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, berkaitan dengan capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas oembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan diatasnya, serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Penyusunan LKPJ merupakan bagian dari siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah, dimana LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021, yang pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD dimaksud. Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan tahun kedua pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang telah diubah melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Selain itu, penyusunan LKPJ juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang pada hakikatnya menunjukkan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya LKPJ akan dibahas oleh DPRD dengan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, serta dapat menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan strategis daerah.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penglolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

C. VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 – 2026

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokrastis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

” TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN ”

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Pokok - Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"	***Sidoarjo Sejahtera***	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola an diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan dtingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan *People Centered Develompement* atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"	***Sidoarjo Sejahtera***	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha*****.**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari

potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: ***Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan*****.**

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: ***Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan*****.**

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

Misi 4: ***Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya*****.**

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas**.**

Misi 5: ***Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.***

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilainilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten
				Opini atas Audit BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Pesentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentar tenaga kerja yang teserap di semblan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrasstruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
				Indeks Resiko Bencana

Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
				Indeks Pelestarian Budaya
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

4. Program Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.

Program prioritas dimaksud, merupakan langkah percepatan (*Quick Win*) untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan. Adapun Program Prioritas dimaksud, yang selanjutnya menjadi 17 Agenda Pokok Prioritas Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer
12. Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

D. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3° – 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5° – 112,9° BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km2 ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1	Tarik	36,06
2	Prambon	34,22
3	Krembung	29,55
4	Porong	29,82
5	Jabon	81,00
6	Tanggulangin	32,29
7	Candi	40,67
8	Tulangan	31,21
9	Wonoayu	33,92
10	Sukodono	32,68
11	Sidoarjo	62,56
12	Buduran	41,03
13	Sedati	79,43
14	Waru	30,32
15	Gedangan	24,06
16	Taman	31,54
17	Krian	32,50
18	Balongbendo	31,40
Jumlah		**714,24**

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023

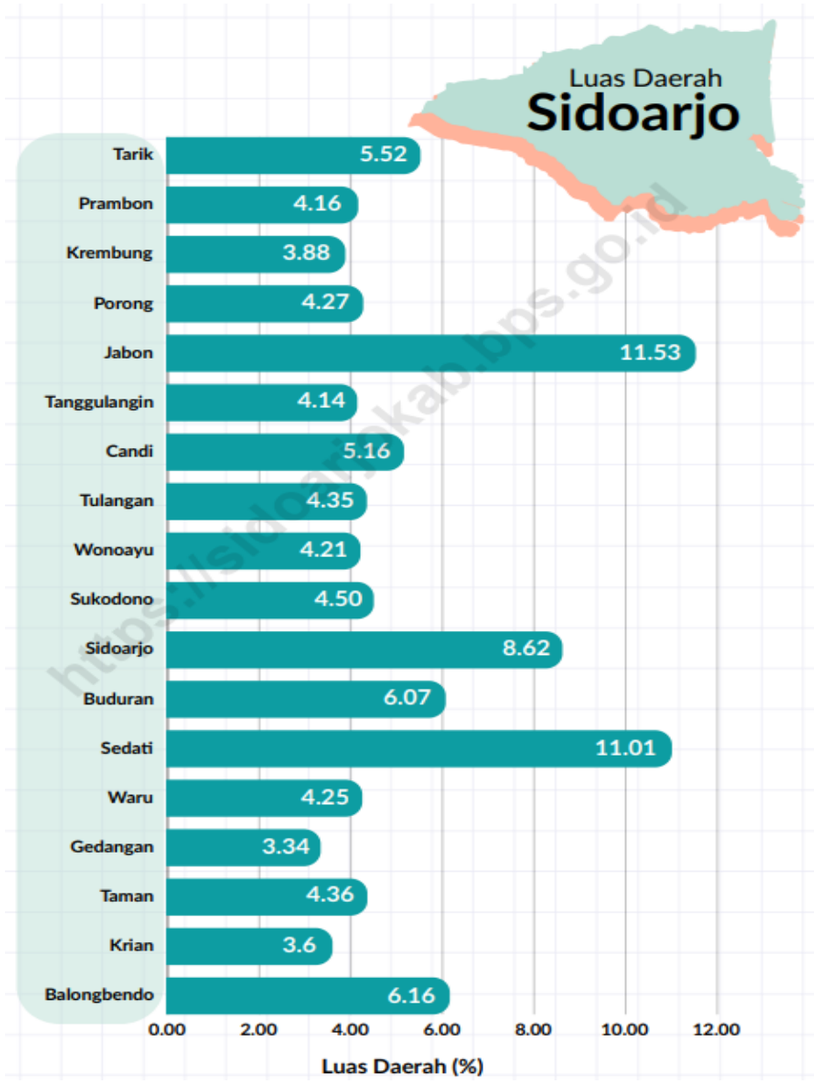

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area)* dan desa perkotaan (*urban area*). Pada Tahun 2023 dilakukan penggabungan untuk Desa dan Kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

1) Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
2) Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong.

3) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
4) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
5) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon
6) Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	12	3
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	18	-
8.	Jabon	13	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	**318**	**28**

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

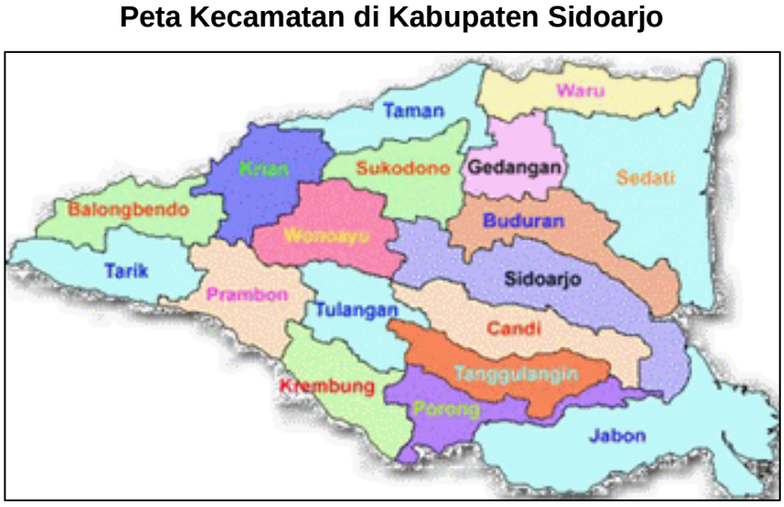

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.

Sepanjang tahun 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,8oC, terjadi di bulan November dengan kelembaban ratarata 73,3%. Sementara suhu terendah terjadi di bulan September, sebesar 20,6oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 71,3 persen.

Sementara itu, BMKG juga mencatat selama Januari-Desember 2023 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 130 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Januari dan Februari masing-masing 27 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Febaruari, sebesar 539,3 mm dengan hari hujan sebanyak 28 hari. Curah hujan turun secara signifikan di bulan Mei menjadi 84,7 mm dengan 7 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan Desember, sebesar 215,0 mmdengan hari hujan sebanyak 13 hari.

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,6	27,7	34,6	49,00	83,2	98,0
Februari	20,8	26,9	34,0	51,0	85,4	100,0
Maret	23,6	27,9	34,4	45,0	83,4	98,0
April	23,6	28,1	33,8	57,0	83,8	100,0
Mei	22,9	28,4	35,2	52,0	78,6	100,0
Juni	23,6	28,4	34,0	53,0	77,9	97,0
Juli	20,9	27,6	34,2	45,0	75,8	100,0
Agustus	21,2	27,6	34,7	50,0	74,3	95,0
September	20,6	28,0	34,6	43,0	71,3	100,0
Oktober	22,8	29,8	36,0	38,0	70,7	95,0
Nopember	22,0	30,4	36,8	42,0	73,3	97,0
Desember	24,4	29,5	35,6	50,0	79,0	98,0

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2023

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)
	Rata-Rata	Maksimum	Rata-Rata
Januari	4,8	30,0	1.007,8
Februari	5,6	30,0	1.007,9
Maret	3,1	14,0	1.009,3
April	3,3	14,0	1.008,3
Mei	4,1	12,0	1.010,3
Juni	4,5	15,0	1.010,2
Juli	4,8	15,0	1.011,1
Agustus	5,7	15,0	1.012,0
September	5,6	15,0	1.011,1
Oktober	5,4	24,0	1.011,1
Nopember	3,4	15,0	1.009,1
Desember	3,1	15,0	1.009,1

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	317,6	27,0	6,5
Februari	539,3	27,0	4,9
Maret	199,5	22,0	4,8
April	373,4	22,0	3,5
Mei	84,7	7,0	5,2
Juni	5,3	2,0	5,2
Juli	0,4	1,0	7,4
Agustus	--	--	8,2
September	--	--	8,1
Oktober	--	--	9,2
Nopember	13,8	6,0	9,1
Desember	222,5	16,0	9,3

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.996.825 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

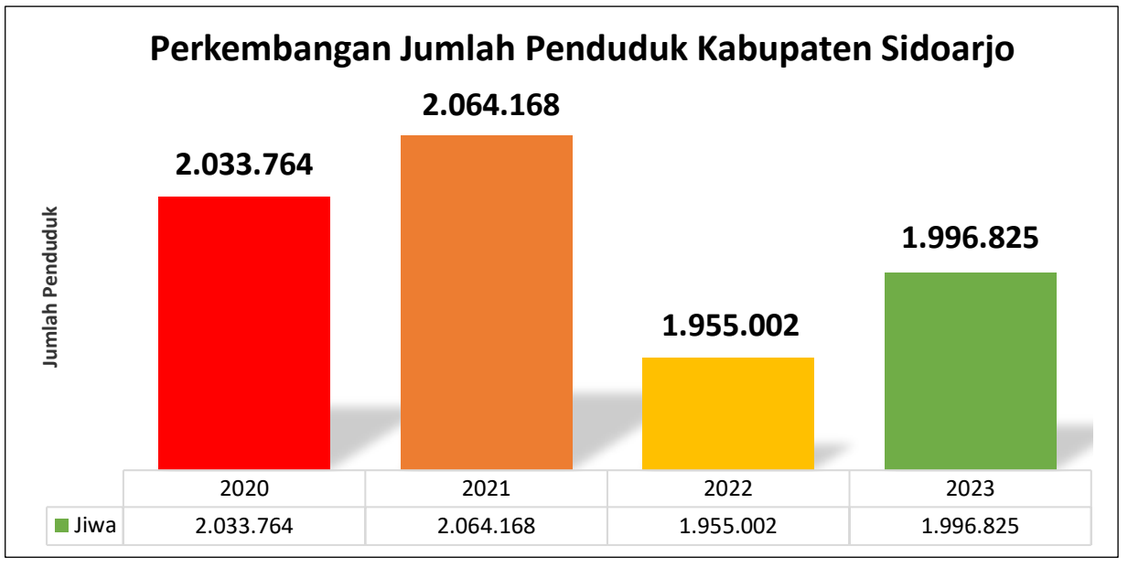

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2023 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
75 <	14.647	20.475	35.122
70 -74	17.232	17.792	35.024
65 -69	32.572	31.703	64.275
60 - 64	45.908	49.455	95.363
55 -59	60.405	64.519	124.924
50 -54	74.472	79.301	153.773
45 -49	72.806	78.136	150.942
40 -44	80.079	82.475	162.554
35 -39	73.154	71.794	144.948
30 -34	73.381	71.087	144.468
25 -29	78.666	75.926	154.592
20 -24	83.427	79.342	162.769
15 -19	74.180	69.818	143.998
10 – 148	81.512	76.637	158.149
05 - 09	75.542	70.698	146.240
00 - 04	62.084	57.600	119.684
JUMLAH	1.000.067	996.758	1.996.825

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2023

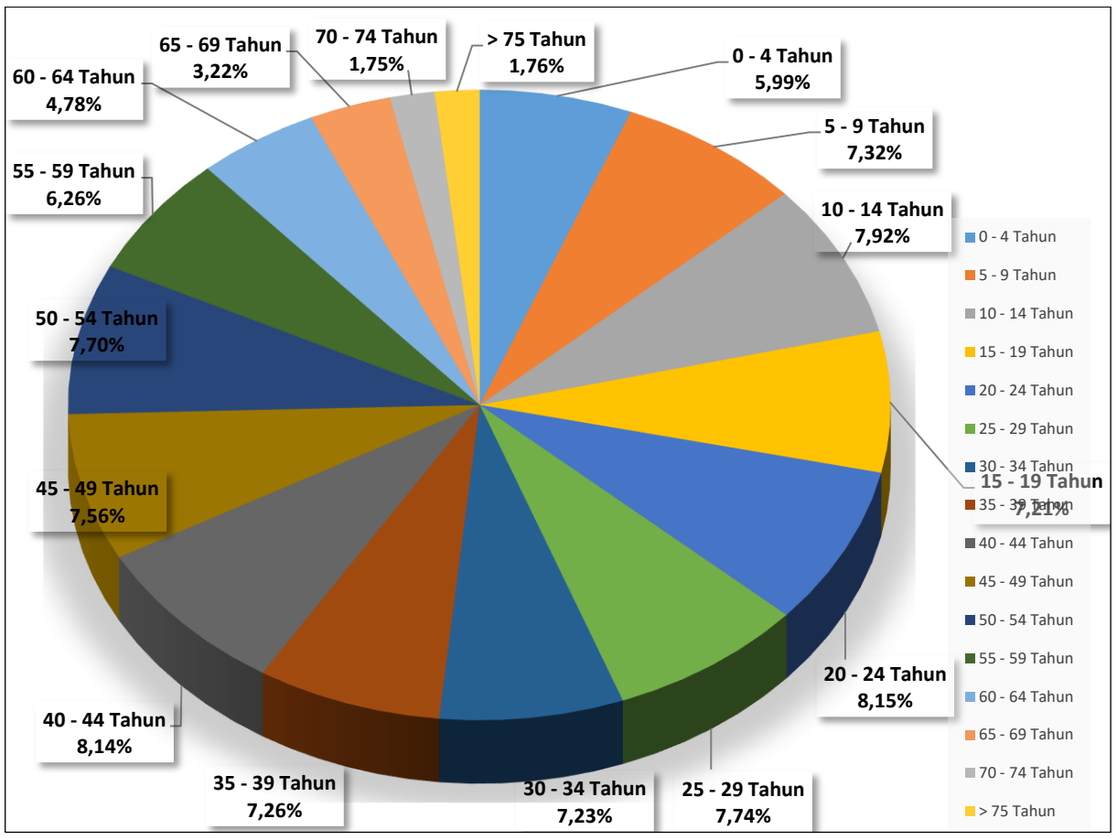

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

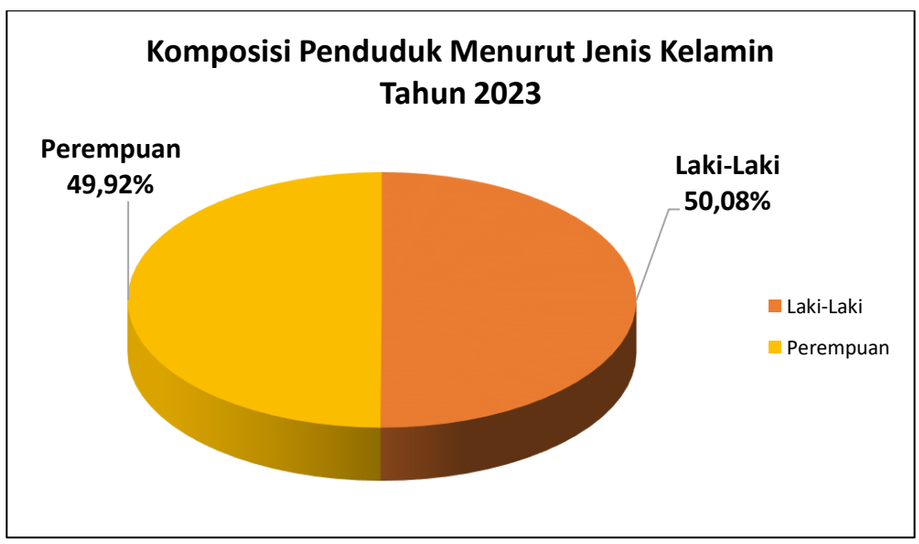

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	TARIK	34.009	33.449	67.458
2	PRAMBON	39.650	38.810	78.460
3	KREMBUNG	34.209	34.193	68.402
4	PORONG	35.282	34.888	70.170
5	JABON	27.701	27.452	55.153
6	TANGGULANGIN	43.601	43.560	87.161
7	CANDI	76.901	77.021	153.922
8	SIDOARJO	98.027	99.729	197.756
9	TULANGAN	50.737	50.440	101.177
10	WONOAYU	42.245	41.519	83.764
11	KRIAN	65.942	64.470	130.412
12	BALONGBENDO	37.461	36.472	73.933
13	TAMAN	100.366	100.039	200.405
14	SUKODONO	61.383	60.571	121.954
15	BUDURAN	49.530	49.469	98.999
16	GEDANGAN	59.289	59.049	118.338
17	SEDATI	47.751	47.526	95.277
18	WARU	95.983	98.101	194.084
JUMLAH		**1.000.067**	**996.758**	**1.996.825**

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

3. Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 273,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 28,5 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 245,14 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di seluruh lapangan usaha pasca pandemi covid 19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 151,57 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 160,09 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 terjadi percepatan terhadap perekonomian Sidoarjo sebesar 6,17 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan

usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi tiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, sebagai berikut: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sidoarjo.

Pada tahun 2023, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 48,61 persen, meningkat 4,40 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha perdaganan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 16,18, meningkat 5,97 persen dari tahun 2022, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 6,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo tahun 2023 sebesar 6,17 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yang pertumbuhannya sebesar 7,57 persen. Salah satu indikator pendukung perlambatan adalah melambatnya pertumbuhan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo antara lain transportasi dan pergudangan yang hanya tumbuh 22,14 tahun 2023 dan 45,32 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan pengeluaran, pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo pada 2023 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yaitu berturut-turut sebesar 54,45 persen dan 29,37 persen.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha Tahun 2023 berdasarkan angka sementara, sebagai berikut :

PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.159,73	2.730,83
2	Pertambangan dan Penggalian	74,26	42,92
3	Industri Pengolahan	133.046,50	83.869,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.695,73	1.553,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	148,77	122,15
6	Konstruksi	18.670,37	12.543,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	44.281,52	25.886,02
8	Transportasi dan Pergudangan	37.086,34	11.843,89

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.624,88	5.942,85
10	Informasi dan Komunikasi	8.957,99	7.844,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.056,07	1.728,97
12	Real Estate	2.240,10	1.546,35
13	Jasa Perusahaan	378,35	235,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.963,95	2.215,42
15	Jasa Pendidikan	2.708,26	1.783,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	800,49	536,06
17	Jasa Lainnya	804,76	525,99
	TOTAL	**273.698,07**	**160.950,78**

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB berdasarkan ADHK Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Share PDRB Berdasarkan ADHK

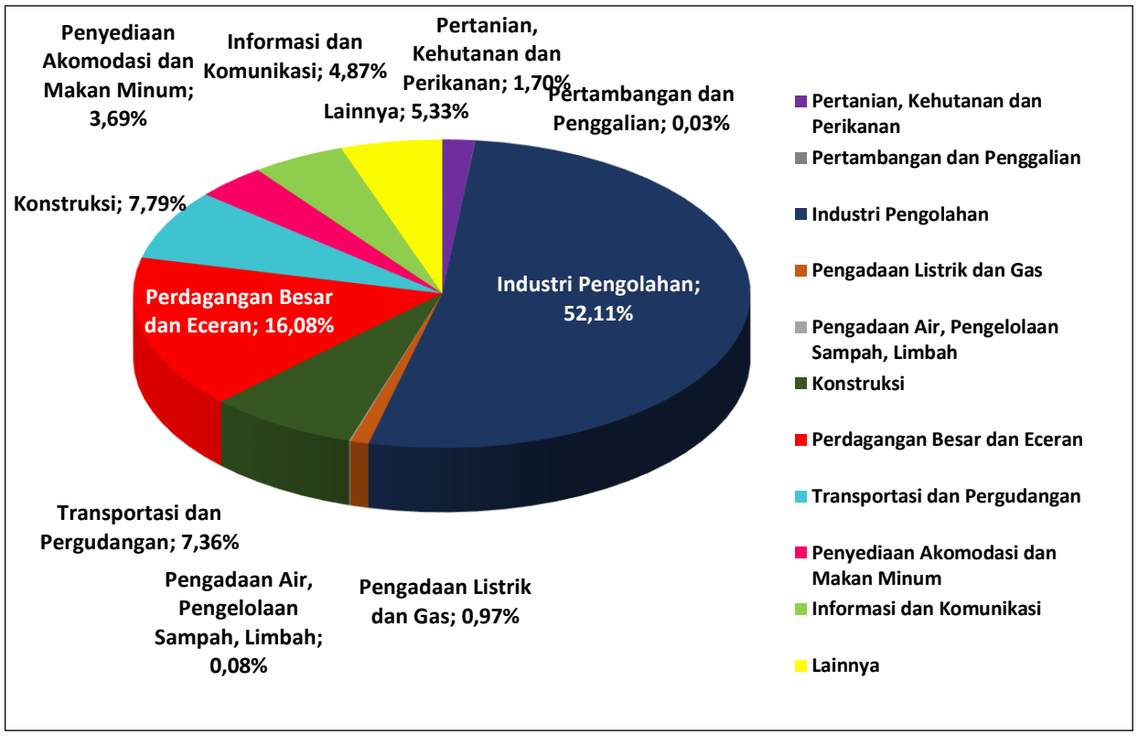

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

E. Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 13.934 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	17	91	86	194
2	Sekretariat DPRD	5	42	9	56
3	Inspektorat	7	18	54	79
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	389	7.700	8.106
5	Dinas Kesehatan	28	188	1.634	1.850
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	8	66	14	88
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	8	30	10	48
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7	21	59	87
9	Dinas Sosial	6	15	14	35
10	Dinas Tenaga Kerja	6	10	17	33
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	8	25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7	10	7	24
13	Dinas Pangan dan Pertanian	10	49	109	168
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	227	15	249
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	26	20	51
16	Dinas Perhubungan	14	59	18	91
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	40	14	61
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5	24	3	32
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	15	10	30
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5	42	6	53
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	15	14	35
22	Dinas Perikanan	4	25	5	34
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	130	18	154
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	24	17	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	53	9	68

26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	6	74	11	91
27	Badan Kepegawaian Daerah	7	34	20	61
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	2	21
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	52	32	90
30	Rumah Sakit Umum Daerah	25	109	1.036	1.170
31	Kecamatan Sidoarjo	38	41	2	81
32	Kecamatan Candi	5	16	1	22
33	Kecamatan Buduran	7	12	2	21
34	Kecamatan Gedangan	8	13	1	22
35	Kecamatan Sedati	7	14	1	22
36	Kecamatan Waru	4	16	2	22
37	Kecamatan Taman	22	29	2	53
38	Kecamatan Sukodono	7	11	2	20
39	Kecamatan Wonoayu	6	15	1	22
40	Kecamatan Krian	10	18	0	28
41	Kecamatan Balongbendo	4	18	1	23
42	Kecamatan Tarik	6	18	1	25
43	Kecamatan Tulangan	8	16	1	25
44	Kecamatan Prambon	10	18	1	29
45	Kecamatan Krembung	7	16	1	24
46	Kecamatan Tanggulangin	8	16	1	25
47	Kecamatan Jabon	5	11	1	17
48	Kecamatan Porong	12	20	1	33
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	13	22	251	286
50	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	2	0	0	2
	TOTAL	447	2.243	11.244	13.934

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

F. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalian potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaat information and communication technologi (ICT).
4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaaan potensi dan kajian akademik.
5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan diserta kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%
2022	Rp. 4.452.199.210.000,00	Rp. 4.504.385.259.558,71	101,17%
2023	Rp. 4.874.725.580.048,00	Rp. 5.020.221.472.820,07	102,98%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2023 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

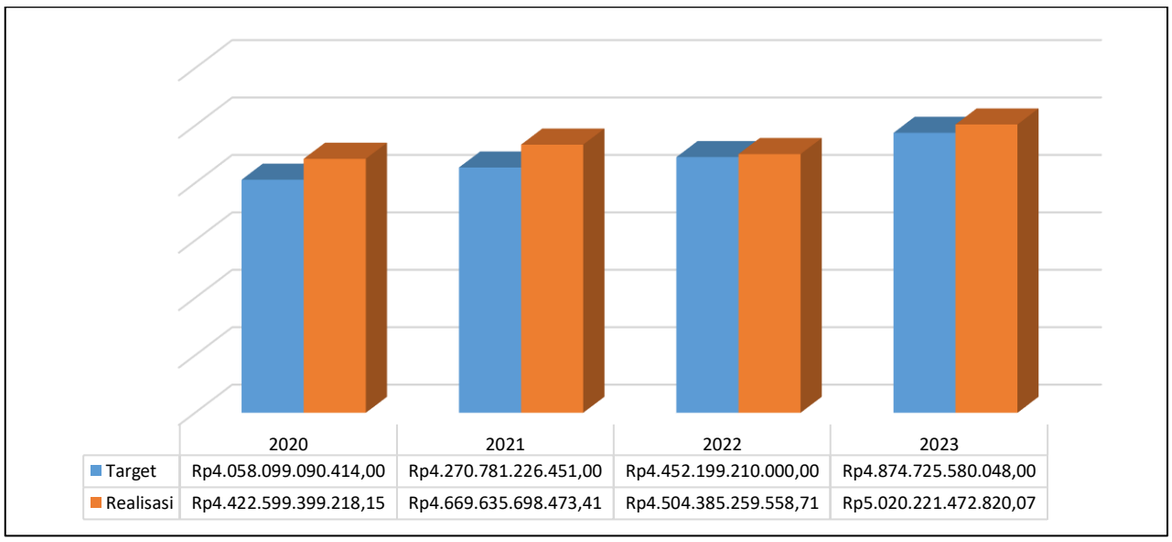

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2023 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.913.135.627.969,00	2.050.814.700.362,07	107,20
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.957.289.952.079,00	2.366.272.099.637,00	100,29
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.300.000.000,00	3.567.282.000,00	82,96
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.874.725.580.048,00**	**5.020.221.472.820,07**	**102.98**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.5.020.221.472.820,07 atau 102,98% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.874.725.580.048,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.050.814.700.362,07 atau tercapai sebesar 107,20% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.913.135.627.969,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.215.000.000.00000	1.302.626.605.440,26	107,21
1.1.2.	Retribusi Daerah	51.832.726.878,00	52.105.726.006,00	100,53
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	39.759.992.614,00	39.759.992.614,50	100,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	606.542.908.477,00	656.322.376.301,31	108,21
	JUMLAH	**1.913.135.627.969,00**	**2.050.814.700.362,07**	**107,20**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun anggaran 2023 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.302.626.605.440,26 atau 107,21% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Daerah	**1.215.000.000.000,00**	**1.302.626.605.440,26**	**107,21**
Pajak Hotel	20.000.000.000,00	21.795.275.752,00	108,98
Pajak Restoran	95.000.000.000,00	112.818.170.066,10	118,76
Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.738.499.404,00	110,55
Pajak Reklame	16.000.000.000,00	18.203.375.196,00	113,77
Pajak Penerangan Jalan	350.000.000.000,00	342.977.025.636,16	97,99
Pajak Parkir	20.000.000.000,00	22.545.794.307,00	112,73
Pajak Air Tanah	3.200.000.000,00	4.051.420.068,00	126,61
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	283.800.000.000,00	305.517.707.518,00	107,65
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	420.000.000.000,00	466.979.337.493,00	111,19

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.52.105.726.006,00 atau tercapai 100,53% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Daerah	**51.832.726.878,00**	**52.105.726.006,00**	**100,53**
Retribusi Jasa Umum	*28.325.960.200,00*	*26.133.133.577,00*	*92,26*
Retribusi Jasa Usaha	*6.199.016.000,00*	*6.916.141.058,00*	*111,57*
Retribusi Perizinan Tertentu	*17.307.750.678,00*	*19.056.451.371,00*	*110,10*

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.39.759.992.614,00 dan terealisasi sebesar Rp.39.759.992.614,50 atau tercapai sebesar 100,00%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	***39.759.992.614,00***	***39.759.992.614,50***	***100,00***
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	28.002.143.023,00	28.002.143.023,50	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	539.422.254,00	539.422.254,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	11.218.427.337,00	11.218.427.337,00	100,00

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2023

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain–lain PAD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.656.322.376.301,31 atau tercapai 108,21%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.606.542.908.477,00.

JENIS / OBYEK	**ANGGARAN (Rp)**	**REALISASI (Rp)**	**%**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	*665.693.322,00*	*1.166.625.720,00*	*175,25*
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	*12.139.211.155,00*	*13.310.470.123,00*	*109,65*
Hasil Kerja Sama Daerah	*0,00*	*6.669.052.744,00*	*0,00*
Jasa Giro	*3.052.143.946,00*	*3.393.088.008,02*	*111,17*
Pendapatan Bunga	*10.169.863.017,00*	*15.452.547.987,60*	*151,94*
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	*1.277.747.173,00*	*1.538.357.178,90*	*120,40*
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	*91.839.112,00*	*43.444.442,57*	*47,30*
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	*91.652.264,00*	*571.413.039,17*	*623,46*
Pendapatan Denda Pajak Daerah	*3.763.155.057,00*	*6.316.510.285,00*	*167,85*
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	*25.305.133,00*	*49.799.658,00*	*196,80*
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Pendapatan dari Pengembalian	*762.172.063,00*	*1.386.187.272,00*	*181,87*
Pendapatan BLUD	*574.500.470.000,00*	*606.119.046.833,05*	*105,50*
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	*3.656.235,00*	*9.300.000,00*	*254,36*
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	*0,00*	*296.533.010,00*	*0,00*
JUMLAH	**606.542.908.477,00**	**656.322.376.301,31**	**108,21**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

f. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.2.965.839.490.458,00 atau 100,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.957.289.952.079,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.376.785.777.352,00**	**2.366.272.099.637,00**	**99,56**
Dana Perimbangan	2.031.853.158.352,00	2.022.735.722.637,00	99,55
Dana Insentif Daerah (DID)	21.357.443.000,00	21.357.443.000,00	100,00
Dana Desa	323.575.176.000,00	322.178.934.000,00	99,57
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**580.504.174.727,00**	**599.567.390.821,00**	**103,28**
Pendapatan Bagi Hasil	564.460.002.806,00	583.727.968.900,00	103,41
Bantuan Keuangan	16.044.171.921,00	15.839.421.921,00	98,72
JUMLAH	**2.957.289.952.079,00**	**2.965.839.490.458,00**	**100,29**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

g. **Lain – Lain Pendapatan Yang Sah**

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Hibah	**4.300.000.000,00**	**2.727.000.000,00**	**63,42**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.300.000.000,00	2.727.000.000,00	63,42
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**0,00**	**840.282.000,00**	**0,00**
Lain-lain Pendapatan	0,00	840.282.000,00	0,00
JUMLAH	**4.300.000.000,00**	**3.567.282.000,00**	**82,96**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

G. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagi upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing- masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut :

1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2020	Rp. 5.182.074.462.157,57	Rp. 4.441.673.370.394,65	85,71%
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%
2022	Rp. 5.291.622.947.330,00	Rp. 4.849.419.407.073,06	91,64%
2023	Rp. 5.367.503.579.233,00	Rp. 5.001.778.673.487,58	93,19%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2023 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo

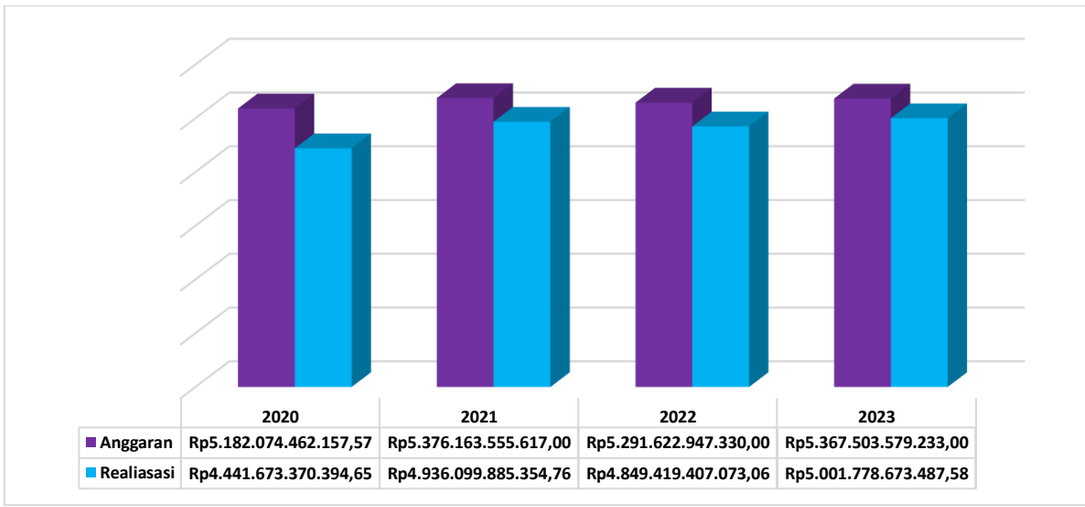

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, seangkan untuk Tahun 2022 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.5.367.503.579.233,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.5.001.778.673.487,58 atau tercapai sebesar 93,19%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	3.725.646.627.268,00	3.507.494.437.666,58	94,14
2.2.	BELANJA MODAL	846.634.465.375,00	715.198.635.441,00	84,48
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.970.200.000,00	9.610.233.290,00	60,18
2.4.	BELANJA TRANSFER	779.252.286.590,00	769.475.367.090,00	98,75
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**5.367.503.579.233,00**	**5.001.778.673.487,58**	**93,19**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.3.507.494.437.666,58 atau 94,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.725.646.627.268,00.

Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.1.	**Belanja Operasi**			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.652.295.134.691,00	1.576.632.054.112,52	95,42
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.639.451.333.433,00	1.508.284.193.883,06	92,00
2.1.3	Belanja Subsidi	2.520.000.000,00	1.256.673.332,00	49,87
2.1.4	Belanja Hibah	323.058.639.144,00	315.559.511.110,00	97,68
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	108.321.520.000,00	105.762.005.229,00	97,64
	JUMLAH	**3.725.646.627.268,00**	**3.507.494.437.666,58**	**94,14**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.715.198.635.441,00 atau 84,48% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.846.634.465.375,00. Rincian realisasi belanja langsung sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.2.	BELANJA MODAL			
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	133.683.750.000,00	79.430.373.480,00	59,42
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.127.532.451,00	183.173.370.829,00	84,75
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.185.608.948,00	159.102.588.430,00	88,30
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314.453.619.976,00	291.642.063.091,00	92,75
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	940.704.000,00	637.069.070,00	67,72
	Jumlah Belanja Modal	**846.634.465.375,00**	**715.198.635.441,00**	**84,48**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.9.610.233.290,00 atau 60,18% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.15.970.200.000,00

Belanja Transfer tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.769.475.367.090,00 atau 98,75% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.779.252.286.590,00

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	**15.970.200.000,00**	**9.610.233.290,00**	**60,18**
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	15.970.200.000,00	9.610.233.290,00	60,18
2.4.	BELANJA TRANSFER	**779.252.286.590,00**	**769.475.367.090,00**	**98,75**
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	141.253.864.390,00	141.253.864.390,00	100,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	637.998.422.200,00	628.221.502.700,00	98,47

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

H. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	494.877.999.185,00	494.877.999.184,63	100,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	0,00	661.916.872,05	-
Jumlah	**494.877.999.185,00**	**495.539.916.056,68**	**100,13**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	2.055.000.000,00	97,86
Pembiayaan Pokok Utang	0,00	0,00	-
Jumlah	**2.100.000.000,00**	**2.055.000.000,00**	**97,86**
	492.777.999.185,00	**493.484.916.056,68**	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**-**	**511.927.597.548,05**	

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.5.210.597.374.474,00 bertambah sebesar Rp.156.906.204.759,00 sehingga menjadi Rp.5.367.503.579.233,00 sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :
   - a. Semula Rp.4.762.697.374.474,00
   - b. Bertambah Rp.112.028.205.574,00
   - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.4.874.725.580.048,00
2. Belanja Daerah :
   - a. Semula Rp.5.210.597.374.474,00
   - b. Bertambah Rp.156.906.204.759,00
   - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.5.367.503.579.233,00
3. Pembiayaan Daerah :
   - a. Penerimaan Pembiayaan
     - 1. Semula Rp.450.000.000.000,00
     - 2. Bertambah Rp.44.877.999.185,00
     - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.494.877.999.185,00
   - b. Pengeluaran Pembiayaan
     - 1. Semula Rp.2.100.000.000,00
     - 2. Bertambah Rp.0,00
     - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.2.100.000.000,00
     - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.492.777.999.185,00
     - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dimaksud, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.1.935.040.752.492,00
2. Berkurang	(Rp.21.905.124.523,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.1.913.135.627.969,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.2.823.356.621.982,00
2. Bertambah	Rp.133.933.330.097,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.2.957.289.952.079,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.4.300.000.000,00
2. Bertambah	Rp.0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.4.300.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.1.130.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.85.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.1.215.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.55.636.731.878,00
2. Berkurang	(Rp.3.804.005.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.51.832.726.878,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.106.470.890.479,00
2. Berkurang	(Rp.66.710.897.865,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.39.759.992.614,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.642.933.130.135,00
2. Berkurang	(Rp.36.390.221.658,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.606.542.908.477,00

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.2.360.764.522.000,00
2. Bertambah	Rp.16.021.255.352,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.2.376.785.777.352,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.462.592.099.982,00
2. Bertambah	Rp.117.912.074.745,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.580.504.174.727,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.4.300.000.000,00
2. Bertambah	Rp.0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.4.300.000.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.3.655.757.131.578,00
2. Bertambah	Rp.69.889.492.690,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.3.725.646.627.268,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.886.964.309.508,00
2. Berkurang	(Rp.40.329.844.133,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.846.634.465.375,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.16.200.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.229.800.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.15.970.200.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.651.675.933.388,00
2. Bertambah	Rp.127.576.353.202,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.779.252.286.590,00

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.1.660.973.527.863,00
2. Berkurang	(Rp.8.678.393.172,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.1.652.295.134.691,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.1.575.447.549.571,00
2. Bertambah	Rp.64.003.783.862,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.1.639.451.333.433,00

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.0,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.2.520.000.000,00
2. Bertambah	Rp.,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.2.520.000.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.371.715.934.144,00
2. Bertambah	Rp.5.342.705.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.323.058.639.144,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.99.100.120.000,00
2. Bertambah	Rp.9.221.400.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.108.321.520.000,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.134.123.750.000,00
2. Berkurang	(Rp.440.000.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.133.683.750.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.200.540.163.888,00
2. Bertambah	Rp.15.587.368.563,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.216.127.532.451,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.179.435.641.353,00
2. Bertambah	Rp.749.967.595,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.180.185.608.948,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp.370.845.800.267,00
2. Berkurang	(Rp.56.392.180.291,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.314.453.619.976,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.910.704.000,00
2. Bertambah	Rp.30.000.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.940.704.000,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.1.108.250.000,00
2. Bertambah	Rp.135.000.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.1.243.250.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, yaitu :

1. Semula	Rp.16.200.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.229.800.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.15.970.200.000,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.118.563.673.188,00
2. Bertambah	Rp.22.690.191.202,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.141.253.864.390,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.533.112.260.200,00
2. Bertambah	Rp.104.886.162.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.637.998.422.200,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.450.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.44.877.999.185,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.494.877.999.185,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.2.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.100.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.450.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.44.877.999.185,00
Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.494.877.999.185,00

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp.2.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.2.100.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp.0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pembayaran pokok utang	Rp.0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Semula	Rp.0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Tema pembangunan Tahun 2023 sebagaimana Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, adalah “Peningkatan Pelayanan Publik, Pembangunan Kota, dan Sistem Transportasi yang Mendukung Berkembangnya Perindustrian dan Perdagangan”, dimana Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Prioritas RKPD Tahun 2023	Arah Kebijakan Tahun 2023
Mendorong Transformasi Ekonomi Inklusif melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Industri Kreatif melalui Dukungan Ekonomi Digital	• Membangunan sinergi dan koordinasi Perangkat Daerah Bidang Ekonomi guna mengarahkan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. • Fokus pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro difokuskan pada kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19, agar dapat memulai Kembali usaha. • Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja dan penguatan efektivitas hubungan industrial guna meciptakan lapangan kerja sebagai upaya untuk menanggulangi pengangguran.
Peningkatan Daya Dukung Transportasi Terpadu Pengurai Kemacetan dan Mendukung Pemulihan Ekonomi;	• Pembangunan dan pemeliharaan jalan guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta pendukung pemulihan ekonomi lokal.

	• Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi kemacetan.
Pemantapan Pembangunan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdayasaing	• Pemenuhan jangkauan jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai target nasional 98% di tahun 2024; • Peningkatan partisipasi dan kualitas Pendidikan masyarakat melalui beasiswa dan pembinaan kualitas pendidik. • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan, • Peningkatan karakter dan budi pekerti siswa melalui integrasi nilai-nilai agama dan budaya ke dalam kurikulum Pendidikan.
Penguatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan Pemanfaatan ICT	• Penguatan daya dukung sistim informasi tata Kelola pemerintahan secara terintegrasi; • Digitalisasi data dan informasi pembangunan daerah; • Implementasi e-governance secara bertahap dan berkelanjutan.
Penataan Kota melalui Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau dan Utilitas Publik lainnya yang Selaras Pembangunan Sektoral dan Pelesatarian Lingkungan	• Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana public yang mendukung kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta utilitas lainnya; • Pelaksanaan program dan kegiatan pelestarian lingkungan secara terintegrasi lintas sektoral.
Pemantapan Pelayanan Publik Inovatif yang Mendukung Kemudahan Investasi dan Mendukung Pertumbuhan Industri, Perdagangan dan Jasa	• Implementasi pengaduan masyarakat secara cepat dan akurat, • Implementasi sistim perizinan yang mudah dan cepat yang mendukung investasi, perdagangan dan jasa.

Pada tahun anggaran 2023 telah ditetapkan paket strategis pengadaan barang / jasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/37/438.1.1.3/2023 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, yaitu antara lain sebagai berikut :

No.	Paket Strategis	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road	Rp.37.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Peningkatan Jalan Tarik – Mlirip	Rp.28.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

3	Peningkatan Jalan Geluran – Suko	Rp.10.775.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
4	Pembangunan Trotoar Jalan Perkotaan	Rp.11.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
5	Peningkatan Jalan Krembung – Mojoruntut (DAK)	Rp.11.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
6	Peningkatan Jalan Tulangan - Durungbedug	Rp.7.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
7	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Prambon	Rp.7.573.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Pembangunan Taman Bahu Jalan	Rp.6.938.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
9	Revitalisasi Taman Alun – Alun dan Median Jalan Sekitarnya	Rp.6.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10	Pembangunan / Peningkatan Afvoer Kedungpeluk Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin	Rp.2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
11	Pelebaran Jalan Bebekan	Rp.850.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
12	Peningkatan Jalan Banjarpanji, Tanggulangin	Rp.3.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
13	Peningkatan Jalan Kwangsan (Ljt)	Rp.4.875.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
14	Peningkatan Jalan Bringinbendo – Tanjungsari (DAK)	Rp.5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
15	Peningkatan Jalan Tropodo	Rp.5.450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
16	Peningkatan Jalan Banjarsari – Damarsi	Rp.7.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
17	Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road Waru – Buduran (Ljt)	Rp.50.000.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
18	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Larangan Kecamatan Candi (DAKP)	Rp.2.407.045.000,00	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balongdowo Kecamatan Candi (DAKP)	Rp.3.543.791.001,00	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

20	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Panggreh Kecamatan Jabon (DAKP)	Rp.4.418.778.001,00	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
21	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungsolo Kecamatan Porong (DAKP)	Rp.6.092.556.990,00	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
22	Pembangunan SPAM Umbulan Paket 1	Rp.9.651.875.825,00	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
23	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Punggul Kecamatan Gedangan (DAKP	Rp.17.487.828.150,00	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capain kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang capaian hasil keberhasilan kinerjanya pada tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2020	2021	2022	2023		Keterangan
						Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	BB	BB	TERCAPAI
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,69	4,21	7,53	2,89	6,16	TERCAPAI
3	Indeks Gini	Poin	0,34	0,347	0,373	0,347	0,359	TIDAK TERCAPAI
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,97	10,87	8,80	10,09	8,05	TERCAPAI
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,59	5,93	5,36	5,40	5,00	TERCAPAI
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,747	0,793	0,792	0,772	0,843	TERCAPAI
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,78	59,81	57,54	59,81	58,99	TIDAK TERCAPAI
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,29	80,65	81,02	80,92	81,88	TERCAPAI
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,03	84,23	85	85,15	TERCAPAI

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai *good and clean governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan kebijakan terbaru untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, yaitu penguatan dampak dari implementasi Reformasi Birokrasi, melalui Reformasi Birokrasi Berdampak, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Sebagaimana peraturan dimaksud, Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen penilaian, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi General, yang terbagi menjadi sub komponen penilaian, sebagai berikut :
   a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
   b) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
   c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
   d) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
   e) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   f) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
   g) Tingkat Digitalisasi Arsip
   h) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
   i) Indeks Kualitas Kebijakan
   j) Indeks Reformasi Hukum
   k) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   l) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang / Jasa
   m) Indeks Sistem Merit
   n) Indeks Pelayanan Publik
   o) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
   p) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   q) Opini BPK
   r) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
   s) Indeks BerAKHLAK
   t) Survei Penilaian Integritas
   u) Survey Kepuasan Masyarakat
2. Reformasi Birokrasi Tematik, yang terbagi menjadi beberapa tematik sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut :
   a) Pengentasan Kemiskinan
   b) Peningkatan Investasi
   c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dengan fokus Penanganan Stunting
   d) Pengendalian Inflasi
   e) Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan BB (Sangat Baik), sedangkan untuk capaiannya adalah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat BB (Sangat Baik) dengan Nilai 75,38. Capaian dimaksud meningkat dari tahun 2022 yang masih berada pada kategori B (Baik). Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana grafik berikut :

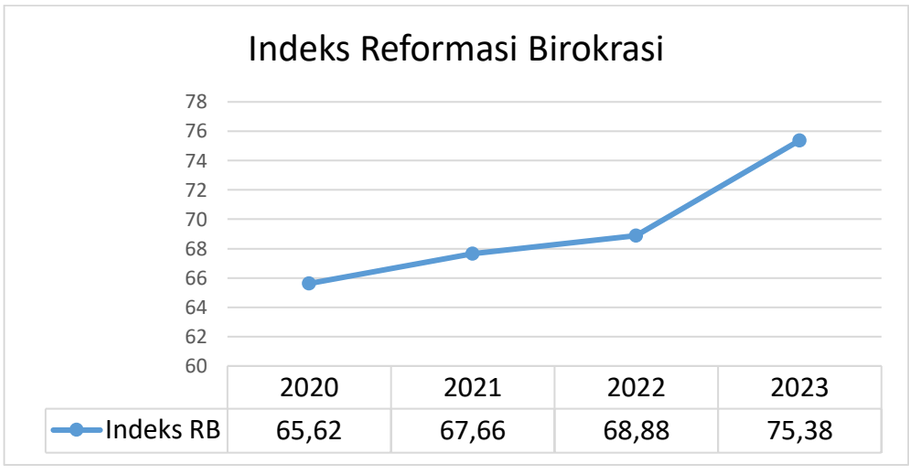

Sumber data : LHE RB Kementerian PAN & RB

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB, komponen penilaian tercapai sebagaimana tabel berikut :

RB General	65,86
RB Tematik	9,52
Total Nilai	**75,38**

Komponen Penilaian RB General, sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,79	1,79
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	99,22	4,14
3	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	2	2	0,8
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,15	2,52
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	77,5	3,1
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5		0
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	33,27	0,83
10	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	4	2

11	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	68,18	1,7
12	Indeks Reformasi Hukum	2,5	67,56	1,69
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,3	1,15
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	60,17	1,5
15	Indeks Sistem Merit	4	320,5	3,13
16	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,43	1,33
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	95,95	1,44
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,11	5,6
19	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
20	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	58,33	3,62
21	Opini BPK	5	5	5
22	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	91,8	3,67
23	Indeks BerAkhlak	4		0
24	Survei Penilaian Integritas	10	75,31	7,53
25	Survei Kepuasan Masyarakat	8	97,75	7,82
26	Koefisien	10		

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Sedangkan komponen Penilaian RB Tematik, sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,33	0,33
2	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,15	0,15
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,1	0,1
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
5	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,12	0,12
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	22,63	0,11
7	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	100	0,22
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	81,93	0,12
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6		
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	100	0,18
11	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2,05	2,05
12	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2	2
13	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,56	0,56
14	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	1,45	1,45
15	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1,73	1,73

Sumber Data : LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2023

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,89, dan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 6,16. Apabila dibandingkan dengan target 2,89 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sudah jauh melebihi target yang ditentukan. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 7,53 maka mengalami penurunan 1,37 poin atau sekitar 18,19%.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

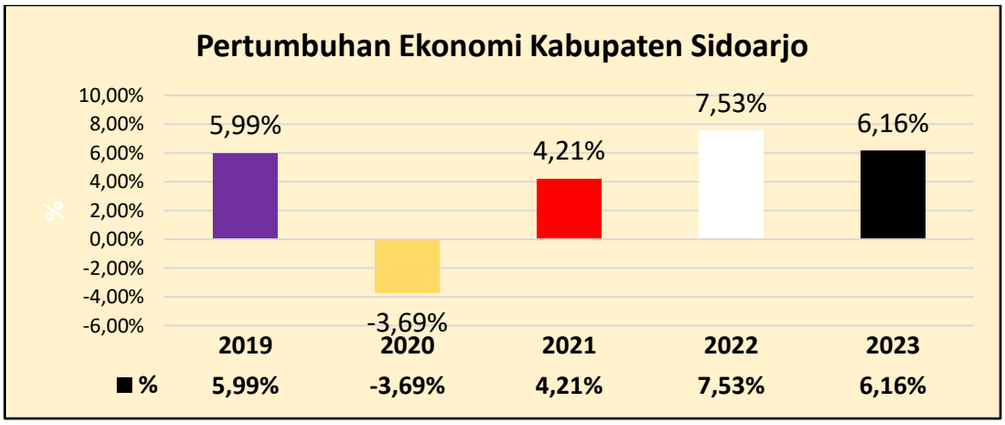

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan kebijakan – kebijakan strategis yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya : pemberian KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri), Renovasi Warung Rakyat, Fasilitasi UMKM Naik Kelas, dan lain sebagainya.

3. Indeks GINI

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

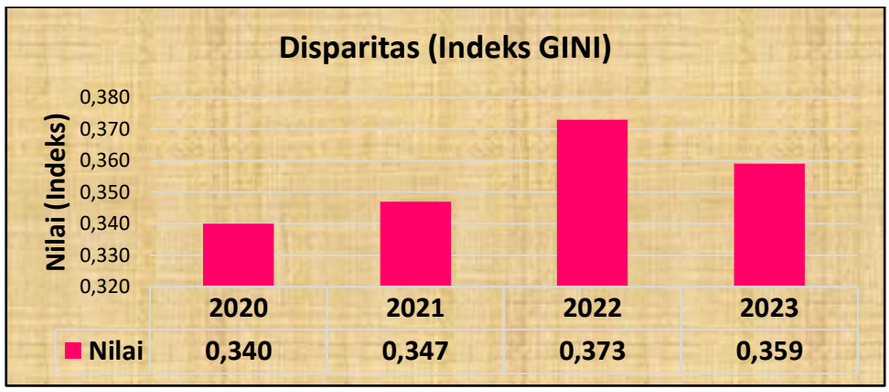

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 tercapai 0,359 dari target 0,347 sehingga masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian tahun 2023 lebih baik, yaitu menurun 0,014 angka atau sekitar 3,90%.

Penurunan Indeks GINI mencerminkan bahwa pemerataan pembangunan dan perekonomian belum merata untuk seluruh masyarakat Sidoarjo. Perlu penguatan kewilayahan, yaitu melalui partisipasi dari seluruh RT untuk mendukung percepatan pembangunan di masing – masing wilayahnya, salah satunya melalui Lomba RT.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

   Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 81,88 dari target 80,91 atau mencapai target dengan capaian 101,20%. Apabila dibanding dengan capaia tahun 2022 yaitu 81,02 maka terdapat kenaikan 0,86 poin atau sekitar 1,06%.

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

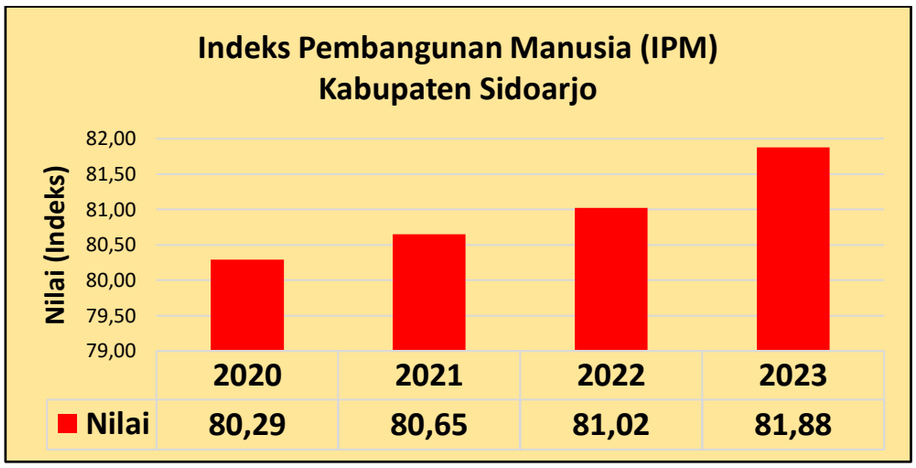

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,78	74,80	75,06	75,36
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	14,94	14,95	14,97
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,50	10,72	10,77	10,78
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.458	14.578	14.808	15.311
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,64	81,01	81,37	81,88

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

5. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran dimaksud meliputi dimensi pengukuran sebagai berikut :

1) Jalan kondisi mantap, sedang dan baik
2) Saluran irigasi dan drainase baik
3) Sarana dasar permukiman baik
4) Sarpras perhubungan baik
5) Fasilitas pendidikan baik
6) Fasilitas kesehatan baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 0,843 dari target 0,772 sehingga mencapai target dengan capaian 109,20%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,792 , maka terdapat kenaikan yang cukup tajam sebesar 0,051 atau 6,44%.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

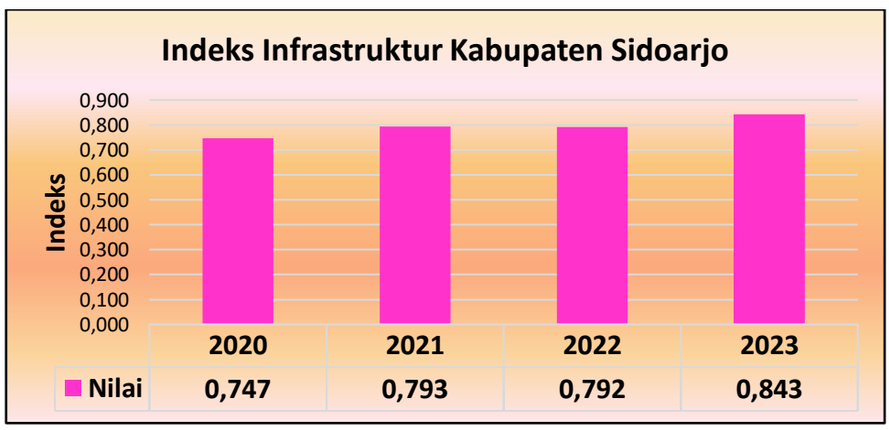

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

Pada tahun 2023 banyak terdapat penambahan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang meliputi : Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road, Peningkatan / Betonisasi Jalan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, Pembangunan Unit Sekolah Baru, Revitalisasi Taman, Pembangunan Trotoar Jalan Raya, Rehabilitasi Puskesmas, Peningkatan Afvoer, dan lain sebagainya.

Apabila dijabarkan hasil perhitungan Indeks Infrastruktur untuk setiap aspek, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No.	Variabel	Target 2023	Realisasi 2023
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	31,18	33,34
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Keciptakaryaan	0,219	0,248
3	Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,0615	0,0663
4	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	80,91
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,66	86,67
Indeks Infrastruktur		0,772	0,843

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 58,99 dari target 59,81 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun apabila dibanding dengan capaian tahun 2022 yaitu 57,54 maka terdapat peningkatan 1,45 poin atau sekitar 2,52%.

Adapun perkembangan nilai / skor IKLH setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

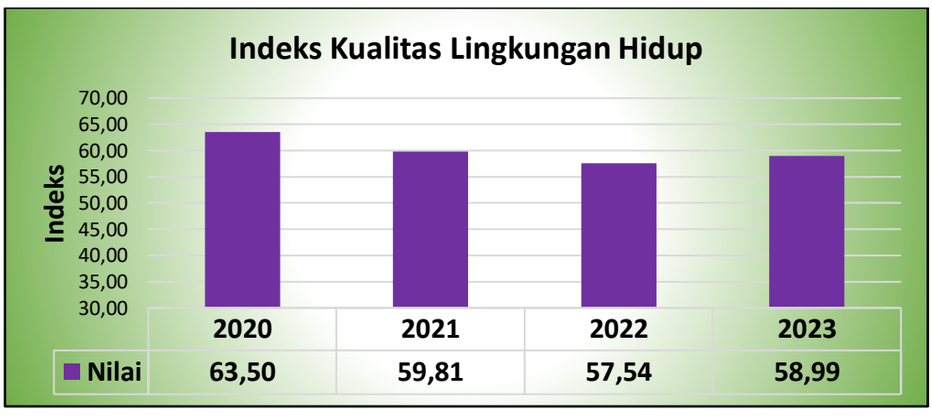

Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Yang menjadi faktor pengurang dari tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih mencapai angka 24,42 sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih berada pada angka yang cukup aman.

Hal ini dikarenakan definisi operasional dari Indeks Kualitas Lahan yang harus menunjukkan penghijauan dari tajuk ke tajuk, sedangkan sebagian besar taman di Kabupaten Sidoarjo, pepohonan belum mencapai ketinggian yang sampai menutupi dari tajuk ke tajuk.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IKLH di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IKLH Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air	54,37
- Indeks Kualitas Udara	81,98
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	24,42

Sumber : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 8,05 persen, turun 0,75 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang masih berada pada angka 8,80 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 10,09 persen, maka capaian tahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 berkurang 165,59 ribu orang menjadi sebanyak 1.176,48 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,62 persen, turun 3,25 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2022.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.081,72 ribu orang atau bertambah 142,30 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sektor Pertanian mengalami peningkatan jumlah pekerja yaitu bertambah sebesar 4,17 ribu orang, sedangkan sektor lapangan kerja paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa.

Sebanyak 674,39 ribu orang (62,34 persen) bekerja pada kegiatan formal atau turun 1,36 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki TPT tertinggi di Sidoarjo, yaitu sebesar 11,10 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,96 persen poin. Lulusan SMP mengalami penurunan TPT yang sangat drastis, yaitu sebesar 16,33 persen poin menjadi 7,57 persen.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka :

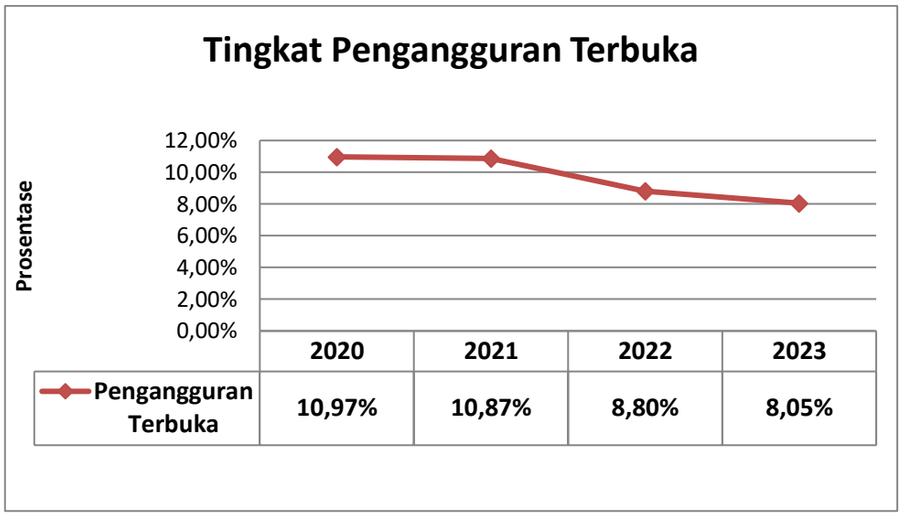

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

8. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka Nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan mencapai 5,00 persen turun dari tahun 2022 yang masih berada pada angka 5,36%. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 5,40% maka capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 mencapai 119,15 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6,54 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 125,69 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 571.696 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 48.483,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,27 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 523.213,00.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo Maret 2023 sebesar 0,72 mengalami penurunan sebesar -0.12 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,84.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2023 sebesar 0,16, mengalami penurunan sebesar -0,02 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,18. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :

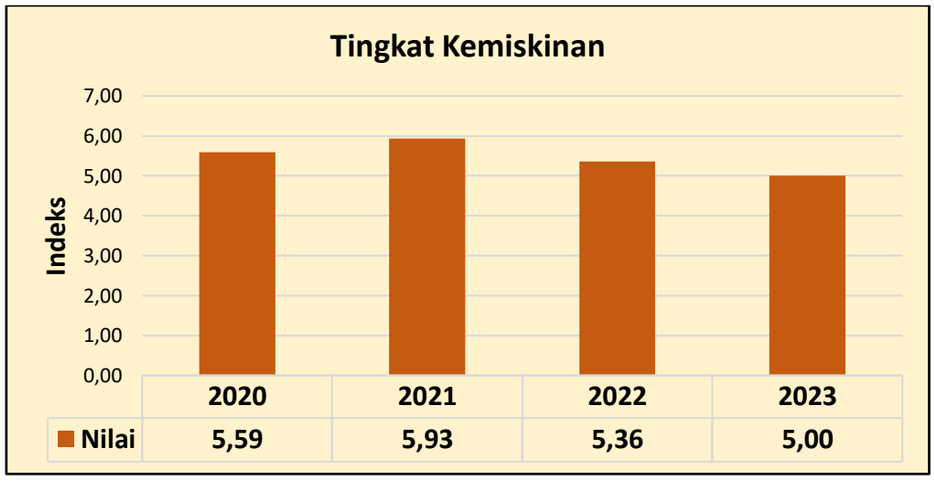

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

9. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Berikut perkembangan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana grafik sebagai berikut :

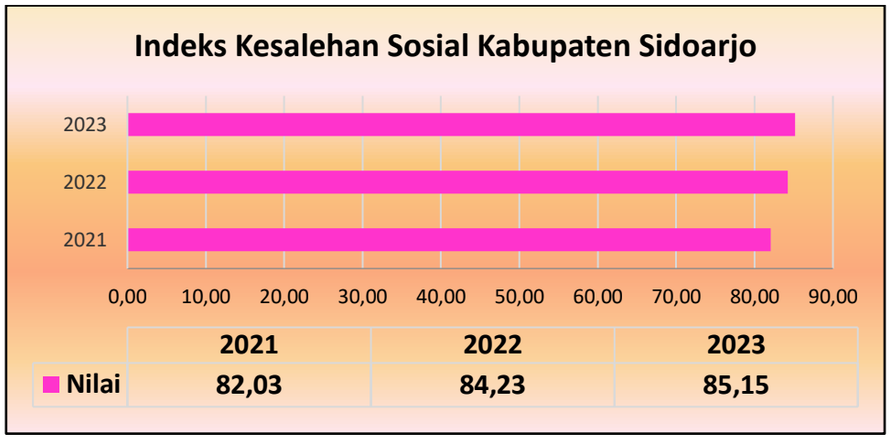

Sumber Data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut :

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Indeks Toleransi	83,29	40%	33,32
Indeks rasa Aman	81,86	30%	24,56
Indeks pelestarian Budaya	90,92	30%	27,28
		100%	**85,15**

Sumber Data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial

Capaian Indeks Kesalehan Sosial tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 84,23 yaitu 0,92 poin atau sekitar 1,09%. Dan apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 85,00 maka tercapai 100,18% atau sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKD), merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 IKD yang menjadi tolak ukur keberhasilan Program Perangkat Daerah, capaian hasil keberhasilan kinerjanya pada tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
1	Harapan Lama Sekolah	15,41 tahun	14,97 tahun	Tidak Mencapai Target
2	Rata – Rata Lama Sekolah	11,23 tahun	10,78 tahun	Tidak Mencapai Target
3	Usia Harapan Hidup	75,19 tahun	75,36 tahun	Mencapai Target
4	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,760	0,823	Mencapai Target
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,60	95,60	Mencapai Target
6	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	80,91	Mencapai Target
7	Indeks Rasa Aman	78,97	81,86	Mencapai Target
8	Indeks Resiko Bencana	92,53	98,12	Tidak Mencapai Target
9	Indeks Toleransi	80,22	83,29	Mencapai Target
10	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,60	95,00	Mencapai Target
11	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	89,91	91,95	Mencapai Target
12	Indeks Pembangunan Gender	94,95	*Belum release*	*Belum release*
13	Indeks Kualitas Air	51,54	54,32	Mencapai Target
14	Indeks Kualitas Udara	85,16	81,98	Tidak Mencapai Target
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,12	24,42	Tidak Mencapai Target
16	Persentase Desa Mandiri	13,98	47,8	Mencapai Target
17	Nilai Indeks SPBE	3,45	3,11	Tidak Mencapai Target

18	Persentase koperasi berkualitas	24,69	24,96	Mencapai Target
19	Persentase Usaha mikro mandiri	1,98	2,06	Mencapai Target
20	Persentase pertumbuhan Nilai Investasi	1,25	-(2,87%)	Tidak Mencapai Target
21	Indeks Pelestarian Budaya	63,58	90,92	Mencapai Target
22	Indeks Pelayanan Publik	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	Mencapai Target
23	Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	Tidak Mencapai Target
24	Opini atas Laporan BPK	WTP	WTP	Mencapai Target
25	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	*Belum release*	*Belum release*
26	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Tidak Mencapai Target
27	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Mencapai Target
28	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas	2,82	1,67	Tidak Mencapai Target
29	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan	16,22	16,08	Tidak Mencapai Target
30	Persentase kontribusi PDRB sektor industri	52,81	52,11	Tidak Mencapai Target
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Mencapai Target

1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 tercapai 14,97 tahun dari target 15,41 tahun sehingga belum mencapai target, namun capaian sudah mencapai 97,14%. Ketidak-tercapaian disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi, tidak mempertimbangkan tren angka tahun – tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 14,95 tahun maka terdapat peningkatan.

Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,97 tahun ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mencapai jenjang Pendidikan Tinggi.

Adapun tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

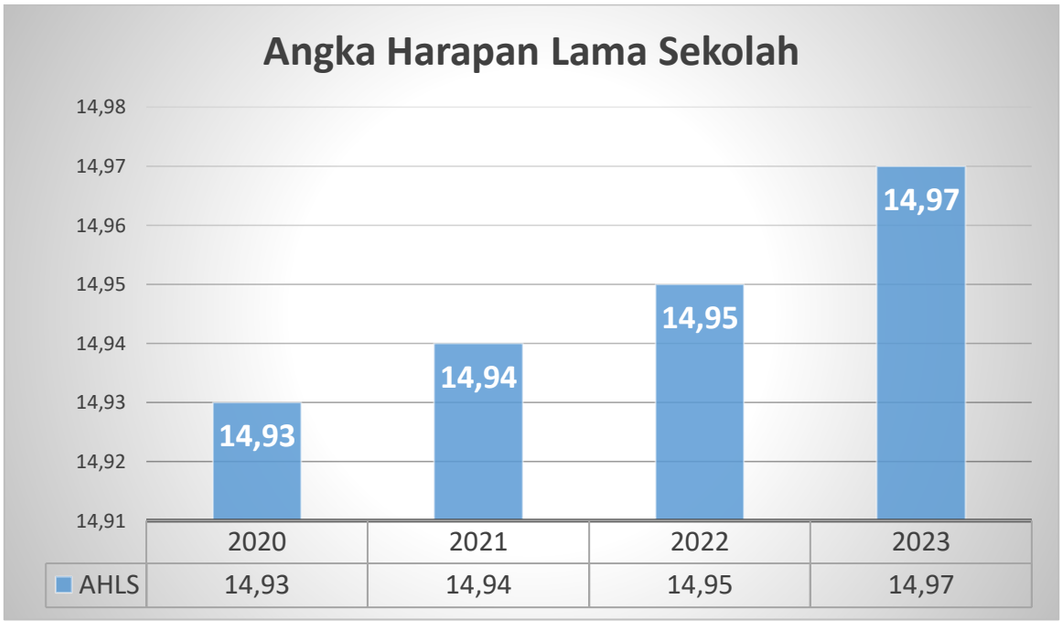

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2023

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo

2. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2023 tercapai 10,78 tahun dari target 11,23 tahun sehingga belum mencapai target, namun sudah tercapai 95,99%. Ketidak-tercapaian disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi, tidak mempertimbangkan tren angka tahun – tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2022 yaitu 10,77 tahun sudah ada peningkatan. Dengan realisasi Rata – Rata Lama Sekolah 10,78 tahun ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo berusia 25 tahun keatas telah menempuh jenjang pendidikan SMA/SMK atau setara SMA/SMK kelas XI/

Adapun tren capaian Rata – Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

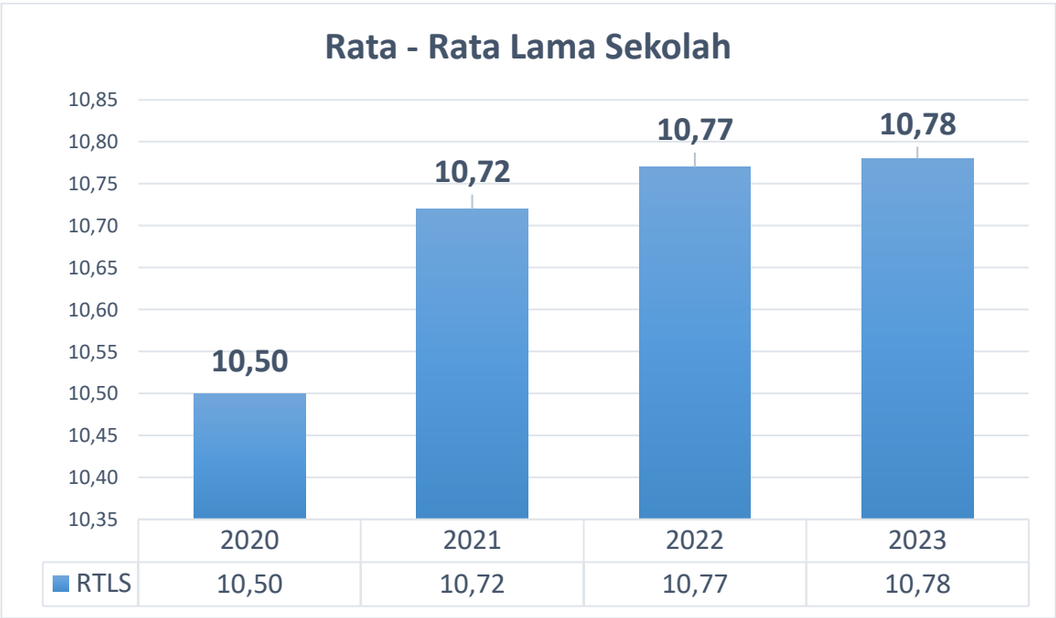

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2023

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo.

3. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup Tahun 2023 tercapai 75,36 tahun dari target 75,19 tahun sehingga sudah mencapai target dengan capaian 100,23%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 74,36 maka terdapat peningkatan yang cukup tinggi yaitu

1,00 poin atau sekitar 1,34%. Dengan realisasi Angka Harapan Hidup 75,36 tahun ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup yang dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 - 2023

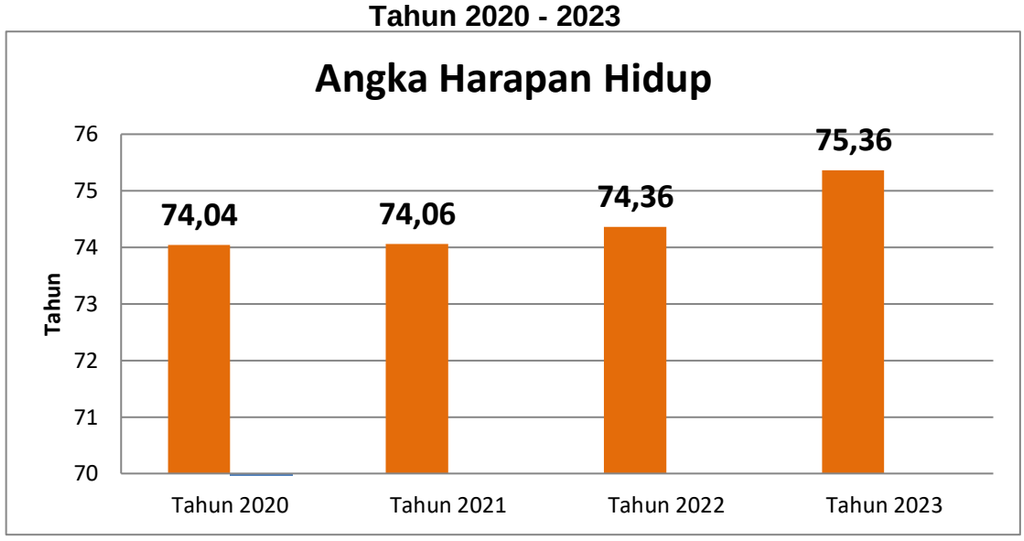

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- Revitalisasi posyandu lansia;
- Optimalisasi posbindu PTM.

Adapun beberapa kinerja yang mendukung pencapaian angka harapan hidup, antara lain :

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2023 tercapai 45,53 per 100.000 kelahiran hidup dari target 51,15 per 100.000 kelahiran hidup sehingga sudah mencapai target. Apabila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 37,30 per 100.000 kelahiran hidup, maka terdapat peningkatan. Meskipun demikian angka tersebut masih lebih baik dari standart nasional.

Standart Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo berada jauh dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 – 2023

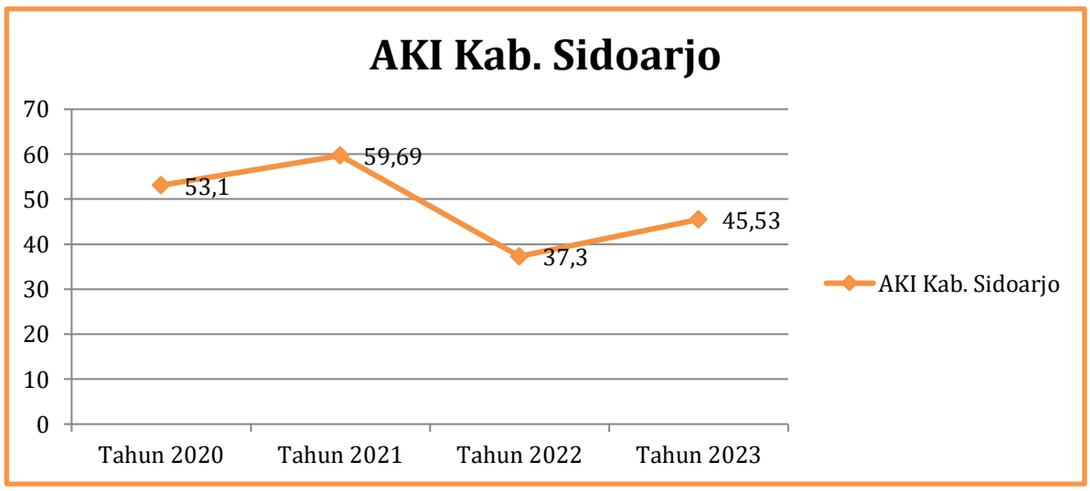

Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar Angka Kematian Ibu dapat terus menurun, yaitu antara lain :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care*/ ANC terpadu-10T);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review* Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency*/ rujukan darurat persalinan;

- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Angka Kematian Bayi Tahun 2023 tercapai 2,82 per 1.000 kelahiran hidup dari target 3,4 per 1.000 kelahiran hidup sehingga sudah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 2,41 per 1.000 kelahiran hidup maka terdapat peningkatan, namun masih memenuhi standar nasional. Upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
    - Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
    - Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
    - Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
    - Pemberian pelayanan *Ante Natal Care (ANC)* terpadu (10 T);
    - Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Standart Nasional angka kematian bayi adalah 14 per 1.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :

Angka Kematian Bayi Tahun 2020 – 2023

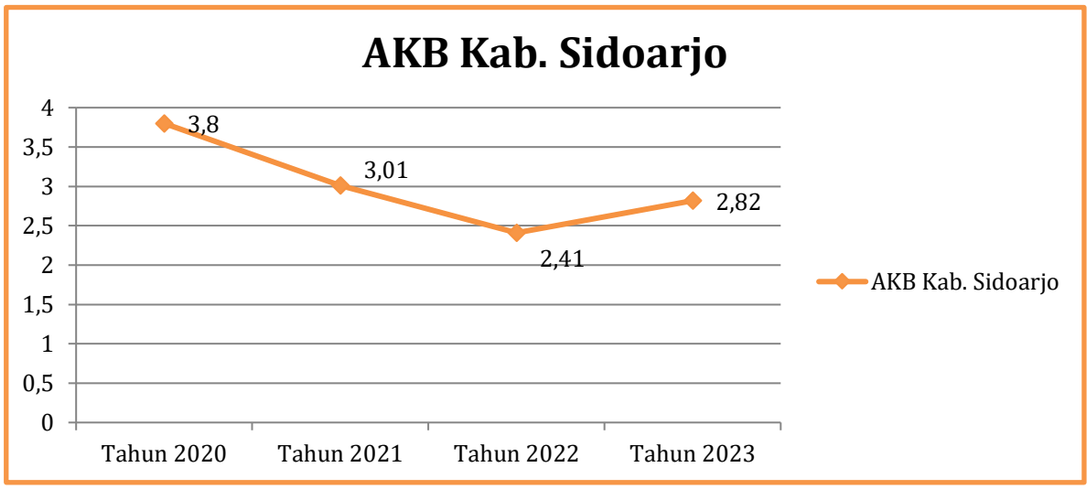

Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Persentase Balita Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

Persentase Balita Stunting Tahun 2023 tercapai 3,1% yang mengalami stunting berdasarkan data surveilans pengukuran posyandu oleh kader. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 7,54% maka sudah mencapai target, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 5,80% maka terdapat penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penurunan stunting antara lain :

- Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif dating ke posyandu;
- Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).

Standart Nasional persentase balita stunted adalah 18,4% sehingga dapat dikatakan bahwa persentase balita stunted di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional. Angka prevalensi stunting dimaksud diukur berdasarkan data versi E-PPBGM Kementerian Kesehatan.

Adapun tren capaian persentase balita stunted dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Stunting Balita Tahun 2020 – 2023

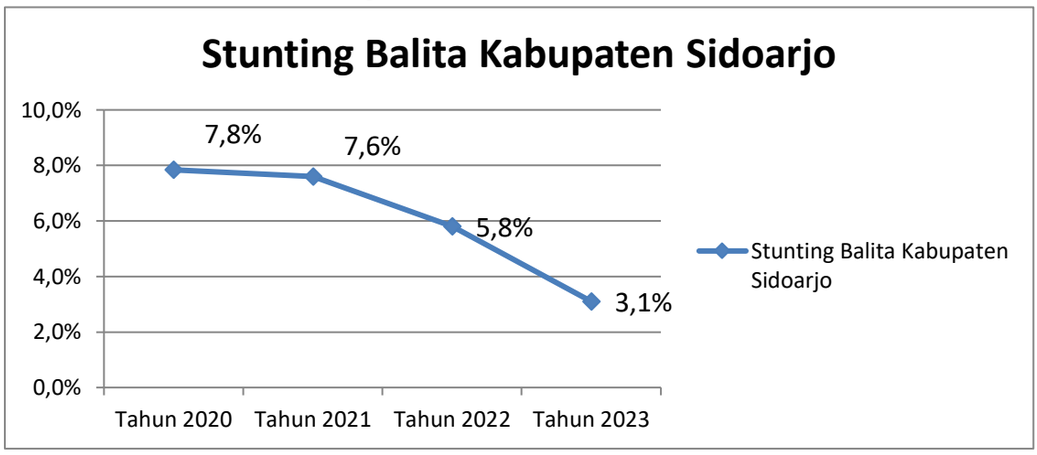

Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

4. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum tahun 2023 yaitu 0,823 yang apabila dibandingkan dengan target 0,760 maka sudah melampaui target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 0,783 maka sudah terdapat peningkatan capaian.

Kinerja yang mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, yaitu antara lain :

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Sampai dengan tahun 2023 telah terbangun ruas jalan Kabupaten sepanjang 1.022, 864 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

No	Kondisi	Panjang Jalan (km)	%
1	Kondisi Mantap :		
	- Kondisi Baik	614,785	60,10
	- Kondisi Sedang	380,983	37,25
	Sub jumlah	**995,768**	**97,35**
2	Kondisi Tidak Mantap		
	- Rusak Ringan	20,541	2,01
	- Rusak Berat	6,555	0,64
	Sub jumlah	**27,096**	**2,65**
	Total Panjang Jalan	**1.022,864**	**100,00**

Sumber Data : Laporan Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023

Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi rusak ringan/sedang, dimana capaian tahun 2023 adalah 97,35% dari target 95,5% sehingga sudah mencapai target dengan capaian 101,9%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 95,05% sudah terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap.

Adapun tren capaian persentase jalan Kabupaten kondisi mantap dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

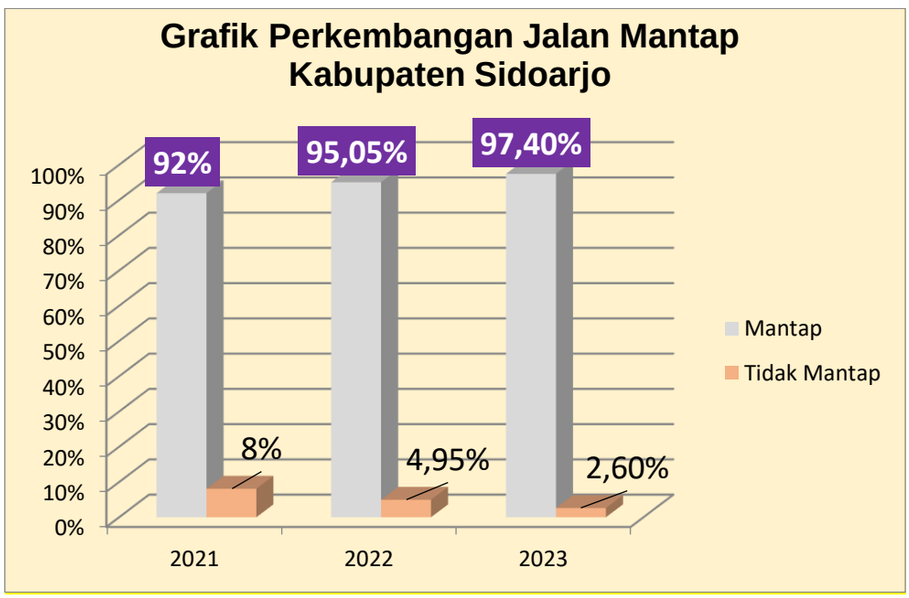

Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Kecamatan	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
			km	km	km	km
1	Jabon	74,063	41,535	28,245	0,683	3,600
2	Tanggulangin	71,727	42,074	25,895	2,483	1,275
3	Sidoarjo	62,332	37,955	24,294	0,083	0,000
4	Candi	68,807	39,510	27,414	1,883	0,000
5	Buduran	56,017	31,220	24,314	0,483	0,000
6	Gedangan	54,429	35,069	19,277	0,083	0,000
7	Porong	48,280	28,755	19,442	0,083	0,000
8	Tulangan	76,687	45,473	29,531	1,683	0,000
9	Krembung	52,907	21,134	27,495	3,078	1,200
10	Prambon	58,303	32,645	24,370	1,288	0,000
11	Tarik	55,528	33,550	19,395	2,583	0,000
12	Balongbendo	48,002	34,188	10,951	2,483	0,380
13	Krian	79,277	55,904	21,990	1,383	0,000
14	Taman	36,505	21,680	14,742	0,083	0,000
15	Wonoayu	51,778	30,910	20,535	0,333	0,000
16	Sukodono	53,252	33,764	18,805	0,683	0,000
17	Waru	40,063	26,340	12,840	0,883	0,000
18	Sedati	34,908	23,080	11,445	0,283	0,100
Total		**1022,864** **100,00%**	**614,785** **60,10%**	**380,983** **37,25%**	**20,541** **2,01%**	**6,555** **0,64%**

Sumber Data : Laporan Rekap Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023

Pada tahun 2023 dilakukan betonisasi jalan sepanjang 24.950,72 meter, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Realisasi (m)	
		Panjang	Lebar
1	Peningkatan Jalan Kwangsan (Ljt)	sgmn1 =475 sgmn2 =391,5	5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarsari - Damarsi	1.833,42	5,00
3	Peningkatan Jalan Tulangan - Durungbedug	1.597,70	4,00
4	Peningkatan Jalan Tropodo I	933,50	4,00
5	Peningkatan Jalan Krembung - Mojoruntut (DAK)	sgmn1 =1251,2 sgmn2 =791,3 (aspal), 100,7 (rigid)	5;6
6	Peningkatan Jalan Banjarpanji, Tanggulangin	950,00	4,50
7	Peningkatan Jalan Geluran – Suko	sgmn 1 = 1057,1 sgmn2 = 498,3	4; 4,4; 6; 7
8	Peningkatan Jalan Bringinbendo - Tanjungsari (DAK)	705,50	5,00
9	Peningkatan Jalan Tarik-Mlirip	5.698,80	5,00
10	Peningkatan Jalan Desa Krembangan Kab Sidoarjo (Ulang)	29,00	5,00
11	Peningkatan Jalan Semambung I Kab Sidoarjo	128,00	3,50
Total Realisasi Betonisasi APBD		15.649,72	4,00-7,00
Juwetkenongo - Krembung (Realisasi IJD PJBH JS 2 2023)		Krembung 2 = 5.428 Krembung 1 = 3.873	7,5 m
Total Jalan Beton 2023		**24.950,72**	

Sumber Data : Laporan Pekerjaan Betonisasi Jalan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur melaksanakan proyek betonisasi Juwetkenongo Krembung 1 dan 2. Dimana anggaran berasal dari APBN dan ruas jalan yang dibeton merupakan jalan kabupaten. Adapun realisasnya adalah sebagai berikut :

a) Krembung 1 = 3.873 meter
b) Krembung 2 = 5.428 meter

Adapun upaya yang telah dilakukan agar jalan dan jembatan Kabupaten terjaga dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala

Berdasarkan data diatas analisa penyebab keberhasilan menjadi meningkat dikarenakan beberapa ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo telah banyak yang dibetonisasi, sehingga mampu meminimalisir kerusakan jalan dan mempertahankan kondisi jalan tetap baik. Berikut rekap permukaan kondisi jalan yang ada di kabupaten Sidoarjo :

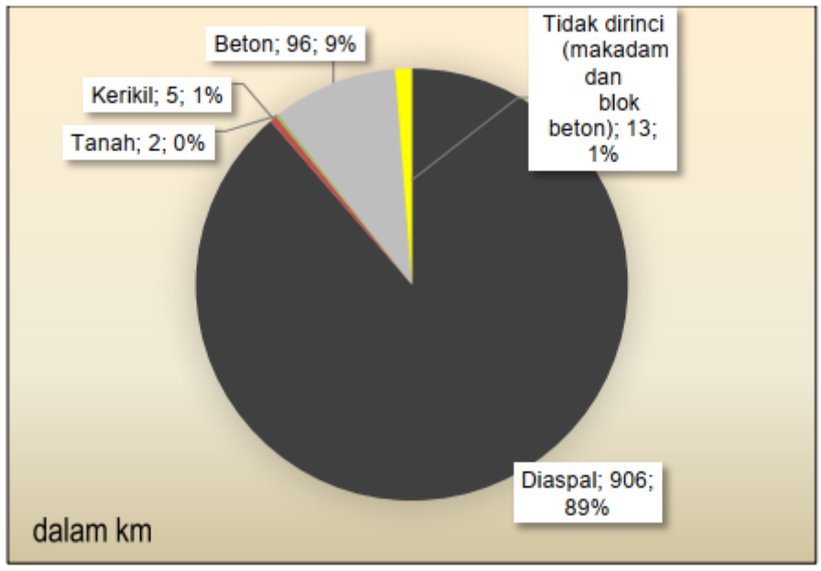

Sumber Data : Laporan Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2023

Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Sampai dengan tahun 2023 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3.859 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3.956 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2023 adalah 97,55% dari target 92% sehingga sudah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 91,92% maka terdapat peningkatan.

Adapun rumus untuk menghitung realisasi kecukupan kebutuhan air irigasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas sawah yang dapat diairi}}{\text{Luas sawah yang ada}} \times 100\% \qquad \frac{3859\ \text{Ha}}{3956\ \text{Ha}} \times 100\% = \mathbf{97{,}55\%}$$

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

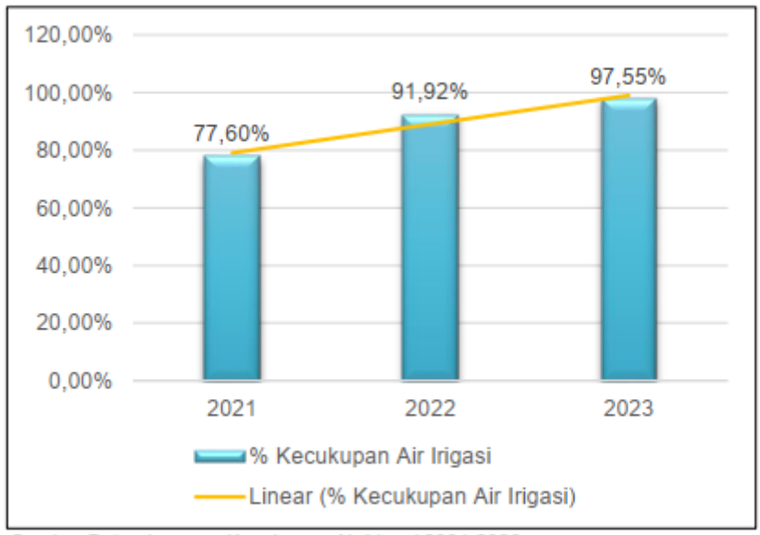

Sumber Data : Laporan Kecukupan Air Irigasi 2021-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang menyebutkan bahwa DI (Daerah Irigasi) berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga pada saat ini Kabupaten Sidoarjo hanya mengelola 18 DI. Berikut Data Ketersediaan Air yang ada di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 berdasarkan Daerah Irigasi adalah sebagai berikut :

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah yang Ada (Ha)	Luas Baku Sawah yang Diairi (Ha)	Kebutuhan Air (Ltr/Dtk)	Ketersediaan Air (Ltr/Dtk)	Pengambilan Air
1	D.I. Kedunguling Kiri	325	325	232	825	Afvoer Kedunguling
2	D.I. Kedunguling Kanan	674	674	634	825	Afvoer Kedunguling
3	D.I. Bader	376	376	258	440	Afvoer Bader
4	D.I. Bulubendo	91	91	93	200	Afvoer Bulubendo
5	D.I. Buntung	80	77	74	150	Afvoer Buntung
6	D.I. Kalidawir	440	440	307	550	Afvoer Kedungan
7	D.I. Gedek	140	140	93	275	Afvoer Kedungan
8	D.I. Kedungpandan	233	233	174	700	Kali Bangil Tak
9	D.I. Wilayut II	196	196	194	350	Afvoer Wilayut
10	D.I. Kali Pucang	191	191	149	275	Afvoer Pucang
11	D.I. Bahgepuk	341	288	249	220	Afvoer Bahgepuk
12	D.I. Kragan	45	45	29	120	Afvoer Kragan
13	D.I. Jomblong	41	41	52	125	Afvoer Jomblong
14	D.I. Karangbong I	86	86	97	200	Afvoer Karangbong
15	D.I. Karangbong II	114	114	124	200	Afvoer Karangbong
16	D.I. Wilayut I	29	29	29	75	Afvoer Wilayut
17	D.I. Jatianom	397	356	288	275	Afvoer Jatianom
18	D.I. Kedungan	157	157	110	325	Afvoer Kedungan
	JUMLAH	**3.956**	**3.859**	**3.187**	**6.130**	

Sumber Data : Laporan Ketersediaan Air Tahun 2023

Adapun upaya yang telah dilakukan agar kebutuhan air irigasi dapat tercukupi optimal, antara lain :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplisi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

Persentase luasan genangan / banjir tertangani

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Persentase luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2023 adalah 85,66% dari target 33% atau tercapai dengan capaian 103,22%.

Adapun tren capaian persentase luasan genangan / banjir tertangani dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

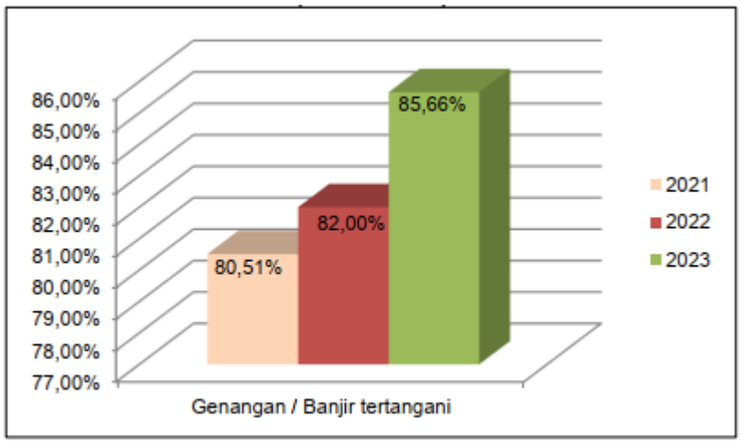

Sumber Data : Laporan Genangan Tertangani Tahun 2021-2023

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menangani genangan / banjir, yaitu antara lain :

1. Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo.
2. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin Pembangunan Rumah Pompa Saluran Gedangrowo.
3. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin.
4. Rehab Bangunan Rumah Panel Dam Pendopo Kec. Buduran.

Kawasan permukiman yang rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

No	Uraian	Kecamatan	Luas Kawasan Rawan Genangan (Ha)	Luas Kawasan Rawan Genangan (Ha)		Luas Catchment Area Pompa (Ha)
				Surut Kurang dari 24 Jam	Surut Lebih dari 24 Jam	
1	Bringinbendo / Sidodadi	Taman	75	70	5	180
2	Pucanganom	Sidoarjo	30	30	0	38
3	Lemahputro		32	32	0	32
4	Rangkahkidul		40	34	6	25
5	Sidokare		38	37,5	0,5	86
6	Bluru Kidul		14	14	0	15
7	Kemiri		7	7	0	7
8	Tambakrejo / Tropodo	Waru	98	75	23	92
9	Tambak Sawah		70	51,5	18,5	122
10	Banjarasri	Tanggulangin	30	30	0	121
11	Banjarpanji		10	10	0	38
12	Kalitengah		7	7	0	11
13	Kedungbanteng		17	17	0	52
14	Porong	Porong	30	25	5	0
15	Pesawahan		28	20	8	0
16	Candipari		18	10	8	0
17	Wunut		10	4	6	0
18	Balongdowo	Candi	4	4	0	15
	Jumlah		**558**	**478**	**80**	**834**

Sumber Data : Laporan Genangan Tertangani Tahun 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa ada beberapa wilayah rawan genangan yang belum bisa tertangani kurang dari 24 jam diantaranya sebagaian besar merupakan wilayah yang ada pada Kecamatan Waru. Sehingga diharapkan pada tahun mendatang (n+1) dapat teranggarkan alokasi dana penanganan genangan sesuai kebutuhan dalam menangani permasalahan yang ada

Persentase pelayanan air minum aman

Sampai dengan tahun 2023 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan yang dibangun oleh PDAM sebanyak 179.703 SR dan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 14.768 SR. Secara keseluruhan masyarakat yang terlayani air bersih sebanyak 194.471 SR atau sekitar 43,23% dari target 46,55% sehingga tercapai 92,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 39,84% maka terdapat peningkatan yang cukup tinggi.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

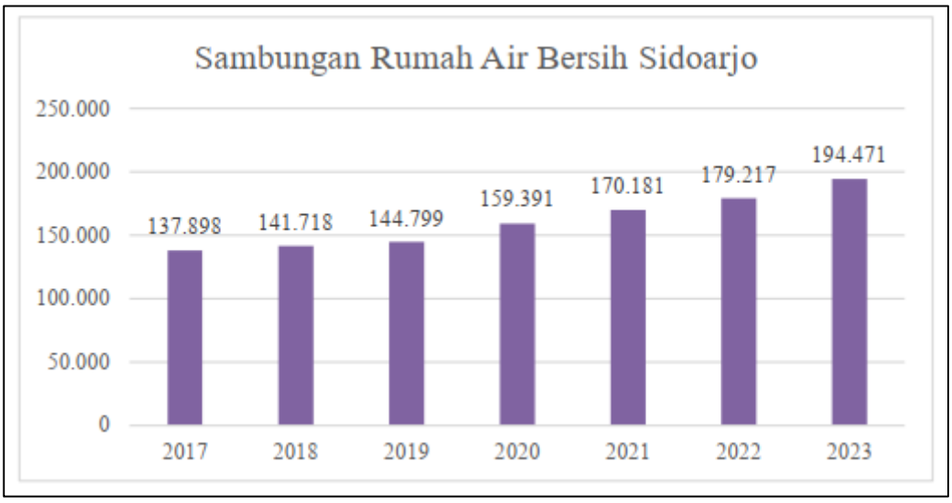

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Jika dijabarkan masing-masing realisasi pelayanan air bersih, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target SR	**200**	**760**	**430**	**676**	**907**	**754**	**4706**
PEMDA	3.001	4.624	6.671	7.898	8.805	10.062	14.768
PDAM	134.897	137.094	138.128	151.493	161.376	169.155	179.703
SR pengguna air bersih (TOTAL)	137.898	141.718	144.799	159.391	170.181	179.217	194.471

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses air bersih, yaitu selain pembangunan akses air bersih, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah air bersih.

Persentase akses sanitasi layak

Sampai dengan tahun 2022 rumah tangga bersanitasi sehat di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 444.555 RT atau sekitar 98,81% dari jumlah penduduk, dimana apabila dibandingkan dengan target 98,05% maka sudah mencapai target dengan capaian 100,78%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 438.251 RT atau 97,41% dari jumlah penduduk maka terdapat peningkatan.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan sanitasi layak dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target RT		**3.305**	**3.450**	**3.374**	**8.033**	**557**	**6308**
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070	429.661	437.694	438.247	444.555

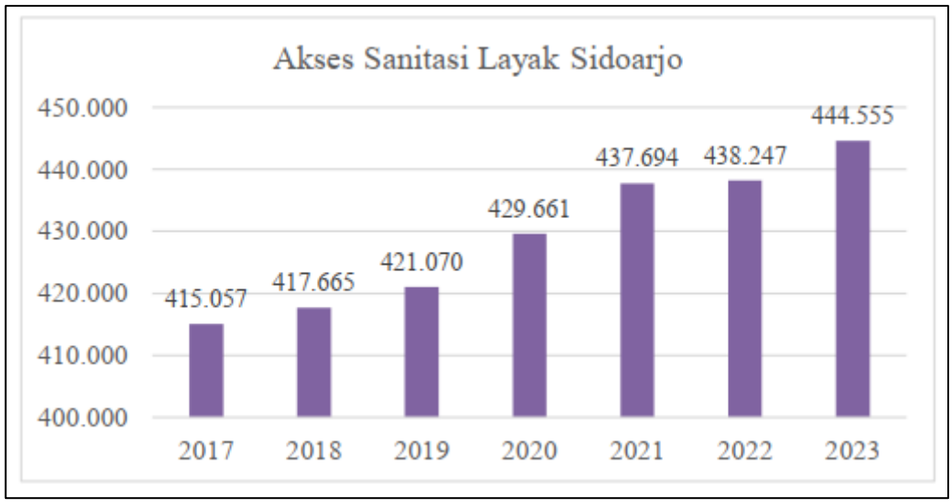

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, yaitu selain pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan sanitasi layak akan selalu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan Bappeda serta Dinas Kesehatan yang juga sebagai PD pengampu kegiatan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan agar menjadi prioritas. Selain itu dapat pula dilakukan kerjasama atau corporate social responsibility (CSR) dengan perusahaan dalam bidang yang sesuai.

Persentase Luas Kawasan Tidak Kumuh

Sebagaimana SK Kumuh Bupati Nomor 311 Tahun 2021 bahwa Luasan kawasan kumuh sesuai arahan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018 seluas 276,62 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424,3 Hektar.

Sampai dengan tahun 2023 kawasan kumuh elah terselesaikan seluas 59,07 Hektar, dengan sisa luas tidak kumuh 71.270,79 Hektar.

Adapun tren capaian penanganan kawasan kumuh dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Luas Kumuh (Ha)
2020	41,08	39,84	276,62
2021	97,4	97,41	233,22
2022	99,72	99,7	212,58
2023	99,79	99,79	153,51

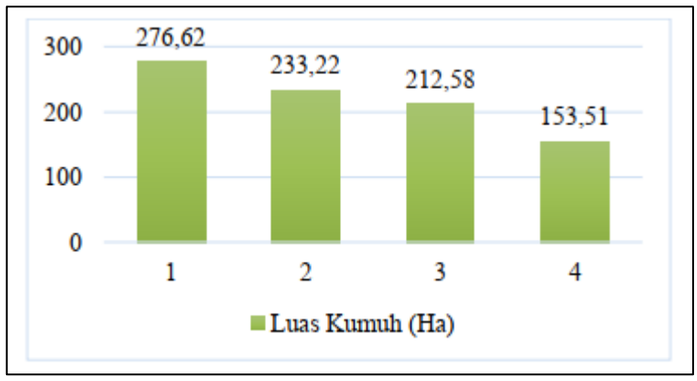

Sumber Data : Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo

Indeks Infrastruktur Perhubungan

Indikator ini menggambarkan tentang kawasan yang tertib dalam berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan dan terminal sebagai tempat parkir untuk angkutan umum dalam mengangkut dan menurunkan penumpang. kecukupan sarpras perkeretaapian sebagai wujud keselamatan dalam berlalu lintas.

Komposit dari indikator infrastruktur perhubungan, antara lain :

i. Jumlah titik lokasi tertib lalulintas yang terjaga
ii. Jumlah terminal angkutan penumpang tipe C terkelola dengan baik
iii. Jumlah kecukupan sarana dan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Sidoarjo

Capaian dari masing-masing komposit indikator dimaksud, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase alat penerangan jalan yang layak fungsi	70%	70%
2	Tingkat konektivitas jaringan jalan	3,64	4,03
3	Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan	0,85	0,85
4	Cakupan pelayanan angkutan umum	90%	90%

Upaya untuk peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan, antara lain :

- Menambah kawasan tertib lalu lintas yang terjaga
- pengelolaan terminal tipe C yang sesuai dengan standart
- Pemeliharaan terhadap pintu perlintasan kereta api

5. Indeks Infrastruktur Pendidikan

Pada tahun 2023 Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 86,67 dengan target 86,66 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Pendidikan, yaitu :

Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik

Kondisi bangunan Ruang Kelas Belajar baik pada jenjang SDN maupun jenjang SMPN, adalah sebagai berikut :

SD Negeri

Persentase Bangbunan Ruang Kelas SD Kategori Baik	Target 2023	Realisasi 2023
	95,45%	95,59%

SMP Negeri

Persentase Bangbunan Ruang Kelas SMP Kategori Baik	Target 2023	Realisasi 2023
	95,65%	95,67%

Pada Tahun 2023 terdapat penambahan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP Negeri 2 Prambon, dan selain itu juga pembangunan kelanjutan dari SMP Negeri 2 Tulangan.

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu :

- Melakukan pendataan terhadap kondisi kerusakan bangunan sekolah/ruang kelas pada sekolah SDN dan SMPN;
- Mengusulkan, mengalokasikan serta menganggarkan dan melaksanaan rehabilitasi terhadap sekolah SDN maupun SMPN dengan kondisi kerusakan Rusat Berat.
- Adapun kerusakan ringan dapat dialokasikan dan di biayai melalui Dana BOS dengan catatan jika kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi.
- Untuk satuan pendidikan SD / Mi swasta dan SMP / MTs swasta telah di fasilitasi oleh mekanisme dana hibah.

6. Indeks Infrastruktur Kesehatan

Pada tahun 2023 Indeks Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 80,91 dengan target 75,19 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Kesehatan, yaitu :

Persentase Bangunan Fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik

Kondisi bangunan RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

RSUD

Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2023

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
2 bangunan	0 bangunan	0 bangunan
100 %	-	-

Apabila diproporsi maka RSUD dalam kondis baik100% kondisi bangunan RS Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi baik.

Pada Tahun 2023 RSUD Sidoarjo melakukan pembangunan Gedung Pusat Terpadu dan Laboratorium Kesehatan Daerah RSUD Sidoarjo, yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak BUDI GUNADI SADIKIN.

Gedung baru ini akan digunakan untuk melayani 10 layanan prioritas diantaranya stroke, kanker, kardiovaskuler, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, uronefrologi, respirasi dan TBC, diabetes mellitus, dan gastrohepatologi.

Pnambahan fasilitas penting untuk RSUD Sidoarjo yang sudah menyandang status tipe-A atau rumah sakit rujukan utama. Sidoarjo adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki RSUD Tipe A. Semua penambahan fasilitas tentunya tujuannya agar masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan lebih prima.

Puskesmas

Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 puskesmas sampai dengan tahun 2023

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
27 bangunan	4 bangunan	0 bangunan
90%	10%	-

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan Rehabilitasi dan pemeliharan rutin puskesmas, baik bersifat ringan, sedang maupun berat.

7. Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamananan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks rasa aman Tahun 2023 tercapai 81,86 dari target 78,97 sehingga sudah mencapai target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 80,77 maka terdapat peningkatan. Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 81,86 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Sangat Tinggi. Kategori indeks rasa aman dapat diklasifikan sebagai berikut :

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
0<=IRA<=20	Rasa Aman Sangat Rendah
20<IRA<=40	Rasa Aman Rendah
40<IRA<=60	Rasa Aman Sedang
60<IRA<=80	Rasa Aman Tinggi
80<IRA<=100	Rasa Aman Sangat Tinggi

Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	80,43
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	84,51
Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	87,17
Keamanan dari Kekerasan	75,34
Indeks Rasa Aman	**81,86**

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai optimal :

- Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tentram dan aman
- Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola kota/kabupaten

8. Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks resiko bencana Tahun 2023 berada pada skor 98,14 dari target skor 92,53 sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Resiko Bencana belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu pada skor 98,74 maka capaian lebih baik karena sudah ada penurunan.

Dengan realisasi Indeks resiko bencana sebesar 98,14 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategoru SEDANG.

Adapun tren Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :

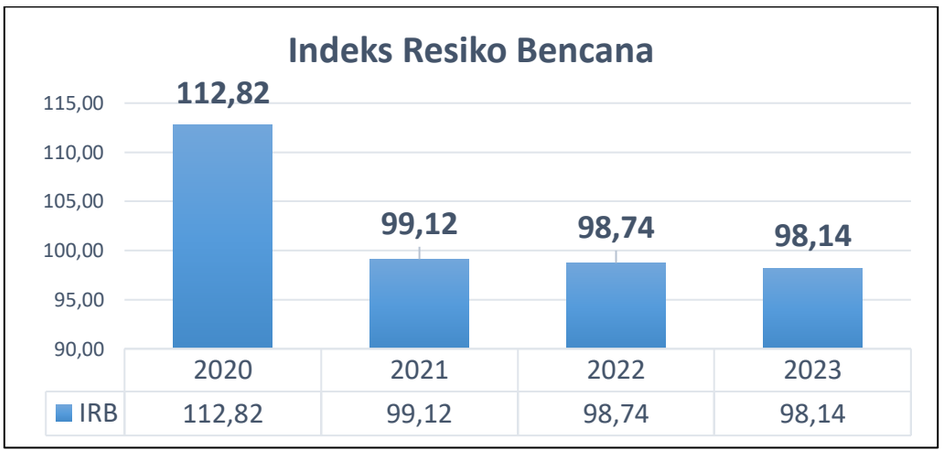

Sumber Data : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga kompenen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponene kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun.

Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

a. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
f. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.97	0.79	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.97		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.89		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.85		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.70		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.72		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.85		

Sumber : Laporan Akhir Pengukuran IRB-IKD Kab. Sidoarjo 2023

Tidak tercapainya target dikarenakan untuk penanganan kejadian kebakaran masih belum memenuhi SPM, diantaranya belum terpenuhinya posko dan armada, serta sarpras sudah banyak yang tidak layak fungsi. Perlu disusun mitigasi dan kajian resiko bencana untuk 5 tahunan.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah untuk penguatan Sistem Peringatan Dini / *Early Warning System* (EWS) bencana
2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana baik di wilayah maupun lingkungan pendidikan
3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak

4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana

9. Indeks Toleransi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukur Indeks Toleransi karena menyadari pentingnya toleransi bagi pembangunan. Indeks toleransi digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari variabel sebagai berikut :

- Variable persepsi terhadap toleransi
- variable sikap terhadap toleransi
- variable Kerjasama antar suku agama berbeda
- variable sikap Pemerintah dalam dukungan antar umat beragama
- Variabel harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam terciptanya toleransi di masyarakat

Indeks toleransi Tahun 2023 tercapai 83,29 dari target 80,22 sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 81,30 maka terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi Indeks toleransi sebesar 83,29 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi.

Adapun capaian masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Variabel	Capaian
Persepsi terhadap toleransi	86,67
Sikap Terhadap Toleransi	83,15
Kerjasama Antar Suku dan agama yang berbeda	79,24
Sikap Pemerintah daerah Terhadap hubungan antar suku agama yang berbeda	83,23
Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah dalam rangka terciptanya Toleransi di Masyarakat	85,16
Indeks Toleransi	**83,29**

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memfasilitasi optimalisasi pertemuan antar umat beragama untuk melahirkan dialog, diskusi, dan kerjasama dalam rangka membangun toleransi dan mencegah konflik dan perpecahan yang berlatar belakang agama
- Memperbaiki sikap positif masyarakat dalam bertoleransi dan bekerjasama

10. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Yang dimaksud dengan "Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 mencapai 119,15 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6,54 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 125,69 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.571.696 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.48.483,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,27 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp.523.213,00.

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebanyak 95,00% dari jumlah penduduk dengan target 94,60% sehingga sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 94,64% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan semakin meningkat.

Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

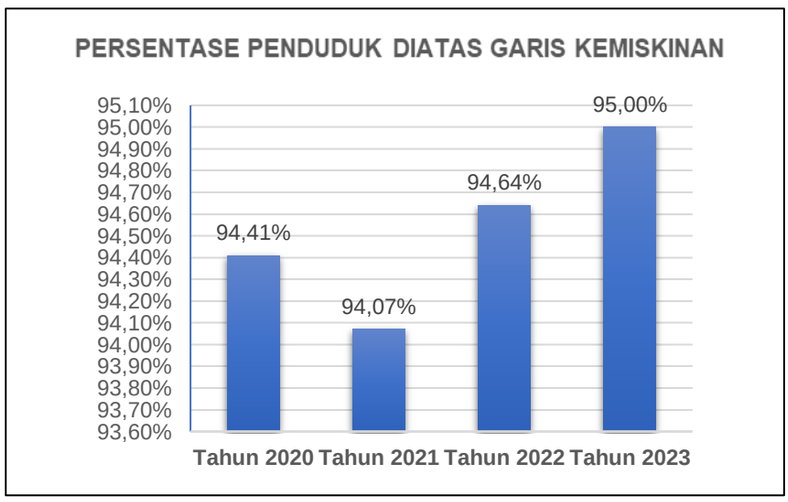

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sidoarjo

11. Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di 9 (Sembilan) Sektor

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di tahun 2023 tercapai 91,95% dari target 89,91% maka capaian sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 89,61% maka terdapat peningkatan angka 2,34 atau sekitar 2,61%.

Sembilan sektor yang menyerap tenaga kerja dimaksud, yaitu :

- Sektor Pertanian,Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- Sektor Pertambangan dan Penggalian
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Listrik, Gas dan Air
- Sektor Bangunan
- Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
- Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Dan Jasa Perusahaan
- Sektor Jasa Kemasyarakatan

Adapun perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

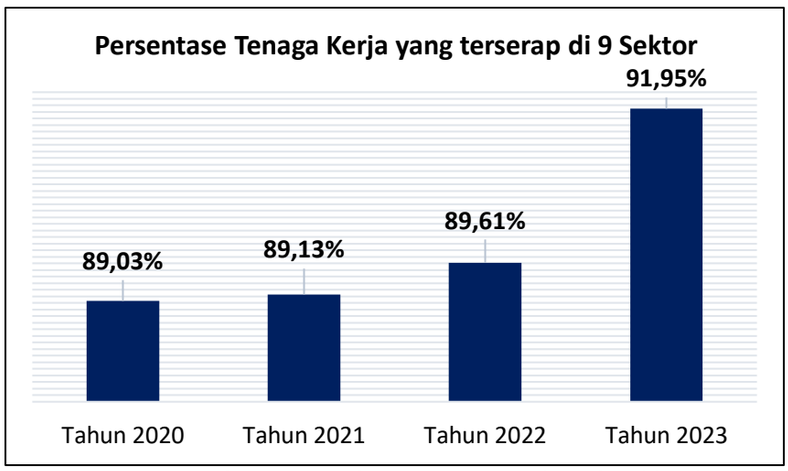

Sumber Data : Dinas Tenagta Kerja Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor yaitu :

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja.
- Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK.
- *Link and match* kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.

- Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

12. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan daengan IPM laki-laki.

Pada tahun 2023, sebagaimana Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelrindungan Anka dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 400.2.2/2407.109.1.2023 bahwa penggunaan Indeks Pembangunan Gender sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah adopsi dari GII yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah 0,301 sedangkan untuk angka Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, masih belum release dari BPS Provinsi Jawa Timur.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

13. Indeks Kualitas Air

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi 54,32 dengan target 51,54. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 47,75 maka tahun 2023 sudah terdapat peningkatan kualitas air. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif.

Permasalahan yang menjadi kendala peningkatan kualitas air yaitu adanya kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA sehingga terjadi peningkatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidoarjo namun tidak dilengkapi dengan Pengelolaan Lingkungan yang baik (termasuk penyediaan sistem pengolahan air limbah yang memadai). Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

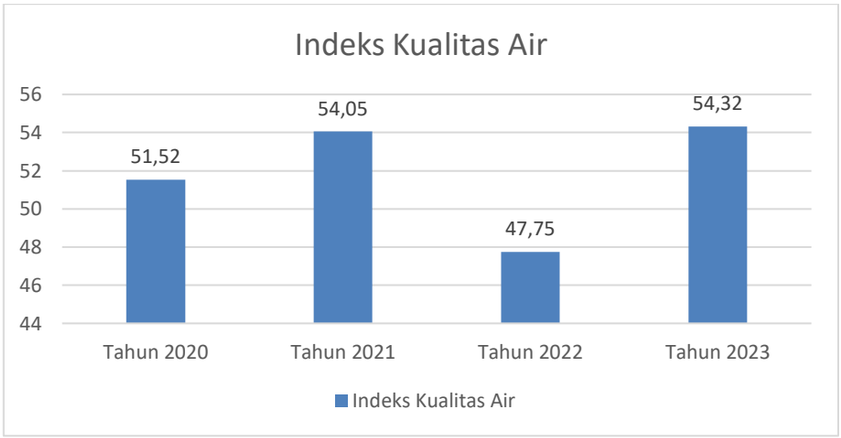

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks mulai tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2023 dimaksud (54,32) masuk dalam **kategori sedang** (yakni dalam rentang $50 \leq x < 75$) dan mengalami peningkatan kategori dari tahun sebelumnya.

14. Indeks Kualitas udara

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target tahun 2023 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar 81,98 sedangkan target 85,16 sehingga tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 yaitu 84,96 maka terdapat penurunan kualitas sebanyak 2,98 poin atau sekitar 3,51%.

ebenarnya untuk pemenuhan baku mutu konsentrasi S02 dan CO2 sudah memenuhi kriteria, namun secara perhitungan akumulasi belum memenuhi target. Hal ini memang disebabkan semakin banyaknya polusi akibat residu transportasi (knalpot). Bahwa pada tahun 2023 alat pengukur indikator kualitas udara dipasang di tempat – tempat yang memang padat lalu lintas, sehingga apabila kendaraan yang berada pada tempat tersebut semakin padat, maka volume polusi juga akan semakin besar.

Selain itu, rata-rata nilai parameter NO_2 di Kawasan Transportasi, Kawasan Industri, dan Kawasan Permukiman mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Udara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

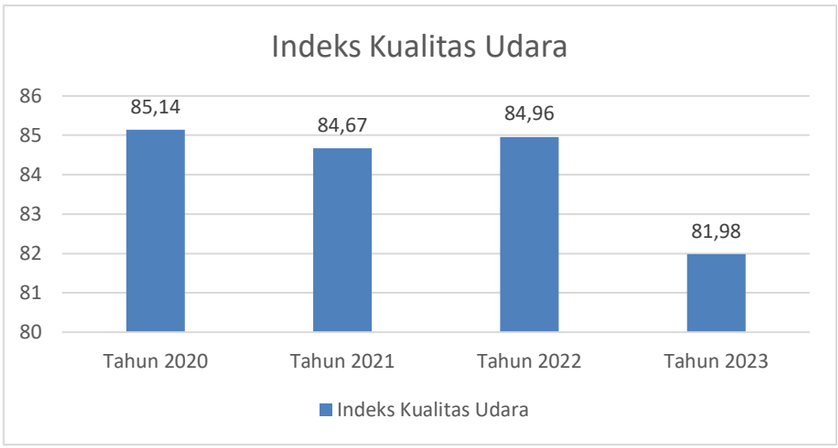

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

Meskipun demikian nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 diatas (sebesar 81,98) masuk dalam **kategori baik** (yakni dalam rentang $70 \leq x < 90$).

Adapun komposit perhitungan kinerja kualitas udara, sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	8.507 mg/L
2	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO2	8,10 mg/m3
3	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO2	17,75 mg/m3

15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan tidak mencapai target tahun 2023 namun terdapat kenaikan jika dibanding tahun 2022. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar 24,42 sedangkan target 27,12 sehingga tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 yaitu 23,63 maka terdapat penurunan kualitas sebanyak 0,79 poin atau sekitar 3,34%.

Proses verifikasi tutupan lahan dilakukan secara bertahap oleh DLH Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh KLHK dimana hasil verifikasi agar dilakukan pengurangan luas hutan mangrove di daerah pesisir yang dideliniasi karena telah dihitung menjadi luas hutan yang diplotting oleh KLHK serta dilakukan perhitungan

ulang. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan ketidak tercapaian masih sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu kurangnya area penghijauan tajuk ke tajuk. Sebenarnya pada tahun 2023 sudah banyak dilakukan revitalisasi taman, namun pepohonan yang ditanam masih belum memenuhi ketinggian tajuk.

Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

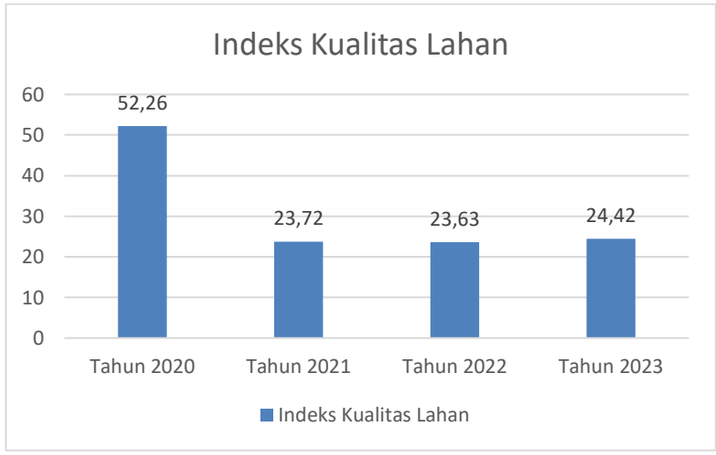

Adapun nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 diatas (sebesar 24,42) masuk dalam **kategori sangat kurang** (yakni dalam rentang $0 \leq x < 25$).

Solusi untuk peningkatan kualitas tutupan lahan, yaitu :

- Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah Kabupaten Sidoarjo serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
- Melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH serta dilakukan verifikasi secara mandiri oleh Pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;
- Pengendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan, pengayaan dan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada, serta mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman

lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;

- Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH dan penyerahan fasum perumahan;
- Mempertahankan area hijau (*green belt*) yang sudah ada dan menghindari/ meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk;
- Menertibkan permukiman atau komersial jasa yang berada di bantaran sungai dan memanfaatkannya sebagai Ruang Terbuka Hijau secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan resapan air.

16. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pengukuran status desa diformulasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Desa di Kabuaten Sidoarjo yang berstatus Desa Mandiri di Tahun 2023 sebanyak 152 Desa dari 318 Desa yang ada atau tercapai 47,8% dari target 13,98% sehingga sangat jauh melampaui target yang ditentukan dalam RPJMD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 22,67% atau 73 Desa dari 322 Desa, maka terdapat peningkatan angka 79 desa atau sekitar 108,22%.

Jumlah Desa di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 318 Desa, dari sebelumnya 322 Desa dikarenakan penggabungan akibat lumpur lapindo sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

1) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
2) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
3) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon

4) Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Desa yang berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun 2023, antara lain :

1. Kecamatan Tarik Terdapat 2 Desa
2. Kecamatan Prambon Terdapat 5 Desa
3. Kecamatan Krembung Terdapat 19 Desa
4. Kecamatan Porong Terdapat 3 Desa
5. Kecamatan Jabon Terdapat 0 Desa
6. Kecamatan Tanggulangin Terdapat 9 Desa
7. Kecamatan Candi Terdapat 24 Desa
8. Kecamatan Sidoarjo Terdapat 3 Desa
9. Kecamatan Tulangan Terdapat 4 Desa
10. Kecamatan Wonoayu Terdapat 5 Desa
11. Kecamatan Krian Terdapat 14 Desa
12. Kecamatan Balongbendo Terdapat 5 Desa
13. Kecamatan Taman Terdapat 5 Desa
14. Kecamatan Sukodono Terdapat 14 Desa
15. Kecamatan Buduran Terdapat 9 Desa
16. Kecamatan Gedangan Terdapat 9 Desa
17. Kecamatan Sedati Terdapat 5 Desa
18. Kecamatan Waru Terdapat 17 Desa

Perkembangan status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut :

CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2023

KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN		STATUS IDM 2023					
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	**Total**
1	TARIK	0	0	16	2	2	**20**
2	PRAMBON	0	0	0	15	5	**20**
3	KREMBUNG	0	0	0	0	19	**19**
4	PORONG	0	0	0	9	3	**12**
5	JABON	0	0	7	6	0	**13**
6	TANGGULANGIN	0	0	1	8	9	**18**
7	CANDI	0	0	0	0	24	**24**
8	SIDOARJO	0	0	0	7	3	**10**
9	TULANGAN	0	0	4	14	4	**22**
10	WONOAYU	0	0	0	18	5	**23**
11	KRIAN	0	0	0	5	14	**19**

12	BALONGBENDO	0	0	0	15	5	**20**
13	TAMAN	0	0	0	11	5	**16**
14	SUKODONO	0	0	0	5	14	**19**
15	BUDURAN	0	0	0	6	9	**15**
16	GEDANGAN	0	0	0	6	9	**15**
17	SEDATI	0	0	2	9	5	**16**
18	WARU	0	0	0	0	17	**17**
TOTAL		**0**	**0**	**30**	**136**	**152**	**318**
Persentase		**0,00**	**0,00**	**9,43**	**42,77**	**47,80**	

Adapun tren capaian persentase desa mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

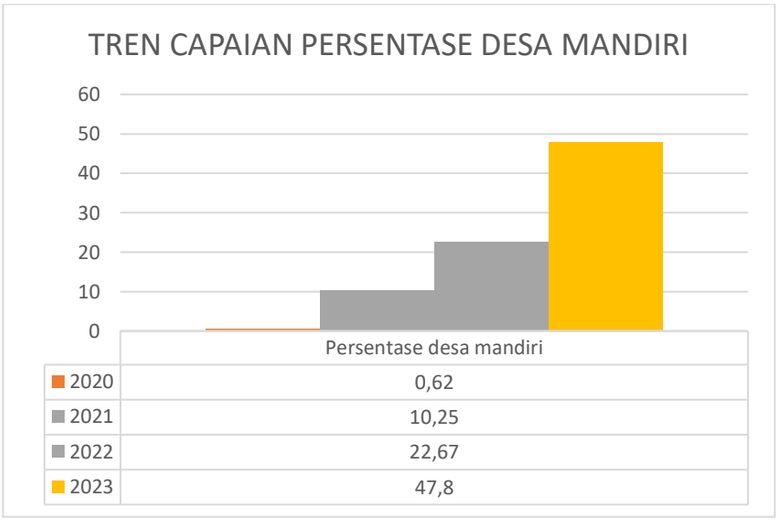

Sumber Data : Laporan IDM Dinas PMD Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Desa yang berstatus menjadi Desa Mandiri, yaitu :

- Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan Desa Wisata yang dikelola BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif Desa melalui pemanfaatan TTG yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kapasitas RT/RW bertujuan untuk pemahaman tugas dan fungsi dari RT/RW.

17. Nilai Indeks SPBE

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 3,11 dari target 3,45 sehingga belum memenuhi target, namun apabila dibandingkan dengan capain tahun 2022 yaitu 2,29 maka terdapat peningkatan yang sangat tinngi yaitu 0,82 poin atau sekitar 35,81%.

Pada Tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan kategori menjadi B(Baik) setelah sebelumnya di Tahun 2022 hanya mendapatkan kategori C(Cukup).

Berikut perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Sidoarjo :

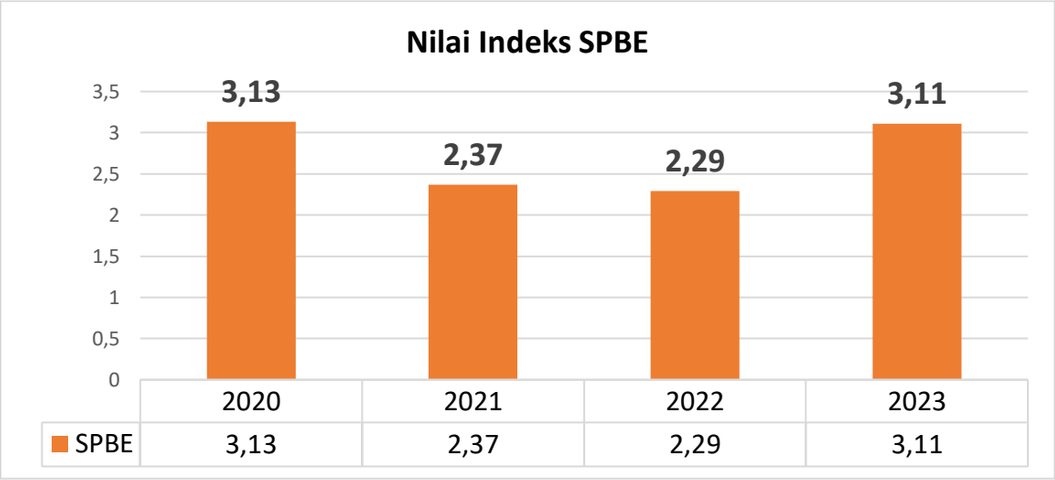

Sumber Data : LHE SPBE KEMENPANRB

Sebenarnya apabila dibandingkan dengan tahun 2022 peningkatan sangat tajam, bahkan mengalami peningkatan kategori, namun masih ada yang perlu dipenuhi oleh Kabupaten Sidoarjo, yaitu penyusunan Arsitektur SPBE, yang dilakukan pada tahun 2024.

Upaya yang dilakukan agar penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo meningkat, yaitu sebagai berikut :

- Menyusun draft Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo direncanakan pada program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputuran Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.

18. Persentase Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

- Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggung

renteng atau kemauan untuk berbagi risiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.

- Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Pada tahun 2023 jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 367 koperasi setara dengan 24,96% dari total keseluruhan 1.470 koperasi sehingga sudah tercapai dari target 24,69%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 23,20% atau sebanyak 343 koperasi sehingga terdapat peningkatan sebanyak 24 koperasi. Untuk tahun 2024 diperkirakan jumlah koperasi di Kabupaten sidoarjo akan bertambah. Hal ini seiring dengan dinamika perekonomian regional dan adanya regulasi kemudahan pembentukan koperasi.
Meskipun target tahun 2023 sudah tercapai, namun sebagian besar koperasi belum mampu mengembangkan usahanya karena keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan peningkatan usaha koperasi.

Adapun perkembangan jumlah koperasi yang berkualitas dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

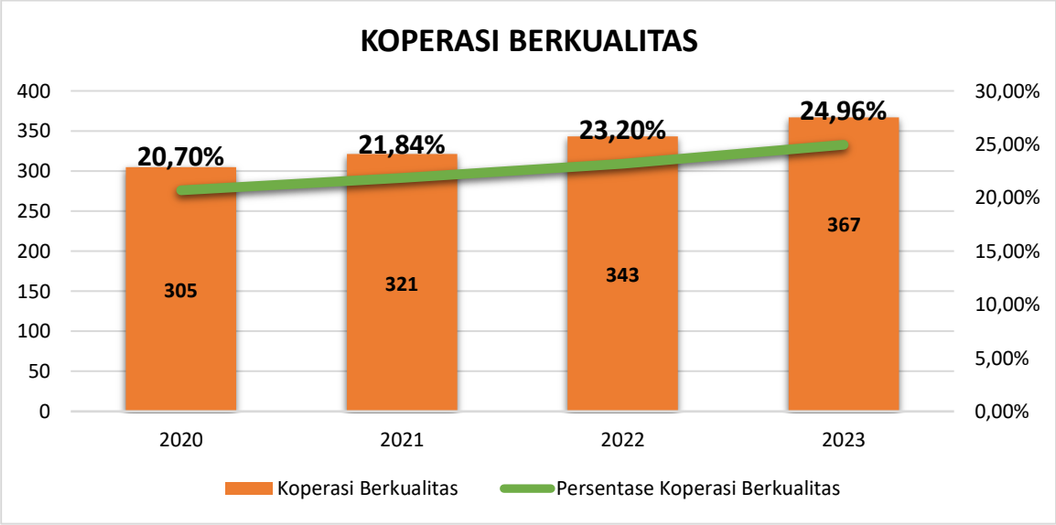

Sumber Data : DISKOP Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin koperasi yang masuk kategori koperasi berkualitas, yaitu :

- Memberikan fasilitas izin usaha koperasi melalui sosialisasi dan pendampingan usaha
- Meningkatkan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi
- Memberikan fasilitas pemasaran produk koperasi
- Menyediakan klinik konsultasi koperasi
- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi

19. Persentase Usaha Mikro Mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.637 usaha mikro setara dengan 2,06% dari total keseluruhan 176.425 usaha mikro sehingga sudah tercapai dari target 1,98%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 1,93% atau sebanyak 3.399 usaha mikro sehingga terdapat peningkatan sebanyak 238 usaha mikro.

Meskipun target tahun 2023 sudah tercapai, namun keterbatasan SDM dan sarana prasarana sehingga antara usaha mikro yang dengan fasilitas peningkatan usaha mikro tidak seimbang. Namun demikian hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan usaha mikro contohnya melalui fasilitasi NIB gratis, pendampingan, pelatihan secara online maupun offline dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.

Adapun perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

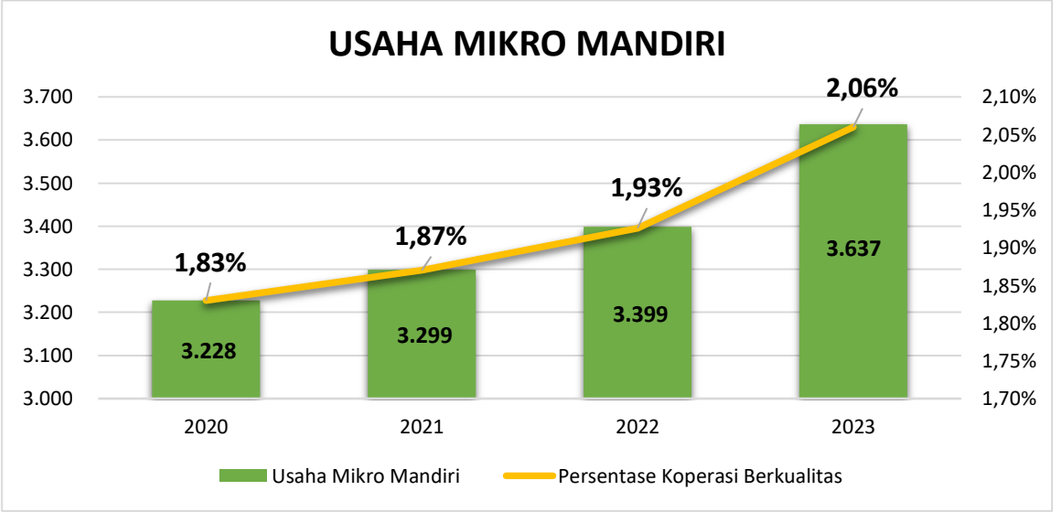

Sumber Data : DISKOP Kab. Sidoarjo

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2023, terbanyak adalah dari kelompok usaha mikro, sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI USAHA MIKRO	PRESENTASE
1.	PERDAGANGAN	48,18%
2.	KULINER	30,03%
3.	JASA	9,05%
4.	LAIN-LAIN	6,93%
5.	FASHION	4,19%
6.	AGRIBISNIS	1,27%

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang masuk kategori usaha mikro yang mandiri, yaitu :

- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan usaha.
- Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
- Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sosialisasi bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.

- Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha.
- Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga lainnya.

20. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pada tahun 2023 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.13.681.823.120.000,00 dari target Rp.7.396.748.810.000,00 maka tercapai 184,97%. Namun Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu senilai Rp.14.086.231.612.109,50 maka terdapat penurunan senilai Rp.404.408.492.109,50 atau sekitar -(2,87%).

Penurunan nilai investasi disebabkan karena kurang tertibnya perusahaan yang memiliki investasi dalam melaporkan nilai investasinya kepada OPD terkait, sehingga akan lambat pula dalam penyampaian laporan ke BKPM / Pusat.

Berikut perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Sidoarjo :

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar nilai investasi semakin meningkat, yaitu antara lain :

- Letak geografis kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis
- Infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pusat perindustrian dan pergudangan

- Regulasi yang mendukung dimulai dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, sampai dengan turunannya serta inovasi dalam menerapkan aturan-aturan tersebut
- Adanya regulasi daerah yang mendukung investasi seperti Rencana Umum Penanaman Modal dan Perbup Pemberian Insentif
- Adanya inovasi daerah yang mendukung aplikasi OSS RBA yang berlaku nasional
- DPMPTSP berinovasi dengan memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Jemput Bola untuk UMKM di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, dan Halal Center; serta Tim Prime Service untuk membantu perusahaan-perusahaan yang dipilih dan diprioritaskan
- Kolaborasi yang baik antara dinas teknis pemangku perizinan berusaha dan instansi teknis terkait penerbitan perizinan, serta komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim dan Kementerian
- Pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha, berkomunikasi dan hubungan yang baik kepada pelaku usaha, dengan adanya kegiatan Pengawasan Perusahaan secara rutin
- Tim dari DPMPTSP yang komit dan sangat kompetitif.

21. Indeks Pelestarian Budaya

Indeks Pelestarian Budaya disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pelestarian Budaya merupakan komposit perhitungan dari Indeks Kesalehan Sosial yang diukur dari Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dirawat, dan sikap masyarakat terhadap kelestarian budaya dan lingkungan.

Variabel yang menjadi dimensi pengukuran Indeks Pelestarian Budaya, sebagai berikut :

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Seni dan Budaya	82,78	35%	28,973
Cagar Budaya	97,02	35%	33,957
Sikap masyarakat	93,29	30%	27,987
		100%	**90,92**

Capaian Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2023 yaitu 90,92 dari target 63,58 sehingga sudah sangat jauh melampaui dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 90,46 maka capaian juga lebih baik dari tahun sebelumnya.

22. Indeks Pelayanan Publik

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan Kompetisi Regional maupun Nasional.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 mendapatkan nilai 4,43 atau kategori A- (Sangat Baik).

Adapun untuk pengukuran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 21 Desember 2023 Nomor : 188/639/438.1.1.3/2023, berikut hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 :

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
Kategori Khusus Role Model				
1.	RSUD Sidoarjo	4,71	A	Pelayanan Prima
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,59	A	Pelayanan Prima
3.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4,51	A	Pelayanan Prima
Kategori Perangkat Daerah Teknis (Dinas)				
1.	Dinas Kesehatan	4,30	A-	Sangat Baik
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4,24	A-	Sangat Baik
3.	Dinas Sosial	4,23	A-	Sangat Baik
4.	Dinas Tenaga Kerja	4,23	A-	Sangat Baik
5.	Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air	4,22	A-	Sangat Baik
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,20	A-	Sangat Baik
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4,17	A-	Sangat Baik
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,10	A-	Sangat Baik
9.	RSUD Sidoarjo Barat	4,09	A-	Sangat Baik
10.	Dinas Perikanan	4,08	A-	Sangat Baik
11.	Dinas Perhubungan	4,07	A-	Sangat Baik
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,01	A-	Sangat Baik

13.	Dinas Pangan dan Pertanian	4,01	A-	Sangat Baik
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,73	B	Baik
15.	Dinas Perumahan, Permukiman, CKTR	3,43	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,42	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,14	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,12	B-	Baik (Dengan Catatan)
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Perangkat Daerah Penunjang (Badan, Sekretariat dan Inspektorat)				
1.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	4,28	A-	Sangat Baik
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,24	A-	Sangat Baik
3.	Sekretariat Daerah	4,20	A-	Sangat Baik
4.	Badan Kepegawaian Daerah	4,13	A-	Sangat Baik
5.	Inspektorat Daerah	4,07	A-	Sangat Baik
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,05	A-	Sangat Baik
7.	Sekretariat DPRD	3,82	B	Baik
8.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3,76	B	Baik
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,08	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Kecamatan				
1.	Kecamatan Taman	4,38	A-	Sangat Baik
2.	Kecamatan Sukodono	4,26	A-	Sangat Baik
3.	Kecamatan Tulangan	4,25	A-	Sangat Baik
4.	Kecamatan Gedangan	4,17	A-	Sangat Baik
5.	Kecamatan Prambon	4,15	A-	Sangat Baik
6.	Kecamatan Porong	4,12	A-	Sangat Baik
7.	Kecamatan Sidoarjo	4,02	A-	Sangat Baik
8.	Kecamatan Balongbendo	4,01	A-	Sangat Baik
9.	Kecamatan Krian	3,81	B	Baik
10.	Kecamatan Candi	3,78	B	Baik
11.	Kecamatan Jabon	3,73	B	Baik
12.	Kecamatan Krembung	3,69	B	Baik
13.	Kecamatan Tarik	3,63	B	Baik
14.	Kecamatan Wonoayu	3,53	B	Baik
15.	Kecamatan Buduran	3,45	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Kecamatan Sedati	3,22	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Kecamatan Tanggulangin	3,17	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Kecamatan Waru	3,15	B-	Baik (Dengan Catatan)

Kategori Puskesmas				
1.	Puskesmas Porong	4,52	A	Pelayanan Prima
2.	Puskesmas Taman	4,48	A-	Sangat Baik
3.	Puskesmas Trosobo	4,38	A-	Sangat Baik
4.	Puskesmas Prambon	4,37	A-	Sangat Baik
5.	Puskesmas Jabon	4,34	A-	Sangat Baik
6.	Puskesmas Tulangan	4,33	A-	Sangat Baik
7.	Puskesmas Balongbendo	4,30	A-	Sangat Baik
8.	Puskesmas Sukodono	4,25	A-	Sangat Baik
9.	Puskesmas Candi	4,24	A-	Sangat Baik
10.	Puskesmas Gedangan	4,20	A-	Sangat Baik
11.	Puskesmas Krian	4,19	A-	Sangat Baik
12.	Puskesmas Buduran	4,16	A-	Sangat Baik
13.	Puskesmas Wonoayu	4,10	A-	Sangat Baik
14.	Puskesmas Krembung	4,10	A-	Sangat Baik
15.	Puskesmas Sedati	4,09	A-	Sangat Baik
16.	Puskesmas Tanggulangin	4,08	A-	Sangat Baik
17.	Puskesmas Sidoarjo	4,05	A-	Sangat Baik
18.	Puskesmas Urangagung	4,02	A-	Sangat Baik
19.	Puskesmas Sekardangan	4,02	A-	Sangat Baik
20.	Puskesmas Tarik	4,02	A-	Sangat Baik
21.	Puskesmas Waru	4,02	A-	Sangat Baik
22.	Puskesmas Barengkrajan	3,95	B	Baik
23.	Puskesmas Kedungsolo	3,94	B	Baik
24.	Puskesmas Kepadangan	3,86	B	Baik
25.	Puskesmas Tarik-2	3,85	B	Baik
26.	Puskesmas Medaeng	3,84	B	Baik
27.	Puskesmas Ganting	3,82	B	Baik
28.	Puskesmas Tambakrejo	3,81	B	Baik
29.	Puskesmas Sidodadi	3,45	B-	Baik (Dengan Catatan)
30.	Puskesmas Wonokasian	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Kelurahan				
1.	Kelurahan Sepanjang	4,09	A-	Sangat Baik
2.	Kelurahan Bulusidokare	4,01	A-	Sangat Baik
3.	Kelurahan Taman	3,80	B	Baik
4.	Kelurahan Sekardangan	3,79	B	Baik
5.	Kelurahan Tambakkemerakan	3,78	B	Baik
6.	Kelurahan Kalijaten	3,40	B-	Baik (Dengan Catatan)
7.	Kelurahan Gebang	3,39	B-	Baik (Dengan Catatan)
8.	Kelurahan Ketegan	3,38	B-	Baik (Dengan Catatan)

9.	Kelurahan Bebekan	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
10.	Kelurahan Magersari	3,29	B-	Baik (Dengan Catatan)
11.	Kelurahan Kemasan	3,27	B-	Baik (Dengan Catatan)
12.	Kelurahan Sidokumpul	3,17	B-	Baik (Dengan Catatan)
13.	Kelurahan Urangagung	3,15	B-	Baik (Dengan Catatan)
14.	Kelurahan Geluran	3,13	B-	Baik (Dengan Catatan)
15.	Kelurahan Cemengkalang	3,12	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Kelurahan Krian	3,11	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Kelurahan Pucang	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Kelurahan Celep	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
19.	Kelurahan Sidoklumpuk	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
20.	Kelurahan Pucanganom	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
21.	Kelurahan Lemahputro	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
22.	Kelurahan Wonocolo	2,92	C	Cukup
23.	Kelurahan Pekauman	2,84	C	Cukup
24.	Kelurahan Porong	2,82	C	Cukup
25.	Kelurahan Sidokare	2,78	C	Cukup
26.	Kelurahan Ngelom	2,66	C	Cukup
27.	Kelurahan Juwetkenongo	2,52	C	Cukup
28.	Kelurahan Gedang	2,21		Fokus Pembinaan
Kategori BUMD				
1.	BPR Delta Artha	3,61	B	Baik
2.	Perumda Delta Tirta	2,50		Fokus Pembinaan
3.	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	1,17		Fokus Pembinaan

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 terdapat 2 (dua) Inovasi yang masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yaitu :

1. KOPI PAHIT (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting)
2. Inovasi E-REBON

23. Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo memperoleh kategori **BB** (**Sangat Baik**). Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu kategori **A (Memuaskan)** dan stagnan dari Tahun 2022.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

- Menyempurnakan Aplikasi e-Kinerja sebagai mekanisme manajemen kinerja untuk mengukur kinerja individu, dan menjadi tools untuk keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
- Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyusun register resiko sampai dengan level Kegiatan dan membentuk Satgas SPIP ke seluruh OPD
- Peningkatan kualitas implementasi SAKIP OPD dengan merubah struktur penilaian SAKIP OPD, menjadi 95% komponen LKE SAKIP dan 5% komponen LKE SPIP
- Penguatan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD melalui pengendalian secara elektronik melalui Aplikasi e-Kenda
- Optimalisasi Aplikasi e-Monev untuk evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan

Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	26.31	26.31
b. Pengukuran Kinerja	30	23.81	23.18
c. Pelaporan Kinerja	15	12.34	11.45
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.50	16.56
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**78.96**	**77.50**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Sumber Data : LHE SAKIP KemenPANRB

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi.

Adapun Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Kategori Nilai	Jumlah OPD
AA (Sangat Memuaskan)	1 OPD (2,04%)
A (Memuaskan)	24 OPD (48,98%)
BB (Sangat Baik)	23 OPD (46,94%)
B (Baik)	1 OPD (2,04%)

No	Nama OPD	Nilai 2023	Predikat
1	RSUD Sidoarjo	91,05	AA
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86,57	A
3	Inspektorat Daerah	86,34	A
4	Sekretariat Daerah	85,97	A
5	Badan Kepegawaian Daerah	85,45	A
6	Badan Pelayanan Pajak Daerah	84,79	A
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	84,77	A
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84,23	A
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,17	A
10	Dinas Pangan dan Pertanian	84,11	A
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	83,99	A
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,94	A
13	Kecamatan Taman	83,60	A
14	Dinas Kesehatan	83,31	A
15	Dinas Tenaga Kerja	82,92	A
16	Satuan Polisi Pamong Praja	81,78	A
17	Dinas Perikanan	81,28	A
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,18	A
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,09	A
20	Kecamatan Sukodono	81,00	A
21	Dinas Perhubungan	80,81	A
22	Kecamatan Gedangan	80,40	A
23	Dinas P3A dan KB	80,38	A
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80,27	A
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,21	A

No	Nama OPD	Nilai 2023	Predikat
26	Kecamatan Porong	79,96	BB
27	Dinas Sosial	79,89	BB
28	Sekretariat DPRD	79,89	BB
29	Kecamatan Prambon	79,83	BB
30	Kecamatan Buduran	79,76	BB
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,75	BB
32	Kecamatan Krian	79,74	BB
33	Kecamatan Tanggulangin	79,71	BB
34	Kecamatan Waru	79,65	BB
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,59	BB
36	Dinas PU Bina Marga dan SDA	79,54	BB
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,53	BB
38	Kecamatan Jabon	79,52	BB
39	Kecamatan Balongbendo	79,51	BB
40	Kecamatan Sedati	79,44	BB
41	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	79,35	BB
42	Dinas Perumahan dan Pemukiman CKTR	78,76	BB
43	Kecamatan Tulangan	78,75	BB
44	Kecamatan Tarik	78,71	BB
45	Kecamatan Wonoayu	78,17	BB
46	Kecamatan Candi	78,15	BB
47	Kecamatan Sidoarjo	77,04	BB
48	Kecamatan Krembung	75,47	BB
49	RSUD Sidoarjo Barat	60,98	B

Sumber Data : LHE SAKIP OPD dari Inspektorat Kab. Sidoarjo

Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari tahun 2022. Aspek yang paling kurang sebagaimana LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari Kementerian PAN dan RB adalah aspek Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB telah dituangkan dalam LHE dan akan diperbaiki pada tahun 2024.

24. Opini Atas Laporan BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam kurun waktu 10 tahun Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Adapun tren capaian Opini atas Audit BPK 4 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Opini atas Audit BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Adapun upaya yang dilakukan agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu :

- Bimtek dan asistensi pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
- Bimtek dan asistensi penatausahaan aset daerah secara berkala
- Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi lainnya terhadap pengelolaan keuangan

25. Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo masih belum release. Adapun kinerja yang mendukung pencapaian peningkatan hasil Survey Eksternal Pesepsi Korupsi, antara lain :

Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP *(Services and Role of Internal Auditing)*
2. Pengelolaan SDM *(People Management)*
3. Praktik Profesional *(Professional Practices)*
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja *(Performance Management and Accountability)*
5. Budaya dan Hubungan Organisasi *(Organizational Relationship and Culture)*
6. Struktur Tata Kelola *(Governance Structures)*

Berdasarkan hasil *self assessment* atas Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah 3,000 ini berarti Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo sudah pada level 3 *(Integrated)*.

Capaian Kapabilitas APIP level 3 *(Integrated)* mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo sudah mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Kapabilitas APIP
2020	Level 2 *(Infrastrukture)*
2021	Level 2 *(Infrastrukture)*
2022	Level 3 *(Integrated)*
2023	Level 3 *(Integrated)*

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat Kapabilitas APIP optimal, yaitu :

- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko.
- Memuatkhirkan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

***Monitoring Center for Prevention* (MCP)**

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, upaya koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Tahun 2023 hasil penilaian MCP Kabupaten Sidoarjo adalah 91 dari rentang nilai 0 s.d. 100 menempati peringkat ke-87, menurun dari capaian tahun 2022 yaitu 95. Adapun nilai masing-masing variabel sebagai berikut :

No.	Variabel	Nilai
1	Perencanaan dan penganggaran	99
2	Pengadaan barang dan jasa	96
3	Perizinan	79
4	Pengawasan APIP	92
5	Manajemen ASN	88
6	Optimalisasi pajak daerah	100
7	Manajemen aset daerah	85
8	Tata kelola keuangan desa	100

Capaian ini sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih baik secara administrasi maupun secara regulasi.

Adapun upaya yang dilakukan agar capaian MCP optimal, yaitu Asistensi dan monitoring terhadap 8 area intervensi yang difokuskan pada area intervensi yang nilainya rendah yaitu melalui :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk area intervensi Perijinan, terutama untuk transparansi tata ruang daerah
- Mengoptimalkan penilaian sistem merit untuk area intervensi Manajemen ASN
- Meningkatkan pendanaan dan sertifikasi BMD untuk pengamanan fisik dan hukum BMD pada area intervensi Pengelolaan BMD

26. Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke-5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke-2 Nasional

Sehubungan dengan perubahan penilaian sebagaimana Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, maka status kinerja LPPD apabila ditargetkan Sangat Tinggi (ST) maka masih kesulitan, dan belum ada Kabupaten / Kota yang sudah mencapai kategori dimaksud. Meskipun demikian Kabupaten Sidoarjo menempati Peringkat ke-2 terbaik Nasional dalam pencapaian indikator LPPD.

27. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian
4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP dengan nilai 3,150 yang berarti bahwa capaian telah mencapai target. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Pengendalian telah dibangun dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan organisasi, namun belum pada sasaran strategis OPD maupun Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, serta belum pada risiko kecurangan.

Berikut tren capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Level Maturitas SPIP
2020	Terdefinisi
2021	Terdefinisi
2022	Terdefinisi
2023	Terdefinisi

Berikut hasil evaluasi penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 :

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat pengendalian intern optimal, yaitu antara lain :

- Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi SPIP
- Meningkatkan kualitas pengawasan melalui reviu, evaluasi, dan pendampingan terhadap manajemen risiko tidak hanya pada tataran operasional tetapi pada tataran sasaran strategis OPD.
- Melaksanakan sosialisasi dan implementasi secara masif terkait kegiatan anti korupsi yang mencakup tiga hal yaitu cegah, deteksi, dan respon.

28. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dalam Arti Luas

Berdasarkan data dari BPS Sidoarjo bahwa Tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas adalah 1,67 dari target 2,82 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan.

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas, antara lain :

Produktivitas Pertanian

Perkembangan produktivitas pertanian sampai dengan tahun 2023, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

NO	TANAMAN PANGAN	TAHUN 2020 (Kw/Ha)	TAHUN 2021 (Kw/Ha)	TAHUN 2022 (Kw/Ha)	TAHUN 2023 (Kw/Ha)
1	Padi	68,51	68,90	68,91	68,929
2	Jagung	79,87	64,03	64,12	64,21
3	Kacang Hijau	20,64	19,03	19,07	19,12
4	Kedelai	18,25	16,54	16,60	16,643
5	Sawi	105,11	105,12	105,13	105,35
6	Bayam	91,23	91,24	91,25	91,258
7	Kangkung	61,30	61,31	61,32	61,33
8	Tebu	749,00	749,42	750,52	751,29

Perkembangan produktivitas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan pada beberapa komoditi baik tanaman pangan dan hortikultura. Peningkatan produktivitas yang terjadi pada komoditas tanaman pangan terjadi pada :

1. Pada komoditas padi terjadi peningkatan sebesar 0,0276% atau sebesar 0,019 kw/ha dibanding tahun 2022. Hal yang mendukung peningkatan produktivitas tersebut antara lain :
   - Tanam tepat waktu
   - Penggunaan alat mesin panen seperti combine harvester dibeberapa daerah yang mampu mengurangi kehilangan hasil produksi
   - Pengawalan intens oleh petugas pertanian dalam mengawal produksi dan produktivitas pada periode 2023 ini serta dukungan gerakan pengendalian OPT di seluruh wilayah kecamatan
2. Pada komoditas Jagung terjadi peningkatan sebesar 0,09 kw/ha atau 0,140 dibanding tahun 2022. Hal ini didukung dengan bantuan benih APBD II dengan varietas unggul yaitu P36 dan banyaknya petani mulai melakukan pemanenan jagung pipil bukan lagi jagung sebagai sayuran.
3. Pada komoditas Kacang hijau mengalami peningkatan sebesar 0,05 kw/ha atau sebesar 0,261 % dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh meningkatnya luas tanam kacang hijau di beberapa kecamatan yang sebelumnya belum pernah menanam kacang hijau yaitu di kecamatan Sukodono dan Gedangan.
4. Komoditas kedelai mengalami peningkatan sebesar 0,043 kw/ha atau sebesar 0,2584 % dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan adanya bantuan benih kedelai berikut sarana produksinya yaitu pupuk NPK Non subsidi, pupuk Hayati dan pestisida cair di 4 kecamatan yaitu seluas 169 ha dengan hasil produktivitas sebesar 1,9 ton/ha.

5. Peningkatan produktivitas Sawi pada tahun 2023 di komoditas sawi terjadi sebesar 0,22 kw/ha atau 0,208 %. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan luas tanam dan panen sawi karena harga sawi masih lebih baik dibandingkan sayuran daun lainnya.
6. Peningkatan produktivitas Kangkung pada tahun 2023 di komoditas sawi terjadi sebesar 0,01 kw/ha atau 0,011 % dibanding tahun 2022 dan peningkatan ini terjadi karena ada perluasan tanam dan panen di beberapa kecamatan yaitu kecamatan Tarik.
7. Peningkatan produktivitas Bayam pada tahun 2023 di komoditas bayam tidak terlalu besar atau sekitar 0,008 kw/ha atau 0,013 % dibanding tahun sebelumnya.
8. Produktivitas tanaman tebu di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 tercapai 751,29 apabila dibandingkan dengan target yaitu 750,5 maka capaian 100% Sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 749,42 maka terdapat peningkatan angka 1,1. Peningkatan tersebut disebabkan oleh petani tebu sudah banyak melakukan budidaya sesuai petunjuk teknis yang dianjurkan.

Produksi Perternakan

Pada tahun 2023 Produksi Peternakan (Daging, Susu, dan Telur) sebanyak 37.986.288 kg dari target 36.333.000 kg, sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan.

Adapaun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi peternakan, antara lain :

- Optimasi pelaksanaan vaksin PMK
- Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan

Kasus penyakit PMK Dan LSD pada ternak di Kabupaten Sidoarjo sudah zero case tapi berdasarkan surveillance penyakit PMK oleh BBPusvetma masih ada ternak yang seropositif NSP PMK, artinya masih ada ternak yg memiliki antibodi terhadap infeksi alam PMK sehingga kemungkinan penularan penyakit PMK kembali jika antibodi PMK rendah. Untuk itu, masih perlu dilakukan booster ulang vaksin PMK pada ternak. Selain itu, masih ada ternak yang masuk ke sidoarjo tanpa eartag sehingga tidak ada catatan vaksinasinya.

Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 82.209.600 kilogram dari target 79.086.882 kilogram atau tercapai 3,9 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 81.767.100 kilogram maka terdapat peningkatan 442.500 kilogram.

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air payau, sebagaimana tabel berikut :

Perikanan Budidaya Air Payau						
No	**Tahun**	**Target (Kg)**	**Presentase (%)**	**Realisasi (kg)**	**Kenaikan (kg)**	**Persentase (%)**
1.	2019	76.236.179	0,47	76.568.500	636.050	0,83
2.	2020	76.617.359	0,50	79.388.600	2.182.300	2,85
3.	2021	78.691.317	0,55	79.825.238	436.638	1,38
4	2022	78.966.373	0,51	81.767.100	1.941.862	2,4
5.	2023	79.086.882	0,52	82.209.600	442.500	0,54

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air payau dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

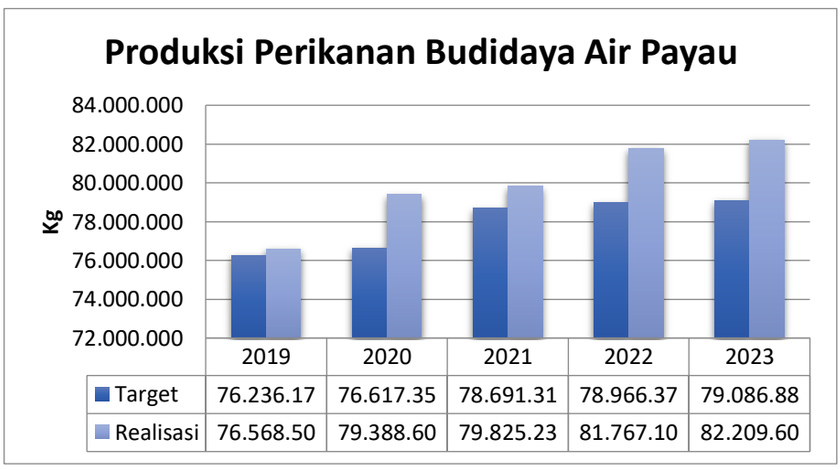

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Normalisasi saluran pasok untuk pasang surut air laut yang dipergunakan untuk suplai budidaya tambak.
- Pendangkalan dan penggelondongan sebagai upaya untuk adaptasi terhadap lingkungan

- Melanjutkan pembangunan jalan produksi sebagai akses modalisasi panen dan transport pengangkutan benih.
- Pelatihan dan sekolah lapang sebagai sarana edukasi untuk para pembudidaya
- Pemberian modal dan hibah benih dan sarana prasarana.

Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 25.905.000 kilogram dari target 25.806.058 kilogram atau tercapai 3,55 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 25.016.620 kilogram maka terdapat peningkatan 888.380 Kilogram.

Perkembangan hasil produksi perikanan Budidaya air tawar, sebagaimana tabel berikut :

Perikanan Budidaya Air Tawar						
No	**Tahun**	**Target (Kg)**	**Prosentase (%)**	**Realisasi (Kg)**	**Kenaikan (Kg)**	**Prosentase (%)**
1.	2019	21.479.883	5,35	21.493.180	839.446	4,06
2.	2020	21.479.900	0,01	22.135.975	642.795 Kg	3
3.	2021	22.822.191	5	22.833.258	697.283 Kg	3,15
4	2022	25.976.980	3,10	25.016.620	777.780	3,20
5	2023	25.806.058	3,20	25.905.000	888.380	3,55

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air tawar dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

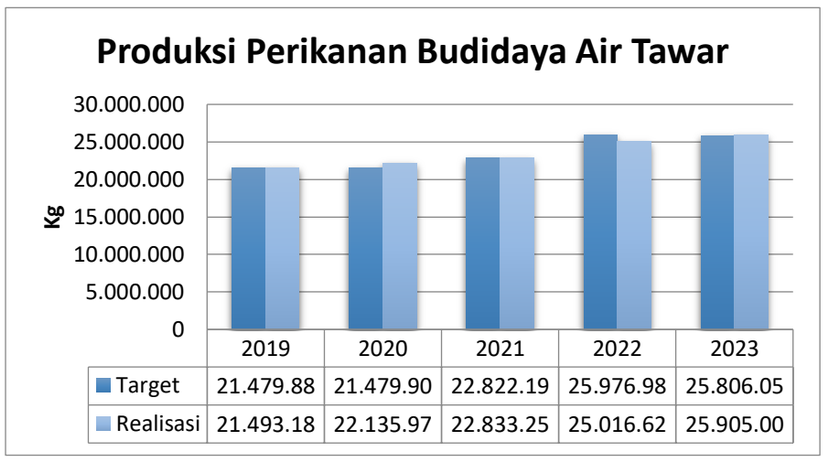

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (Pembudidaya) dengan cara memberikan pelatihan dan sosialisasi cara berbudidaya dengan baik dan benar.
- Pemberian hibah dan bantuan dan diadakannya KURDA

Produksi Perikanan Tangkap Laut

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15.947.800 kilogram dari target 15.875.000 kilogram atau tercapai 100,46%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 15.859.100 kilogram maka terdapat peningkatan 88.700 kilogram atau sekitar 0,56%.

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut, sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
1.	2019	15.400.000 Kg	15.416.200 Kg	196.400 kg	1,29
2.	2020	15.600.000 Kg	15.540.300 Kg	124.100 kg	0,80
3.	2021	15.800.000 Kg	15.818.400 Kg	278.100 kg	1,79
4.	2022	15.850.000 Kg	15.859,100 Kg	40.700 kg	0,26
5.	2023	15.875.000 Kg	15.947.800 Kg	88.700 kg	0,56

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut :

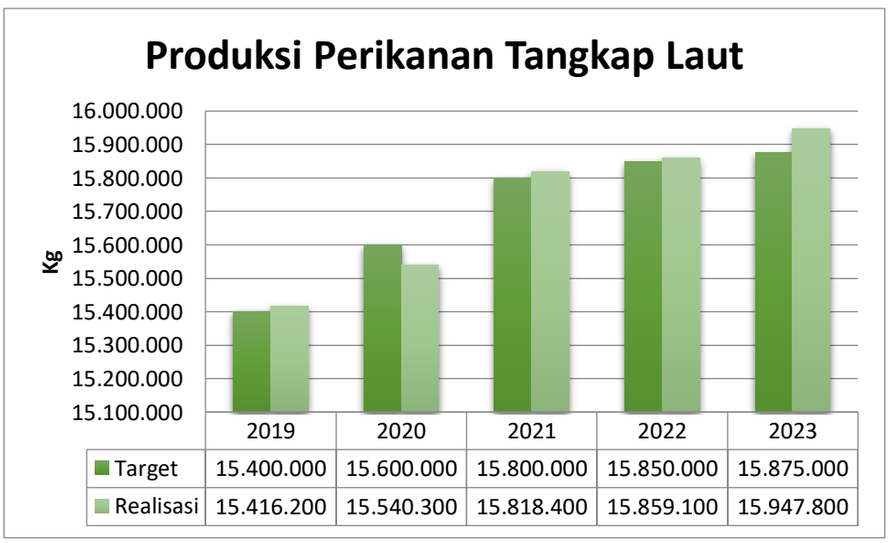

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu:

- Pemberian hibah / Bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan sehingga dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.
- Pemberian modal/bantuanmodal kepada nelayan sehingga menungkinkan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.

Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 562.800 kilogram dari target 562.000 kilogram atau tercapai 100,14%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 562.700 kilogram maka terdapat peningkatan 100 kilogram atau sekitar 0,02%.

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap Perairan Umum Daratan, sebagaimana tabel berikut :

Perairan Umum Daratan (PUD)					
No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**Kenaikan**	**Persentase**
1.	2019	543.000 Kg	547.800 Kg	11.700 Kg	2,18
2.	2020	550.000 Kg	553.200 kg	5.400 kg	0,98
3.	2021	560.000 Kg	561.900 kg	8.700 kg	1,57
4.	2022	561.000 Kg	562.700 Kg	800 Kg	0,14
5.	2023	562.000 Kg	562.800 Kg	100 Kg	0,02

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut :

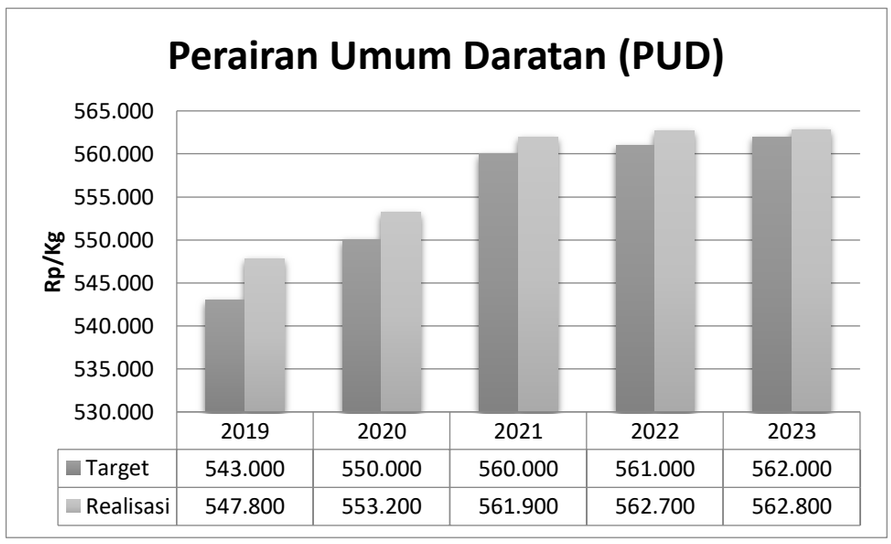

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu:

- Pemberian hibah / Bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan sehingga dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.
- Pemberian modal / bantuanmodal kepada nelayan sehingga menungkinkan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers

Pada tahun 2023 Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers senilai Rp. 61.100/Kg dari target Rp. 61.000/Kg atau tercapai 100,32 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu Rp. 60.900 /Kg maka terdapat peningkatan Rp. 100/Kg atau sekitar 0,16 %.

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers, sebagaimana tabel berikut :

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang						
No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Kenaikan (Rp)**	**Penurunan (%)**	**Persentase (%)**
1.	2019	60.000 / Kg	62.500 / Kg	2.500 / Kg	-	4,16
2.	2020	60.500/ Kg	60.000/Kg	-	500 / Kg	-0,83
3.	2021	60.500/ Kg	60.750/Kg	250 / kg	-	0,41
4	2022	60.000/kg	60.900/kg	900/kg	-	1,50
5	2023	61.000/kg	61.100/kg	100/kg	-	0,16

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang

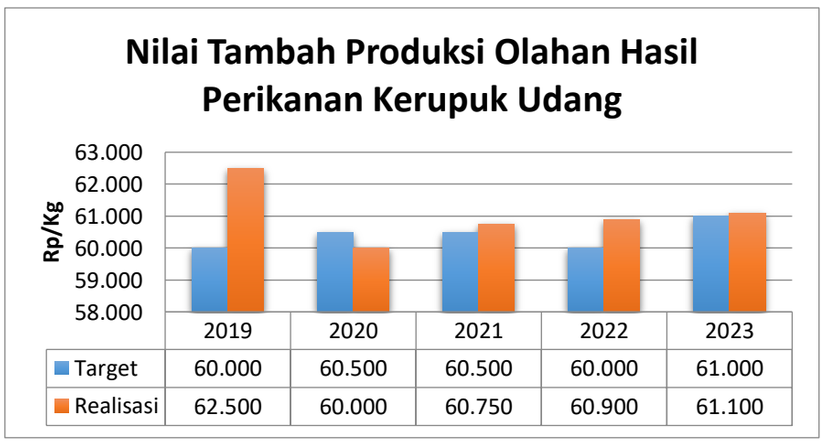

Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers semakin meningkat, yaitu:

- Harus memiliki sertifikasi keamanan mutu produksi olahan hasil perikanan
- Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para pengolah.
- Melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan standart

Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish

Pada tahun 2023 Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish senilai Rp.131.000/Kg dari target Rp.127.500/Kg atau tercapai 102,75 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu Rp. 128.000/Kg maka terdapat peningkatan Rp.3.500/Kg atau sekitar 2,7 %.

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish, sebagaimana tabel berikut :

	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap					
No	**Tahun**	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Kenaikan (Rp)**	**Penurunan (Rp)**	**Persentase (%)**
1.	2019	128.000 /Kg	132.500/ Kg	2.500/ Kg	-	1,95
2.	2020	127.500/ Kg	127.000/ Kg	-	500 /Kg	-0,39
3.	2021	127.000 / kg	127.255 / kg	255 / kg	-	0,20
4	2022	127.000 / Kg	128.000 / Kg	1000 / Kg	-	0,80
5.	2023	127.500/kg	131.000/kg	3.500/kg	-	2,7

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap

Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Mikfish semakin meningkat, yaitu:

- Harus memiliki sertifikasi keamanan mutu produksi olahan hasil perikanan
- Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para pengolah.
- Melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan standart

29. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Berdasarkan data dari BPS Sidoarjo bahwa Tahun Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan adalah 16,22 dari target 16,08 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan.

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan, antara lain :

Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan ekspor non migas sebesar 2.84%, apabila dibandingkan dengan target 2.8%, maka tercapai 101%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana table berikut :

Tahun	2021	2022	2023
Target	0	2.5%	2.8%
Realisasi	3.4%	2.59%	2.84%
Capaian	0	101.92%	101%

Tren realisasi pertumbuhan ekspor non migas, sebagaimana grafik berikut :

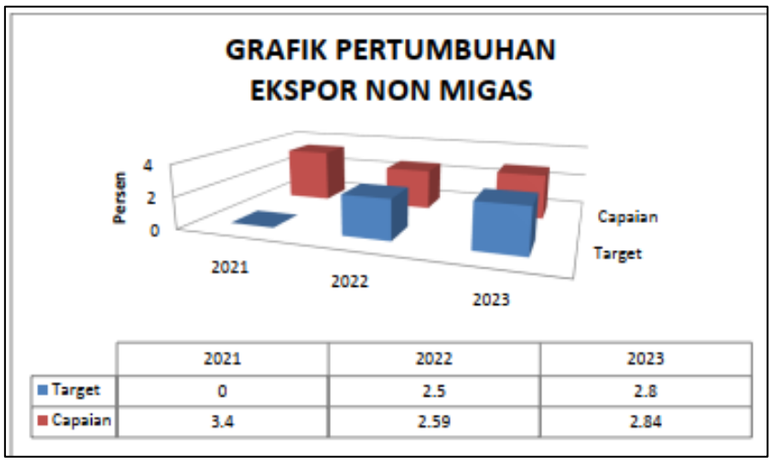

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab keberhasilan Hal–hal yang mengakibatkan dampak peningkatan Eksport Non Migas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan
2. Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor
3. Melaksanakan program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah
4. Pendampingan IKM memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Upaya optimalisasi pencapain target kinerja meningkatkan eksport :

1) Melakukan Pameran dagang ditingkat Nasional Internasional terhadap produk unggulan Sidoarjo;
2) Melakukan pembinaan/pemberdayaan UMKM yang beroreantasi Eksport;
3) Meningkatkan citra produk dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan eksport;
4) Memberikan pelatihan ekspor bagi UKM/IKM untuk meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor

Persentase Peningkatan UTTP yang di Tera / Tera Ulang

Persentase peningkatan UTTP yang di tera/tera ulang Tahun 2023 sebesar 0.51% Dapat diketahui bahwa realisasi UTTP Tera/ Tera Ulang Tahun 2023 sebesar 12.490 UTTP atau meningkat sebesar 0,51% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 12.427 UTTP. Berikut adalah tren realisasi pertumbuhan UTTP yang di tera/tera ulang sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023
Target	0.5%	0.5%	0.5%
Realisasi	0.5%	0.5%	0.51%
Capaian	0	100%	102%

Tren realisasi pertumbuhan ekspor non migas, sebagaimana grafik berikut :

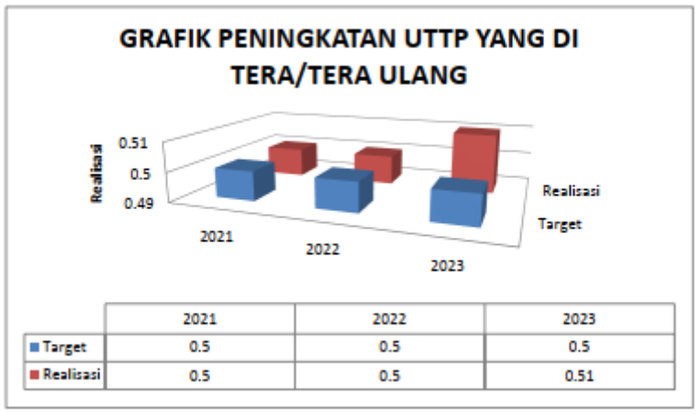

	2021	2022	2023
Target	0.5	0.5	0.5
Realisasi	0.5	0.5	0.51

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pasar

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 19 Pasar. Dinamakan dengan UPTD Pasar Daerah yang terbagi atas 4 (empat) Wilayah, antara lain :

- Wilayah Sidoarjo
- Wilayah Porong
- Wilayah Taman
- Wilayah Krian

ada Tahun 2023, hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar mendapatkan hasil **97,6 (sangat baik)**. Hal ini mengalami peningkatan dari hasil SKM Pelayanan Pasar Tahun 2022 dengan hasil 95,86 (Sangat Baik). Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan baik dari pengelola pasar maupun pedagang pasar.

Salah satu aspek yang dijadikan tolak ukur adalah perbaikan sarana dan prasaran pasar rakyat yang masuk dalam 44 kriteria pasar SNI, yaitu :

1	Jumlah Pedagang yang terdaftar	23	Tinggi anak tangga
2	Ukuran luas ruang dagang	24	Tinggi meja tempat berjualan
3	Jumlah pos	25	Akses untuk kursi roda
4	Zonasi	26	Jalur evakuasi
5	Area parkir	27	Tabung pemadam kebakaran
6	Area bongkar muat barang	28	Hidran air
7	Akses keluar masuk kendaraan	29	Pengujian kualitas air bersih
8	Lebar koridor	30	Pengujian limbah cair
9	Kantor pengelola	31	Ketersediaan tempat sampah

10	Lokasi toilet dan kamar madi (terpisah antara laki2 dan perempuan)	32	Alat angkut sampah
11	Jumlah toilet pada satu lokasi	33	TPS sementara
12	Tempat menyimpan bahan pangan basah	34	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
13	Tempat cuci tangan	35	Sarana telekomunikasi
14	Ruang menyusui	36	Informasi identitas pedagang
15	CCTV	37	Informasi kisaran harga
16	Ruang peribadatan	38	Informasi zonasi pasar
17	Ruang bersama	39	Prosedur kerja / sop
18	Pos kesehatan	40	Struktur pengelola
19	Pos keamanan	41	Jumlah pengelola
20	Area merokok	42	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
21	Ruang disenfektan	43	Program pengembangan pasar
22	Area penghijauan	44	Program pemberdayaan komunitas pasar

Dari 44 parameter kriteria Pasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 19 Pasar Rakyat di Tahun 2020 terdapat 1 pasar yang ditetapkan sebagai Pasar SNI yaitu Pasar Sukodono, dan 2 pasar lainnya yang berparameter sangat tinggi adalah Pasar Porong, dan Pasar Gedangan.

Upaya pembenahan pasar kearah pasar dengan para meter tinggi dan sangat tinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna pasar.

Pemenuhan Kriteria Pasar SNI

No	Kriteria Pemenuhan Target SNI Tahun	Jumlah Pasar	Rendah (10 Indikator)	Sedang (11-20 Indikator)	Tinggi (21-30 Indikator)	Potensi Sangat Tinggi (31-44 Indikator)
1	2020	19	0	10	6	3
2	2021	19	0	10	6	3
3	2022	19	0	10	6	3
4	2023	19	0	10	6	3

Pasar rakyat dengan parameter rendah adalah pasar rakyat yang memenuhi Kriteria Pasar SNI 1-10 indikator. Pasar Rakyat dengan Parameter sedang adalah pasar yang memenuhi 11-20 Kriteria Pasar SNI. Pada Tahun 2021 terdapat 10 Pasar yang berada pada parameter sedang. Pasar Rakyat dengan Parameter tinggi adalah pasar yang memenuhi 21-30 Kriteria Pasar SNI, pada Tahun 2021 terdapat 6 pasar yang berparameter tinggi. Sedangkan pasar yang berpotensi sangat tinggi adalah pasar rakyat yang memenuhi kriteria Pasar SNI sebanyak 31-44 Kriteria Pasar SNI, dan pada Tahun 2021 terdapat 3 pasar yang berparameter sangat tinggi yaitu Pasar Sukodono, Pasar Porong, dan Pasar Gedangan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka SKM layanan pasar meningkat:

1. Optimalisasi tertib pasar, keamanan dan kebersihan pasar dalam rangka memberikan kenyaman pasar bagi para penjual dan pembeli;
2. Peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan
3. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat dan konsumen

30. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri

Berdasarkan data dari BPS Sidoarjo bahwa Tahun 2023 Persentase kontribusi PDRB sektor industri adalah 52,81 dari target 52,11 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan.

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan Persentase kontribusi PDRB sektor industri, antara lain :

Persentase Pertumbuhan Usaha Industri

Capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha Industri pada tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 1.75% atau sebanyak 160 IKM dari target 0.93% atau sebanyak 160 IKM. Hal ini menunjukkan capaian sebesar 159%. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pendampingan IKM dan memberikan kemudahan pengurusan perizinan usaha industri melalui pemberian rekomendasi verifikasi teknis serta fasilitasi standarisasi bagi IKM.

Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebanyak 17.521 unit/usaha. Jumlah ini meningkat 144 unit/usaha atau meningkat sebesar 1.75% dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2022 yang sebanyak 17.217 unit/usaha.

Berikut adalah tren realisasi pertumbuhan usaha industri sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023
Target	1,52% (17.200 IKM)	0.93% (17.377 IKM)	1.1% (17.519 IKM)
Realisasi	1,98% (17.217 IKM)	0.93% (17.377 IKM)	1.75% (17.521 IKM)
Capaian	130.26	100%	159%

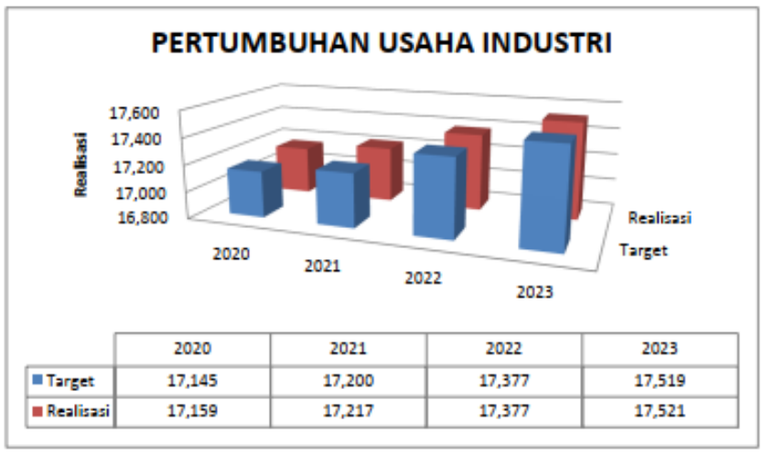

	2020	2021	2022	2023
Target	17,145	17,200	17,377	17,519
Realisasi	17,159	17,217	17,377	17,521

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu **:**

- Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menegah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
- Memetakan pembangunan / pembentukkan *cluster* baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka klestarian produk dan menaikkan omzet;
- Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab keberhasilan. Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu :

1. Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menegah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
2. Memetakan pembangunan / pembentukkan cluster baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka klestarian produk dan menaikkan omzet;
3. Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standardisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.

IKM naik kelas

IKM naik kelas adalah upaya yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendorong dan meningkatkan IKM agar mampu meningkatkan penjualan dan atau modal menjadi lebih tinggi. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada tahun 2023, IKM Naik kelas sebanyak 401 IKM, apabila dibandingkan dengan target 400 IKM, maka tercapai 100.3%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 700 IKM, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 401 IKM dengan persentase capaian sebesar 57,29%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	2021	2022	2023
Target	-	300 IKM	400 IKM
Realisasi	-	300 IKM	401 IKM
Capaian	-	100%	100,3%

Sumber Data : Disperindag Kab. Sidoarjo

Upaya untuk memperbanyak IKM yang naik kelas, yaitu **:**

- Fasilitasi pelatihan desain produk, sertifikasi produk, inovasi produk, dan sistem manajemen mutu produk bagi IKM;
- Fasilitasi Standarisasi Produk IKM.

Berikut rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan jumlah IKM yang naik kelas di tahun 2023 :

No.	Nama Kegiatan	Realisasi
1	Bimbingan Teknis Ijin Edar dan Penentuan Masa Kadaluwarsa	18 IKM
2	Bimbingan Teknis Pembuatan SOP bagi IKM	16 IKM
3	Bimbingan Teknis Izin Edar BPOM	20 IKM
4	Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal	40 IKM
5	Pelatihan Desain Produk Kulit	12 IKM
6	Pelatihan Desain Produk Pangan dan Teknologi Kemasan	30 IKM
7	Sosialisasi HKI	40 IKM
8	Pendaftaran Merek	96 IKM
9	Pengujian Laboratorium Produk IKM	49 IKM
10	Link and Match IKM	20 IKM
11	Pengembangan dan Benchmarking Produk Fashion	10 IKM
12	Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Industri melalui SiINAS	50 IKM
	Total	401 IKM

31. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya.

Padat Tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mendapat predikat Sangat Inovatif dan berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kategori Sangat Inovatif.

Berikut perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo :

	2021	2022	2023
Target	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF	SANGAT INOVATIF
Realisasi	*INOVATIF*	*SANGAT INOVATIF*	*SANGAT INOVATIF*

Apabila digambarkan dalam grafik, sebagai berikut :

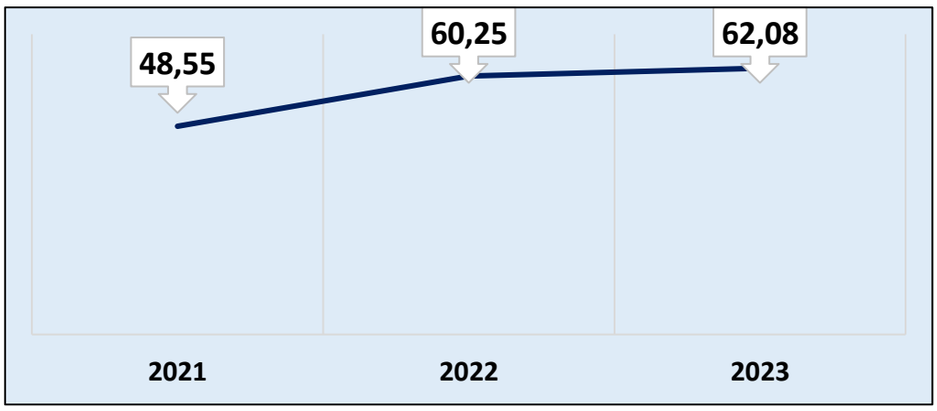

Sumber Data : Hasil IID Kemendagri

Meskipun capaian IID Kabupaten Sidoarjo Th 2023 meningkat, tetapi secara nasional peringkatnya turun dari peringkat 23 (2022) menjadi peringkat 27 (2023). Sedangkan perkembangan jumlah inovasi melalui partisipasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

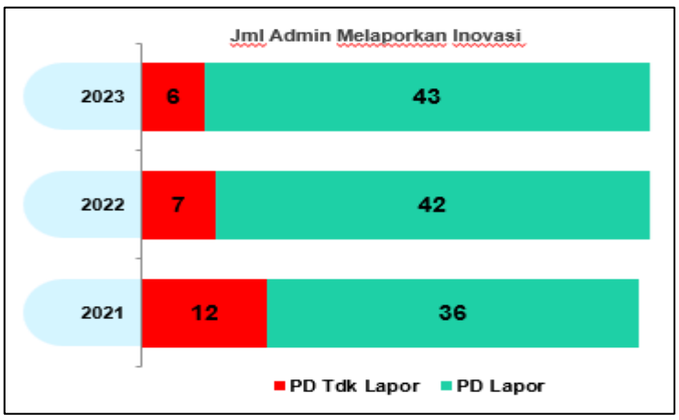

Partisipasi PD dalam pelaporan inovasi meningkat setiap tahun dari 75% (2021), menjadi 85,71% (2022), dan 87,76% (2023).

Upaya untuk optimalisasi pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2024, antara lain :

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi
   - Mengingat 16 Kabupaten Terinovatif mengirimkan 200 inovasi
   - Mengingat bbrp inidikator mandatory masih menggunakan bukti dukung seadanya
2. Mengoptimalkan Partipasi PD

   Mengingat Perbup 31/2023 mengamanatkan bahwa 1 PD 1 inovasi tiap tahun
3. Meningkatkan Partisipasi Inovator

   Menjadikan KISI sebagai agenda rutin tahunan dan wadah innovator mengaktualisasikan diri dan menyediakan stok inovasi daerah
4. Menjaga Keberlanjutan Inovasi

   Inovasi yg telah diterapkan didorong utk terus melakukan update/upgrade

C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Program prioritas dimaksud, merupakan langkah percepatan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026. Adapun Program Prioritas dimaksud, hasil keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru

Prioritas dimaksud bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pencetakan wirausaha baru dari hasil pelatihan kerja, maupun penempatan tenaga kerja melalui lowongan usaha / bursa kerja / perjanjian kerja. Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	AKUMULASI (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
18.447 Lapangan Kerja	31.701 Lapangan Kerja	41.649 Lapangan Kerja	91.797 Lapangan Kerja	25.300 Lapangan Kerja

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

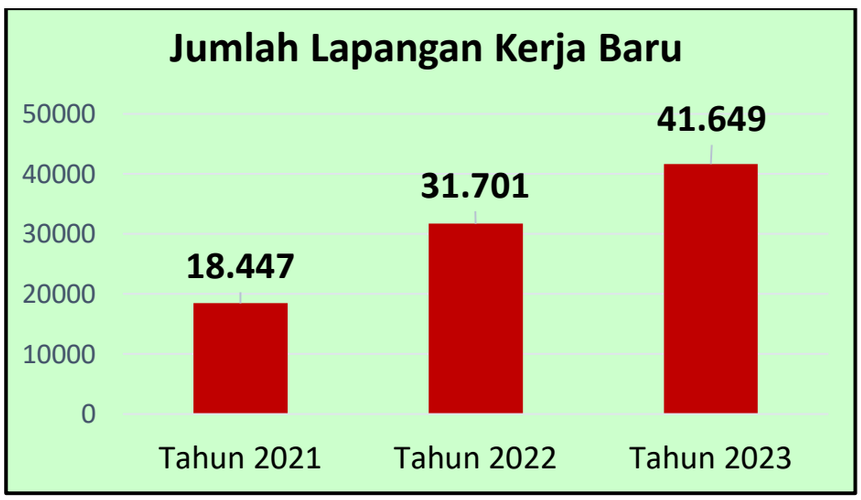

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- Dinas Tenaga Kerja;
- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Perikanan; dan
- Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan adanya penciptaan Lapangan Kerja Baru maka berdampak pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo yang pada Tahun 2023 mencapai angka 8,05% menurun dari Tahun 2021 10,87%.

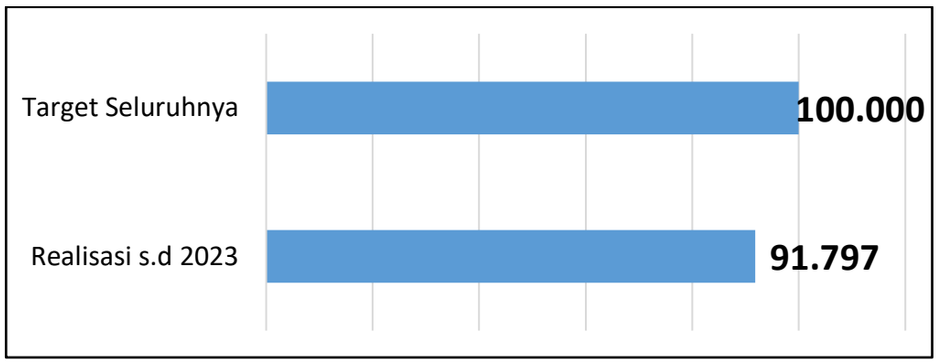

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 100.000 Lapangan Kerja Baru, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 91.797 Lapangan Kerja Baru, sehingga hanya ada Gap 8.203 Lapangan Kerja Baru.

Adapun 41.649 Lapangan Kerja Baru di Tahun 2023, meliputi :

a) Lapangan Kerja Baru dari Pencetakan Wirausaha Baru Hasil Pelatihan sebanyak 2.120 Lapangan Kerja
b) Lapangan Kerja Baru dari Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 37.081 Lapangan Kerja
c) Lapangan Kerja Baru dari Lowongan CASN sebanyak 2.448 Lapangan Kerja

2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

Prioritas dimaksud bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang merata.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
330.795 Orang	66.519 Orang	69.750 Orang	153.085 Orang (UHC non cut off)

UHC non cut off dimaksud adalah masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepersertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kesehatan.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

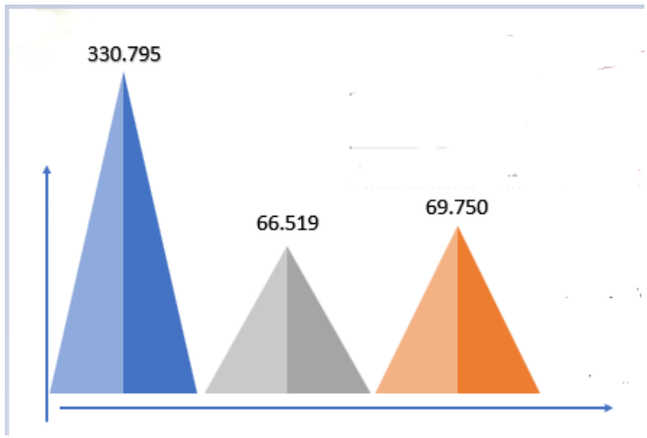

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Usia Harapan Hidup, yang pada tahun 2023 mencapai 75,36 tahun meningkat dari Tahun 2021 yang masih mencapai angka 74,06 tahun

Sebanyak 153.229 jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerimah Upah (PBPU) dan bukan pekerja Pemerintah Daerah.

Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan.

Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berupa pemberian makanan dan minuman gratis yang diberikan kepada penduduk miskin (PMKS Lansia Terlantar).

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Sosial.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
730 orang per hari 2 kali makan	730 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan

Sebanyak 730 orang miskin di Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan makan gratis dengan gizi lengkap setiap hari 2 kali dalam sehari.

Keberhasilan kinerja berdampak pada menurunnya Angka Kemiskinan, yang selalu menurun dari Tahun 2021 5,93% pada Tahun 2023 menjadi 5,00%

Pemberian makanan gratis diberikan kepada PMKS Lansia Terlantar yang terdata pada database Dinas Sosial melalui BERKAT SAYANG.

Makanan yang disajikan sudah memenuhi unsur gizi dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

4. 10.000 Beasiswa Kuliah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian beasiswa untuk : pemuda berprestasi, mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, dan mahasiswa dari keluarga miskin.

Beasiswa diberikan untuk 3 sasaran, yaitu :

1. Untuk penduduk miskin
2. Untuk penduduk yang berprestasi di bidang keagamaan
3. Untuk pemuda berprestasi.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan sasaran beasiswa, yaitu untuk pemuda berprestasi yang kuliah di Luar Negeri.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target	Tahun 2022	Tahun 2023	AKUMULASI (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
Jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	497 orang	493 orang	990 orang	503 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	1.000 orang	1.000 orang	2.000 orang	1.000 orang
Jumlah pemuda berprestasi bidang keagamaan yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	357 orang	650 orang	1.007 orang	500 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang berkuliah di Luar Negeri, menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	-	-	-	30 orang
TOTAL	**1.854 orang**	**2.143 orang**	**3.997 orang**	**2.033 orang**

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- Dinas Sosial; dan
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2021 mencapai 80,65 dan pada Tahun 2023 mencapai 81,88 yang merupakan angka tertinggi untuk Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

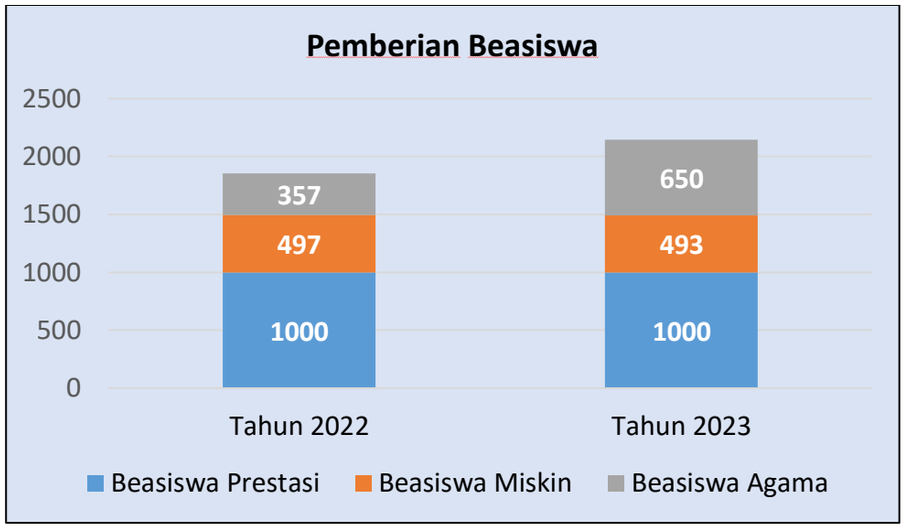

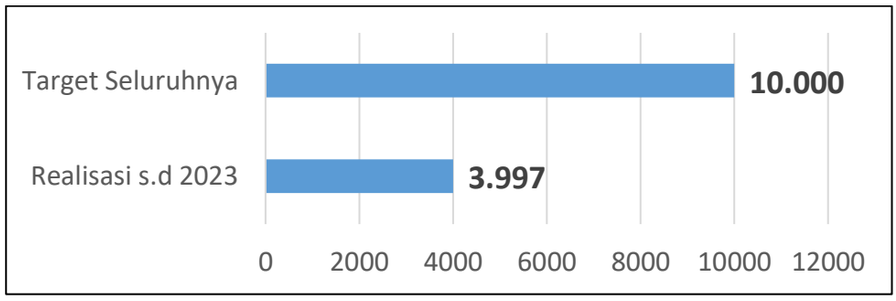

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 10.000 Beasiswa, sampai dengan Tahun 2023 sudah diberikan 3.997 Beasiswa, sehingga masih ada Gap 6.003 Beasiswa yang akan diberikan pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pada tahun 2024 terdapat tambahan spesifikasi beasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang berprestasi yang kuliah di Luar Negeri yaitu sebanyak 30 beasiswa.

5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Sidoarjo melalui peningkatan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Agama dengan memberikan insentif / tambahan penghasilan.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
8.351 orang	9.677 orang	10.023 Orang	10.167 Orang

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Keberhasilan kinerja berdampak meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial, yang pada Tahun 2023 tercapai 85,15 meningkat dari Tahun 2021 82,03

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

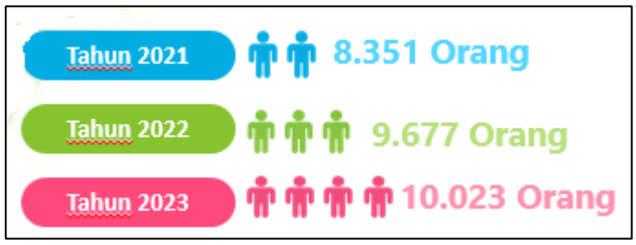

6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro mandiri melalui pemberdayaan perempuan sebagai penggerak usaha mikro dengan pemberian modal usaha, yaitu dengan Program KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri).

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.891 kelompok	2.993 Kelompok	2.400 kelompok

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

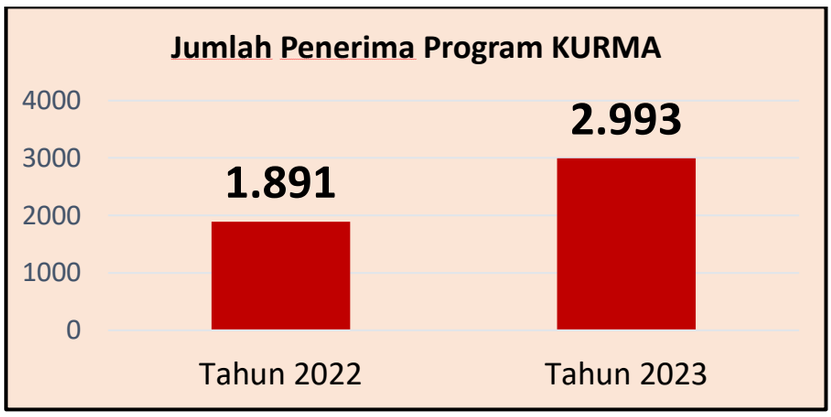

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dimana pada Tahun 2023 mencapai 6,16%.

7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga Desa / Kelurahan melalui peran aktif RT dengan memberikan biaya operasional.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2023	Target Tahun 2024
730 RT dari 4 Kecamatan	8.041 RT dan 1.902 RW dari 18 Kecamatan

Pada tahun anggaran 2023, alokasi insentif diberikan untuk seluruh RT di Kelurahan se Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan insentif Rp.500.000,- setiap Bulan.

Sedangkan mulai tahun 2024, akan diberikan biaya operasional untuk 8.041 RT dan 1.902 RW dari 18 Kecamatan se – Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi RT untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penyerahan Bantuan Sound System
- Sosialisasi Lomba RT

8. 20.000 UMKM Naik Kelas

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM agar naik kelas dengan memberi bekal pembinaan dan pelatihan.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TOTAL (2021 + 2022 + 2023)	Target Tahun 2024
1.664 UMKM	5.533 UMKM Disperindag : 900 UMKM Diskop : 4.633 UMKM	5.185 UMKM Disperindag : 901 UMKM Diskop : 4.284 UMKM	12.382 UMKM	4.340 UMKM Disperindag : 340 UMKM Diskop : 4.000 UMKM

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sama dengan Program Kurma, Program UMKM Naik Kelas juga berdampak pada meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dimana untuk Tahun 2023 mencapai 6,16%.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

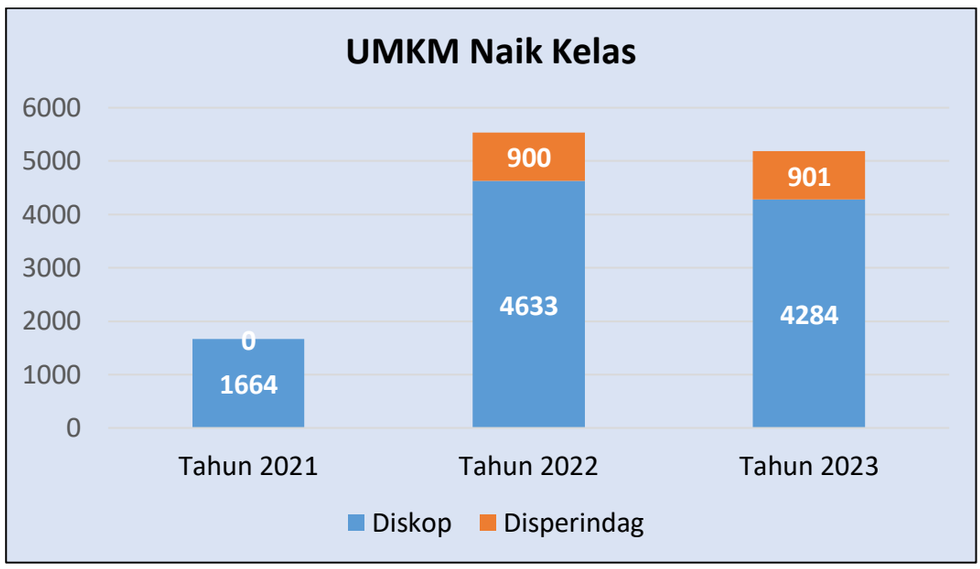

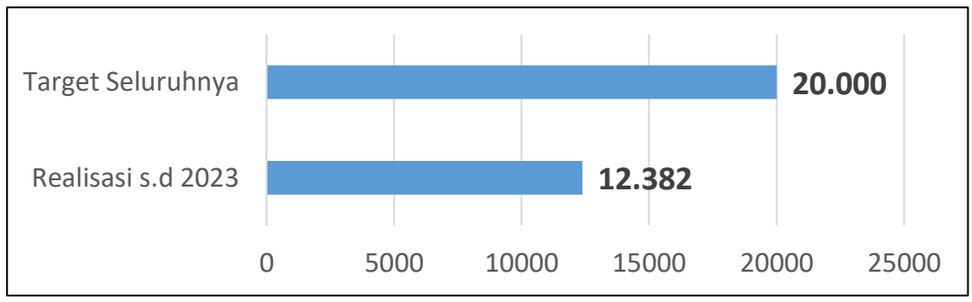

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 20.000 UMKM yang Naik Kelas, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 12.382 UMKM yang naik kelas, sehingga masih ada Gap 7.618 UMKM yang akan diupayakan untuk naik kelas sampai sampai dengan Tahun 2026.

Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan UMKM Naik Kelas, diantaranya adalah :

- Bimbingan Teknis Kurasi Produk
- Pelatihan Pemasaran Online
- Sosialisasi Bahan Tambahan Pangan
- Uji SKKNI Skema Pemasaran
- Uji SKKNI Skema Penjamah Makanan
- Pelatihan Kemasan / Packaging
- Bimbingan Teknis Bahan Tambahan Pangan
- Wira Usaha Baru (WUB)
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PKL
- Pelatihan Membatik
- Fasilitasi Halal
- Fasilitasi Pendaftaran Merek
- Pelatihan Sistem Manajemen Mutu
- Fasilitasi Uji Lab Produk IKM
- Verifikasi Teknis dalam rangka penerbitan IUI melalui SIINas
- Sosialisasi Legalitas Usaha, HKI, dan Standarisasi
- Bimbingan Teknis Uji Edar dan Oenentuan Masa Kadaluwarsa Produk Pangan
- Pelatihan Desain Produk Kulit
- Pengembangan dan Benchmarking Produk Fashion
- Bimbingan Teknis Izin Edar BPOPM
- Bimbingan Teknis Pembuatan SOP bagi IKM
- Link dan Match
- Pelatihan e-Commerce dan Branding

- Pelatihan Search Engine Optimization dan Kiat – Kiat Berdagang Online
- Pelatihan Pendampingan Penyusunan Profil IKM
- Sosialisasi Peningkatan Citra Produk Ekspor
- Pembinaan Ekspor secara Konvensional dan Online
- Sosialisasi Prosedur Ekspor
- Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan
- Business Matching
- Sosialisasi Peningkatan Citra Produk Eksport
- Sosialisasi Pembinaan Ekspor Secara Konvensional dan Online

IKM dari Kabupaten Sidoarjo yang sudah menembus pasar ekspor ada 116 IKM, yaitu :

1. CV. BOLU KETAN MENDUT, dengan produk Keripik Bolu Ketan yang berhasil ekspor dengan tujuan Perth, Australia
2. CV. INDIGO SEJAHTERA, dengan produk Mie Telor yang berhasil ekspor dengan tujuan Jeddah, Saudi Arabia
3. UMSIDA, dengan produk Tanaman Hias yang berhasil ekspor dengan tujuan Amerika Serikat
4. PT. CMN INTERNASIONAL INDONESIA, dengan produk Wadah Kemasan Plastik ”Moorlife” yang berhasil ekspor dengan tujuan Filipina.

9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai di Kabupaten Sidoarjo melalui : betonisasi jalan, pembangunan jalan pendamping (frontage road), pembangunan fly over, peningkatan sarana prasarana perhubungan, dan lain sebagainya.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.290 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	16.132,20 meter

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	3.003,9 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	23.305 meter

Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	837 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.093 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	24.950,72 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	10 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	848 titik
Pembangunan Fly Over	Fly Over Juanda Fly Over Krian Fly Over Tarik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	2.000 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	25.630 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	16 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	412 titik

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air;
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Infrastruktur, yang pada tahun 2023 mencapai 0,843 mengalami peningkatan yang tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang masih berada pada angka 0,793

Pembangunan Frontage Road Waru – Buduran

Total Lahan yang telah dibebaskan adalah 20.063 meter persegi, dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

Pembebasan Lahan Frontage	
Tahun 2021	4.772 m2
Tahun 2022	5.637 m2
Tahun 2023	9.654 m2

Total dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dibangun Frontage Road sepanjang 5.386,9 meter, dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

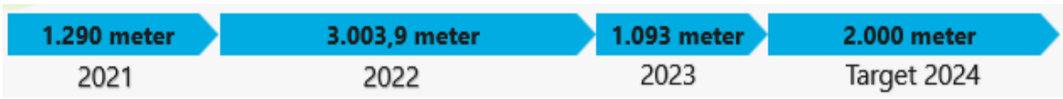

Betonisasi Jalan

Dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dilakukan Pembangunan Betonisasi Jalan sepanjang 64.387,92 meter, dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

Adapun pembangunan betonisasi jalan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarasri s/d Sentul – SENTUL sepanjang 765,5 meter
2. Peningkatan Jalan RT.4 dan 8 Desa Tambak Oso sepanjang 194 meter
3. Peningkatan Jalan Ruas jalan Banjarasri dari KUD Mina Dwisamudra ke Timur - BANJAR ASRI sepanjang 250 meter
4. Peningkatan Jalan Desa Tambak Sumur sepanjang 260 meter
5. PENINGKATAN JALAN NGABAN - KEDUNG BANTENG (LJT) sepanjang 635 meter
6. Peningkatan jalan Sepanjang jalan mangga s/d jl gadung desa wage sepanjang 120,5 meter
7. PENINGKATAN JALAN GANTING - WAGE (DESA BOHAR) (LJT) sepanjang 950 meter
8. PENINGKATAN JALAN BETRO - DAMARSI (DESA KWANGSAN) RUAS NO 047 sepanjang 900 meter

9. PENINGKATAN JALAN BETRO - KALANGANYAR (LJT) (DAK) sepanjang 666 meter
10. PENINGKATAN JALAN KEBON AGUNG - KEMASAN(LJT) sepanjang 1.737 meter
11. PENINGKATAN JALAN WONOPLINTAHAN-JEDONGCANGKRING sepanjang 2.251 meter
12. Peningkatan Jalan Taruna Desa Wage sepanjang 535 meter
13. Peningkatan Jalan Jeruk s/d Jl. Mangga Desa Wage sepanjang 352 meter
14. Peningkatan Jalan Dsn Suko Legok RT 15 RW 05 Desa Suko sepanjang 225 meter
15. PENINGKATAN JALAN KEBON AGUNG - SUKODONO (LJT) PAJAK ROKOK sepanjang 695 meter
16. PENINGKATAN JALAN GEDANGAN - BETRO (LJT) sepanjang 538 meter
17. Peningkatan Jalan Mandala RW.04 dan RW.05 Desa Semambung sepanjang 564 meter
18. Pembangunan Jalan RW.5 - 6 Desa Semambung - Gedangan – SEMAMBUNG sepanjang 145 meter
19. Peningkatan Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (085) – TENGGULUNGAN sepanjang 433 meter
20. PENINGKATAN JALAN PILANG - SAWO CANGKRING (PAJAK ROKOK) sepanjang 767 meter
21. PENINGKATAN JALAN KREMBUNG - KEPADANGAN (LJT) sepanjang 447 meter
22. Peningkatan jalan Ds. Tebel s/d Ds. Kragan – TEBEL sepanjang 470 meter
23. Peningkatan Jalan A. Yani depan Balai desa Medaeng Evaluasi Ulang sepanjang 191 meter
24. Peningkatan Jalan Aryo Bebangah (Desa Bangah RW 01, 03, 04) sepanjang 262 meter
25. Peningkatan Jalan Wadungasri – Tambaksumur sepanjang 207 meter

Tahun 2022

1. Ruas Jalan Pawindo – Jatikalang sepanjang 639,00 meter
2. Ruas Jalan Tulangan – Kepadangan, Kepadangan – Bulang, Simpang Tiga Tulangan sepanjang 6.335,00 meter
3. Ruas Jalan Betro - Kalanganyar (DAK) sepanjang 922,40 meter
4. Ruas Jalan Pilang - Tulangan sepanjang 1.020,10 meter
5. Ruas Jalan Kebonagung - Kemasan sepanjang 5.099,50 meter
6. Ruas Jalan Pabean - Wadungasri sepanjang 532,00 meter

7. Ruas Jalan Krian - Kemangsen sepanjang 476,20 meter
8. Ruas Jalan Pabean - Ngingas sepanjang 835,00 meter
9. Ruas Jalan Wonoayu - Candinegoro sepanjang 875,00 meter
10. Ruas Jalan Panjunan - Suko (DAK) sepanjang 1.855,60 meter
11. Ruas Jalan Panjunan - Suko sepanjang 556,00 meter
12. Ruas Jalan Krembung - Kepadangan sepanjang 469,80 meter
13. Ruas Jalan Semambung -Sedatigede (Ljt) sepanjang 302,50 meter
14. Ruas Jalan Tenggulunan - Sugihwaras (Ljt) sepanjang 217,40 meter
15. Ruas Jalan Durungbedug - Sidodadi sepanjang 887,20 meter
16. Jalan Akses Ex Tol Menuju Tlocor sepanjang 150,36 meter
17. Ruas Jalan Sidorejo - Barengkrajan sepanjang 1.969,00 meter
18. Ruas Jalan Desa Tambak Sawah RT.03 RT.04 Rw.02, Kab. Sidoarjo, Waru, Tambaksawah sepanjang 502,00 meter
19. Ruas Jalan Masanganwetan Menuju Dusun Wagir, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Masanganwetan sepanjang 133,00 meter
20. Ruas Jalan Sepanjang Jalan RT 13, 14, 15, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko sepanjang 118,75 meter
21. Ruas Jalan Sepanjang Jalan Suko RT 15 RW 05, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko sepanjang 105,00 meter
22. Pembangunan Gorong-Gorong Desa Kali Tengah RT.01 RW.01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin, Kalitengah sepanjang 205,00 meter
23. Jalan Desa Tulangan-Medalem, Kab. Sidoarjo, Tulangan, Tulangan, Seluruh Kelurahan/Desa sepanjang 318,30 meter
24. Jalan Dusun Sangangewu RT 04 RW 01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin sepanjang 183,50 meter
25. Jalan Masanganwetan RT 03 Menuju Masangankulon, Kab. Sidoarjo, Masanganwetan sepanjang 81,40 meter
26. Jalan Ngingas, Waru sepanjang 924,00 meter
27. Ruas Jalan Gedangan - Betro sepanjang 531,00 meter

Tahun 2023

1. Peningkatan Jalan Kwangsan (Ljt), untuk segmen 1 sepanjang 475 meter dan segmen 2 sepanjang 391,5 meter
2. Peningkatan Jalan Banjarsari – Damarsi sepanjang 1.833,42 meter
3. Peningkatan Jalan Tulangan - Durungbedug sepanjang 1.597,70 meter
4. Peningkatan Jalan Tropodo I sepanjang 933,50 meter

5. Peningkatan Jalan Krembung – Mojoruntut (DAK), untuk segmen 1 sepanjang 1.251,2 meter, segmen 2 sepanjang 791,3 meter (aspal) dan 100,7 meter (rigid)
6. Peningkatan Jalan Banjarpanji, Tanggulangin sepanjang 950 meter
7. Peningkatan Jalan Geluran – Suko, untuk segmen 1 sepanjang 1.057,1 meter dan segmen 2 sepanjang 498,3 meter
8. Peningkatan Jalan Bringinbendo – Tanjungsari (DAK) sepanjang 705,50 meter
9. Peningkatan Jalan Tarik – Mlirip sepanjang 5.698,80 meter
10. Peningkatan Jalan Desa Krembangan Kab. Sidoarjo (Ulang) sepanjang 29 meter
11. Peningkatan Jalan Semambung I Kab. Sidoarjo sepanjang 128 meter
12. Juwetkenongo – Krembung (Realisasi IJD PJBH JS 2 2023), untuk sektor Krembung 2 sepanjang 5.428 meter dan untuk sektor Krembung 1 sepanjang 3.873 meter

Dengan semakin masifnya pembangunan betonisasi jalan, maka persentase jalan dengan kondisi mantap di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 mencapai angka 97,35%. Angka tersebut masih akan terus naik dengan adanya target betonisasi jalan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yang antara lain meliputi :

1. Peningkatan Jalan Modong – Grabagan (DAK)
2. Peningkatan Jalan Masanganwetan – Sukodono (DAK)
3. Peningkatan Jalan Banjarsari – Dukuhtengah (Lanjutan)
4. Peningkatan Jalan Kludan – Tulangan
5. Peningkatan Jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring (Ljt)
6. Pelebaran Jalan Akses Jabon
7. Peningkatan Jalan Candinegoro – Terungkulon
8. Peningkatan Jalan Dusun Delik Desa Seduri s.d Dusun Girang Desa Wonokupang
9. Peningkatan Jalan Dukuhsari – Semambung
10. Peningkatan Jalan Pilang - Sawocangkring

Berikut peta Penanganan Jalan Beton sampai dengan Tahun 2023 :

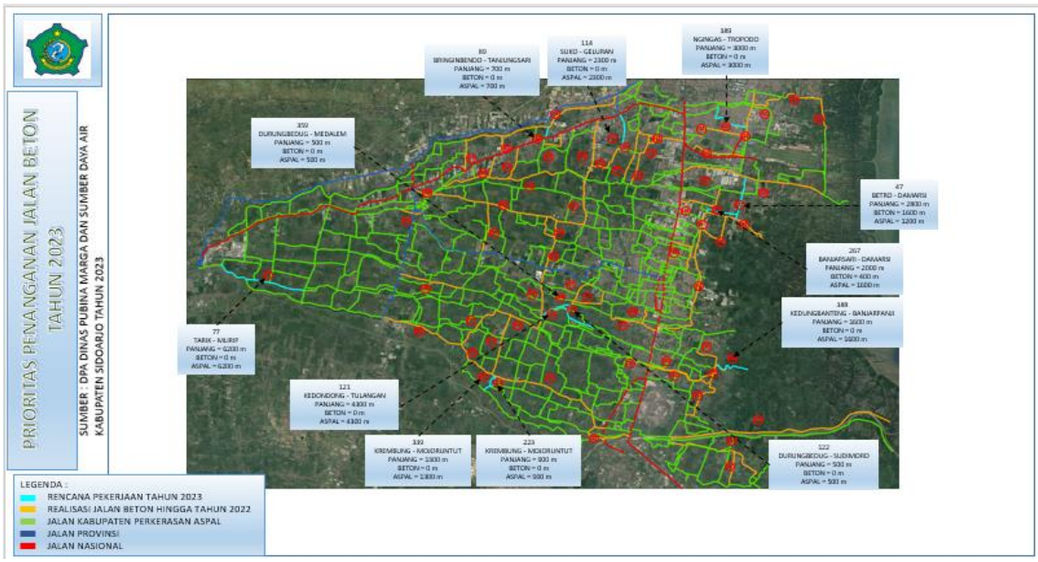

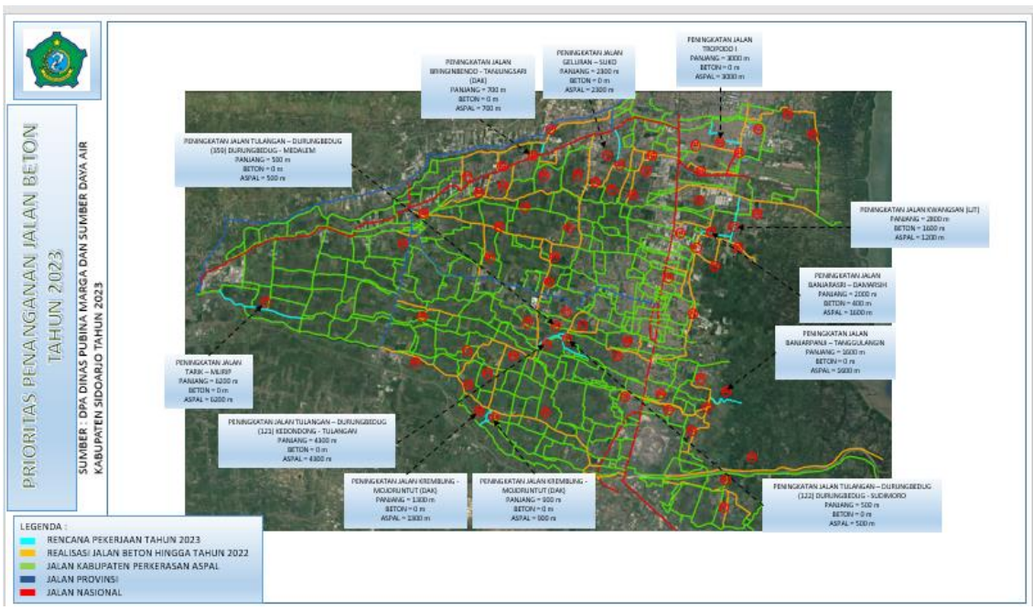

Pembangunan Fly Over

Pembangunan Fly Over bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi waktu tempuh.

Dengan adanya Fly Over Juanda, Fly Over Tarik, dan Fly Over Krian diharapkan dapat mengurangi kemacetan terutama di area sekitar Gedangan, perlintasan kereta api Krian dan Tarik.

Fly Over Tarik

Fly Over Juanda

Fly Over Krian

10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu dengan memberikan honorarium bulanan dan pembinaan.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
Tahun 2021	606 kader	(belum ada pemberian)
Tahun 2022	7.198 kader	133 nakes
Tahun 2023	12.579 kader	210 nakes
Target Tahun 2024	12.633 kader	225 nakes

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

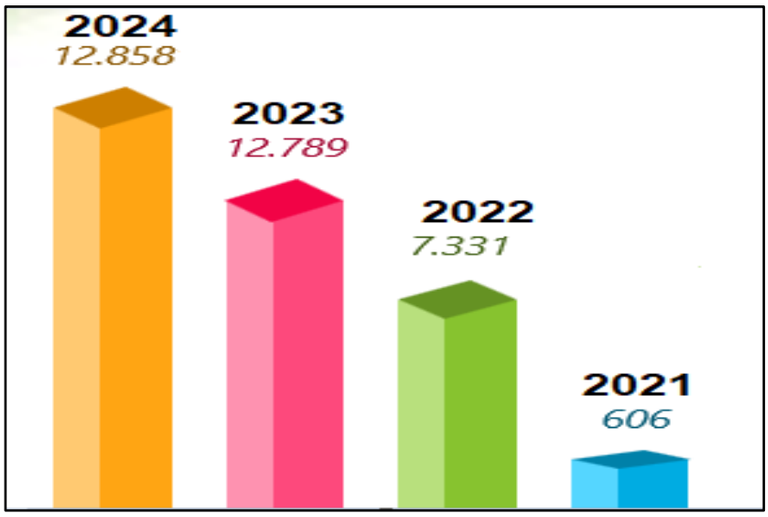

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kesehatan.

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Usia Harapan Hidup, yang pada tahun 2023 mencapai 75,36 tahun meningkat dari Tahun 2021 yang masih mencapai angka 74,06 tahun.

Insentif yang diberikan kepada nakes sebesar Rp. 250.000,- per bulan yang diterima langsung selama enam bulan sebesar Rp. 1.500.000,-. Sedangkan kader kesehatan posyandu mendapatkan honor Rp. 30.000,- perbulan juga diterima langsung selama 6 bulan.

Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu merupakan perhatian dan atensi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer dengan memberikan honorarium bulanan dan insentif.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
12.834 orang	9.837 orang	13.206 orang	14.605 orang

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

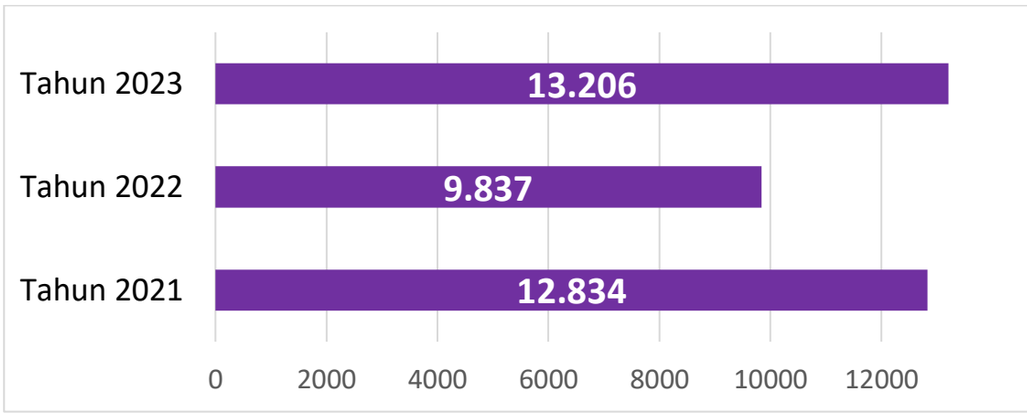

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, yang pada Tahun 2023 sudah mencapai 98,32%

12. Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan memfasilitasi kreativitas para pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni budaya.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah berupa event kepemudaan yang diselenggarakan, sebagai berikut :.

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
❑ POPDA XIII & PEPARPEDA I Jawa Timur ❑ Jayandaru Youth Night Paradise	❑ PORPROV VIII Jawa Timur ❑ Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)	❑ Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya jumlah prestasi pemuda yang diperoleh, sebagai berikut :

- Tahun 2021 : 464 Prestasi
- Tahun 2022 : 613 Prestasi
- Tahun 2023 : 501 Prestasi

Pada PORPROV VIII Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memperoleh 680 medali, yang terdiri dari :

- Medali Emas : 97 medali
- Medali Perak : 90 medali
- Medali Perunggu : 112 medali

Medali tesebut diperoleh melalui cabang olahraga, sebagai berikut :

- Pencak silat : emas, perak
- Aeromodeling : emas
- Tae Kwon Do : emas, perak, perunggu
- Hapkido : emas, perak, perunggu
- Petanque : emas, perak, perunggu
- Arung Jeram : emas, perak, perunggu
- Dancesport : emas, perak, perunggu
- Berkuda : emas, perak, perunggu
- Sepatu Roda : emas, perak, perunggu
- Renang : emas, perak, perunggu
- Atletik : emas, perak, perunggu
- Biliar : emas, perak, perunggu
- Bola Voli Pantai : emas, perak
- Angkat Besi : emas, perak, perunggu
- Anggar : emas, perak, perunggu
- Senam : emas, perak, perunggu
- Tarung Derajat : emas, perak, perunggu
- Sepak Takraw : emas, perak, perunggu
- Jujitsu : emas, perak, perunggu
- Gate Ball : emas, perak, perunggu
- Karate : emas, perak, perunggu
- Kick Boxing : emas, perak, perunggu

- Muaythai : emas, perak, perunggu
- Angkat Berat : emas, perak, perunggu
- Selam : emas, perak, perunggu
- Wushu : emas, perak, perunggu
- Sepak Bola : emas
- Catur : emas, perak, perunggu
- Panahan : emas, perak, perunggu
- Bola Voli Indoor : emas, perunggu
- Binaraga : emas, perak
- Sambo : emas, perak, perunggu
- Futsal : emas
- Kurash : emas, perak, perunggu
- IBCA MMA : emas
- Bola Basket : perak, perunggu
- Tenis Meja : perak, perunggu
- Menembak : perak
- E-Sport : perak, perunggu
- Bulutangkis : perak, perunggu
- Drumband : perunggu
- Balap Sepeda : perunggu
- Dayung : emas, perak, perunggu
- Judo : perunggu
- Bola Tangan : perunggu
- Tenis Lapangan : perunggu
- Woodball : emas, perak, perunggu

Sedangkan untuk prestasi kepemudaan, salah satu pemuda dari Kabupaten Sidoarjo, YASINTA AURELIA berhasil Puteri Indonesia Lingkungan 2023 dan mengikuti kompetisi Miss Supranational 2023 di Polandia, berhasil memperoleh penempatan dalam 24 Besar dengan urutan posisi ke-19.

Sebagai wadah komunitas pemuda di Kabupaten Sidoarjo dalam mengkoordinasikan kegiatannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memfasilitasi Youth Center, yang dibangun satu lokasi dengan kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan warung / usaha perdagangan rakyat dengan memberikan pendampingan, bantuan dan renovasi.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TOTAL (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
150 Warung	402 Warung	422 Warung	974 Warung	400 rung

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sama dengan Program Kurma dan Program UMKM Naik Kelas, Program Bedah Warung juga berdampak pada meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dimana untuk Tahun 2023 mencapai 6,16%

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

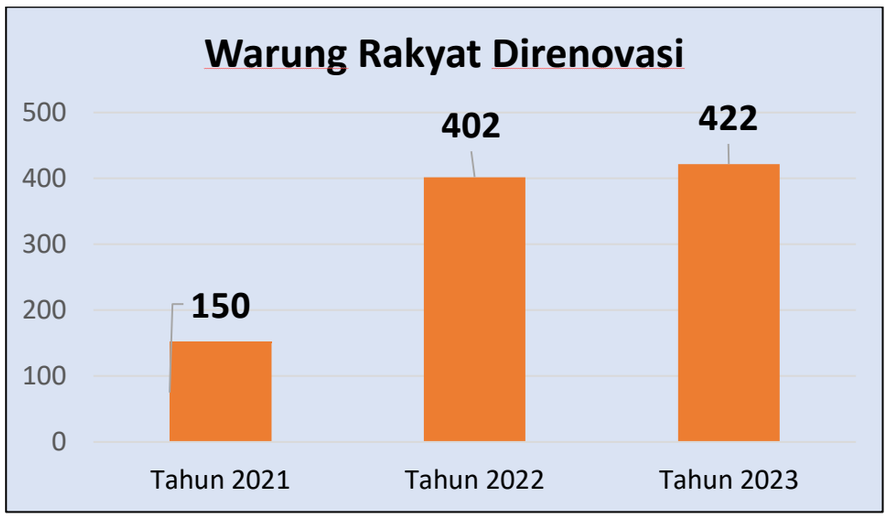

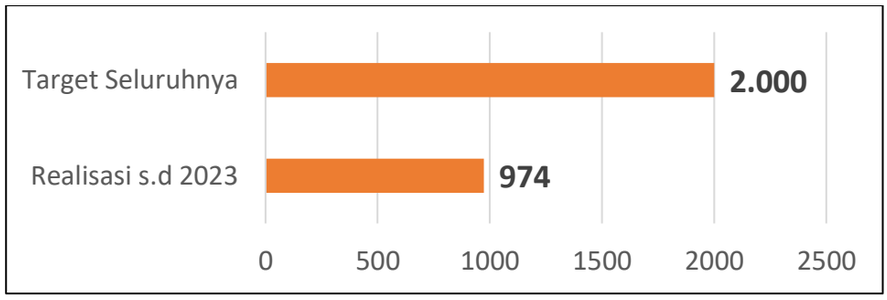

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 2.000 warung yang akan direnovasi, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 974 warung, sehingga masih ada Gap 1.026 warung yang direnovasi sampai sampai dengan Tahun 2026

14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan status Desa menjadi Desa Mandiri melalui peningkatan operasional ADD (Alokasi Dana Desa).

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sumber Dana	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
ADD SILTAP	Rp 120.061.733.364,-	Rp 124. 942.712.235,-	Rp.126.403.322.463,-	Rp.127.251.512.856,-
ADD Bagi Hasil	Rp12.528.833.443,-	Rp13.036.176.834,-	Rp13.200.275.437,-	Rp13.200.275.437,-

Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat dari penambahan target ADD SILTAP dan ADD Bagi Hasil mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo, yang pada tahun 2023 sudah mencapai 152 Desa atau

sekitar 47,8%. dan sudah tidak ada desa dengan status Sangat Tertinggal dan Tertinggal.

Berikut data status Indeks Desa Membangun Tahun 2023 :

KECAMATAN		STATUS IDM 2023					
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	**Total**
1	TARIK	0	0	16	2	2	**20**
2	PRAMBON	0	0	0	15	5	**20**
3	KREMBUNG	0	0	0	0	19	**19**
4	PORONG	0	0	0	9	3	**12**
5	JABON	0	0	7	6	0	**13**
6	TANGGULANGIN	0	0	1	8	9	**18**
7	CANDI	0	0	0	0	24	**24**
8	SIDOARJO	0	0	0	7	3	**10**
9	TULANGAN	0	0	4	14	4	**22**
10	WONOAYU	0	0	0	18	5	**23**
11	KRIAN	0	0	0	5	14	**19**
12	BALONGBENDO	0	0	0	15	5	**20**
13	TAMAN	0	0	0	11	5	**16**
14	SUKODONO	0	0	0	5	14	**19**
15	BUDURAN	0	0	0	6	9	**15**
16	GEDANGAN	0	0	0	6	9	**15**
17	SEDATI	0	0	2	9	5	**16**
18	WARU	0	0	0	0	17	**17**
TOTAL		**0**	**0**	**30**	**136**	**152**	**318**
Persentase		**0,00**	**0,00**	**9,43**	**42,77**	**47,80**	

15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan respon cepat terhadap pengaduan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pada tahun 2022 telah dilaunching Sidoarjo Call Center 112 untuk respon cepat bebas pulsa 24 jam penuh melayani pengaduan masyarakat.

Akumulasi capaian pelayanan Call Center 112 Sidoarjo, sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1.949 pengaduan	1.945 pengaduan	1.500 pengaduan

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2023 kategori A- (Sangat Baik).

Laporan pelayanan Call Center 112 sepanjang Tahun 2023, sebagai berikut :

Laporan jumlah telepon prank dan ghost call masih sangat banyak di Tahun 2023, sehingga akan terus dilakukan pembinaan dengan melakukan block nomor kontak dimaksud.

Sedangkan dari total 1.945 aduan yang masuk, seluruh laporan sudah ditindaklanjuti baik itu dalam proses penanganan maupun sudah selesai. Untuk aduan paling banyak adalah seputar perbaikan PJU dengan jumlah 529 aduan. Kemudian OPD paling banyak menangani aduan adalah Dinas Perhubungan dengan total 665 aduan, diikuti PSC, PMI, Polresta dengan jumlah 22 aduan.

16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan perijinan khususnya untuk pelaku usaha mikro.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur	-	1.611 ijin	1.158 ijin	1.318 ijin
Jumlah UM yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan	300 UM	300 UM	78 UM	300 UM

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya nilai investasi daerah, dimana pada Tahun 2023 Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp.13.681.823.120.000,-

Kegiatan yang mendukung prioritas dimaksud, yaitu pelayanan perijinan jemput bola untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui : revitalisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau), Normalisasi Sungai, dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	837 ton/hari

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	2 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	7 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	905 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	39 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	5 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	800 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	2 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	886 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	30 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	9 titik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	5 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air;
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
- Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Keberhasilan kinerja berdampak pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang pada tahun 2023 mencapai 59,99.

Perluasan RTH

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2023 sebesar 29,23 hektar. Adapun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 RTH yang dilakukan revitalisasi dan penambahan luas, antara lain :

- Tugu Babalayar dalam bentuk pembangunan monumen Hikayat Sang Delta di titik tengah perempatan babalayar sebagai salah satu landmark tugu yang iconik di Sidoarjo
- Taman Alun – Alun Sidoarjo
- Taman Trotoar GOR Sidoarjo
- Revitalisasi Taman Median Jalan Sidoarjo dalam bentuk Revitalisasi Taman sekitar Monumen Pancasila
- Taman Pulau Gajah Mada
- Pembangunan Lampu Hias di Jalan Pondok Candra dalam bentuk pembangunan lampu hias tematik di fly over pondok candra
- Taman Aloha Juanda dalam bentuk merevitalisasi median jalan arah bandara juanda dan ada pembangunan monumen Ir H.Juanda di timur frontage juanda

- Revitalisasi taman median jalan waru dalam bentuk merevitalisasi taman median di sepanjang jalan aloha waru sehingga estetik berkesinambungan dengan pembangunan lampu PJU tematik
- Revitalisasi Sarpras taman abhirama dalam bentuk pemeliharaan sarpras taman abhirama (sarana bermain, fitness outdoor, gazebo, toilet, rumah kayu,dll)
- Revitalisasi sarpras alun alun dalam bentuk pemeliharaan sarana bermain, toilet, fitness outdoor
- Taman Lansia
- Taman Mangundiprojo

Revitalisasi Sungai

Tingkat ketersediaan air untuk Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2023 mencapai 6.130 Liter/Detik yang sudah menunjukkan kecukupan. Selain daripada itu, pririotas dimaksud juga untuk mengendalikan banjir dan genangan yang masih sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Adapun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 revitalisasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- Pembangunan Rumah Pompa Banjarasri
- Pembangunan Rumah Pompa Banjarpanji
- Pembangunan Rumah Pompa Kedungbanteng
- Pembangunan Rumah Pompa Lippo Raya Jati
- Pembangunan Rumah Pompa Penatarsewu
- Normalisasi Sistem Drainase, Pembangunan Sudetan dan Pintu Air Desa Tropodo
- Pembangunan Rumah Pompa Desa Kepuhkiriman
- Pembangunan - Peningkatan Afvoer Kedungpeluk Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin
- Pembangunan – Peningkatan Saluran Anak Afvoer Kalialo Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin
- Pembangunan – Peningkatan Saluran Losing Gedangrowo Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin
- Penataan Sungai Kawasan Perkotaan (Afvoer Kali Balong)

Revolusi Manajemen Sampah

Pada tahun 2023 sampah yang terkelola dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sebesar 77%. Adapun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 revitalisasi TPST yang sudah dilakukan, antara lain :

- Revitalisasi TPST Kawasan Lingkar Timur dalam bentuk Perbaikan Hanggar dan Lantai Kerja
- Revitalisasi TPST Kawasan Barengkrajan Krian
- Revitalisasi TPST Kawasan Banjarbendo dalam bentuk Perbaikan Hanggar dan Lantai Kerja
- Revitalisasi TPST Kawasan Taman dalam bentuk Perbaikan Hanggar dan Lantai Kerja

D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas mutu pendidikan dan pemerataan Pendidikan	1. APK PAUD (5-6 Tahun)	100	109,02		
		2. APK SD sederajat	100	111,71		
		3. APK SMP sederajat	100	100,61		
		4. Indeks kompetensi minimum literasi SD	2	3,36		
		5. Indeks kompetensi minimum numerasi SD	1,8	2,76		
		6. Indeks karakter SD	2,19	2,69		
		7. Indeks kompetensi minimum literasi SMP	2,08	3,34		
		8. Indeks kompetensi minimum numerasi SMP	1,85	2,64		
		9. Indeks karakter SMP	2,33	2,72		
		10. Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik	95,45%	95,59%		
		11. Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik	95,65%	95,67%		
		12. Persentase PAUD terakrediatasi A	39%	40,24%		
		13. Persentase SD terakrediatasi A	74%	74,91%		
		14. Persentase SMP terakrediatasi A	57,25%	74,91%		
		15. Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar	38%	40%		
		16. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	01:28	01:28		

		17. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	01:30	01:30		
		18. Rasio jumlah ruang kelas terhadap siswa jenjang SD	01:28	01:28		
		19. Rasio jumlah ruang kelas terhadap siswa jenjang SMP	01:30	01:30		
		20 Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	60%	63,67%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. APK PAUD	100	109,02		
		2. APK SD	100	111,71		
		3. APK SMP	100	100,61		
		4. Persentase PAUD akreditasi A	39%	40,24%		
		5. Persentase SD akreditasi A	74%	74,91%		
		6. Persentase SMP akreditasi A	57,25%	74,91%		
		7. Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar	38%	40%		
		8. Persentase bangunan ruang kelas SD kaegori baik	95,45%	95,59%		
		9. Persentase bangunan ruang kelas SMP kaegori baik	95,65%	95,67%		
		10. Rasio jumlah ruang kelas terhadap siswa jenjang SD	01:28	01:28		
		11. Rasio jumlah ruang kelas terhadap siswa jenjang SMP	01:30	01:30		
		12. Rasio guru terhadap murid jenjang SD	01:28	01:28		
		13. Rasio guru terhadap murid jenjang SMP	01:30	01:30		
		14. Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	60%	63,67%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	746.634.195.082,00	712.669.555.691,00	95,45%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	681.651.090.897,00	651.275.009.034,00	95,54%	

3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	2.945.000,00	2.945.000,00	100,00%	

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesehatan	Indeks infrastruktur kesehatan	72,32	80,91		
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. Persentase KS (Keluarga Sehat);	34,76%	37,90%		
		2. Rata-rata nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) di puskesmas	95%	96,98%		
3	Meningkatkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Paripurna	Terakreditasi Paripurna		
4	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan kesehatan	Standar nilai akreditasi RS yang sesuai LARS DHP	Madya	Paripurna		
		Bed Occupation Rate (BOR)	30% s/d 50%	58,90%		
		Average Length of Stay (ALOS)	6s/d 9 hari	3 Hari		
		Bed Turn Over (BTO)	3 s/d 6 kali	56 kali		
		Turn Over Interval (TOI)	15 s/d 20 hari	3 Hari		
		Net Date Rate (NDR)	< 25 per mil	19,1 per mil		
		Gross Death Rate (GDR)	< 45 per mil	28,3 per mil		

5	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana standar tipe C	65%	66,35%		
6	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Persentase SDM yang bekerja sesuai profesi dan keahlian	80%	93,1%		
		Indeks kualitas SDM Rumah Sakit	80%	97,2%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	1. AKI	51,15 per 100.000 KH	45,53 per 100.000 KH		
		2. AKB	3,4 per 1.000 KH	2,82 per 1.000 KH		
		3. Persentase balita stunting	7,54%	3,1%		
		4. Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	70,00%	69%		
		5. Persentase keluarga yang disurvey KS	93,00%	93,13%		
		6. Presentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang terakreditasi	24%	54%		
		7.Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan;	95%	100%		
		8. Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	70%	71%		
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,68%	Target ditentukan oleh Kemenkes RI, berdasarkan prevalensi Riskesda (32,1 X penduduk usia 15-59 tahun)	
		10. Persentase KLB yang tertangani <24 jam	100%	100%		

		11. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100,00%		
		12. Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	90%	90,00%		
		13. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	1 : 72.548	1 : 77.069		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	58%	65,00%		
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian yang berijin	100%	100,00%		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	30	63,5		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD)	Average Length of Stay (ALOS)	3 Hari	4,4 Hari		
		Bed Occupancy Rate (BOR)	60%	75,8%		
		Bed Turn Over (BTO)	50 Kali	63,2 Kali		
		Gross Death Rate (GDR)	70%	75%		
		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	100	100,00%		
		Net Death Rate (NDR)	45%	46%		
		Persentase Diselesaikannya Penelitian	80%	100%		
		Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit yang Memenuhi Standar Akreditasi.	80%	95%		
		Persentase Indikator SPM Bagian Keuangan yang Mencapai Target	100%	100,00%		

		Persentase Indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang Mencapai Target	100%	100%		
		Persentase Indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang Mencapai Target	100%	100,00%		
		Persentase Indikator SPM Bagian Umum yang Mencapai Target	100%	100,00%		
		Persentase Indikator SPM Bidang Pelayanan Penunjang yang Mencapai Target	100%	90,91%		
		Persentase Indikator SPM Bidang Pelayanan Medik yang Mencapai Target	85%	88,61%		
		Persentase Keluhan Pelanggan (Number of Complain)	0,02%	0,07%		
		Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91%	95,2%		
		Persentase Terlaksananya Evaluasi Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan	100%	100,00%		
		Persentase Terlaksananya Pengukuran Parameter Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang Memenuhi Standar Akreditasi	90%	100%		
		Turn Over Interval (TOI)	1 Hari	1,4 Hari		
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKB (Angka Kematian Bayi)	3,4 per 100.000 KH	1 per 100.000 KH		
		AKI (Angka Kematian Ibu)	51,15 per 1.000 KH	1 per 1.000 KH		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sediaan kefarmasian sesuai perencanaan	90%	100%		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	100,00%	100%		

		kesehatan sesuai standar				
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	30	35		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kesehatan)	267.421.409.696,00	261.759.372.468,33	97,88%	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	208.290.678.287,00	185.499.340.314,00	89,06%	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.450.119.602,00	10.205.189.588,00	89,13%	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	215.162.914,00	191.901.186,00	89,19%	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.086.954.021,00	2.036.742.796,00	97,59%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD)	667.288.701.730,00	595.733.498.408,00	89,28%	
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.335.552.000,00	20.805.571.150,00	97,52%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD Sidoarjo Barat)	37.214.412.904,00	32.767.758.785,00	88,05%	
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.743.877.285,00	79.800.205.434,00	96,44%	

10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.779.336.362,00	4.679.240.624,00	97,91%	

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata	Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	95,50%	97,35%		
2	Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata	Prosentase Kecukupan Kebutuhan Air Irigasi	92%	97,55%		
		Prosentase Luasan Genangan/Banjir Tertangani	83%	85,66%		
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan pembangunan	87,5%	88,89%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	89%	90,04%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase yang Ditingkatkan dan Dipelihara	27%	29,97%		
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Sidoarjo dalam Kondisi Mantap	91%	97,35%		
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	66%	66,74%		
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	50%	50%		
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	68%	78%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas PUBMSDA)	21.157.327.818,00	19.144.843.657,00	90,49%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.015.509.714,00	13.976.471.881,00	93,08%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	58.215.308.394,00	53.554.533.285,00	91,99%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	295.375.573.525,00	244.783.102.810,00	82,87%	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.383.903.561,00	2.780.572.822,00	82,17%	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	300.000.000,00	293.777.000,00	97,93%	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.759.368.414,00	1.423.743.924,00	80,92%	

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Layanan Dasar Keciptakaryaan Daerah	Persentase pelayanan air minum aman	46,55%	43,23%		
		Persentase akses sanitasi layak	98,05%	98,81%		
		Persentase luas tidak kumuh	99,79%	99,79%		
		Persentase bangunan gedung wilayah yang sesuai ketentuan	66%	66,74%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	46,55%	43,23%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	98,05%	98,81%		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur kawasan	92%	92%		

		permukiman yang tersedia				
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban pasca bencana dan Rumah susun yang tersedia	87%	87%		
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyelesaian luasan kawasan kumuh	45,73%	45,73%		
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	22%	23,15%		
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umumnya sesuai target tahun berkenaan	92%	92%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas P2CKTR)	11.850.774.383,00	11.007.396.233,00	92,88%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	51.782.872.477,00	40.618.767.910,00	78,44%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.384.036.121,00	2.325.637.562,00	97,55%	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	27.240.249.684,00	24.199.897.360,00	88,84%	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.790.380.180,00	2.410.573.508,00	86,39%	
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	99.950.000,00	69.375.000,00	69,41%	
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.464.725.000,00	2.421.625.000,00	98,25%	

8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.452.085.093,00	10.779.231.511,00	94,12%	

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, dijabarkan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakkan Perda dan Perkada	Hasil SKM terhadap layanan tibumtranmas	Baik (81)	Sangat Baik (98,98)		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg)	0%	0%		
3	Meningkatnya pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%		
4	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	0,85	0,79		
5	Meningkatnya kapasitas penanganan kebakaran dan non kebakaran	1. Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	45	38,98		
		2. Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	100	100		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentramanTingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketentraman	Baik	Sangat Baik		

	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	jumlah kader wawasan kebangsaan	100	100		
		jumlah peserta pemantapan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	100		
		jumlah peserta kader bela negara dan karakter kebangsaan	100	100		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	jumlah partisipasi peserta terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik	80	80		
		persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	0	0		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	jumlah ormas yang di data	364	364		
		jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan ormas	4	4		
		jumlah proposal ormas yang diverifikasi	12	12		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	3	3		
		jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	12	12		

2	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase konflik yang terselesaikan	100%	100%		
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	100%	100%		
		2. Persentase korban bencana yang terehabilitasi	100%	100%		
		3. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	100%	100%		
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase Satuan Petugas PMK yang memiliki Sertifikasi sesuai Standar Kualifikasi	40%	70,73%		
		2. Persentase Mobil PMK dengan Kondisi Layak Fungsi	80%	80%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Satpol PP)	16.612.907.916,00	15.774.982.085,00	94,96%	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.588.368.453,00	12.084.594.198,00	96,00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bakesbang)	6.639.037.824,00	6.056.576.204,00	91,23%	

4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.956.317.423,00	1.930.438.000,00	98,68%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10.435.499.200,00	5.382.642.432,00	51,58%	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	85.495.968.215,00	84.592.629.114,00	98,94%	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	418.609,00	417.500,00	99,74%	
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.159.964.360,00	2.985.375.710,00	94,47%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPBD)	12.652.911.325,00	11.930.401.707,00	94,29%	
10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.989.217.012,00	1.761.466.949,00	88,55%	
11	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.770.918.907,00	7.562.689.009,00	97,32%	

Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pelayanan	85%	88,07%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%	60%		
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Terlayani	60,51%	60,51%		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	97,5%	98,19%		
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%		
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.419.844.879,00	6.969.407.596,00	93,93%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.442.137.500,00	2.424.591.875,00	99,28%	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.462.361.195,00	8.013.272.618,00	94,69%	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	29.034.872.719,00	27.752.909.526,00	95,58%	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	406.514.970,00	384.279.450,00	94,53%	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	206.246.543,00	205.700.696,00	99,74%	

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Angkatan Kerja Terlatih yang telah Bekerja	Peresentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	69.49	**70,33**		
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan	67	67,99		
3	Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama	24.85	25		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	82.5	82.5		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	21	21		
		Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	52	52		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki Perizinan	44	44		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen RTK yang tersusun	53	53		
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK	100	100		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi penempatannya	57	57		
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100	100		

	Program Hubungan Industrial	Persentase per-selisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjan-jian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	23	23		
		Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit	25	25		
		Persentase peru-sahaan yang me-nerapkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	38	38		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.032.875.328,00	7.622.780.101,00	94,89%	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	92.775.000,00	92.475.000,00	99,68%	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.679.625.102,00	4.590.184.669,00	80,82%	
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	774.786.474,00	710.184.000,00	91,66%	
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.234.632.037,00	2.176.425.740,00	67,29%	sisa anggaran pada BPJS Cukai untuk tenaga rentan dikarenakan pemberian BPJS diberikan pembatasan usia maksimal 65 Tahun
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	6.525.000,00	6.525.000,00	100,00%	

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Peningkatan Status Desa	Persentase Desa Maju yang meningkat statusnya ke Desa Mandiri	13,35	23,58		
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100	100		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	2,17	2,48		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama	21,74	23,29		
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki Bumdes	71,43	79,19		
		Persentase peningkatan status desa	31,06	36,96		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang diberdayakan	82,3	82,3		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.657.036.943,00	6.098.024.184,00	91,60%	

2	PROGRAM PENATAAN DESA	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%	
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	71.783.960,00	71.583.600,00	99,72%	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.378.788.000,00	8.888.808.480,00	94,78%	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.859.504.282,00	2.629.037.138,00	91,94%	

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	67,2	67,34		
		Persentase kasus kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial	67,28	67,34		
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah lembaga Perlindungan perempuan dan anak yang diadvokasi dan dibina	210	210		

		Jumlah rekomendasi tindak lanjut peningkatan perlindungan perempuan dan anak	25	0		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,14	0		
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah kecamatan, desa/kelurahan menuju layak anak yang di advokasi dan dibina	0	0		
		Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang diadvokasi dan dibina	100	100		
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase kekerasan terhadap anak yang di selesaikan	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	54.229.320,00	47.622.300,00	87,82%	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	357.650.165,00	328.471.683,00	91,84%	
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	118.699.900,00	116.724.900,00	98,34%	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	267.775.000,00	244.796.250,00	91,42%	

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya pencapaian Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ McPR	77,50%	70,56%		
		Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	1,4%	0,91%		
		Persentase putus pemakaian kontrasepsi (DO)	19,5%	7,41%		
		Persentase UNMETNEED	7,47%	6,61%		
		CBR (Crude Birt Rate)	13,55	13,55		

Capaian Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	32, 5	10		
		Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	100%	100%		
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,02	1,8		
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase UnMeet Need	7,47%	6.61%		
		Angka Prevalensi modern (modern	66,2	70,56		

		Contrasepsi Prevalance Rate/ mCPR)				
		Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop out) /DO	24%	7,41%		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan	1,70%	0.91%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.363.609.232,00	6.623.403.094,00	89,95%	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	745.839.960,00	728.452.060,00	97,67%	
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	26.332.099.810,00	25.310.224.131,00	96,12%	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	83.013.600,00	81.425.000,00	98,09%	

Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	a. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,5	90,72		
		b. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	90,89	90,91		
2	Meningkatnya Konsumsi dan Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidoarjo	a. Tk. Konsumsi Energi Perkapita per hari	1.965 Kal/Hari	2.152 Kal/Hari		

		b. Tk. Ketersediaan Energi Perkapita per hari	2.320 Kal/Hari	2.832 Kal/Hari		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Urusan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Prosentase Peningkatan Cadangan Pangan (stok pangan yang dikordinasikan)	0,01%	0%		
		2. Tingkat Konsumsi Beras perkapita perhari <= dari 275 gr	237 g/kap/hr	236,62 g/kap/hr		
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	84,40%	88,12%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.772.424.061,00	29.903.390.310,00	97,18%	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.328.616.490,00	1.314.443.550,00	98,93%	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	108.305.155,00	106.554.400,00	98,38%	

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	6,41 mg/L	8,507 mg/L	Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai BOD yang fluktuatif	
		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO2	7,83 µg/ m3	8,1 µg/ m3		
		Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO2	13,67 µg/ m3	17,75 µg/ m3		
2	Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	74%	77%	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan di lokasi kegiatan (terutama penghijauan berupa tanaman pelindung yang bertajuk dengan ketinggian minimal 2 meter)	
		Persentase luasan RTH yang terkelola	5,15%	0,67%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD	45%	83%		
		Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	45%	39%		
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan persetujuan lingkungan	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHAADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	3,6%	6,43%		

4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa atau kelurahan peduli lingkungan hidup	1%	0,6%	a) Kurangnya minat desa untuk mengikuti Desa Berseri b) Banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menghias desa sebagai persiapan desa berseri	
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sekolah peduli lingkungan hidup	0,8%	1,9%		
		Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%		
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah di TPA	50%	40%		
		Persentase pengurangan sampah di TPST	29%	37%		
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH yang terkelola	2,36%	2,38%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.469.857.082,00	62.145.876.700,00	77,23%	listrik yang digunakan untuk pengoperasian bagian LTP tidak maksimal karena terjadi penurunan tanah pada bangunan LTP sedangkan bangunan LTP belum ada penyerahan aset dari Pemerintah Pusat

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.402.159.657,00	2.221.547.782,00	92,48%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	39.875.536.383,00	36.788.253.433,00	92,26%	
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	114.676.982,00	112.269.216,00	97,90%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	154.663.032,00	153.009.136,00	98,93%	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	149.570.248,00	149.461.404,00	99,93%	
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	274.504.701,00	184.806.618,00	67,32%	Menyesuaikan kebutuhan pengaduan lingkungan hidup
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.158.387.627,00	10.279.711.455,00	92,13%	

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan admindukcapil sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP elektronik	99,4%	99,89%		
		Persentase penduduk usia 0 s/d <17 tahun yang ber-KIA	50%	51,72%		
		Persentase penduduk usia 0 s/d 18th ber akta kelahiran	98%	98,2%		
		persentase penerbitan akta kematian	100%	100%		
		persentase penduduk berstatus kawin berakta perkawinan	100%	100%		
		persentase penduduk status cerai hidup berakta perceraian	100%	100%		
2	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga	50%	50%		
		Persentase fasilitasi kerjasama layanan adminduk	50%	50%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan	100%	100%		
		Persentase pelaporan penduduk rentan yang dapat diselesaikan	100%	100%		
		Persentase pelayanan pindah datang/ keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%		
		Persentase penduduk ber KTP-EL	99,4%	99,89%		

		Persentase penduduk usia 0s/d 17 tahun ber-KIA	50%	51,72%		
2	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	persentase penduduk status cerai hidup berakta cerai	100%	100%		
		persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	100%	100%		
		persentase penduduk usia 0s.d 18 tahun berakta kelahiran	98%	98,2%		
		persentase penerbitan akta kematian	100%	100%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu	100%	100%		
		Persentase Sarpras SIAK yang layak fungsi	100%	100%		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Rekomendasi Pengelolaan Profil Kependudukan terhadap Kebijakan Daerah	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.769.506.575,00	12.302.160.234,00	96,34%	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	312.503.756,00	271.861.600,00	86,99%	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	276.324.997,00	248.479.500,00	89,92%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	593.086.040,00	533.671.350,00	89,98%	

Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Tersedianya infrastruktur perhubungan yg berkualitas dan merata	Indeks Infrastrukur Perhubungan	0,0615	0,0663		
		Indeks tingkat pelayanan jalan	0,727	0,702		
2	Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi	70%	70%		
		Tingkat konektivitas jaringan jalan	3,64	4,03		
		Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan	0,85	0,85		
		Cakupan pelayanan angkutan umum	90%	90%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	100%	100%		
		Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	74%	74%		
		Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70%	70%		

		Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	70%	70%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Perlengkapan Transportasi Sungai Yang Tersedia	20%	20%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	49%	49%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.683.178.881,00	16.680.899.514,00	94,33%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	108.351.631.681,00	99.859.382.691,00	92,16%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	29.205.300,00	28.827.900,00	98,71%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.355.004.513,00	4.140.421.729,00	95,07%	

Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase capaian Aspek SPBE	108%	92,00%		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Layanan Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Informasi Statistik	87	97,64		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	86	86		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%	100%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	70%		

		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.382.349.279,00	10.385.116.360,00	91,24%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.725.791.466,00	3.590.812.171,00	96,38%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.342.253.313,00	11.140.448.006,00	98,22%	

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	6,23%	6,99%		
2	Meningkatnya usaha mikro mandiri	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	2,38%	7%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	83,5%	85,51%		

2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	44,42%	51,39%		
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang di diklat	66,83%	84,62%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang direvitalisasi	3,21%	3,2%		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	6,06%	6,11%		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	1,98%	2,04%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.826.954.746,00	7.041.392.798,00	89,96%	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	32.910.000,00	30.310.000,00	92,10%	
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	45.931.991,00	45.610.800,00	99,30%	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	664.855.000,00	657.544.325,00	98,90%	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	365.285.544,00	360.281.910,00	98,63%	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	21.657.037.558,00	21.244.329.530,00	98,09%	

7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.949.203.800,00	5.840.314.600,00	98,17%	

Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.20	97.24		
2	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	Rp.7.179.211.521.000	Rp.13.681.823.120.000,00		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	94,22%	96.32		
		Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	97,11%	98.68		
		Persentase kontribusi retribusi pelayanan perizinan tertentu terhadap total retribusi	20,58%	36.10		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase kebijakan penanaman modal daerah yang disusun	100	100		

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Kepeminatan Investasi	100	100		
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase pelaku usaha yang taat melaporkan penanaman modal sesuai ketentuan periode pelaporan LKPM	100	116		
		Presentase pelaku usaha yang memiliki tingkat kepatuhan berusaha minimal baik	100	115		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp.1.419.898.897.000	Rp.1.158.061.520.000		
		Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp.5.759.312.624.000	Rp.8.752.759.500.000		
6	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang di Monev	39	48		
		Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	50	99		
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal yang disusun	10	10		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.546.985.599,00	10.729.304.781,00	92,92%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	105.000.000,00	95.836.800,00	91,27%	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00%	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.263.374.000,00	1.190.274.326,00	94,21%	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000,00	337.955.200,00	95,28%	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00%	

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya prestasi dibidang kepemudaan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	25 Orang	75 Orang		
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	75 Prestasi	426 Prestasi		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi olahraga yang diraih ditingkat regional, nasional dan internasional	75 Prestasi	426 Prestasi		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi kepramukaan yang berkembang	12%	12%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.018.675.766,00	10.241.304.038,00	92,94%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.923.838.380,00	7.678.858.892,00	96,91%	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	48.214.045.326,00	46.506.965.252,00	96,46%	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	

URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya lokal	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	88%	88,13%		
		2. Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	73%	73,02%		
		3. Jumlah penutur muda Bahasa daerah	9 Orang	10 Orang		
		4. Pesentase guru mengikuti uji kemahiran Bahasa Indonesia	13%	14,05%		
		5. Jumlah Kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	9 Kelompok	9 Kelompok		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Cakupan objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	73%	73,02%		
		2. Jumlah penutur muda bahasa daerah	9 orang	10 orang		
		3. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	88%	88,13%		
		4. Persentase guru mengikuti ujian kemahiran bahasa indonesia	13%	14,05%		
2	Program Pengembangan kesenian tradisional	Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	9 kelompok	9 kelompok		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	38.722.200,00	38.572.250,00	99,61%	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	297.600.000,00	295.015.000,00	99,13%	

Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan sesuai prosedur	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terfasilitasinya pengadaan tanah pemerintah non Perangkat Daerah sesuai prosedur	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	175.000,00	175.000,00	100,00%	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	85.219.432,00	75.065.536,00	88,08%	

Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%		
		Persentase data statistik yang digunakan sebagai bahan informasi	40%	40%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	84.455.000,00	84.405.000,00	99,94%	

Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	INDEKS KAMI (Indeks Keamanan Informasi)	494	537		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	57.000.000,00	56.642.500,00	99,37%	

Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sidoarjo	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	62,32	84,31		
2	Meningkatnya Mutu penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	43,75%	87,50%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah lembaga yang telah mengelola arsip dengan baik	7 PD	14 PD		
		jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	1.500 berkas	2.931 berkas		
		Jumlah Pengguna layanan arsip	72 orang	112 orang		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	890.521.192,00	883.698.877,00	99,23%	

Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya budaya literasi masyarakat Sidoarjo	Nilai Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat Sidoarjo	57%	57,03%		
2	Meningkatnya literasi dan kegemaran membaca masyarakat	Nilai kegemaran membaca masyarakat	63,9%	67,28%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi perpustakaan	140.024 eksemplar	151.250 eksemplar		
		Jumlah pengunjung perpustakaan	175.000 orang	175.334 orang		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.413.624.173,00	8.118.024.250,00	96,49%	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.034.358.586,00	2.019.566.188,00	99,27%	

3. URUSAN PILIHAN

Hasil kinerja penyelenggaraan urusan pilihan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Urusan Perikanan dan Kelautan

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Berkembangnya Sub sektor Perikanan	Prosentase peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah	1,5%	1,59%		
		Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,55%	0,56%		
		Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	0,51%	0,54%		
		Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar	3,1%	3,55%		
		Nilai tambah produksi hasilolahan perikanan krupuk udang	Rp.60.000/Kg	Rp.61.100/Kg		
		Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan bandeng asap	Rp.127.000/Kg	Rp.131.000/Kg		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perairan Umum Daratan (PUD)	562,00 ton	562,80 ton		
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut	15.890,00 ton	15.948,00 ton		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya air payau	77.040.755,00 kg	81.405.600,00 kg		
		Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	23.920.109,00 kg	28.627.520,00 kg		
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan jumlah pelanggaran di lingkungan perairan.	50,00%	16,00%		
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	8.645.000,00 kg	8.744.831,00 kg		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.163.662.435,00	6.729.789.179,00	93,94%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	155.515.385,00	155.455.250,00	99,96%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.417.118.556,00	10.155.518.552,00	97,49%	

4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	123.162.806,00	119.527.668,00	97,05%	
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	956.246.794,00	936.389.186,00	97,92%	

Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perkebunan Dan Produksi Peternakan	Prosentase Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan.				
		1. Padi	0,02%	0,027%		
		2. Jagung	0,10%	0,14%		
		3. Kacang Hijau	0,20%	0,26%		
		4. Kedelai	0,20%	0,25%		
		5. Sawi	0,01%	0,02%		
		6. Bayam	0,01%	0,13%		
		7. Kangkung	0,01%	0,11%		
		8. Tebu	0,10%	0,11%		
		Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan				
		1. Daging	0,75%	0,74%		
		2. Telur	0,75%	0,74%		
		3. Susu	0,75%	0,74%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi peternakan (daging, susu, telur)	36.333.000 kg	37.986.288 kg		
		Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	426,6 kw/ha	426,83 kw/ha		
		Prosentase penyaluran pupuk bersubsidi	94,30%	91%		
		Prosentase peningkatan populasi ternak	1%	0,7727%		
		Produktivitas tanaman tebu	751,3 kw/ha	751,289 kw/ha		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	83%	89%		
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	85	86,92		
		Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	25%	63,73%		
		Prosentase unit usaha yang telah menghasilkan produk pangan dan non pangan asal hewan yang dinyatakan ASUH	7,50%	16,36%		

4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman perkebunan	9%	10,39%		
		2. Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	12%	12,78%		
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani ke kelas madya	2,40%	2,5%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.772.424.061,00	29.903.390.310,00	97,18%	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.328.616.490,00	1.314.443.550,00	98,93%	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	108.305.155,00	106.554.400,00	98,38%	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.891.683.805,00	3.725.296.590,00	95,72%	

5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.310.873.231,00	1.297.386.340,00	98,97%	
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.730.515.639,00	4.703.910.738,00	99,44%	
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	444.909.774,00	423.010.231,00	95,08%	
8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.596.134.911,00	2.001.015.644,00	77,08%	DAK air tanah dalam Desa Banjarpanji tidak dilaksankaan, karena warga lebih membutuhkan air bersih

Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Berkembangnya wisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	939.664 orang	1.354.112 orang		
		Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	2 hari	2,7 hari		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Sidoarjo	939.664 orang	1.354.112 orang		

2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama Tinggal Rata Rata Wisatawan	2 hari	2 hari		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Industri / Usaha Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata	28 organisasi	28 organisasi		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	888.988.837,00	861.382.522,00	96,89%	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	238.427.800,00	221.296.730,00	92,81%	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150.000.000,00	148.728.540,00	99,15%	

Urusan Industri

Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	IKM Naik Kelas	300 IKM	351 IKM		
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	1,1%	1,75%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan	3,22%	4,8%		

		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	100%	100%		
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	0,34%	0,5%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Database IKM yang Terupdate	0,92%	1,11%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.471.238.875,00	8.279.158.846,00	87,41%	
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	119.137.500,00	113.776.250,00	95,50%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	76.425.000,00	74.925.000,00	98,04%	

Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	1. Pertumbuhan Ekspor Non Migas	2,8%	2,84%		
		2. Persentase Peningkatan UTTP yang di tera / tera ulang	0,5%	1%		
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat	Nilai SKM terhadap Layanan Pasar	77	97,6		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar SNI	15,78%	15,78%		
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	<9	0,028		
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	80%	84,79%		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non Migas	1.350.000.000	1.350.019.942		
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang terstandarisasi	95%	95%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.300.799.211,00	24.815.469.690,00	98,08%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11.680.434.483,00	11.294.953.654,00	96,70%	
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	286.842.964,00	285.850.180,00	99,65%	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.266.429.432,00	2.208.454.756,00	97,44%	
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	344.817.783,00	336.257.322,00	97,52%	

Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	6.525.000,00	6.525.000,00	100,00%	

3. Unsur Penunjang Pemerintahan

Hasil kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks kualitas Kebijakan	72	80.98		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51.02%		
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%		
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A)	66%	100%		
		Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	88,5	86		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	72	80.98		
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%		
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	72	80.98		
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86	91.12		

3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	72	80.98		
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%		
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51.02%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.790.530.385,00	64.842.270.620,00	97,08%	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.340.228.587,00	38.508.298.118,00	95,46%	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.186.151.488,00	5.718.542.076,00	92,44%	

Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

Unsur penunjang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya fasilitasi dukungan Sekretariat DPRD terhadap trifungsi DPRD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih	Nilai Survey Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	86,5	95,8		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	86	86		
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.535.739.800,00	54.957.753.088,00	90,79%	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.077.920.676,00	32.381.669.505,00	85,04%	

Unsur Penunjang Pengawasan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Integrated	Integrated		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	33%	48.98%		
		Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	100%	100%		
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	87%	92.01%		
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	92%	90.17%		
		Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.269.011.008,00	16.554.839.794,00	95,86%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.500.906.893,00	1.075.360.250,00	71,65%	Menyesuaikan kebutuhan pengawasan

Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan

Unsur penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen RKPD terhadap dokumen RPJMD	100%	100%		
		Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah	100%	100%		
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	100%	100%		
		Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra,PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%		

		Persentasekesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	96,80%	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05%	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	98,47%	

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah	Persentase Inovasi daerah yang memenuhi krieria IID	70%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang memiliki kegiatan mendukung IID	72%	100%		
		Persentase penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	92%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	621.187.603,00	594.718.925,00	95,74%	

Unsur Penunjang Keuangan

Unsur penunjang Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	Persentase OPD dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	99,96%	99,88%		
2	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	3,42%	26,74%		
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	1. Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2	5,00%	19,98%		
		2. Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB	3,00%	33,10%		
		3. Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain	2,97%	25,53%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS	100%	100%		
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	100%	100%		
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	100%	100%		
		Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	100%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	100%	100%		
		Persentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	66,13%	80,45%		
		Persentase pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%		
		Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase capaian penerimaan PBB-P2 terhadap target	100%	111,19%		
		Prosentase capaian penerimaan BPHTB terhadap target	100%	107,65%		
		Prosentase capaian penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah) terhadap target	100%	103,70%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPKAD)	17.435.775.010,00	16.817.819.972,00	96,46%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	800.280.834.708,00	782.723.934.739,00	97,81%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.746.185.237,00	4.278.849.972,00	90,15%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPPD)	46.907.854.764,00	43.105.009.006,00	91,89%	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12.114.549.662,00	10.066.742.239,00	83,10%	

Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat

Unsur penunjang kepegawaian dan diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Mewujudkan ASN yang Profesional Berbasis Sistem Merit	Indek Profesionalitas ASN	81	82,26		
2	Meningkatnya tata kelola kepegawaian berdasar sistem merit	Nilai Sistem Merit	314,5	320,5		
3	Meningkatnya kompetensi ASN menuju terwujudnya ASN yang profesional	Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN)	37	31,65		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai	49.5%	49.5%		
		Prosentase pegawai berkinerja minimal baik	80%	80%		
		Prosentase penempatan ASN sesuai kompetensinya	81%	81%		
		Prosentase penempatan PNS sesuai kualifikasi	100%	100%		
		Tingkat motivasi pegawai (sisi manajemen kepegawaian)	85%	85%		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP per tahun	50%	90%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.378.708.527,00	10.878.894.309,00	95,61%	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.284.384.680,00	1.697.805.600,00	74,32%	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.568.023.192,00	1.351.868.174,00	86,21%	

Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut :

KECAMATAN SIDOARJO

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	89	98,78		
		Nilai SAKIP	76,48	77,04		
		Nilai IPP	4,01	4,02		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi	100%	100%		

		masyarakat, dan PKL				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.408.184.841,00	14.708.994.901,00	95,46%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.030.397.727,00	635.627.617,00	61,69%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.857.500,00	70.357.500,00	99,29%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	159.142.540,00	159.142.540,00	100,00%	

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	219.552.500,00	196.902.500,00	89,68%	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.563.263.855,00	7.440.705.725,00	98,38%	

KECAMATAN CANDI

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	85,63	98,49		
		Nilai SAKIP	75,33 BB	78,15 BB		
		Nilai IPP	B	B		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup,	100%	90,45%		

		usaha ekonomi masyarakat, dan PKL				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00	93,16%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	631.794.057,00	571.444.095,00	90,45%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.790.000,00	40.340.000,00	86,22%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.950.000,00	54.762.500,00	99,66%	

KECAMATAN BUDURAN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	88	95,56		
		Nilai SAKIP	80,05	79,76		

		Nilai IPP	3,55	3,45	Masih adanya sarpras yang belum memadai	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	70%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	85%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	85%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	85%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	70%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.439.023.948,00	4.877.503.050,00	89,68%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	106.234.057,00	92.277.800,00	86,86%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.855.500,00	44.158.500,00	94,24%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.297.540,00	20.212.000,00	94,90%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.312.500,00	5.260.000,00	99,01%	

KECAMATAN GEDANGAN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	89,1	97,07		
		Nilai SAKIP	80,01	80,40		
		Nilai IPP	4,55	4,17	membutuhkan sarana dan prasarana pendukung terutama pelayanan	

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	85%	85%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.478.465.909,00	5.197.826.144,00	94,88%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	590.192.657,00	459.897.150,00	77,92%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.975.000,00	76.425.000,00	96,77%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.810.500,00	85.740.300,00	98,77%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	459.462.500,00	337.415.000,00	73,44%	Efisiensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi

KECAMATAN SEDATI

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	91,27	85,59	Kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan Umum	
		Nilai SAKIP	80,05	79,44		
		Nilai IPP	3,55	3,22	Kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan Umum	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	73%	73%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.115.794.943,00	4.604.175.412,00	90,00%	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	584.666.557,00	199.788.000,00	34,17%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.948.750,00	67.886.750,00	83,86%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67.387.690,00	62.737.500,00	93,10%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.168.400,00	8.118.000,00	99,38%	

KECAMATAN WARU

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	91,2	95,65		
		Nilai SAKIP	77,5	79,65		
		Nilai IPP	3,51	3,15	Sarana dan Prasarana Kurang memadai	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		

		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	80%	80%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.255.966.831,00	4.836.781.700,00	92,02%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	671.847.645,00	515.094.147,00	76,67%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.481.122,00	70.731.122,00	98,95%	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.618.600,00	44.618.600,00	100,00%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.226.925,00	29.226.925,00	100,00%	

KECAMATAN TAMAN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	90	95,62		
		Nilai SAKIP	80,05	83,60		
		Nilai IPP	4,25	4,38		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan	100%	100%		

		tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.981.593.734,00	13.364.493.428,00	95,59%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	508.556.807,00	339.996.844,00	66,86%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.435.957.205,00	4.227.575.656,00	95,30%	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	429.272.500,00	269.937.500,00	62,88%	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.325.195,00	62.235.000,00	98,28%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	188.860.000,00	143.495.000,00	75,98%	

KECAMATAN SUKODONO

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	98,1	97,89	responden berkurang karena pelayanan cetak KTP dialihkan ke MPP lingkar timur	
		Nilai SAKIP	81	81		
		Nilai IPP	4,51	4,26	membutuhkan sarpras pelayanan terutama untuk rekam KTP	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang	87%	87%		

		dilaksanakan sesuai standar				
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	82%	82%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.838.244.451,00	5.355.651.965,00	91,73%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	362.071.557,00	228.065.000,00	62,99%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.920.000,00	86.920.000,00	68,48%	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.743.250,00	12.743.250,00	100,00%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00%	

KECAMATAN WONOAYU

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik		
		Nilai SAKIP	BB	BB		
		Nilai IPP	B	B		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan	100%	100%		

		tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.018.848.590,00	4.737.113.062,00	94,39%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	521.238.397,00	470.324.728,00	90,23%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	169.615.000,00	125.765.000,00	74,15%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.802.500,00	56.802.500,00	100,00%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.125.000,00	42.125.000,00	75,06%	

KECAMATAN KRIAN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	87	98		
		Nilai SAKIP	78,25	79,74		
		Nilai IPP	4,05	3,81		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	98%	98%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	98%	98%		

		Umum Dengan Baik				
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	98%	98%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.066.457.888,00	8.681.998.610,00	95,76%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	270.570.397,00	156.198.231,00	57,73%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.046.092.500,00	1.029.907.500,00	98,45%	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	193.956.570,00	57.044.994,00	29,41%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.475.000,00	15.275.000,00	18,52%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.275.000,00	21.775.000,00	25,84%	

KECAMATAN BALONGBENDO

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	89,00	90,09		
		Nilai SAKIP	80,50	79,51		
		Nilai IPP	4,20	4,01	Penanganan mal administrasi	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%		

		Umum Dengan Baik				
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.716.028.956,00	4.465.203.763,00	94,68%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	851.906.207,00	458.670.600,00	53,84%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.587.500,00	41.387.500,00	99,52%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.337.500,00	69.922.500,00	99,41%	

KECAMATAN TARIK

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	89,55	96,21		
		Nilai SAKIP	78,2	78,71		
		Nilai IPP	3,7	3,63	sarana dan prasarana seperti mesin antrian, papan pengumuman, sarpras kelompok rentan belum terpenuhi	

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.746.342.599,00	4.354.279.871,00	91,74%	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	644.134.057,00	384.780.750,00	59,74%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	293.310.000,00	171.111.500,00	58,34%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.775.000,00	16.580.000,00	93,28%	

KECAMATAN TULANGAN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	93,2	99,00		
		Nilai SAKIP	72,5	73,00		
		Nilai IPP	4,00	4,25		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		

		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.818.176.857,00	5.415.715.475,00	93,08%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	136.296.557,00	128.259.825,00	94,10%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.710.000,00	71.109.956,00	96,47%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.716.250,00	21.670.000,00	99,79%	

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%	

KECAMATAN PRAMBON

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	97,29	97,56		
		Nilai SAKIP	80,02	79,83		
		Nilai IPP	4,08	4,15		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.288.148.834,00	5.015.728.205,00	94,85%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.375.000,00	291.514.900,00	58,14%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.150.000,00	36.805.500,00	99,07%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.887.500,00	32.330.000,00	98,30%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.100.000,00	9.950.000,00	98,51%	

KECAMATAN KREMBUNG

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	98,82	99,00		
		Nilai SAKIP	74	79		
		Nilai IPP	3,4	3,69		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%		

		Umum Dengan Baik				
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.032.679.601,00	4.776.310.011,00	94,91%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	552.934.057,00	530.903.950,00	96,02%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.353.500,00	85.858.500,00	98,29%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.226.000,00	97.070.000,00	99,84%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00%	

KECAMATAN TANGGULANGIN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	88,4	92,1		
		Nilai SAKIP	80,05	79,71		
		Nilai IPP	3,45	3,17		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran	100%	100%		

		dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu				

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.561.402.923,00	5.260.534.449,00	94,59%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	541.905.000,00	393.745.000,00	72,66%	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	101.500.000,00	99.050.000,00	97,59%	

KECAMATAN JABON

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	91,15	94,43		
		Nilai SAKIP	80,5	79,52		
		Nilai IPP	4,2	3,73		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.427.599.213,00	3.987.549.877,00	90,06%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	545.121.557,00	269.633.850,00	49,46%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.305.000,00	30.925.000,00	87,59%	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.537.500,00	14.500.000,00	64,34%	

KECAMATAN PORONG

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Penyelenggaraan Urusan

No.	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM	93,06	98,97		
		Nilai SAKIP	80,30	79,96		
		Nilai IPP	4,01	4,12		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%		
		b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi	100%	100%		

		masyarakat, dan PKL				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100%	100%		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sesuai Dengan Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	50%	100%		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%		

Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Uraian	Pagu P-APBD TA 2023	Realisasi	%	Kendala Permasalahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.398.220.184,00	7.668.565.021,00	91,31%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	453.592.850,00	337.545.100,00	74,42%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.150.000,00	69.217.500,00	85,30%	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.746.800,00	97.171.800,00	95,50%	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.850.000,00	8.150.000,00	92,09%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.122.325.000,00	1.077.713.699,00	96,03%	

E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan sepanjang Tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo	PERDA Nomor 01 Tahun 2023	Menggabungkan administrasi kelurahan yang terdampak lumpur lapindo
2	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	PERDA Nomor 02 Tahun 2023	Menata Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang nyaman untuk anak
3	Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo	PERDA Nomor 04 Tahun 2023	Menggabungkan administrasi desa yang terdampak lumpur lapindo
4	Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023	PERBUP Nomor 05 Tahun 2023	Mengelola bantuan keuangan umum dan khusus
5	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat	PERBUP Nomor 06 Tahun 2023	Merubah mekanisme pemberian beasiswa kuliah
6	Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta	PERBUP Nomor 07 Tahun 2023	Merubah tarif langganan PDAM
7	Peraturan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan	PERBUP Nomor 08 Tahun 2023	Mengelola bantuan keuangan umum dan khusus

	Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023		
8	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 09 Tahun 2023	Merubah mekanisme penerimaan peserta didik baru TK, SD, dan SMP
9	Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan	PERBUP Nomor 11 Tahun 2023	Membuat juknis pemberian Program KURMA
10	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidkan Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023	PERBUP Nomor 12 Tahun 2023	Membuat juknis pemberian BOSDA
11	Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah	PERBUP Nomor 13 Tahun 2023	Mengatur mekanisme kerjasama dengan BLUD
12	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 16 Tahun 2023	Merubah juknis pemberian BLT Buruh parik rokok
13	Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemeirntah Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 17 Tahun 2023	Menetapkan mekanisme SPIP
14	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea	PERBUP Nomor 19 Tahun 2023	Merubah mekanisme pemungutan BPHTB

	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
15	Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat	PERBUP Nomor 14 Tahun 2023	Menetapkan tarif layanan RSUD Sidoarjo Barat
16	Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023	PERBUP Nomor 24 Tahun 2023	Mengelola bantuan keuangan umum dan khusus
17	Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 25 Tahun 2023	Mengatur jasa pelayanan yang ada di RSUD Sidoarjo Barat
18	Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi	PERBUP Nomor 29 Tahun 2023	Memberikan penjelasan tentang pemberian Program Bedah Warung
19	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	PERBUP Nomor 31 Tahun 2023	Peningkatan inovasi daerah
20	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidaorjo Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi	PERBUP Nomor 35 Tahun 2023	Menata pengelolaan keuangan daerah
21	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	PERBUP Nomor 36 Tahun 2023	Merubah mekanisme pemungutan BPHTB
22	Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarno Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan	PERBUP Nomor 39 Tahun 2023	Mengoptimalkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan

23	Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo	PERBUP Nomor 43 Tahun 2023	Menetapkan tarif layanan RSUD Sidoarjo
24	Pengelolaan Utang / Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah	PERBUP Nomor 45 Tahun 2023	Memberikan juknis pengelolaan utang pada BLUD
25	Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 49 Tahun 2023	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD
26	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat	PERBUP Nomor 50 Tahun 2023	Merubah mekanisme pemberian beasiswa kuliah
27	Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 51 Tahun 2023	Menetapkan tarif baru TPA Griyo Mulyo
28	Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakayta Daerah di Kabupaten Siaorjo	PERBUP Nomor 52 Tahun 2023	Menetapkan juknis pemberian Program KURDA SAYANG
29	Integrasi Pelayanan Publik di Wilayah Kabupaten Sidoarjo melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo	PERBUP Nomor 55 Tahun 2023	Integrase aplikasi SIPRAJA
30	Perubahan Jadwal Retensi Arsip	PERBUP Nomor 78 Tahun 2023	Menata arsip
31	Perubahan Atas Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo	PERBUP Nomor 79 Tahun 2023	Menetapkan tarif layanan RSUD Sidoarjo
32	Batas Desa Ketapang	PERBUP Nomor 80 Tahun 2023	Penetapan batas desa
33	Batas Desa Kedungbendo	PERBUP Nomor 81 Tahun 2023	Penetapan batas desa
34	Batas Desa Glagaharum	PERBUP Nomor 82 Tahun 2023	Penetapan batas desa
35	Batas Desa Renokenongo	PERBUP Nomor 83 Tahun 2023	Penetapan batas desa
36	Batas Desa Besuki	PERBUP Nomor 84 Tahun 2023	Penetapan batas desa

37	Batas Desa Pejarakan	PERBUP Nomor 85 Tahun 2023	Penetapan batas desa
38	Batas Desa Kedungcangkring	PERBUP Nomor 86 Tahun 2023	Penetapan batas desa
39	Batas Desa Dukuhsari	PERBUP Nomor 87 Tahun 2023	Penetapan batas desa
40	Batas Kelurahan Mindo	PERBUP Nomor 88 Tahun 2023	Penetapan batas kelurahan
41	Batas Kelurahan Jatirejo	PERBUP Nomor 89 Tahun 2023	Penetapan batas kelurahan
42	Batas Kelurahan Siring	PERBUP Nomor 90 Tahun 2023	Penetapan batas kelurahan
43	Insentif Pajak	PERBUP Nomor 56 Tahun 2023	Pemberian insentif pajak
44	Batas Kelurahan Porong	PERBUP Nomor 58 Tahun 2023	Penetapan batas kelurahan
45	Batas Kelurahan Gedang	PERBUP Nomor 62 Tahun 2023	Penetapan batas kelurahan
46	Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Sidoarjo	PERBUP Nomor 63 Tahun 2023	Optimalisasi pengelolaan sampah
47	Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	PERBUP Nomot 74 Tahun 2023	Mekanisme penggunaan KKPD

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN SEBELUMNYA

1. Bagian Hukum

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Perbup retribusi sampah menuai pro dan kontra di masyarakat untuk itu agar segera dilakukan evaluasi	Akan dilakukan evaluasi terkait Perbup Retribusi sampah	Bila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, akan ada perubahan/pencabutan Perbup
2	Perlu adanya kajian perda yang sudah lama untuk penyesuaian dengan ketentuan – ketentuan yang ada	Dilakukan identifikasi terkait PERDA yang sudah lama untuk dilakukan evaluasi/kajian, dilakukan kajian tiap tahun sebanyak 5 kajian produk hukum daerah	PERDA sesuai ketentuan dan kondisi masyarakat terkini

2. Bagian Kerjasama

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Kerja sama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas (Perguruan Tinggi) dirasa kurang terlihat manfaatnya karena hanya sebatas magang mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat lebih dikembangkan untuk membantu Perangkat Daerah dalam menangani permasalahan yang dihadapi, contohnya implementasi merdeka belajar untuk membantu verifikasi data miskin di Dinas Sosial	Sebenarnya kerja sama dengan Universitas yang telah dilaksanakan sampai saat ini, tidak hanya magang mahasiswa, antara lain:Contohnya: 1. Kerja sama dengan Unitomo dimana telah dilakukan edukasi ke desa-desa terkait kebencanaan, untuk membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana), yang membutuhkan dana yang besara. Namun dengan pola kerja sama, kegiatan dapat tetap terlaksana tanpa anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini sudah terdapat 40 Destana di Kabupaten Sidoarjo hasil kerja sama dengan Unitomo Surabaya; 2. Kerja sama dengan Universitas Muhammadyah Sidoarjo, PPNS, ITS, dsb untuk kajian yang	Tersedianya data pemetaan potensi kerja sama perangkat daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Universitas

		ada di Bappeda dan Dinas PUBMSDA Namun dalam menindaklanjuti rekomendasi ini, akan dilakukan pemetaan potensi kerja sama (yang salah satunya dengan Universitas) yang diharapkan kerja sama yang dijalin lebih terasa manfaatnya dan dapat lebih mendukung kinerja perangkat daerah.	
2	Terhadap pengajuan kerja sama dari Perguruan Tinggi saat ini dilakukan dengan cara yang lebih selektif untuk melihat program kegiatan yang akan dilakukan serta pengaruh yang diberikan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Implementasi kerja sama akan terus didorong untuk mendukung program kerja di perangkat daerah	Kerja Sama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) akan dilakukan dengan lebih selektif untuk melihat program kegiatan yang akan dilaksanakan. Serta dilakukan kegiatan Monev kerja sama secara rutin (tiap triwulan), sehingga dapat dinilai bagaimana impact kerja sama yang dilakukan bagi pencapaian tujuan program kerja perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo	Pelaksanaan kerja sama dengan Universitas yang lebih implementatif dalam mendukung program kerja Perangkat Daerah
3	Kerja sama saat ini belum terlihat impact-nya untuk kemajuan pembangunan di Sidoarjo, sama halnya dengan kegiatan studi banding ke Luar Negeri. Sehingga diharapkan kedepannya kerja sama dapat lebih bermanfaat. Menjadi masukan dan catatan untuk ditindaklanjuti Bagian Kerja Sama. Kerja sama dengan perusahaan akan lebih dioptimalkan melalui CSR perusahaan. Terdapat masukan untuk melakukan kerja sama misi dagang baik dalam negeri maupun luar negeri	1. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Mitra Luar Negeri; 2. Terkait dengan CSR akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait; 3. Akan dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait misi dagang.	1. Tersusunnya data pemetaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan mitra luar negeri; 2. Optimalisasi CSR dalam implementasi kerja sama dengan perusahaan; 3. Dilakukannya inisiasi kerja sama misi dagang.

3. Bagian Organisasi

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Agar dilakukan evaluasi serta analisa terkait tidak tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2022	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (SK Bupati) 2. Pembentukan Tim Agen Perubahan (SK Bupati) 3. Ekspose Kinerja (Pemberian 3 Penghargaan Perangkat Daerah dalam Reformasi Birokrasi) dengan Indeks Reformasi Birokrasi a. Inspektorat Daerah (36.10) b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (35.88) c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (35.74) 4. Rapat Koordinasi Pembahasan Pratik Baik Reformasi Birokrasi (Tim Reformasi Birokrasi) 5. Rapat Koordinasi Pembahasan Reformasi Birokrasi Tematik 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tribulan 1 7. Sosialiasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Zona Integritas Perangkat Daerah 8. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik (Tim Reformasi Birokrasi) 9. Pendampingan Pra Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi (Agen Perubahan) 10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Penyesuaian perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi sesuai dengan arahan Presiden tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat, agar terciptanya Birokrasi yang bersih, efektif, effiesien dan budaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik (melayani secara prima dalam rangka kepercayaan publik)

		Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tribulan 2 11. Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB 12.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tribulan 3 13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tribulan 4	
2	Belum terintegrasinya platform aplikasi baik pelayanan maupun tata kelola pemerintahan yang ada di setiap perangkat daerah, agar segera ditindaklanjuti	Pemkab Sidoarjo sedang melakukan pengembangan 2 Platform, yaitu: 1. Tata Kelola Pemerintahan pada platform **PAKSI** (Portal Akuntabilitas Kinerja Sidoarjo), yang berisi fitur: Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, e-Kinerja, SMART ASN, dst) 2. Pelayanan Publik: **SIPRAJA** (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo), yang merupakan Sistem Pelayanan bagi warga masyarakat sidoarjo secara terpadu dan terintegrasi. Saat ini SIPRAJA menjadi pilot project Kemenpan RB untuk DIgitalisasi Pelayanan Publik secara Nasional.	1. Pada Tahun 2022 PAKSI sudah berhasil dibuat, saat ini masih tahap uji fitur, dan berproses menuju integrasi dengan aplikasi lainnya oleh Diskominfo. 2. Digitalisasi Pelayanan Publik melalui SIPRAJA, menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diharapkan kebutuhan Server, Jaringan, Sarana Prasarana dan dukungan SDM bisa disupport untuk keberhasilan penerapannya.

3	Mendorong optimalisasi Perangkat Daerah pemberi rekomendasi teknis yang belum berjalan maksimal di MPP	Menyelenggarakan FGD dengan Stakeholder terkait, diantaranya DPMPTSP dan seluruh Perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi teknis.	1. Pada tahun 2020 di MPP telah menyediakan booth bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) pemberi rekomendasi teknis, namun saat pandemi beberapa PD teknis yang mengundurkan diri berkantor di MPP dikarenakan kendala kekurangan SDM. 2. Aplikasi SIPADDU (Sistem Pelayanan Perzinan Terpadu) yang dikembangkan oleh DPMPTSP telah berhasil mengintegrasikan SOP beberapa layanan perizinan, sehingga belum menyeluruh di PD Teknis.

4. Bagian Pengadaan Barang / Jasa

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Proses pengadaan agar dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam RUP tanpa menunggu DPA ditetapkan, karena secara regulasi proses pengadaan bisa dilakukan sebelum DPA ditetapkan	Akan dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD dengan menghadirkan narasumber dari LKPP	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak terlambat, dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada RUP
2	Agar perencanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan di tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksinya bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran	Akan dilakukan koordinasi dengan BPKAD dan Bappeda perihal kebijakan penganggaran di tahun 2024	Pelaksanaan pekerjaan kontruksi, terutama untuk paket bernilai besar, punya cukup waktu dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga diharapkan pekerjaan tidak dilakukan terburu-buru dan kualitas pekerjaan dapat sesuai dengan spesifikasi teknis
3	UKPBJ untuk membuat system yang menampilkan OPD mana yang terlambat melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai jadwal pada Sirup di OPD	Telah dibuat aplikasi SIMentalBaja yang dapat membantu OPD dalam melakukan monitoring pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak terlambat, dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada RUP

4	UKPBJ menuPport kepada OPD terkait pengajuan pekerjaan lelang kegiatan perencanaan untuk di lakukan di tahun sebelumnya sehingga SPK bisa selesai di Bulan Maret dan pekerjaan fisiknya tidak selalu terlambat di akhir tahun	Akan dilaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan tender dini kepada OPD yang memiliki paket tender di tahun 2024	Pelaksanaan pekerjaan kontruksi, terutama untuk paket bernilai besar, punya cukup waktu dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga diharapkan pekerjaan tidak dilakukan terburu-buru dan kualitas pekerjaan dapat sesuai dengan spesifikasi teknis
5	Menggunakan tim Teknik Untuk mengevaluasi HPS Pekerjaan Jalan beton di Sidoarjo yang harganya terlalu mahal karena per 1 Km dengan harga 10 milyar	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan reviu HPS bersama Inspektorat untuk paket tender tahun 2023	Penghematan dan efisiensi anggaran
6	Menghimbau kepada PPKom untuk lebih selektif lagi dalam memilih konsultan perencana dan konsultan Pengawas	Akan disampaikan kepada Ppkom pada saat reviu dokumen persiapan pengadaan paket tender	Hasil pekerjaan konstruksi dapat sesuai dengan spesifikasi teknis

5. Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Bagian AP Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan berperan lebih Aktif lagi dalam memonitoring dan mengevaluasi progam kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh semua OPD karena selama ini pelaporan di aplikasi e-kenda dengan kenyataan di Lapangan tidak sesuai	Mengembangkan fitur tambahan pada Aplikasi e-Kenda, termasuk mengunci entri setiap minggunya, sehingga apabila konsultan pengawas terlambat entri realisasi maka harus melalui prosedur keterlambatan. Selain itu juga menambah fitur polyline untuk mengetahui milestone pengambilan gambar dari setiap minggunya, apakah sesuai pada lokasi atau tidak	Tidak ada paket pekerjaan fisik yang terlambat
2	Lebih menyempurnakan lagi Aplikasi e-Kenda agar lebih bisa mengontrol Laporan pekerjaan yang di lakukan oleh OPD, karena selama ini Laporan yang ada di Aplikasi e-kenda	bukti fisik sudah harus melalui ambil gambar langsung beserta timestamp waktu & lokasi, serta polyline pengambilan setiap minggunya.	Tidak ada paket pekerjaan fisik yang terlambat

	sudah 100% tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai	Tentunya juga perlu dilakukan monev dengan instansi lain (PBJ & Inspektorat) terkait pengendalian kontrak dan pengawasan pekerjaannya.	

6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Meningkatkan koordinasi untuk mengundang anggota DPRD sesuai dapilnya apabila ada kegiatan Bupati/ Wakil Bupati di wilayah itu	Akan berkoordinasi dgn Sekretariat Dewan untuk mengundang Anggota DPRD (sesuai dapil) berkaitan kegiatan Pimpinan Daerah di Wilayah tersebut	Meningkatkan harmonisasi kinerja antara Bupati / wakil Bupati dengan Anggota Legislatif

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Belum tercapainya program Satu Data, yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pelayanan lainnya untuk segera diwujudkan	Bekerja sama dengan USAID Erat dalam rangka implementasi Satu Data di Kabupaten Sidoarjo sesuai Perbup 41 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo. Dan telah disusun rencana aksi Satu Data Kabupaten Sidoarjo mulai bulan Maret s/d Agustus 2023	Merumuskan dan memetakan data prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo per Urusan
2	Melakukan pemetaan terkait tanggung jawab/ kewenangan OPD – OPD yang selama ini masih sering tumpang tindih dalam melakukan kegiatan pekerjaan di lapangan	Merumuskan *crosscutting* dan *cascading* kinerja sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	Pencapaian target IKU dan IKD tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3	Meningkatkan koordinasi antar OPD, agar sinkronisasi dengan program pembangunan yang dilaksanakan	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja daerah, program prioritas, serta pencapaian program, kegiatan dan subkegiatan PD secara berkala	1. Rencana aksi atas pencapaian target yang telah ditetapkan 2. Meminimalisir kendala dan masalah yang dihadapi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan

8. Badan Kepegawaian Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Segera disusun formulasi terkait permasalahan Pegawai Non ASN yang tidak masuk dalam formasi P3K.	1. Melakukan inventarisasi pegawai non asn eksisting dan melakukan identifikasi jabatan yang dapat diusulkan formasi PPPK, penyedia/outsourcing atau lainnya sesuai ketentuan Inventarisasi pegawai non ASN eksisting 7316 orang Masuk pendataan BKN 3088 orang oursourching (pengemudi, penjaga, kebersihan) 741 orang Sesuai surat MenPAN Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 instansi tetap mengalokasikan anggaran belanja pegawai non ASN	a. Pemenuhan kekurangan kebutuhan pegawai b. Penyelesaian pegawai non ASN
		2. Melakukan review peta jabatan	
		Review peta jabatan telah dilakukan dan ditetapkan sesuai Perbup 23 Tahun 2023	
2	Agar segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong di semua tingkatan	Menyusun Kelompok Rencana Suksesi dan menyusun Perencanaan Pengisian JPTP	Keterisian Jabatan dan optimalisasi kinerja
		Pengisian JPTP telah dilaksanakan, yakni Selter untuk lima JPTP dan Selter Sekda	
3	Proses selter maupun pansel mutasi jabatan agar dilakukan secara profesional dan transparan	Selter JPTP telah dilaksanakan dan diumumkan sesuai ketentuan	Keterisian Jabatan dan optimalisasi kinerja
		Pengumuman Selter disampaikan melalui website http;//bkd.sidoarjokab.go.id dan Instagram : bkd_sidoarjo	
		Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dengan Keputusan Bupati dan koordinasi berkala dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Untuk persertifikatan Aset milik Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 target dari BPKAD sejumlah 1.000 yang terealisasi sejumlah 600, kendala yang dihadapai ada Desa sedangkan untuk tahun 2023 targetnya sejumlah 1.500	a. Membentuk tim penyelesaian status kepemilikan aset;	Telah dibentuk SK Tim Penyelesaian status kepemilikan aset Nomor 188/73/438.1.1.3/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023
		b. Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;	Telah dibentuk SK Tim Penelusuran aset Nomor 188/71/438.1.1.3/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Tim Penelusuran Aset Pemerintah dan Sekretariat Tim Penelusuran Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023
		c. Membangun koordinasi dan sinergi dengan BPN;	Telah dilaksankannya koordinasi dan membangun sinergi dengan Kantor Pertanahan Sidoarjo dalam rangka percepatan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
		d. Sosialisasi secara massif ke desa melalui kecamatan;	Telah dilaksanakannya Sosialisasi secara massif ke desa-desa melalui kecamatan
		f. Membentuk tim korlap di masing-masing OPD.	Telah dibentuk Tim Korlap di bawah masing-masing OPD
2	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Opini atas audit BPK WTP	a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;	Telah dilaksanakannya Pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan
		b. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja;	Rekonsiliasi pendapatan juga telah dilaksanakan setiap bulan Januari-Desember 2023 khusus untuk OPD Penghasil begitupun juga untuk rekonsiliasi belanja telah dilaksanakan per bulan.
		c. Rekonsiliasi laporan keuangan;	Rekonsiliasi Laporan Keuangan telah dilaksanakan per tribulanan (Januari, April, Juli, Oktober 2023)

		d. Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;	Telah dilaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
		e. Pengembangan aplikasi SIKSDA.	• Aplikasi SIKSDA sudah terkoneksi dengan BSRE sehingga bisa menghasilkan Tanda Tangan Elektronik (TTE). • Paperless di Aplikasi Siksda, SPM yang sudah di-TTE oleh PA/KPA diupload beserta dokumen pendukung kemudian diterima dan diverifikasi oleh verifikator kemudian dibuatkan SP2D dan selanjutnya divalidasi dan di-TTE untuk dilakukan pencairan oleh Kuasa BUD.
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari penyertaan modal BPR DELTA ARTA (PERSERODA), PD ANEKA USAHA, PERUMDA DELTA TIRTA DAN BANK JATIM perlu dievaluasi dan melibatkan konsultan.	a. Melakukan rapat koordinasi/FGD dengan BUMD terkait dan Bagian Perekonomian selaku pembina BUMD;	Telah dilaksanakannya rapat koordinasi/FGD dengan BUMD terkait dan Bagian Perekonomian selaku pembina BUMD
		b. Mengusulkan anggaran Belanja Konsultansi dalam PAPBD 2023	Refocusing Anggaran
4	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil sewa BMD, Hasil kerjasama pemanfaatan BMD, Jasa Giro dan Pendapatan Bunga perlu dievaluasi dan dianalisa yang matang dan melibatkan konsultan	a. Membentuk tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sewa BMD;	Telah dibentuk SK Tim Pemanfaatan aset Nomor 188/74/438.1.1.3/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Tim Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah dan Sekreatariat Tim Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023
		b. Melakukan analisa potensi PAD yang bersumber dari sewa BMD dan hasil kerjasama BMD	Telah dilaksanakan MONEV untuk dapat menganalisa potensi PAD dari Sewa dan hasil kerjasama BMD
		c. Mengusulkan anggaran Belanja Konsultansi dalam PAPBD 2023	Refocusing Anggaran

10. Badan Pelayanan Pajak Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari penyertaan modal BPR DELTA ARTA (PERSERODA), PD ANEKA USAHA, PERUMDA DELTA TIRTA DAN BANK JATIM perlu dievaluasi dan melibatkan konsultan.	Sesuai tugas BPPD dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah bahwa BPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah. Sehingga terkait PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak termasuk dalam tugas dan fungsi BPPD	-
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil sewa BMD, Hasil kerjasama pemanfaatan BMD, Jasa Giro dan Pendapatan Bunga perlu dievaluasi dan dianalisa yang matang dan melibatkan konsultan	Sesuai tugas BPPD dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah bahwa BPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah. Sehingga terkait PAD yang bersumber dari sewa BMD, Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD, Jasa Giro dan Pendapatan Bunga tidak termasuk dalam tugas dan fungsi BPPD	-
3	Terkait pajak daerah OPD teknis masih kurang matang terkait penentuan potensi, target dan realisasi sehingga lampauan terlalu tinggi	Melakukan analisa potensi target dan realisasi pajak daerah dengan melibatkan tenaga ahli	Telah direalisasikan Jasa Konsultan Pendampingan Identifikasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

	dan berdampak pada SILPA		
4	Melakukan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, yaitu : - Penerbitan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;	- Penerbitan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2022	SPPT PBB P2 Tahun 2023 masih menampilkan informasi tunggakan
	- Adanya penangguhan ketetapan atas objek yang terdapat piutang di atas 5 tahun untuk ketetapan dibawah Rp2.000.000 dan 10 tahun untuk ketetapan di atas Rp2.000.000;	- Penangguhan ketetapan atas piutang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022	Telah dilakukan pemutakhiran data PBB dan pengaktifan kembali bagi NOP WP yang akan melakukan pembayaran PBB P2
	- Bekerja sama dengan APH dalam rangka penindakan kepada wajib pajak;	- Terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dengan ketetapan diatas Rp2.000.000 sudah dilakukan penagihan aktif oleh Kejaksaan dan rencana untuk Buku 2 (Ketetapan Rp500.000-Rp2.000.000) yang memiliki tunggakan akan dikerjasamakan untuk dilakukan penagihan aktif	Telah dilakukan penagihan aktif oleh kejaksaan
	- Pemasangan alat perekam transaksi untuk memudahkan pengawasan transaksi objek pajak;	- Melakukan monitoring dan evaluasi atas Wajib Pajak yang telah dipasang alat perekam transaksi dengan menyampaikan surat konfirmasi atas pembayaran wajib pajak atau surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK)	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas Wajib Pajak yang telah dipasang alat perekam transaksi dengan menyampaikan surat konfirmasi atas pembayaran wajib pajak atau surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK)
	- Meningkatkan sistem pelayanan pajak daerah secara daring sehingga akses kepada Wajib pajak lebih mudah.	- Pengembangan aplikasi pajak daerah	Telah dikembangkan pembayaran menggunakan VA dan QRIS (QRIS maksimal nilai 10 juta dan tidak ada biaya admin walau di scan dari mobile banking atau ewallet apapun)

11. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	P2CKTR Berinovasi menuntaskan masalah Sanitasi atau pembangunan jamban Sehat dan air bersih di Sidoarjo yang Non PDAM	saat ini sedang dalam proses usulan pengajuan dana APBN sebesar ±2,1M (SANIMAS), LPK sebesar ±200 Juta Rupiah, dan DAK sebesar ±1M Rupiah ; sedangkan untuk air minum diusulkan dana APBN HAMP sebesar ±2M Rupiah	Sanitasi dan Air Bersih Kabupaten Sidoarjo
2	Di tahun berikutnya Dinas P2CKTR harus bisa menuntaskan Kawasan Kumuh yang belum tertangani sekitar 212,58 Ha.yang tersebar di desa/kel Sukodono seluas 13,91 Ha, Desa/Sumokembangsri seluas 12,93 Ha. Desa/ Kel. Pekauman seluas 12 Ha. Desa/Kel. Bligo 11,71 Ha. Desa/ Kel.seluas 11.31 Ha	- Untuk menuntaskan SK Kawasan Kumuh 311/2021 dimohon untuk dilakukan pengalihan lokasi yang telah ditentukan dan terlampir pada SK Kawasan Kumuh 311/2021 untuk usulan POKIR dan Musrenban - Terdapat dukungan APBN (Program KOTAKU) yang telah berakhir Bulan Juni 2022 untuk Program Pencegahan Kawasan Kumuh -Telah terdapat beberapa kegiatan RTLH sesuai lokasi SK Kawasan Kumuh 311/2021 yang telah masuk RENJA Tahun Anggaran 2024	Pengentasan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Kabupaten Sidoarjo

12. Dinas Perikanan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Realisasi Tindak lanjut
1,	DPRD memberikan apresiasi atas capaian Kinerja Dinas Perikanan di Tahun 2022 dengan meningkatnya indikator produksi Perikanan Tangkap, Budidaya air payau dan lain-lain, realisasi serapan anggaran tahun 2022 yang mencapai 98,98 %, namun dampaknya belum terlihat untuk petani tambak di daerah Sidoarjo Timur yaitu Tanggulangin dan Jabon	Normalisasi saluran sudah dilakukan di daerah avour keboguyang sepanjang 1,5 km pada tahun 2022, tetapi utk avour Jatianom s.d Tuyono Desa Permisan, Plumbon dan Penatarsewu sudah kami ajukan lewat SIPD utk pekerjaan tahun 2024.	*13. Rehab/Normalisasi Saluran Tambak Ds. Permisan, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo dan *15. Rehab/Normalisasi Saluran Tambak Ds. Tambak Kalisogo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sudah diusulkan dalam SIPD 2024 tapi belum bisa diakomodir karena refocusing anggaran

	(Permisan, Kalisogo, Plumbon , Keboguyang) yang gagal panen dikarenakan belum adanya pekerjaan normalisasi sungai di daerah tersebut.		
2,	Agar melakukan perbaikan infrastruktur jembatan produksi dan juga sarana dan prasarana budidaya ikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani tambak dan pembudidaya ikan di Sidoarjo Timur	Untuk Pengajuan pembangunan jembatan produksi sdh kami ajukan utk Tahun 2023 tetapi ada refocusing anggaran namun selanjutnya sdh kami ajukan kembali pada SIPD utk pekerjaan di Tahun 2024.	karena keterbatasan anggaran pengajuan pembangunan jembatan belum dapat diusulkan di SIPD 2024, untuk pekerjaan fisik prasarana yang di usulkan di SIPD 2024 antara lain Normalisasi, Pembangunan jalan produksi dan Pembangunan tanggul/bronjong tambak
3,	Membentuk satgas untuk pemeliharaa saluran tambak	Satgas di Perikanan memang blm ada tapi pada Dinas Perikanan ada Pokdakan yaitu kelompok pembudidaya ikan yg berfungsi sebagai wadah utk menyampaikan informasi terkait permasalahan budidaya ikan di lapangan dan sarana prasarana tambak yg di bina oleh penyuluh perikanan sesuai wilayah binaan per kecamatan	1. Mengaktikan kembali POKLINA (Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan) di Kabupaten Sidoarjo dan mengesahkan SK POKLINA tersebut sebagai mitra Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo dalam menjalankan program pengelolaan tambak partisipatif dengan di dukung oleh Dana Daerah; 2. Akan berkoordinasi dengan Dinas PUBMSDA Kab. Sidoarjo utk memasukkan POKLINA sebagai pertimbangan dalam melakukan penyusunan jadwal RTG (Rencana Tata Tanam Global) utk komoditi perikanan dan dimasukkan dalam HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air).
4,	Penyerapan Anggaran Tahun 2023 tribulan I Sebesar Rp. 2.445.203.160 atau hanya 64 % dari total Anggaran tribulan I Sebesar Rp. 3.796.522.479	Penyerapan anggaran terkendala belum turun SK Bupati terkait Hr. Pengarah dan Narasumber; penyerapan TPP Tribulan I belum bisa dilaksanakan;	1. Penyerapan anggaran honor pengarah dan narasumber menunggu SK Bupati; 2. Penyerapan TPP tribulan I menunnggu persetujuan dari kemenpanRB

13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Agar segera dilakukan realisasi pembangunan depo arsip di desa Lebo	Telah diajukan Pengurukan depot arsip pada DPA TA 2023 namun pada saat akan pelaksanaan terjadi kendala dalam pengurusan aset di Desa Lebo	Terwujudnya Depot Arsip Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
		Permohonan pemanfaatan Ex BPN yang berlokasi tepat di sebelah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai depot arsip	sebagai alternatif karena tidak terwujudnya pembangunan depo arsip di desa Lebo karena masalah pengurusan Asset yang belum selesai

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Perlu suport anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Pemerintahan Desa serta segera memenuhi kekurangan personil yang dibutuhkan	kami perhatikan untuk ditindaklanjuti	pembinaan dan evaluasi Pemerintahan Desa serta pemenuhan kekurangan personil yang dibutuhkan

15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Komisi C Mengapresiasi Kinerja PU BMSDA dengan terbangunnya jalan beton sepanjang 23,302 m dan Pembangunan Frontage Road 3.003,9 m sehingga jalan dalam Kondisi mantap di Sidoarjo meningkat, namun di sisi lain masih banyak pengaduan Masyarakat terkait jalan rusak maka dari itu PUBMSDA harus bisa	Dinas PUBMSDA telah menyiapkan inovasi terkait penanganan aduan masyarakat yakni Sistem Informasi Aduan PU (SIAP) dan sudah terbangun Grand Design Application. Aplikasi yang dibangun merupakan sistem aplikasi berbasis maps, dan berisi informasi layanan/perencanaan yang akan dilaksanakan. sehingga	Nantinya aplikasi tersebut berfungsi untuk tracing / pemantauan aduan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memantau secara langsung Tindak Lanjut hasil aduan.

	berinovasi untuk percepatan pemeliharaan jalan karena setiap tahun yang selalu menjadi permasalahan di masyarakat.	masy akan mudah dalam menyampaikan aduan, dan dapat menerima laporan Tindak Lanjut aduan.	
		Dinas PUBMSDA akan mempersiapkan tim / satgas jalan dan air berbasis kewilayahan sesuai dengan basis wilayah UPTD.	Untuk mempercepat pelayanan jalan mantab di Kabupaten Sidoarjo
2	Untuk menormalisasi saluran irigasi dari hulu ke hilir (jabon, porong, tanggulangin), dan Avour Kalialoh bila itu kewenangan pusat atau propinsi PUBMSDA harus terus berkoordinasi supaya dilakukan Normalisasi yang sudah bertahun tahun terkesan pembiaran	Dinas PUBMSDA telah melakukan penjajakan kerjasama dengan BBWS yang telah dimulai dengan Rapat koordinasi penjajakan Kerjasama terkait kewenangan saluran yang ada di wilayah Sidoarjo yang dimediasi oleh Bagian Kerja Sama.	Mengetahui dan menetapkan daerah/saluran kewenangan Kabupaten Sidoarjo, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan pekerjaan infrastruktur (saluran irigasi dan drainase)

16. Dinas Kesehatan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Komisi C minta Dinkes untuk tetap merencanakan dan mengupayakan Pembangunan puskesmas Baru di Sidoarjo agar kebutuhan tiap tahun bisa membangun 4 puskesmas	Kebutuhan penambahan puskesmas di Kabupaten Sidoarjo memang sangat dibutuhkan. Namun demikian. dengan adanya program ILP (Integrasi Layanan Primer) maka kami akan mengoptimalkan fungsi jejaring (klinik, RS, apotek, lab dan faskes lainnya) dan jaringan (pustu, pusling dan bidan desa) untuk menangani permasalahan kesehatan masyarakat. Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi dan pelatihan ILP di	Rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas yang ada saat ini masih jauh dari standar (1 : 77.000), sedangkan standarnya adalah 1 : 30.000

		Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat yang belum bisa tercover karena kurangnya jumlah puskesmas, bisa diatasi dengan optimalisasi pelaksanaan ILP.	
2	Setiap perencanaan pembangunan Puskesmas Baru untuk menyiapkan lahan Parkir	Kami sangat mengupayakan dalam setiap pembangunan puskesmas baru untuk dilengkapi dengan lahan parkir yang memenuhi kebutuhan puskesmas. Beberapa puskesmas baru yang telah dibangun, sudah memenuhi kebutuhan lahan parkir meskipun tidak sempurna. Dari 31 Puskesmas yang ada saat ini, yang mempunyai lahan parkir memadai hanya : 1. Porong 2. Sedati 3. Waru 4. Taman 5. Wonoayu 6. Sidodadi 7. Sukodono Dan yang lainnya lahan parkir hanya untuk sepeda motor dan ambulance.	Karena selama ini banyak puskesmas di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki lahan parkir yang kurang memadai

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk segera	Penyusunan dan penetapan arsitektur Keamanan SPBE Pemkab Sidoarjo	Dalam proses penyusunan arsitektur keamanan sebagai bagian dokumen arsitektur SPBE Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan selesai pada akhir triwulan IV tahun 2023

	dilakukan optimalisasi termasuk pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Pelaksanaan IT Security Assessment pada sistem elektronik Pemkab Sidoarjo sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 2. Peningkatan kapasitas sumber daya keamanan informasi (perangkat dan SDM)	1. Telah dilaksanakan pengujian keamanan sejumlah 15 aplikasi baru dan beberapa website Pemkab Sidoarjo sesuai standar keamanan SPBE 2. Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dengan menugaskan personil mengikuti seminar dan pelatihan terkait keamanan informasi, antara lain pelatihan teknis keamanan siber di PPSDM BSSN pada Februari 2023 dan Cyber security awareness oleh inixindo pada Maret 2023. sedangkan terkait peningkatan kapasitas perangkat keamanan dilakukan hanya dengan pemeliharaan komputer/laptop personil keamanan informasi karena anggaran yang tidak disetujui antara lain pengadaan IPCamera ruang server dan pengadaan lisensi Firewall untuk pengamanan server aplikasi

2	Optimalisasi implementasi respon cepat dari pengaduan masyarakat untuk segera dilakukan	1. Akan dilaksanakan RAPAT KOORDINASI dan MONEV SP4N LAPOR di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo , untuk penguatan pengelolaan aduan masyarakat. (Program juga akan didukung USAID ERAT) 2. Publikasi Masive APLIKASI SP4N LAPOR kepada masyarakat menggunakan PESO (Paid Media, Earn Media, Shared Media, Own Media) sehingga masyarakat terdukasi untuk aduan yang sifatnya tidak kegawatdaruratan dapat menggunakan SP4N LAPOR baik melalui web based atau aplikasi android. Dan untuk aduan yang sifatnya kegawatdaruratan difasilitasi menggunakan kanal Call center 112 Sidoarjo. 3. Pembuatan Penandatanganan Kerjasama lintas OPD dan Stakeholders(mitra pemerintah) untuk bersepakat memberikan pelayanan prima dan respon cepat pada aduan yang masuk di OPD 4. Tim Monev Pengelolaan Aduan juga sudah ada, SK dibentuk Inspektorat	1. Sudah dilaksanakan Rakor SP4N-LAPOR! bersama admin OPD dan Instansi 2. Sudah koordinasi aduan tidak gawat darurat secara manual dengan call center 112 3. Sudah ada SK Tim Pengelola SP4N-LAPOR! tahun 2023

3	Segera mewujudkan progam pembangunan kampung digital untuk mempromosikan UMKM di desa yang ada di Sidoarjo	Kontribusi Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dalam mewujudkan Kampung Digital : - 1. Sosialisasi & Edukasi Literasi Digital kepada Pemdes, dan BUMDES di Desa agar lebih produktif dan inovatif melalui Workshop / Coaching Class online Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Produktivitas dan income UMKM. Sasaran : a. Karang Taruna, UMKM Desa, BumDesa, : lebih pada literasi pengelolaan media social sebagai media promosi dan media jejaring untuk meningkatkan income, baik melalui afiliasi e-commerce dan juga monetisasi youtube b. Pemdes & Kader : lebih pada literasi digital dan pemanfaatan digitalisasi informasi dalam sektor pemerintahan,	1.Pelatihan Pengelolaan Media Sosial untuk Pemerintah Desa , Kader, Karang Taruna dan Penyuluh --> sudah dilaksanakan di Desa Tambakrejo Tahun 2023 2.Pelatihan & Sosialisasi Pengelolaan Website Desa (sebagai kanal media komunikasi publik yang gratis) harapannya Pemdes dapat memaksimalkan sebagai kanal media komunikasi publik, kanal aduan dan kedepan dapat menjadi etalase produk UKM yang dihasilkan BumDesa atau warga sekitar. --> Pelaksanaan 4-6 Des 2023

		Bidang Tata Kelola Informatika : - menyiapkan aplikasi pendukung untuk implementasi kampung digital mulai dari alur program, desain antar muka aplikasi, modul sesuai fitur yang dibutuhkan, pembangunan database dan interoperabilitas dengan aplikasi lainnya. - mengelola aplikasi yang sudah dibangun melalui penanganan gangguan sampai dengan rencana pengembangan aplikasi	1. Telah dilakukan kerjasama antara Dinas Kominfo dengan PT. Telkom dan Dinas PMD untuk implementasi penggunaan aplikasi Simpeldesa di 50 (lima puluh) Desa tersebar di Kecamatan Jabon, Taman, Waru, dan Gedangan pada tahun 2023 ini. 2. Fasilitasi pengelolaan aplikasi berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo merujuk pada pasal 12 ayat 1 tentang Rekomendasi Aplikasi telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 060/5123/438.5.14/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Informasi SOP Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi
4	Segera mengimplementasikan progam call Center 112 untuk respon cepat bebas pulsa 24 jam pengaduan masyarakat	Layanan Call Center 112 Bebas Pulsa 24 Jam Pengaduan Masyarakat sudah di implementasikan, dan kini juga selalu dalam evaluasi untuk dikembangkan versi aplikasi ke 2.0, 1.Updating aplikasi Call Center 112 versi 2.0 2.Pengkinian SOP Penanganan Aduan pada setiap OPD 3.Tindak lanjut dan pengkinian kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat lintas OPD	1. Telah dilakukan updating aplikasi Call center 112 versi 2.0 pada bulan November 2022 2. Belum ada tindak lanjut terkait pengkinian SOP penanganan aduan pada setiap OPD 3. Baru akan dilakukan setelah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 2023

18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan usaha mikro contohnya melalui fasilitasi NIB gratis, pendampingan, pelatihan secara online maupun offline dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu	Akan ditindak lanjuti dan kegiatan pelatihan yang sudah di anggarkan dalam APBD 2023 akan dilaksanakan dengan baik	Optimalisasi pelayanan dan pendampingan untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo
2	Memfasilitasi perijinan, memberi pelatihan manajemen, memfasilitasi klinik konsultan koperasi dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Akan ditindak lanjuti dan kegiatan pelatihan yang sudah di anggarkan dalam APBD 2023 akan dilaksanakan dengan baik	Fasilitasi perijinan, manajemen, konsultasi dan pengawasan untuk koperasi di Kabupaten Sidoarjo

19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Untuk segera mengusulkan dan melaksanakan rehab ruang kelas SDN dan SMPN yang kondisinya rusak Berat, untuk rusak ringan agar di perbaiki dengan menggunakan anggaran dari BOS	Pada DPA tahun 2023 telah di anggarkan untuk rehab sekolah rusak berat sebanyak 39 sekolah dengan pagu Rp. 20.146.117.530	Rehab sekolah rusak berat dan sedang
2	Untuk menyelesaikan Pembangunan sekolah SMPN di Prambon Pada tahun 2023 ini	Pada DPA tahun 2023 telah dianggarkan untuk kelanjutan pembangunan SMP 2 Prambon sebesar Rp. 9.000.000.000,-	Pembangunan lanjutan SMPN 2 Prambon

20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Membangun tempat centra industri UMKM di Sidoarjo yang bisa menampung industry kreatif yang ada di Sidoarjo	Membangun SIHT di Desa Candi Pari Kecamatan Porong	Sebagai tempat promosi produk-produk unggulan UKM / IKM Kabupaten Sidoarjo dan sebagai tempat tujuan kunjungan tamu dari luar Kabupaten Sidoarjo
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum bisa membuat pasar rakyat untuk menciptakan pasar yang respresentatif, karena bertahun tahun belum bisa membangun atau merevitalisasi pasar tradisional yang sudah tidak layak dipergunakan, dan merekomendasikan untuk merevitalisasi pasar larangan yang sudah ada perencanaannya	Disperindag mempertimbangkan revitalisasi pasar. Jika pasar swasta sudah berjalan, maka pemerintah tidak perlu hadir. Dinas masih mempertimbangkan urgensi revitalisasi pasar buduran dan wonoayu.	Untuk menciptakan pasar rakyat yang representatif
3	Diharap Dinas Perindag dalam menentukan target retribusi pelayaan Tera/Tera Ulang perlu ada kajian dan analisa agar dikemudian hari antara target dan realisasi bisa setara dan berimbang untuk itu perlu melibatkan konsultan	Sudah tidak perlu lagi karena sudah ada HKPD	- Untuk mengetahui potensi UTTP yang ada di Kabupaten Sidoarjo - Untuk menentukan target retribusi
4	Meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen; target	Meningkatkan Daya Saing IKM agar menembus pasar global dengan meningkatkan komoditi ekspor dan volume ekspor	Meningkatkan daya saing IKM secara tepat sasaran dan lebih merata

	IKM naik kelas 300 dan realisasi 300 IKM		
5	Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor	Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor dengan menambah nilai transaksi ekspor	Untuk peningkatan volume ekspor daerah
6	Melaksanakan/program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah	Meningkatkan kembali volume ekspor dengan capacity building melalui kegiatan bussiness matching	Untuk peningkatan volume ekspor daerah
7	Pendampingan IKM dalam memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) IKM	Sudah dilakukan pendampingan IKM untuk memperoleh KITE melalui kerjasama dengan Export Center Surabaya	Untuk peningkatan volume ekspor daerah
8	Melakukan Pameran dagang ditingkat Nasional Internasional terhadap produk unggulan Sidoarjo	Pameran Dagang rutin di tingkat nasional telah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2023 di beberapa daerah antara lain : 1. Pameran Batik Bordir (Grand City Surabaya) 2. Jatim Fair (Grand City Surabaya) 3. Inacraft (Jakarta Convention Center) 4. Kriyanusa (Jakarta Convention Center) 5. Jogja Expo (Jogja City Mall)	Untuk promosi produk unggulan daerah dan meningkatkan perekonomian UKM / IKM di Kabupaten Sidoarjo
9	Melakukan pembinaan/pemberdayaan UMKM yang beroreantasi Eksport	Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor dengan menambah nilai transaksi ekspor	Untuk meningkatkan volume ekspor daerah dan mencetak eksportir baru
10	Meningkatkan citra produk dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan eksport	Meningkatkan citra produk dengan differensiasi produk lokal. Penguatan citra produk lokal yang sudah diakui oleh negara tujuan ekspor yaitu seperti udang, bandeng, produk kulit, tanaman hias, wadah kemasan plastik moorlife, makanan minuman, dan lain-lainnya	Untuk meningkatkan volume ekspor daerah

11	Memberikan pelatihan ekspor bagi UKM/IKM untuk meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor	Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor dengan menambah nilai transaksi ekspor	Untuk meningkatkan volume ekspor daerah dan mencetak eksportir baru
12	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan baik dari pengelola pasar maupun pedagang pasar	Tahun 2023 Disperindag telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar melalui e-SKM dengan indikator kepuasan Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Prasarana yang tersedia	Untuk mewujudkan pasar yang representatif

21. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Untuk mencukupi dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pariwisata terutama wisata air yang ada di Sidoarjo	Untuk wisata air yang dimiliki oleh Pemda adalah Kolam renang sendang delta telah dilaksanakan pemeliharaan berupa pengecatan dan akan dilakukan revitalisasi gedung kolam renang yang semula outdoor menjadi semi indoor	memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana kolam renang sendang delta
2	Untuk memperbaiki sarana dan prasarana di GOR dalam rangka persiapan PORPROV (Pekan Olah Raga Provinsi) di Kabupaten Sidoarjo	Telah dilaksanakan beberapa perbaikan guna mempersiapkan PORPROV diantaranya: 1. Rehab Lintasan Atletik Stadion GOR, 2. Pemeliharaan Stadion Jenggolo 3. Rehabilitasi tower lampu stadion gelora delta sda 4. Pemasangan Lampu Bulu Tangkis GOR 5. Pemeliharaan	Mendukung penyelenggaraan acara PORPROV

		Gedung GOR 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Petanque 7. Pemeliharaan Voli Pantai	
3	Perlu melakukan kajian potensi retribusi tempat rekreasi dan olaharag yang matang melibatkan konsultan sebagai bahan menentukan target guna bisa realisasi	Telah dilakukan kajian naskah akademis Perda Retribusi Tempat Olahraga dan saat ini perda masih dalam proses di bagian hukum	Meningkatkan Pendapatan melalui Retribusi Tempat Olahraga
		Perda Rencana ditetapkan tahun 2024	

22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	DLHK untuk melakukan peningkatan penghijauan, dengan menambah luasan RTH terutama di perkotaan, permukiman yang padat dan di wilayah Barat Sidoarjo untuk di bangun menjadi taman atau RTH serta menambah penghijauan di median Jalan di Sidoarjo	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak menambahkan luasan RTH taman, melakukan revitalisasi keindahan RTH. Guna peningkatan Indeks Kualitas Lahan di masa mendatang perlu penambahan luasan RTH yang tentunya dengan dukungan anggaran memadai	Meningkatkan kualitas RTH taman utamanya keindahan wajah Kota Sidoarjo
2	Untuk mengfungsikan Kembali TPST yang ada di desa-desa dan meningkatkan kegiatan Sosialisasi/ penyuluhan kepada Masyarakat dalam penanganan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mendorong Pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan persampahan di masing-masing desa dengan memfungsikan kembali TPST yang ada (untuk TPST yang dibangun oleh Desa atau aset yang telah diserahkan ke Desa) melalui pendampingan dan evaluasi kinerja pengelolaan	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di setiap Desa/Kelurahan dapat berfungsi secara maksimal untuk mengurangi sampah dari tingkat sumber dan Masyarakat dapat

	Sampah di tingkat Desa	persampahan dengan skala layanan 1 desa. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan dan menyiapkan materi pembinaan ke wilayah Kecamatan terkait pengelolaan persampahan baik secara formal dengan menjadi narasumber kegiatan pembinaan/sosialisasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan/desa/kelurahan maupun memberikan secara informal melalui diskusi atau sharing baik secara langsung maupun melalui media sosial.	mengurangi sampah dari tingkat sumber sehingga sampah yang masuk ke TPST hanya memiliki sedikit residu untuk dibawa ke TPA
3	Karena kurangnya SDM sehingga menyebabkan Pekerjaan landscape di wilayah Sidoarjo yang menelan anggaran sangat besar tetapi hasilnya jauh dari harapan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengelola SDM yang ada guna melakukan pemeliharaan landscape taman guna menjaga kebersihan dan taman yang terawat.	Meningkatnya kebersihan, keindahan pada landscape di wilayah Sidoarjo
4	Kurangnya sosialisasi dan belum optimalnya kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah kepada masyarakat/sumber sampah, dibuktikan dalam LKPJ prosentase pengurangan sampah targetnya 28 % hanya realisasi 25 %.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Sidoarjo No. 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan berkoordinasi dengan satker lainnya dan melakukan kegiatan pelatihan pengolahan persampahan di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah.	Meminimalisasi timbulan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah, serta meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat.

23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Untuk aplikasi perijinan agar dapatnya dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat dan dapat dijangkau sampai ke Desa perlu dilakukan sosialisasi secara massif	- Telah Dilaksanakan sosialisasi pengenalan aplikasi OSS RBA dan SIPPADU, melalui media sosial dan podcast. Pengenalan aplikasi OSS telah dilakukan secara rutin selama 18 kali selama jemput bola dilaksanakan pada 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. - Pendampingan pelayanan di MPP dan kantor DPMPTSP Sidoarjo (Jalan Pahlawan No. 141), kegiatan jemput bola perizinan	- Memperluas pengetahuan masyarakat akan kewajiban dan kemudahan akses perizinan berusaha - Meningkatnya jumlah pelaku usaha (mikro) yang memiliki legalitas usaha
2	Perlu inovasi daerah yang mendukung aplikasi OSS RBA yang berlaku nasional dengan memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Jemput Bola untuk UMKM di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, dan Halal Center; serta Tim Prime Service untuk membantu perusahaan-perusahaan yang dipilih dan diprioritaskan	- Telah dilaksanakan inovasi daerah berupa kegiatan jemput bola perizinan, dengan tujuan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap tertib legalitas dalam berusaha - Berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah baik daerah, wilayah OPD teknis dan instansi vertikal lainnya, juga lembaga atau layanan yang bergerak dan mendukung kegiatan dimaksud	Peningkatan pengetahuan serta layanan dan pemberian izin usaha (mikro)

3	Kolaborasi yang baik antara dinas teknis pemangku perizinan berusaha dan instansi teknis terkait penerbitan perizinan, serta komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim dan Kementerian	Bahwa perizinan yang terbagi dalam 16 sektor tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh DPMPTSP tanpa ada peran serta dukungan dan kerja sama dengan OPD teknis lainnya, baik yang ada di daerah maupun kementerian/lembaga vertikal. Pasca UU Ciptaker kewenangan perizinan dibagi menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, dan kementerian. DPMPTSP aktif berkolaborasi dan berkoordinasi seperti contoh dalam hal pengawasan.	Peningkatan kinerja layanan
4	Perlu dilakukan kajian potensi retribusi persetujuan bangunan gedung agar pendapatan dan realisasi berimbang	Telah dilakukan kajian potensi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan oleh BAPPEDA dan dihadiri oleh DPMPTSP.	Melakukan Analisa Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo

24. Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1	Agar dialokasikan anggaran untuk seragam dinas satpol PP mengingat sudah 2 tahun tidak ada pengadaan seragam sedangkan intensitas kegiatan yg semakin bertambah menjelang pelaksanaan pemilu 2024	Mengusulkan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas lapangan Satpol PP pada Perubahan APBD tahun 2023	Pengadaan pakaian dinas lapangan untuk personil Satpol PP dapat terlaksana pada Tri Bulan IV tahun anggaran 2023, sehingga bisa dipakai pada saat pelaksanaan Pemilu serentak awal tahun 2024

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.

BAB V
PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Januari 2023 Menerima piagam Penghargaan Kategori Terbaik ke-5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Lapangan Bola Prapat Kurung, Perak Timur, Surabaya.

2. Pada tanggal 28 Februari 2023 Menerima Penghargaan Adipura Kategori Kota Sedang dari Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta

3. Pada tanggal 14 Maret 2023 Mendapat Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) dari Wapres RI karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di Balai Sudirman, Jakarta.

4. Pada tanggal 15 Maret 2023 Mendapat Penghargaan dari Radar Sidoarjo sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan Infrastruktur dalam Radar Sidoarjo Award 2023, di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo

5. Pada tanggal 29 April 2023 Mendapat Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah (PPD) Kinerja Terbaik Nasional peringkat ke – 5, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah)Otoda) ke- 27, di Anjungan City of Makassar

6. Pada tanggal 25 Mei 2023 Meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10x Berturut-turut atas LHP LKPD T.A. 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diterima di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

7. Pada tanggal 29 Mei 2023 Meraih Penghargaan E-Purchasing Award atas nilai transaksi terbanyak dalam pemanfaatan barang/jasa melalui e-katalog lokal Kabupaetn/Kota Tahun 2023, dari Gubernur Jatim, di Grand City, Surabaya.

8. Pada tanggal 16 Juni 2023 Meraih The 1st Indonesia GPR Awards 2023 (IGA) sebagai pemimpin terpopuler di Media Pemberitaan Online dari Humas Indonesia, diberikan di Hotel Clora, Makassar.

9. Pada tanggal 12 Agustus 2023 Meraih Jasa Bakti Memajukan Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, di Jogjakarta.

10. Pada tanggal 29 Oktober 2023 Meraih Penghargaan “Inspirational Regional Head Who Mobilizies Youth” sebagai Pimpinan Daerah Yang Menginspirasi dan Penggerak Para Kaum Muda, dari Media Kabarpas, di Luminor Hotel, Sidoarjo.

11. Pada tanggal 13 November 2023 Mendapatkan Apresiasi dari Yankes Kemenkes dr. Azhar Jaya, S.H., SKM., MARS atas predikat Kelas A RSUD Sidoarjo, di Sidoarjo.

12. Pada tanggal 16 November 2023 Meraih Juara I Penyelenggara Pelayanan Kesehata Tradisional yang Cemerlang, Efektif, Responsif, Inovatif, dan Akurat Tradisional (Pelita Ceria) se – Jatim, di Batu, pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59

13. Pada tanggal 11 Desember 2023 Mendapatkan Penghargaan Dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jawa Timur, di Surabaya dengan kategori Pembina Terbaik Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

14. Pada tanggal 12 Desembr 2023 Kabupaten Sidoarjo Dinobatkan Sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 yang disusun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, serta Legislatif (DPRD) dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mendukung situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka selebar - lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

BUPATI SIDOARJO

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

TAHUN ANGGARAN 2023

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG SAYA HORMATI :

- PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO;
- REKAN-REKAN FORKOPIMDA KABUPATEN SIDOARJO;
- BAPAK WAKIL BUPATI SIDOARJO;
- BAPAK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
- SELURUH PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO;
- PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN SIDOARJO;
- PARA PIMPINAN PARPOL, PIMPINAN ORMAS, WARTAWAN DAN ANGGOTA LSM YANG HADIR;
- SERTA HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

UNTUK MENGAWALI ACARA INI, MARILAH KITA BERSAMA - SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DENGAN

AGENDA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023 INI, DALAM KEADAAN SEHAT WAL-AFIAT. MUDAH-MUDAHAN ACARA PADA HARI INI BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA SERTA MENDAPATKAN RIDHO DARI ALLAH SWT. AAMIIN YRA...

ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO YANG TELAH MENJALANKAN FUNGSINYA SECARA OPTIMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2023 MERUPAKAN TAHUN KETIGA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2021 – 2026 BESERTA PELAKSANAAN 17 PROGRAM PRIORITAS. LKPJ WAJIB DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DAERAH KEPADA DPRD MAKSIMAL 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. DAN PADA HARI INI AKAN SAYA SAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA YANG TELAH DITARGETKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023, PERLU SAYA SAMPAIKAN HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT :

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023 DITETAPKAN SEBESAR **RP.4.874.725.580.048,-** REALISASI SEBESAR **RP.5.020.221.472.820,07** ATAU MENCAPAI **102,98%**. ADAPUN PENDAPATAN DIMAKSUD BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN–LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2023, SEBESAR **RP.1.913.135.627.969,-** REALISASI SEBESAR **RP.2.050.814.700.362,07** ATAU TERCAPAI **107,20%**. PENDAPATAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2023 DITARGETKAN SEBESAR **RP.2.957.289.952.079,-** REALISASI SEBESAR **RP.2.366.272.099.637,-** ATAU TERCAPAI **100,29%**. SELANJUTNYA TARGET LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023, SEBESAR **RP.4.300.000.000,-** REALISASI SEBESAR **RP.3.567.282.000,-** ATAU TERCAPAI **82,96%**.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023 DITETAPKAN SEBESAR **RP.5.367.503.579.233,-** REALISASI SEBESAR **RP.5.001.778.673.487,58** ATAU **93,19%** DARI PAGU ANGGARAN YANG DITETAPKAN. BELANJA DAERAH TERSEBUT TERDIRI DARI BELANJA OPERASI DENGAN PAGU ANGGARAN SEBESAR **RP.3.725.646.627.268,-** REALISASI SEBESAR **RP.3.507.494.437.666,58** ATAU TERCAPAI **94,14%** DARI PAGU ANGGARAN. BELANJA MODAL DIALOKASIKAN SEBESAR **RP.846.634.465.375,-** DAN TEREALISASI SEBESAR **RP.715.198.635.441,-** ATAU **84,48%** DARI PAGU ANGGARAN. BELANJA TIDAK TERDUGA DIALOKASIKAN SEBESAR **RP.15.970.200.000,-** DAN TEREALISASI SEBESAR **RP.9.610.233.290,-** ATAU **60,18%** DARI PAGU ANGGARAN. BELANJA TRANSFER DIALOKASIKAN SEBESAR **RP.779.252.286.590,-** DAN TEREALISASI SEBESAR **RP.769.475.367.090,-** ATAU **98,75%** DARI PAGU ANGGARAN.

KINERJA KEUANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 TELAH MENGALAMI PENCAPAIAN BAIK, DIMANA SILPA MENURUN SAMPAI DENGAN **RP.511.927.597.548,05**.

DATA LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT MASIH BERSIFAT *UNAUDITED* BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

BERIKUTNYA AKAN SAYA SAMPAIKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, YANG TELAH DICAPAI PADA TAHUN ANGGARAN 2023, SEBAGAI BERIKUT :

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), MERUPAKAN UKURAN CAPAIAN KINERJA TERTINGGI DARI TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH. BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026 TERDAPAT 9 IKU YANG MENJADI TOLAK UKUR KEBERHASILAN UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, YANG CAPAIAN HASIL KEBERHASILAN KINERJANYA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	STATUS
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	TERCAPAI
2	Pertumbuhan Ekonomi	2,89	6,16	TERCAPAI
3	Indeks Gini	0,347	0,359	TIDAK TERCAPAI
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,09	8,05	TERCAPAI
5	Tingkat Kemiskinan	5,40	5,00	TERCAPAI
6	Indeks Infrastruktur	0,772	0,843	TERCAPAI
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,81	58,99	TIDAK TERCAPAI
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,92	81,88	TERCAPAI
9	Indeks Kesalehan Sosial	85	85,15	TERCAPAI

1. **INDEKS REFORMASI BIROKRASI**

   INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 DITARGETKAN BB (SANGAT BAIK), SEDANGKAN UNTUK CAPAIANNYA ADALAH KABUPATEN SIDOARJO MENDAPATKAN PREDIKAT **BB (SANGAT BAIK)** DENGAN NILAI **75,38**. CAPAIAN DIMAKSUD MENINGKAT DARI TAHUN 2022 YANG MASIH BERADA PADA KATEGORI B (BAIK)

2. **PERTUMBUHAN EKONOMI**

   PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 DITARGETKAN SEBESAR 2,89, DAN BERDASARKAN DATA DARI BPS KABUPATEN SIDOARJO, ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023 SEBESAR **6,16**. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET 2,89 MAKA PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023 SUDAH JAUH MELEBIHI TARGET YANG DITENTUKAN.

3. **INDEKS GINI**

   PERKEMBANGAN INDEKS GINI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 TERCAPAI **0,359** DARI TARGET 0,347 SEHINGGA MASIH BELUM DAPAT MENCAPAI TARGET YANG DITENTUKAN. MESKIPUN DEMIKIAN, APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2022 MAKA CAPAIAN TAHUN 2023 LEBIH BAIK, YAITU MENURUN 0,014 ANGKA ATAU SEKITAR 3,90%

4. **TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**

   TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2023 SEBESAR **8,05** PERSEN, TURUN 0,75 POIN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2022 YANG MASIH

BERADA PADA ANGKA 8,80 PERSEN. APABILA DIPERBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2023 YAITU 10,09 PERSEN, MAKA CAPAIAN TAHUN 2023 JAUH MELEBIHI TARGET YANG DITETAPKAN.

5. **TINGKAT KEMISKINAN**

   PADA TAHUN 2023 TINGKAT KEMISKINAN MENCAPAI **5,00** PERSEN TURUN DARI TAHUN 2022 YANG MASIH BERADA PADA ANGKA 5,36%. APABILA DIPERBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2023 YANG SEBESAR 5,40% MAKA CAPAIAN TAHUN 2023 SUDAH MEMENUHI TARGET YANG DITETAPKAN

6. **INDEKS INFRASTRUKTUR**

   INDEKS INFRASTRUKTUR KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2023 MENCAPAI **0,843** DARI TARGET 0,772 SEHINGGA MENCAPAI TARGET DENGAN CAPAIAN 109,20%. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2022 YANG SEBESAR 0,792 , MAKA TERDAPAT KENAIKAN YANG CUKUP TAJAM SEBESAR 0,051 ATAU 6,44%

7. **INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

   INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2023 MENCAPAI **58,99** DARI TARGET 59,81 SEHINGGA BELUM MEMENUHI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD. NAMUN APABILA DIBANDING DENGAN CAPAIAN TAHUN 2022 YAITU 57,54 MAKA TERDAPAT PENINGKATAN 1,45 POIN ATAU SEKITAR 2,52%

8. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2023 MENCAPAI **81,88** DARI TARGET 80,91 ATAU MENCAPAI TARGET DENGAN CAPAIAN 101,20%. APABILA DIBANDING DENGAN CAPAIAN TAHUN 2022 YAITU 81,02 MAKA TERDAPAT KENAIKAN 0,86 POIN ATAU SEKITAR 1,06%.

APABILA DIBANDINGKAN DENGAN SELURUH KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR, MAKA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SIDOARJO MENEMPATI PERINGKAT KE-1 UNTUK KABUPATEN DAN PERINGKAT KE-4 UNTUK KABUPATEN DAN KOTA.

9. INDEKS KESALEHAN SOSIAL

CAPAIAN INDEKS KESALEHAN SOSIAL TAHUN 2023 YAITU **85,15** MENINGKAT DARI TAHUN 2022 YANG SEBESAR 84,23 YAITU 0,92 POIN ATAU SEKITAR 1,09%. DAN APABILA DIPERBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2023 YAITU 85,00 MAKA TERCAPAI 100,18% ATAU SUDAH MELAMPAUI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.

B. INDIKATOR KINERJA DAERAH

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD), MERUPAKAN UKURAN KEBERHASILAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH. BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026 IKD YANG MENJADI TOLAK UKUR KEBERHASILAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, CAPAIAN HASIL

KEBERHASILAN KINERJANYA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET 2023	REALISASI 2023	STATUS
1	Harapan Lama Sekolah	15,41 tahun	14,97 tahun	TIDAK TERCAPAI
2	Rata – Rata Lama Sekolah	11,23 tahun	10,78 tahun	TIDAK TERCAPAI
3	Usia Harapan Hidup	75,19 tahun	75,36 tahun	TERCAPAI
4	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,760	0,823	TERCAPAI
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,60	95,60	TERCAPAI
6	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	80,91	TERCAPAI
7	Indeks Rasa Aman	78,97	81,86	TERCAPAI
8	Indeks Resiko Bencana	92,53	98,12	TIDAK TERCAPAI
9	Indeks Toleransi	80,22	83,29	TERCAPAI
10	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,60	95,00	TERCAPAI
11	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	89,91	91,95	TERCAPAI
12	Indeks Pembangunan Gender	94,95	*Belum release*	*BELUM RELEASE*
13	Indeks Kualitas Air	51,54	54,32	TERCAPAI
14	Indeks Kualitas Udara	85,16	81,98	TIDAK TERCAPAI
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,12	24,42	TIDAK TERCAPAI
16	Persentase Desa Mandiri	13,98	47,8	TERCAPAI
17	Nilai Indeks SPBE	3,45	3,11	TIDAK TERCAPAI
18	Persentase koperasi berkualitas	24,69	24,96	TERCAPAI

19	Persentase Usaha mikro mandiri	1,98	2,06	TERCAPAI
20	Persentase pertumbuhan Nilai Investasi	1,25	-(2,87%)	TIDAK TERCAPAI
21	Indeks Pelestarian Budaya	63,58	90,92	TERCAPAI
22	Indeks Pelayanan Publik	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	TERCAPAI
23	Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	TIDAK TERCAPAI
24	Opini atas Laporan BPK	WTP	WTP	TERCAPAI
25	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	*Belum release*	*BELUM RELEASE*
26	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	TINGGI TERCAPAI
27	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	TERCAPAI
28	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas	2,82	1,67	TIDAK TERCAPAI
29	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan	16,22	16,08	TIDAK TERCAPAI
30	Persentase kontribusi PDRB sektor industri	52,81	52,11	TIDAK TERCAPAI
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	TERCAPAI

1. HARAPAN LAMA SEKOLAH

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2023 TERCAPAI **14,97** TAHUN DARI TARGET 15,41 TAHUN SEHINGGA BELUM MENCAPAI TARGET, NAMUN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 14,95 TAHUN MAKA TERDAPAT PENINGKATAN.

2. RATA – RATA LAMA SEKOLAH

RATA – RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2023 TERCAPAI **10,78** TAHUN DARI TARGET 11,23 TAHUN SEHINGGA BELUM MENCAPAI TARGET, NAMUN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 10,77 TAHUN SUDAH ADA PENINGKATAN.

3. USIA HARAPAN HIDUP

ANGKA HARAPAN HIDUP TAHUN 2023 TERCAPAI **75,36** TAHUN DARI TARGET 75,19 TAHUN SEHINGGA SUDAH MENCAPAI TARGET DENGAN CAPAIAN 100,23%. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2022 YAITU 74,36 MAKA TERDAPAT PENINGKATAN YANG CUKUP TINGGI YAITU 1,00 POIN ATAU SEKITAR 1,34%. DENGAN REALISASI ANGKA HARAPAN HIDUP 75,36 TAHUN INI MENUNJUKKAN BAHWA PROGRAM-PROGRAM KESEHATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM HAL INI DINAS KESEHATAN SUDAH BERHASIL

4. INDEKS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

CAPAIAN INDEKS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023 YAITU **0,823** YANG APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET 0,760 MAKA SUDAH MELAMPAUI TARGET. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN TAHUN 2022 YAITU 0,783 MAKA SUDAH TERDAPAT PENINGKATAN

5. INDEKS INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

PADA TAHUN 2023 INDEKS INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO SEBESAR **86,67** DENGAN TARGET 86,66 SEHINGGA SUDAH MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN

6. INDEKS INFRASTRUKTUR KESEHATAN

PADA TAHUN 2023 INDEKS INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO SEBESAR **80,91** DENGAN TARGET 75,19 SEHINGGA SUDAH MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN

7. INDEKS RASA AMAN

INDEKS RASA AMAN TAHUN 2023 TERCAPAI **81,86** DARI TARGET 78,97 SEHINGGA SUDAH MENCAPAI TARGET YANG DITENTUKAN. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 80,77 MAKA TERDAPAT PENINGKATAN. DENGAN REALISASI INDEKS RASA AMAN SEBESAR 81,86 INI MENUNJUKKAN BAHWA KABUPATEN SIDOARJO BERADA PADA KATEGORI RASA AMAN SANGAT TINGGI.

8. INDEKS RESIKO BENCANA

INDEKS RESIKO BENCANA TAHUN 2023 BERADA PADA SKOR **98,14** DARI TARGET SKOR 92,53 SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN BAHWA INDEKS RESIKO BENCANA BELUM MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU PADA SKOR 98,74 MAKA CAPAIAN LEBIH BAIK KARENA SUDAH ADA PENURUNAN.

9. INDEKS TOLERANSI

INDEKS TOLERANSI TAHUN 2023 TERCAPAI **83,29** DARI TARGET 80,22 SEHINGGA TELAH MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 81,30 MAKA TERDAPAT PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA. DENGAN REALISASI INDEKS TOLERANSI SEBESAR 83,29 INI MENUNJUKKAN BAHWA KABUPATEN SIDOARJO BERADA PADA KATEGORI RASA TOLERANSI TINGGI.

10. PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN

JUMLAH PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN YANG ADA DI KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2023 SEBANYAK **95,00%** DARI JUMLAH PENDUDUK DENGAN TARGET 94,60% SEHINGGA SUDAH MELAMPAUI TARGET YANG DITENTUKAN. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2022 YAITU 94,64% MAKA PENDUDUK YANG BERADA DIATAS GARIS KEMISKINAN SEMAKIN MENINGKAT.

11. PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI SEMBILAN SEKTOR

PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI 9 SEKTOR DI TAHUN 2023 TERCAPAI **91,95%** DARI TARGET 89,91% MAKA CAPAIAN SUDAH MELAMPAUI TARGET YANG DITENTUKAN. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 89,61% MAKA TERDAPAT PENINGKATAN ANGKA 2,34 ATAU SEKITAR 2,61%.

12. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PADA TAHUN 2023, PENGGUNAAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER SUDAH TIDAK DIBERLAKUKAN LAGI DAN DIGANTI DENGAN INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG).

INDEKS KETIMPANGAN GENDER KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 ADALAH **0,301** SEDANGKAN UNTUK ANGKA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2024, MASIH BELUM RELEASE DARI BPS PROVINSI JAWA TIMUR.

13. INDEKS KUALITAS AIR

CAPAIAN REALISASI KINERJA INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2023 SUDAH MENCAPAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, YAITU REALISASI **54,32** DENGAN TARGET 51,54. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 47,75 MAKA TAHUN 2023 SUDAH TERDAPAT PENINGKATAN KUALITAS AIR.

14. INDEKS KUALITAS UDARA

CAPAIAN REALISASI KINERJA INDEKS KUALITAS UDARA TIDAK MENCAPAI TARGET TAHUN 2023 DAN MENGALAMI PENURUNAN DIBANDING TAHUN 2022. REALISASI INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2023 SEBESAR **81,98** SEDANGKAN TARGET 85,16 SEHINGGA TIDAK MENCAPAI TARGET. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2022 YAITU 84,96 MAKA TERDAPAT PENURUNAN KUALITAS SEBANYAK 2,98 POIN ATAU SEKITAR 3,51%.

15. INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

CAPAIAN REALISASI KINERJA INDEKS KUALITAS LAHAN TIDAK MENCAPAI TARGET TAHUN 2023 NAMUN TERDAPAT KENAIKAN JIKA DIBANDING TAHUN 2022. REALISASI INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2023 SEBESAR **24,42** SEDANGKAN TARGET 27,12 SEHINGGA TIDAK MENCAPAI TARGET. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2022 YAITU 23,63 MAKA TERDAPAT PENURUNAN KUALITAS SEBANYAK 0,79 POIN ATAU SEKITAR 3,34%.

16. PERSENTASE DESA MANDIRI

DESA DI KABUATEN SIDOARJO YANG BERSTATUS DESA MANDIRI DI TAHUN 2023 SEBANYAK **152 DESA** DARI 318 DESA YANG ADA ATAU TERCAPAI **47,8%** DARI TARGET 13,98% SEHINGGA SANGAT JAUH MELAMPAUI TARGET YANG DITENTUKAN DALAM RPJMD. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 22,67% ATAU 73 DESA DARI 322 DESA, MAKA TERDAPAT PENINGKATAN ANGKA 79 DESA ATAU SEKITAR 108,22%

17. NILAI INDEKS SPBE

TAHUN 2023, NILAI INDEKS SPBE KABUPATEN SIDOARJO MEMPEROLEH NILAI **3,11** DARI TARGET 3,45 SEHINGGA BELUM MEMENUHI TARGET, NAMUN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIN TAHUN 2022 YAITU 2,29 MAKA TERDAPAT PENINGKATAN YANG SANGAT TINNGI YAITU 0,82 POIN ATAU SEKITAR 35,81%.

PADA TAHUN 2023 INDEKS SPBE KABUPATEN SIDOARJO MENGALAMI PENINGKATAN KATEGORI MENJADI **B(BAIK)** SETELAH SEBELUMNYA DI TAHUN 2022 HANYA MENDAPATKAN KATEGORI C(CUKUP).

18. PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS

PADA TAHUN 2023 JUMLAH KOPERASI YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN SIDOARJO SEBANYAK **367 KOPERASI** SETARA DENGAN **24,96%** DARI TOTAL KESELURUHAN 1.470 KOPERASI SEHINGGA SUDAH TERCAPAI DARI TARGET 24,69%. PERBANDINGAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 23,20% ATAU SEBANYAK 343 KOPERASI SEHINGGA TERDAPAT PENINGKATAN SEBANYAK 24 KOPERASI

19. PERSENTASE USAHA MIKRO MANDIRI

PADA TAHUN 2023 JUMLAH USAHA MIKRO YANG MANDIRI DI KABUPATEN SIDOARJO SEBANYAK **3.637 USAHA MIKRO** SETARA DENGAN **2,06%** DARI TOTAL KESELURUHAN 176.425 USAHA MIKRO SEHINGGA SUDAH TERCAPAI DARI TARGET 1,98%. PERBANDINGAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022 YAITU 1,93% ATAU SEBANYAK 3.399 USAHA MIKRO SEHINGGA TERDAPAT PENINGKATAN SEBANYAK 238 USAHA MIKRO.

20. PERSENTASE PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI

PADA TAHUN 2023 NILAI INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO SENILAI **RP.13.681.823.120.000,00** DARI TARGET RP.7.396.748.810.000,00 MAKA TERCAPAI 184,97%. NAMUN APABILA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI PADA

TAHUN 2022 YAITU SENILAI RP.14.086.231.612.109,50 MAKA TERDAPAT PENURUNAN SENILAI RP.404.408.492.109,50 ATAU SEKITAR **-(2,87%).**

21. INDEKS PELESTARIAN BUDAYA

CAPAIAN INDEKS PELESTARIAN BUDAYA TAHUN 2023 YAITU **90,92** DARI TARGET 63,58 SEHINGGA SUDAH SANGAT JAUH MELAMPAUI DARI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2022 YAITU 90,46 MAKA CAPAIAN JUGA LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA

22. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

BERDASARKAN HASIL EVALUASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) KABUPATEN SIDOARJO UNTUK TAHUN 2023 MENDAPATKAN NILAI **4,43** ATAU KATEGORI **A- (SANGAT BAIK)**.

23. NILAI SAKIP KABUPATEN

HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP KABUPATEN SIDOARJO, TAHUN 2023 KABUPATEN SIDOARJO MEMPEROLEH KATEGORI **BB (SANGAT BAIK)**. HASIL TERSEBUT MASIH BELUM MEMENUHI TARGET YANG DITETAPKAN YAITU KATEGORI A (MEMUASKAN) DAN STAGNAN DARI TAHUN 2022

24. OPINI ATAS LAPORAN BPK

OPINI ATAS AUDIT BPK UNTUK KABUPATEN SIDOARJO PADA TAHUN 2023 ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 ADALAH "**WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)**". DALAM KURUN WAKTU 10 TAHUN KABUPATEN SIDOARJO SELALU

MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TELAH MENUNJUKAN KONSISTENSI DAN KOMITMEN DALAM MENGELOLA KEUANGAN

25. SURVEY EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI

SAMPAI DENGAN BULAN MARET TAHUN 2024, NILAI SURVEY EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI KABUPATEN SIDOARJO MASIH *BELUM RELEASE*

26. STATUS KINERJA LPPD

MESKIPUN STATUS KINERJA LPPD ADALAH **TINGGI (T)** DAN BELUM MENCAPAI TARGET SANGAT TINGGI (ST) NAMUN KABUPATEN SIDOARJO MENEMPATI **PERINGKAT KE-2 TERBAIK NASIONAL** DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR LPPD

27. TINGKAT MATURITAS SPIP

TAHUN 2023 TELAH DILAKSANAKAN EVALUASI ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP OLEH BPKP DENGAN NILAI **3,150** YANG BERARTI BAHWA CAPAIAN TELAH MENCAPAI TARGET

28. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DALAM ARTI LUAS

BERDASARKAN DATA DARI BPS SIDOARJO BAHWA TAHUN 2023 LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DALAM ARTI LUAS ADALAH **1,67** DARI TARGET 2,82 SEHINGGA MASIH BELUM MENCAPAI TARGET YANG DITENTUKAN.

29. PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

BERDASARKAN DATA DARI BPS SIDOARJO BAHWA TAHUN PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN ADALAH **16,22** DARI TARGET 16,08 SEHINGGA MASIH BELUM MENCAPAI TARGET YANG DITENTUKAN

30. PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SEKTOR INDUSTRI

BERDASARKAN DATA DARI BPS SIDOARJO BAHWA TAHUN 2023 PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SEKTOR INDUSTRI ADALAH **52,81** DARI TARGET 52,11 SEHINGGA MASIH BELUM MENCAPAI TARGET YANG DITENTUKAN

31. INDEKS INOVASI DAERAH

PADA TAHUN 2023 INDEKS INOVASI DAERAH DITARGETKAN MENDAPAT PREDIKAT SANGAT INOVATIF DAN BERDASARKAN HASIL PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2023, KABUPATEN SIDOARJO MENDAPATKAN KATEGORI **SANGAT INOVATIF**

C. PELAKSANAAN 17 PROGRAM PRIORITAS

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SEPERTI YANG TELAH DIKETAHUI BAHWA KAMI MEMPUNYAI 17 PROGRAM PRIORITAS, YANG CAPAIAN PELAKSANAANNYA DI TAHUN 2023, DAPAT SAYA SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. **100.000 LAPANGAN KERJA BARU**

   PADA TAHUN 2023 TERDAPAT **41.649 LAPANGAN KERJA BARU**, ANTARA LAIN :

   - PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU HASIL PELATIHAN SEBANYAK 2.120 LAPANGAN KERJA;
   - PENEMPATAN TENAGA KERJA SEBANYAK 37.081 LAPANGAN KERJA, DAN
   - 2.448 DARI LOWONGAN CASN.

   SEHINGGA SECARA AGREGASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 SUDAH TERDAPAT 91.797 LAPANGAN KERJA BARU UNTUK MASYARAKAT SIDOARJO, DAN MASIH ADA SISA TARGET 8.203 YANG HARUS DISELESAIKAN PADA TAHUN 2024.

2. **BPJS KESEHATAN GRATIS SELURUH WARGA**

   PADA TAHUN 2023 SEBANYAK **69.750 ORANG** TERLAYANI JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT SIDOARJO.

3. **GRATIS MAKANAN TIAP HARI WARGA MISKIN**

   SECARA RUTIN UNTUK SETIAP TAHUNNYA, PADA TAHUN 2023 SUDAH DIBERIKAN MAKANAN GRATIS UNTUK PMKS LANSIA TERLANTAR SEBANYAK **730 ORANG PER HARI UNTUK 2 KALI MAKAN** MELALUI PROGRAM BERKAT SAYANG.

4. **10.000 BEASISWA KULIAH**

   PADA TAHUN 2023 TELAH DISALURKAN BEASISWA UNTUK :

   - 493 ORANG MAHASISWA MISKIN
   - 1.000 ORANG MAHASISWA BERPRESTASI, DAN

- 650 ORANG MAHASISWA YANG BERPRESTASI DALAM BIDANG KEAGAMAAN;

SEHINGGA TOTAL TAHUN 2023 DISALURKAN SEBANYAK **2.143 BEASISWA KULIAH**. SEDANGKAN APABILA DIAGREGASI MULAI TAHUN 2022, MAKA SUDAH TERDAPAT 3.977 BEASISWA YANG SUDAH DISALURKAN, SEHINGGA MASIH ADA SISA 6.003 BEASISWA YANG AKAN DISALURKAN PADA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026.

PADA TAHUN 2024 TERDAPAT TAMBAHAN SPESIFIKASI BEASISWA, YAITU UNTUK MAHASISWA YANG BERPRESTASI YANG KULIAH DI LUAR NEGERI YAITU SEBANYAK 30 BEASISWA.

5. **INSENTIF PLUS GURU NGAJI DAN GURU AGAMA**

   PADA TAHUN 2023 SUDAH DIBERIKAN INSENTIF UNTUK 9**.677 GURU NGAJI DAN GURU AGAMA**.

6. **RP. 5 JUTA – 50 JUTA MODAL USAHA MIKRO PEREMPUAN**

   PADA TAHUN 2023 DIBERIKAN MODAL USAHA UNTUK **2.993 KELOMPOK USAHA PEREMPUAN** MELALUI PROGRAM KURMA

7. **RP. 6 JUTA OPERASIONAL BAGI RT**

   PADA TAHUN 2023 SUDAH DIBERIKAN BIAYA OPERASIONAL SEBESAR RP.6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) UNTUK **730 RT DARI 4 KECAMATAN YANG MEMPUNYAI KELURAHAN**.

   SEDANGKAN MULAI TAHUN 2024, AKAN DIBERIKAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK 8.041 RT DAN 1.902 RW DARI 18 KECAMATAN SE – KABUPATEN SIDOARJO.

DALAM PELAKSANAAN PENINGKATAN PARTISIPASI RT UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO, TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT :

- PENYERAHAN BANTUAN SOUND SYSTEM
- SOSIALISASI LOMBA RT

8. 20.000 UMKM NAIK KELAS

PADA TAHUN 2023 TERDAPAT **5.185 UMKM** YANG DIFASILITASI UNTUK NAIK KELAS, YAITU 901 UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SERTA 4.284 UMKM BINAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

APABILA DIAGREGASI DARI TAHUN 2021, MAKA TOTAL UMKM YANG SUDAH DIFASILITASI NAIK KELAS YAITU 12.382 UMKM, SEHINGGA MASIH ADA SISA 7.618 UMKM YANG HARUS DIFASILITASI UNTUK NAIK KELAS DI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026.

9. PENATAAN KOTA DAN TRANSPORTASI TERPADU URAI KEMACETAN

TERDAPAT BEBERAPA KEBERHASILAN KINERJA YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DIMAKSUD, YAITU ANTARA LAIN :

- PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN FRONTAGE ROAD WARU – BUDURAN SEPANJANG **1.093 METER**
- BETONISASI JALAN SEPANJANG **24.950,72 METER**
- PEMBANGUNAN JALAN PENGURAI KEMACETAN SEBANYAK **10 TITIK**

- SERTA PEMBANGUNAN 3 FLY OVER, YAITU : **FLY OVER JUANDA, FLY OVER KRIAN, DAN FLY OVER TARIK** YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH PUSAT.

PEMBANGUNAN FRONTAGE ROAD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 SECARA KESELURUHAN TELAH MENCAPAI 5.386,9 METER DENGAN MEMBEBASKAN LAHAN SELUAS 10.063 M2.

SEDANGKAN UNTUK BETONISASI JALAN SECARA AGREGASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 SUDAH MENCAPAI SEPANJANG 64.387,92 METER.

10. **TINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KESEHATAN DAN KADER POSYANDU**

PADA TAHUN 2023 TELAH DIBERIKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UNTUK **12.579 KADER POSYANDU DAN 210 TENAGA KESEHATAN**.

11. **TINGKATKAN KESEJAHTERAAN GTT, GURU SWASTA, DAN TENAGA HONORER**

SECARA RUTIN DIBERIKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UNTUK GTT, GURU SWASTA DAN TENAGA HONORER, YANG MANA PADA TAHUN 2023 TELAH DIBERIKAN UNTUK **13.206 ORANG**

12. **YOUTH CENTER, BANGUN PUSA KREATIVITAS ANAK MUDA**

PADA TAHUN 2023 TELAH DILAKSANAKAN EVENT KEPEMUDAAN, ANTARA LAIN :

- PORPROV VIII JAWA TIMUR
- AKSI GEMILANG (LOMBA INOVASI PEMUDA DESA)

SELAIN ITU JUGA TELAH DIFASILITASI YOUTH CENTER UNTUK SARANA KOORDINASI PARA PEMUDA SIDOARJO DALAM MELAKSAKAN KEGIATAN KREATIFITASNYA.

13. **2.000 WARUNG RAKYAT DIRENOVASI**

TAHUN 2023 SUDAH DILAKUKAN BEDAH WARUNG UNTUK **422 WARUNG**, SEHINGA SECARA AGREGASI MULAI DARI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 SUDAH DIRENOVASI 974 WARUNG. UNTUK SISA TARGET 1.026 WARUNG YANG BELUM DIRENOVASI AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026.

14. **TINGKATKAN ADD UNTUK DESA SEJAHTERA**

SETIAP TAHUNNYA SELALU ADA PENINGKATAN TARGET ALOKASI PEMBERIAN ADD (ALOKASI DANA DESA), YAITU PADA TAHUN 2023 TELAH DITARGETKAN, SEBAGAI BERIKUT :

- ADD SILTAP SEBANYAK RP.126.403.322.463,-
- ADD BAGI HASIL SEBANYAK RP.13.200.275.437,-

15. **24 JAM PENGADUAN RAKYAT RESPON CEPAT**

MELALUI CALL CENTER 112 SIDOARJO, TELAH DITINDAKLANJUTI **1.945 PENGADUAN**, YANG MANA PENGADUAN TERBANYAK ADALAH SEPUTAR PERBAIKAN PJU.

16. **REFORMASI PERIJINAN UNTUK BISNIS YANG KONDUSIF**

TELAH DILAKUKAN KEMUDAHAN PROSES PERIJINAN USAHA MELALUI JEMPUT BOLA UNTUK **1.158 IJIN** DAN **78 UM**. PADA

TAHUN 2023 JUGA TELAH DIRANCANG PENYEDERHANAAN PROSEDUR UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA DI KABUPATEN SIDOARJO.

17. **PERLUASAN RTH, REVITALISASI SUNGAI, REVOLUSI MANAJEMEN SAMPAH**

    TERDAPAT BEBERAPA KEBERHASILAN KINERJA YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DIMAKSUD, YAITU ANTARA LAIN :

    - JUMLAH RTH YANG DITINGKATKAN SEBANYAK **2 RTH**
    - JUMLAH / VOLUME SAMPAH YANG DIKELOLA (RECYCLE) SEBANYAK **886 TON / HARI**
    - JUMLAH SARANA PRASARANA IRIGASI YANG DIBANGUN / DITINGKATKAN SEBANYAK **30 SARPRAS**

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH MASYARAKAT SIDOARJO, ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP KEBIJAKAN YANG ADA SEHINGGA MEMBUAHKAN BANYAK PRESTASI YANG MEMBANGGAKAN DI TAHUN 2023, DIANTARANYA :

1. PADA TANGGAL 12 JANUARI 2023 MENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN KATEGORI TERBAIK KE-5 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3), DARI GUBERNUR JAWA TIMUR, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, DI LAPANGAN BOLA PRAPAT KURUNG, PERAK TIMUR, SURABAYA

2. PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 MENERIMA PENGHARGAAN ADIPURA KATEGORI KOTA SEDANG DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DI JAKARTA
3. PADA TANGGAL 14 MARET 2023 MENDAPAT PENGHARGAAN UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) DARI WAPRES RI KARENA TELAH MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS), DI BALAI SUDIRMAN, JAKARTA
4. PADA TANGGAL 15 MARET 2023 MENDAPAT PENGHARGAAN DARI RADAR SIDOARJO SEBAGAI TOKOH PENGGERAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RADAR SIDOARJO AWARD 2023, DI PENDOPO DELTA WIBAWA, SIDOARJO
5. PADA TANGGAL 29 APRIL 2023 MENDAPAT PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH (PPD) KINERJA TERBAIK NASIONAL PERINGKAT KE – 5, PADA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH (OTODA) KE- 27, DI ANJUNGAN CITY OF MAKASSAR
6. PADA TANGGAL 25 MEI 2023 MERAIH PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 10X BERTURUT-TURUT ATAS LHP LKPD T.A. 2022 DARI BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR, DITERIMA DI KANTOR BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR
7. PADA TANGGAL 29 MEI 2023 MERAIH PENGHARGAAN E-PURCHASING AWARD ATAS NILAI TRANSAKSI TERBANYAK DALAM PEMANFAATAN BARANG/JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL KABUPAETN/KOTA TAHUN 2023, DARI GUBERNUR JATIM, DI GRAND CITY, SURABAYA

8. PADA TANGGAL 16 JUNI 2023 MERAIH THE 1ST INDONESIA GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS AWARDS 2023 SEBAGAI PEMIMPIN TERPOPULER DI MEDIA PEMBERITAAN ONLINE DARI HUMAS INDONESIA, DIBERIKAN DI HOTEL CLORA, MAKASSAR
9. PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2023 MERAIH JASA BAKTI MEMAJUKAN KOPERASI DAN UKM DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI, DI JOGJAKARTA.
10. PADA TANGGAL 29 OKTOBER 2023 MERAIH PENGHARGAAN "INSPIRATIONAL REGIONAL HEAD WHO MOBILIZIES YOUTH" SEBAGAI PIMPINAN DAERAH YANG MENGINSPIRASI DAN PENGGERAK PARA KAUM MUDA, DARI MEDIA KABARPAS, DI LUMINOR HOTEL, SIDOARJO
11. PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 MENDAPATKAN APRESIASI DARI YANKES KEMENKES DR. AZHAR JAYA, S.H., SKM., MARS ATAS PREDIKAT KELAS A RSUD SIDOARJO, DI SIDOARJO.
12. PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2023 MERAIH JUARA I PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL YANG CEMERLANG, EFEKTIF, RESPONSIF, INOVATIF, DAN AKURAT TRADISIONAL (PELITA CERIA) SE – JATIM, DI BATU, PADA HARI KESEHATAN NASIONAL (HKN) KE-59
13. PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2023 MENDAPATKAN PENGHARGAAN DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) PEMPROV JAWA TIMUR, DI SURABAYA DENGAN KATEGORI PEMBINA TERBAIK PENERAPAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB).
14. PADA TANGGAL 12 DESEMBR 2023 KABUPATEN SIDOARJO DINOBATKAN SEBAGAI KABUPATEN SANGAT INOVATIF DALAM

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2023 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) RI, DI GEDUNG SASANA BHAKTI PRAJA (SBP), KANTOR PUSAT KEMENDAGRI, JAKARTA

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SECARA GARIS BESAR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DI TAHUN ANGGARAN 2023 TELAH KAMI SAMPAIKAN. KAMI MENYADARI BAHWA MASIH TERDAPAT BANYAK KEKURANGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN KABUPATEN SIDOARJO. UNTUK ITU, REKOMENDASI DAN EVALUASI DARI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, AKAN KAMI JADIKAN SEBAGAI BAHAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI TAHUN SELANJUTNYA.

DEMIKIAN PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN INI. TERIMA KASIH DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK, BIMBINGAN DAN KEKUATAN KEPADA KITA SEMUA, DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG TELAH DIAMANATKANNYA, UNTUK MEMBANGUN KABUPATEN SIDOARJO YANG KITA CINTAI BERSAMA INI.

SEKIAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

WALLAHUL MUWAFFIQ ILAA AQWAMIT THORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATU

SIDOARJO, 6 MARET 2023

BUPATI SIDOARJO,

H. AHMAD MUHDLOR ALI, S.IP.

Capaian Pelaksanaan 17 Program Prioritas s.d Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1
100.000 Lapangan
Kerja Baru
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

100.000 Lapangan Kerja Baru

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	AKUMULASI (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
18.447 Lapangan Kerja	31.701 Lapangan Kerja	41.649 Lapangan Kerja	91.797 Lapangan Kerja	25.300 Lapangan Kerja

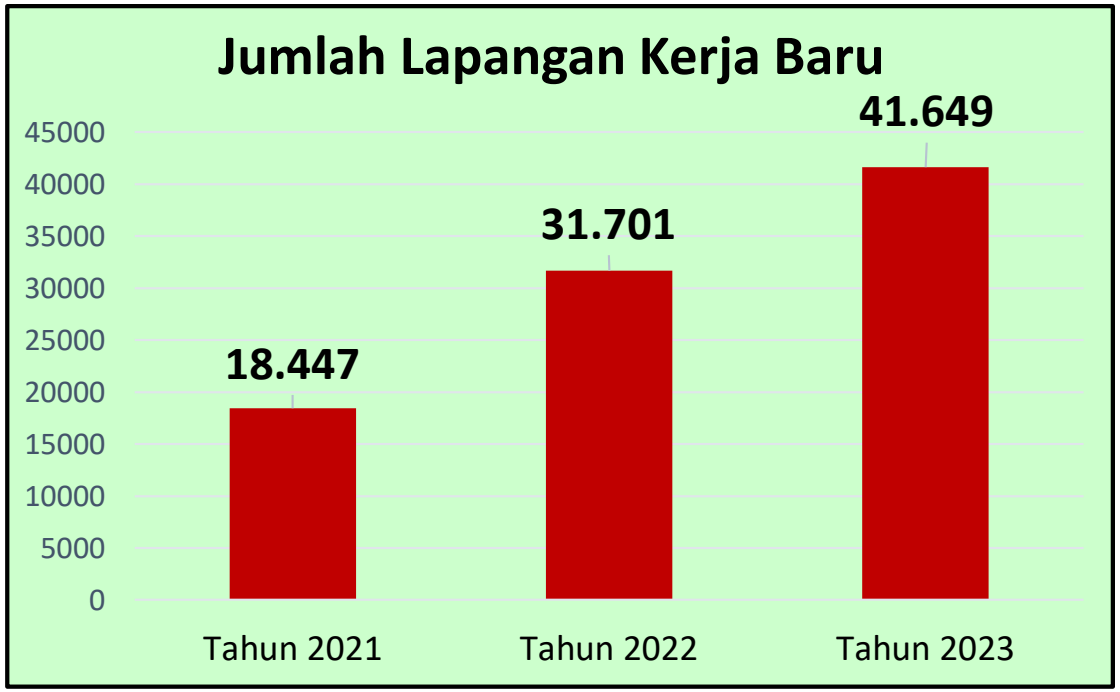

Prioritas dimaksud bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pencetakan wirausaha baru dari hasil pelatihan kerja, maupun penempatan tenaga kerja melalui lowongan usaha / bursa kerja / perjanjian kerja

100.000 Lapangan Kerja Baru

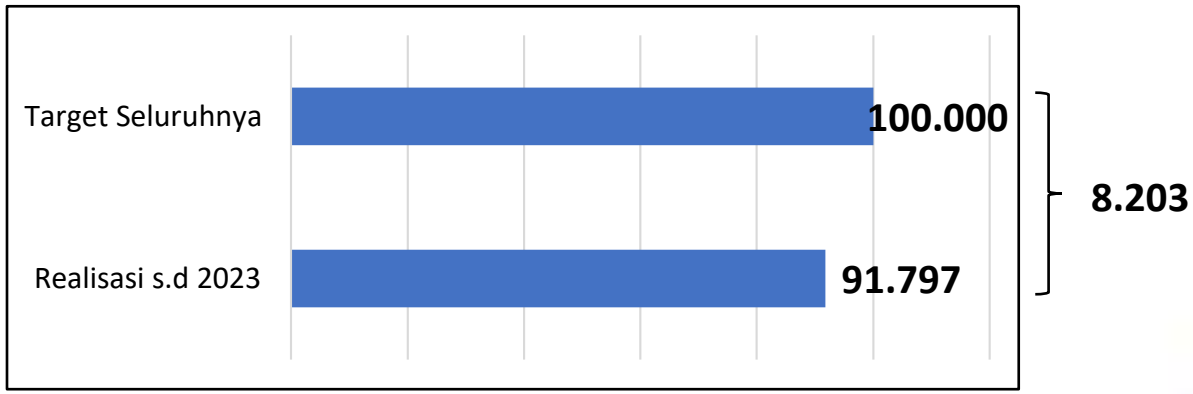

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 100.000 Lapangan Kerja Baru, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 91.797 Lapangan Kerja Baru, sehingga hanya ada Gap 8.203 Lapangan Kerja Baru.

Dengan adanya penciptaan Lapangan Kerja Baru maka berdampak pada menurunnya **Tingkat Pengangguran Terbuka** di Kabupaten Sidoarjo yang pada Tahun 2023 mencapai angka **8,05%** menurun dari Tahun 2021 10,87%

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS TENAGA KERJA; DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, dan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Adapun 41.649 Lapangan Kerja Baru di Tahun 2023, meliputi :

Lapangan Kerja Baru dari Pencetakan Wirausaha Baru Hasil Pelatihan	Lapangan Kerja Baru dari Penempatan Tenaga Kerja	Lapangan Kerja Baru dari Lowongan CASN
2.120 Lapangan Kerja	37.081 Lapangan Kerja	2.448 Lapangan Kerja

BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

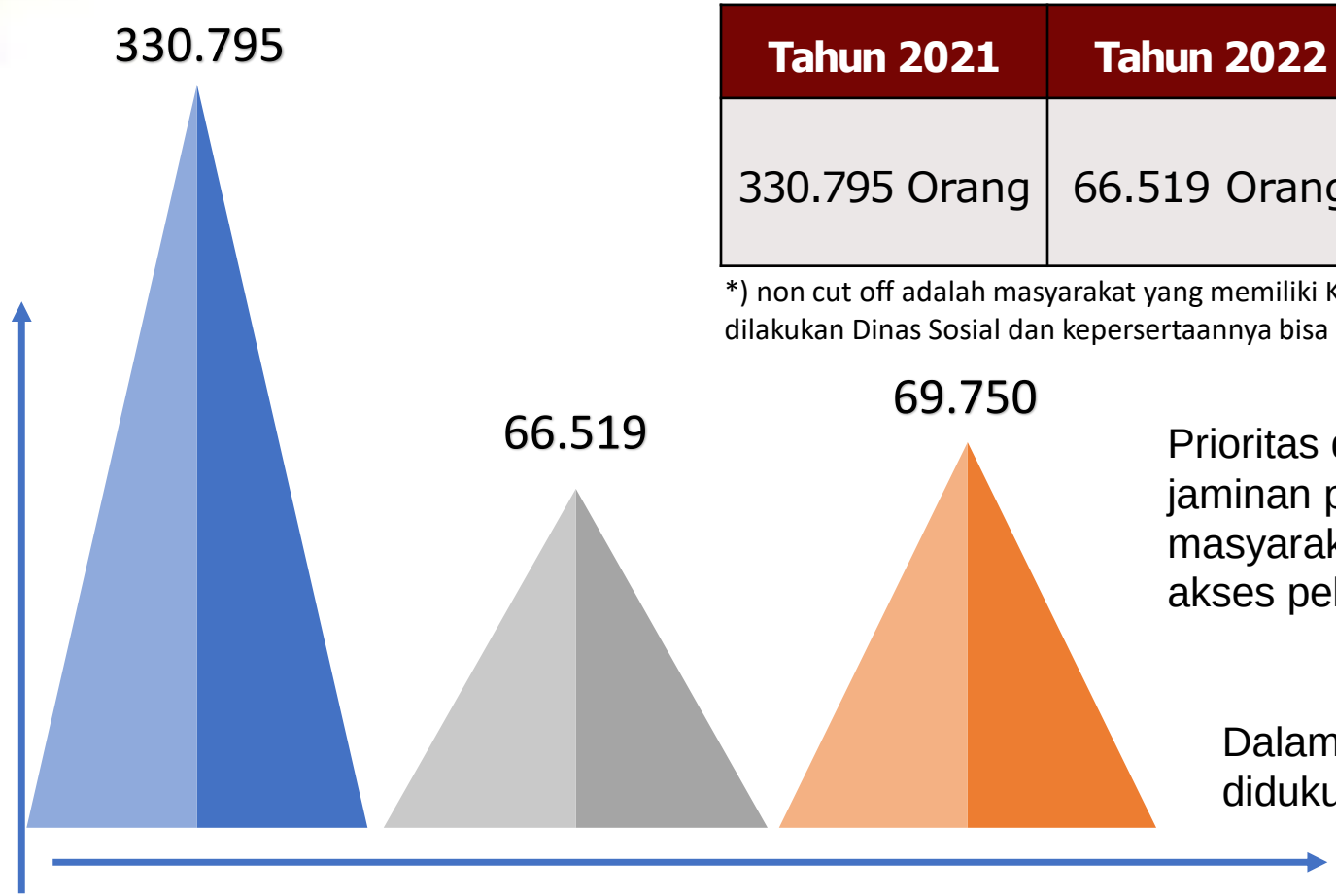

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
330.795 Orang	66.519 Orang	69.750 Orang	153.085 Orang (UHC non cut off)

*) non cut off adalah masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepersertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu

Prioritas dimaksud bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang merata

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS KESEHATAN

BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

- Sebanyak 153.229 jiwa warga Sidoarjo yang tercover BPJS Kesehatan gratis masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerimah Upah (PBPU) dan bukan pekerja Pemerintah Daerah.
- Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan.
- Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Usia Harapan Hidup**, yang pada tahun 2023 mencapai **75,36 tahun** meningkat dari Tahun 2021 yang masih mencapai angka 74,06 tahun

3
Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
730 orang per hari 2 kali makan	730 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berupa pemberian makanan dan minuman gratis yang diberikan kepada penduduk miskin (PMKS Lansia Terlantar).
Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Sosial

Keberhasilan kinerja berdampak pada menurunnya **Angka Kemiskinan**, yang selalu menurun dari Tahun 2021 5,93% pada Tahun 2023 menjadi **5,00%**

Pemberian makanan gratis diberikan kepada PMKS Lansia Terlantar yang terdata pada database Dinas Sosial melalui ***BERKAT SAYANG.***
Makanan yang disajikan sudah memenuhi unsur gizi dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

4

10.000 Beasiswa Kuliah

10.000 Beasiswa Kuliah

Target	Tahun 2022	Tahun 2023	AKUMULASI (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
Jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	497 orang	493 orang	990 orang	503 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	1.000 orang	1.000 orang	2.000 orang	1.000 orang
Jumlah pemuda berprestasi bidang keagamaan yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	357 orang	650 orang	1.007 orang	500 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang berkuliah di Luar Negeri, menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	-	-	-	30 orang
TOTAL	**1.854 orang**	**2.143 orang**	**3.997 orang**	**2.033 orang**

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian beasiswa untuk : pemuda berprestasi, mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, dan mahasiswa dari keluarga miskin.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Sosial; dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

10.000 Beasiswa Kuliah

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dari Tahun 2021 mencapai 80,65 dan pada Tahun 2023 mencapai **81,88** yang merupakan angka tertinggi untuk Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2024 terdapat tambahan spesifikasi beasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang berprestasi yang kuliah di Luar Negeri yaitu sebanyak 30 beasiswa..

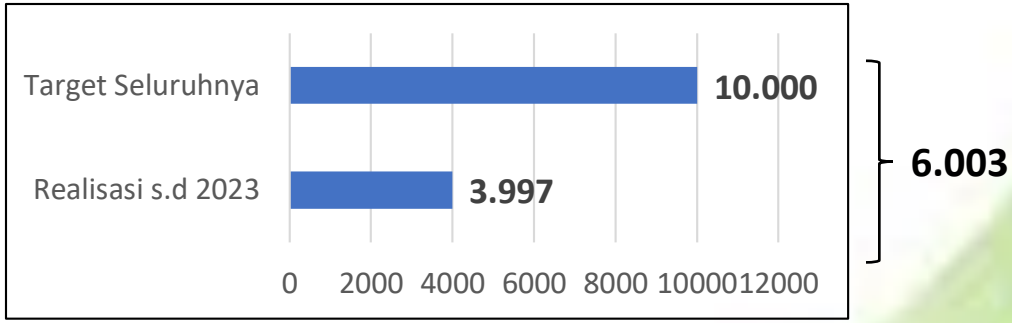

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 10.000 Beasiswa, sampai dengan Tahun 2023 sudah diberikan 3.997 Beasiswa, sehingga masih ada Gap 6.003 Beasiswa yang akan diberikan pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026

10.000 Beasiswa Kuliah

5

Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Tahun 2021 8.351 Orang

Tahun 2022 9.677 Orang

Tahun 2023 10.023 Orang

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
8.351 orang	9.677 orang	10.023 Orang	10.167 Orang

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Sidoarjo melalui peningkatan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Agama dengan memberikan insentif / tambahan penghasilan

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Keberhasilan kinerja berdampak meningkatnya **Indeks Kesalehan Sosial**, yang pada Tahun 2023 tercapai **85,15** meningkat dari Tahun 2021 82,03

Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta

Modal Usaha Mikro Perempuan

Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.891 kelompok	2.993 Kelompok	2.400 kelompok

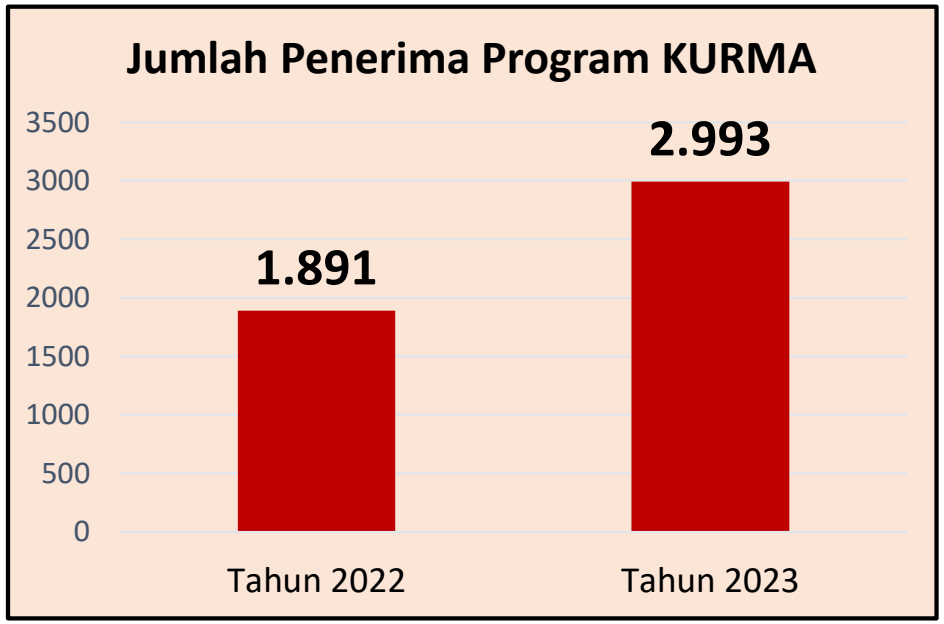

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro mandiri melalui pemberdayaan perempuan sebagai penggerak usaha mikro dengan pemberian modal usaha.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Pertumbuhan Ekonomi**, dimana pada Tahun 2023 mencapai **6,16%**

Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

7

Rp. 6 Juta Operasional

Bagi RT

Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Tahun 2023	Target Tahun 2024
730 RT dari 4 Kecamatan	8.041 RT dan 1.902 RW dari 18 Kecamatan

Pemberian Insentif untuk Seluruh RT diberikan pada Tahun 2024 untuk total 8.041 RT dan 1.902 RW dari 18 Kecamatan di Kab. Sidoarjo

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga Desa / Kelurahan melalui peran aktif RT dengan memberikan biaya operasional.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Keberhasilan kinerja berdampak meningkatnya **Indeks Kesalehan Sosial**, yang pada Tahun 2023 tercapai **85,15** meningkat dari Tahun 2021 82,03

Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Pada Tahun 2023 dilaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi RT dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Penyerahan Bantuan Sound System

Sosialisasi Lomba RT

8

20.000 UMKM

Naik Kelas

20.000 UMKM Naik Kelas

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TOTAL (2021 + 2022 + 2023)	Target Tahun 2024
1.664 UMKM	5.533 UMKM Disperindag : 900 UMKM Diskop : 4.633 UMKM	5.185 UMKM Disperindag : 901 UMKM Diskop : 4.284 UMKM	12.382 UMKM	4.340 UMKM Disperindag : 340 UMKM Diskop : 4.000 UMKM

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM agar naik kelas dengan memberi bekal pembinaan dan pelatihan
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Sama dengan Program Kurma, Program UMKM Naik Kelas juga berdampak pada meningkatnya **Pertumbuhan Ekonomi**, dimana pada Tahun 2023 mencapai **6,16%**

20.000 UMKM Naik Kelas

Bimbingan Teknis Kurasi Produk

Pelatihan Kemasan / Packaging

Bimbingan Teknis Wirausaha Baru (WUB)

SKKNI Pemasaran

Sosialisasi Legalitas Usaha dan Standarisasi

Pelatihan Desain Produk Kulit

20.000 UMKM Naik Kelas

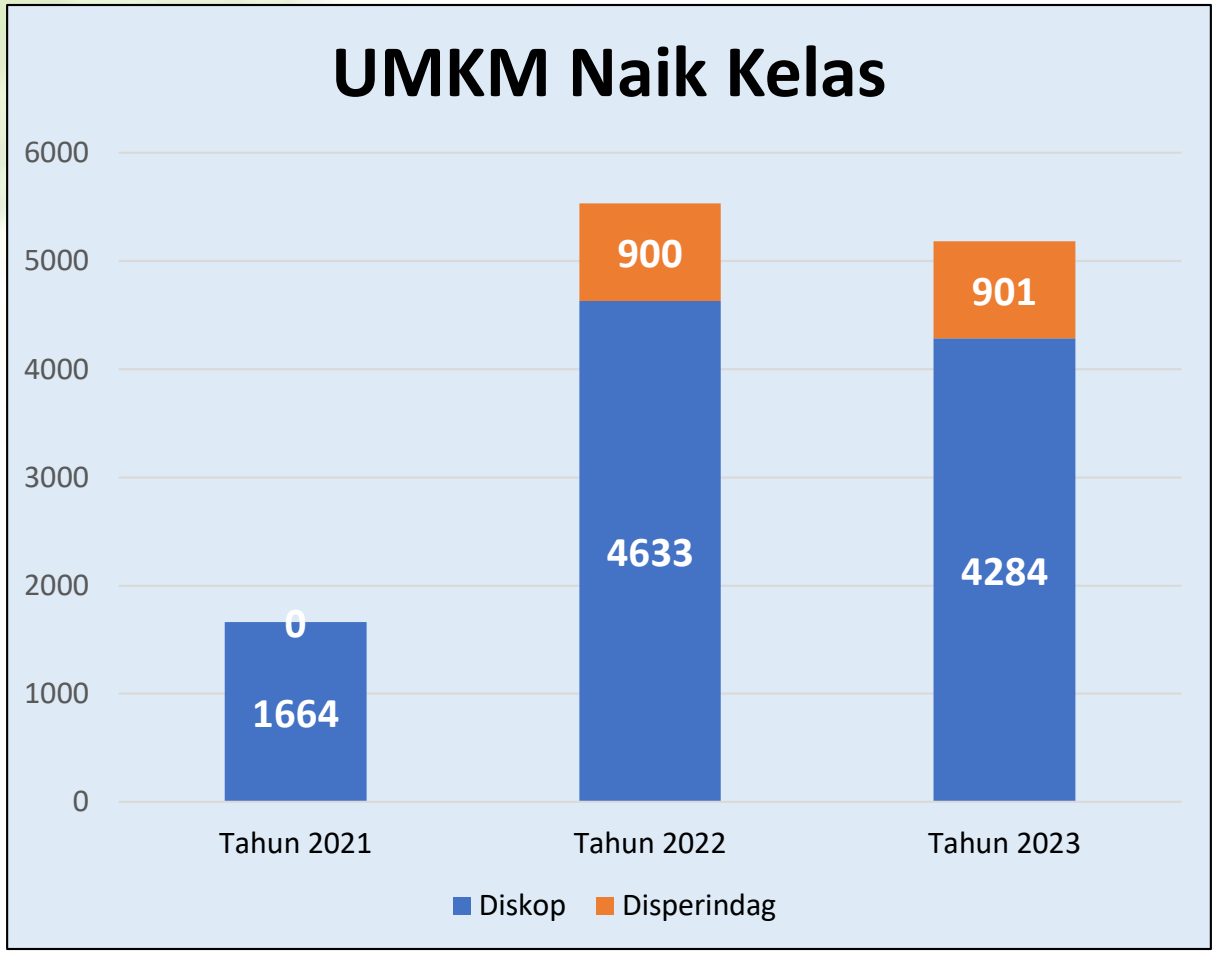

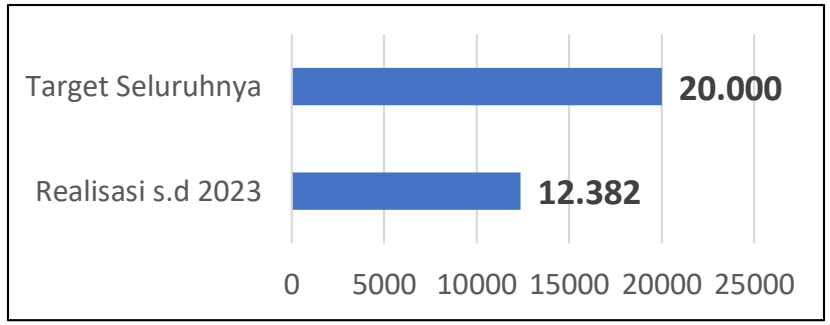

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 20.000 UMKM yang Naik Kelas, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 12.382 UMKM yang naik kelas, sehingga masih ada Gap 7.618 UMKM yang akan diupayakan untuk naik kelas sampai sampai dengan Tahun 2026

9

Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.290 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	16.132,20 meter

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	3.003,9 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	23.305 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	837 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.093 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	24.950,72 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	10 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	848 titik
Pembangunan Fly Over	- Fly Over Juanda - Fly Over Krian - Fly Over Tarik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	2.000 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	25.630 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	16 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	412 titik

Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai di Kabupaten Sidoarjo melalui : betonisasi jalan, pembangunan jalan pendamping (frontage road), pembangunan fly over, peningkatan sarana prasarana perhubungan, dan lain sebagainya

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR;
- DINAS PERHUBUNGAN
- DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Indeks Infrastruktur**, yang pada tahun 2023 mencapai **0,843** mengalami peningkatan yang tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang masih berada pada angka 0,793

Pembangunan Frontage Road Waru - Buduran

Pembebasan Lahan Frontage	
Tahun 2021	4.772 m2
Tahun 2022	5.637 m2
Tahun 2023	9.654 m2

Total Lahan Dibebaskan 20.063 m2

1.290 meter	3.003,9 meter	1.093 meter	2.000 meter
2021	2022	2023	Target 2024

Total dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dibangun Frontage Road sepanjang 5.386,9 meter

Betonisasi Jalan

Dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dilakukan Pembangunan Betonisasi Jalan sepanjang 64.387,92 meter

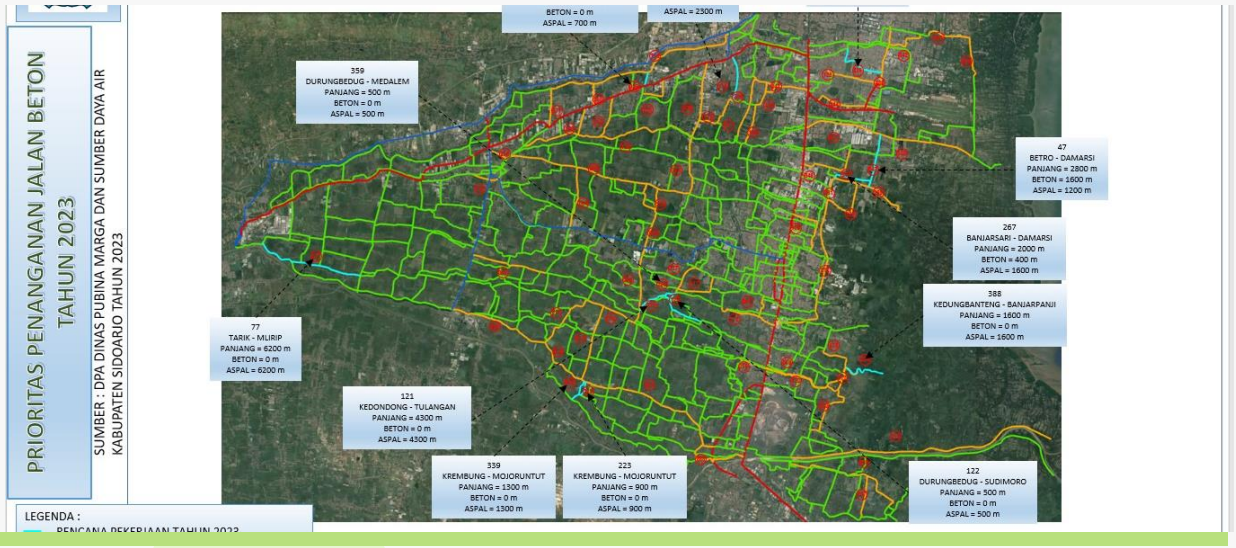

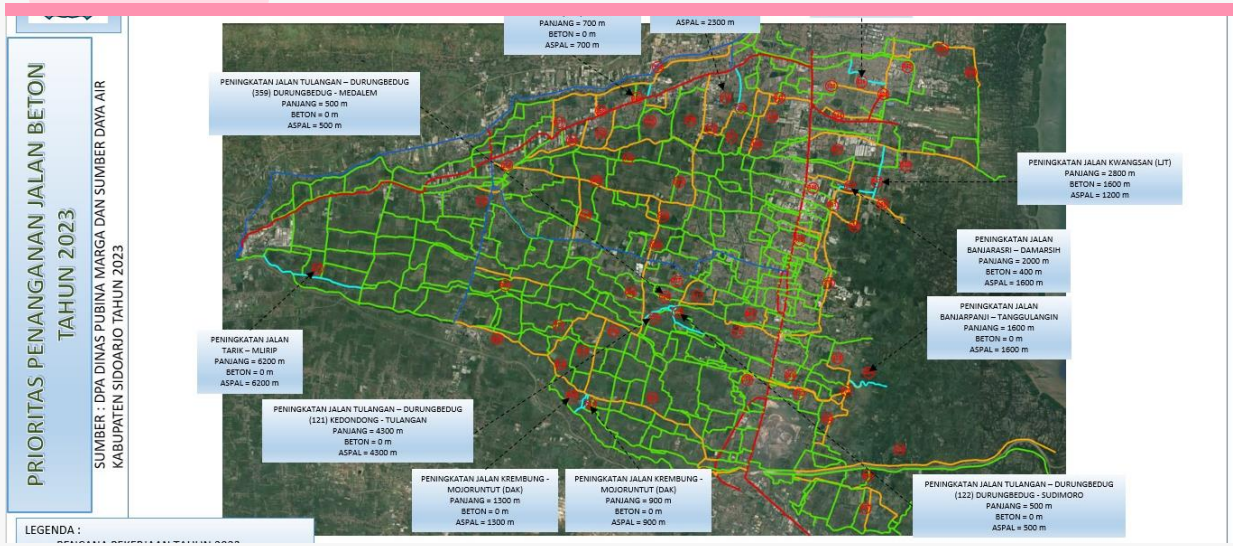

16.132,20 meter	23.305 meter	24.950,72 meter	25.630 meter
2021	2022	2023	Target 2024

Betonisasi Jalan Tahun 2021

Betonisasi Kebonagung - Becirongengor

Betonisasi Damarsi Kec. Sedati

Betonisasi Suko Legok Kec. Sukodono

Betonisasi Banjarasri – Sentul Kec. Tanggulangin

Betonisasi Buncitan – Kalanganyar Kec. Sedati

Betonisasi Simpang Tiga Tulangan

Betonisasi Gedangan - Betro

Betonisasi Kebonagung - Kemasan

Betonisasi Pabean - Wadungasri

Betonisasi Kepadangan – Bulang Kec. Tulangan

Betonisasi Jalan Tahun 2022

Betonisasi Kwangsan Kec. Sedati

Betonisasi Geluran - Suko

Betonisasi Tarik - Mlirip

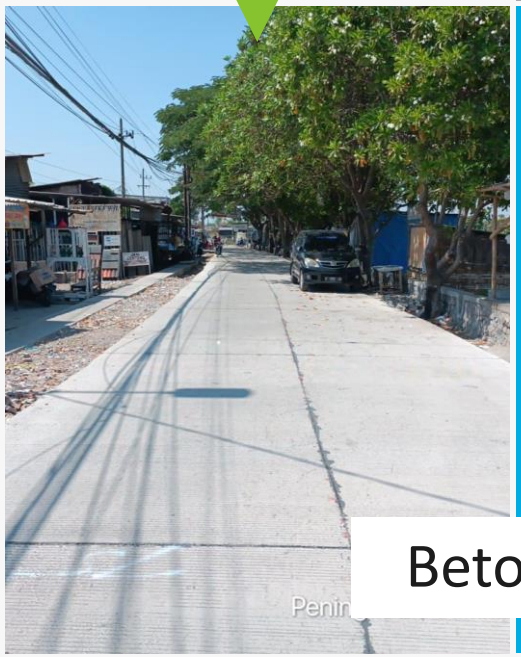

Betonisasi Krembung - Mojoruntut

Betonisasi Banjarpanji Kec. Tanggulangin

Betonisasi Jalan Tahun 2023

Pembangunan Fly Over

Fly Over Tarik

Fly Over Juanda

Fly Over Krian

Pembangunan Fly Over bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi waktu tempuh. Dengan adanya Fly Over Juanda, Fly Over Tarik, dan Fly Over Krian diharapkan dapat mengurangi kemacetan terutama di area sekitar Gedangan, perlintasan kereta api Krian dan Tarik.

10

Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

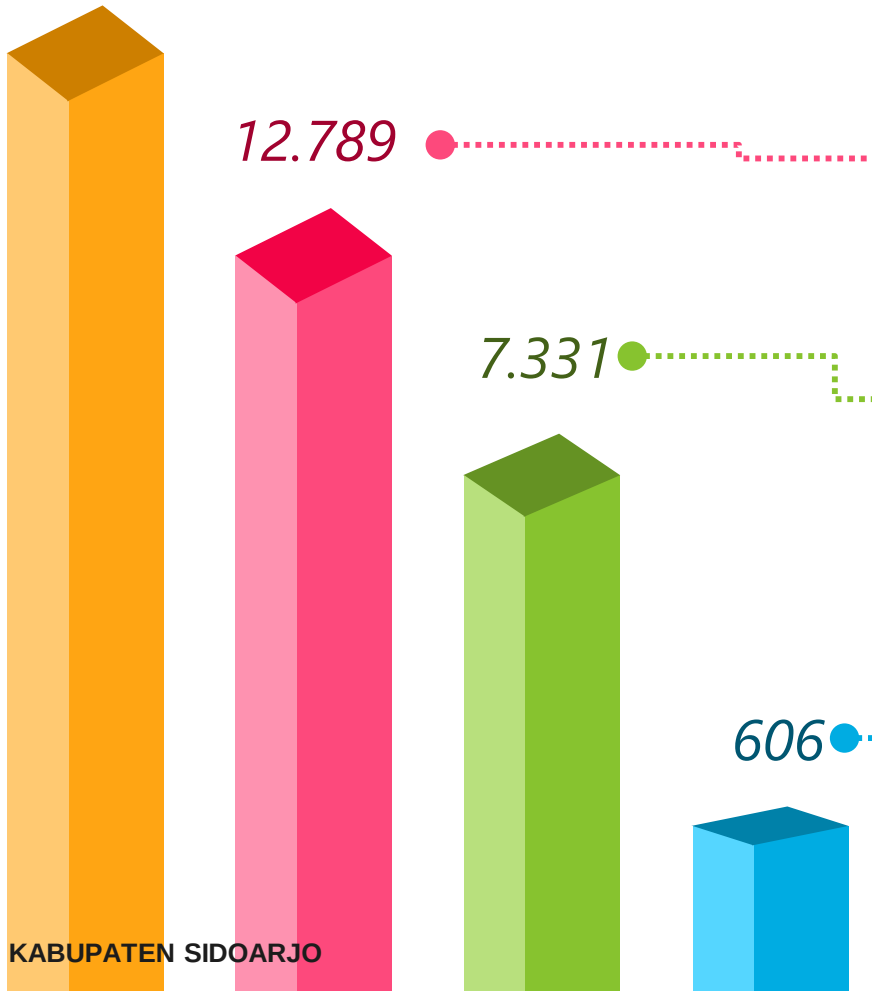

Target Tahun 2024

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
12.633 kader	225 nakes

Tahun 2023

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
12.579 kader	210 nakes

Tahun 2022

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
7.198 kader	133 nakes

Tahun 2021

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
606 kader	(belum ada pemberian)

Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu dengan memberikan honorarium bulanan dan pembinaan

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS KESEHATAN

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Usia Harapan Hidup**, yang pada tahun 2023 mencapai **75,36 tahun** meningkat dari Tahun 2021 yang masih mencapai angka 74,06 tahun

Kec. Sidoarjo

Kec. Gedangan

Kec. Tulangan

Kec. Buduran

Kec. Candi

Insentif yang diberikan sebesar Rp. 250 ribu perbulan yang diterima langsung selama enam bulan sebesar Rp. 1,5 juta. Sedangkan kader kesehatan posyandu mendapatkan honor Rp. 30 ribu perbulan juga diterima langsung selama 6 bulan.

Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu merupakan perhatian dan atensi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Kec. Sukodono

Kec. Taman

Kec. Waru

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

11

Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer

Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer

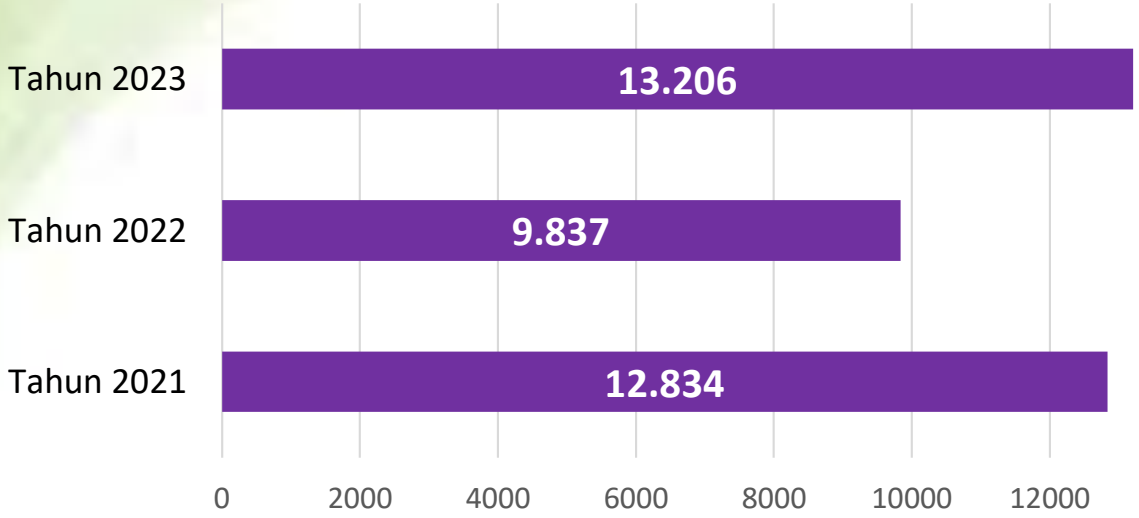

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer dengan memberikan honorarium bulanan dan insentif

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
12.834 orang	9.837 orang	13.206 orang	14.605 orang

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan**, yang pada Tahun 2023 sudah mencapai **98,32%**

12

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan memfasilitasi kreativitas para pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni budaya.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- Keberhasilan kinerja berdampak pada **meningkatnya jumlah prestasi pemuda yang diperoleh**, sebagai berikut :
  - Tahun 2021 : 464 Prestasi
  - Tahun 2022 : 613 Prestasi
  - Tahun 2023 : 501 Prestasi

Event Kepemudaan yang diselenggarakan :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
❑ POPDA XIII & PEPARPEDA I Jawa Timur ❑ Jayandaru Youth Night Paradise	❑ PORPROV VIII Jawa Timur ❑ Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)	❑ Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Sebagai wadah komunitas pemuda di Kabupaten Sidoarjo dalam mengkoordinasikan kegiatannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memfasilitasi Youth Center, yang dibangun satu lokasi dengan kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

13

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TOTAL (2021 + 2022 + 2023)	Target Tahun 2024
150 Warung	402 Warung	422 Warung	974 Warung	400 Warung

Program Bedah Warung Pemkab Sidoarjo

Semi Minimarket, Warung Warga Kebanjiran Pembeli

Warung milik Sumayah warga Dusun Guyangan RT 16/RW 8, Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung ini lebih tertata rapi. Awal Januari lalu, warung kelontong miliknya terpilih jadi salah satu prototipe program bedah warung dari Pemkab Sidoarjo.

RIZKY PUTRI PRATIMI,
Wartawan Radar Sidoarjo

KONDISI warung itu kini lebih bersih. Produk yang dijual tertata rapi pada rak khusus. Konsumen lebih leluasa memilih sendiri barang yang diinginkan. Jika diperhatikan, konsepnya semi minimarket. Seperti yang dikehendaki oleh pemkab.

Dimana bedah warung ini dilakukan agar toko kecil mampu bertahan di tengah persaingan dengan minimarket yang tumbuh subur hingga pelosok desa.

Perempuan yang sudah 15 tahun membuka toko kelontong ini merasa bersyukur. Dengan tampilan baru tersebut, warungnya kini lebih ramai pembeli. "Iya, pembeli jadi senang belanja di sini," katanya.

Selain bahagia karena warungnya dibedah, kebahagiaan Sumayah bertambah dengan hadirnya Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor ke tempatnya berjualan Rabu (9/2). Gus Muhdlor panggilan akrab bupati meninjau langsung hasil bedah warung yang menjadi program prioritasnya itu.

• Ke Halaman 10

BERSYUKUR: Bupati Sidoarjo Ahmad Muthlor berbincang dengan Sumayah salah satu penerima program bedah warung.

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan warung / usaha perdagangan rakyat dengan memberikan pendampingan, bantuan dan renovasi.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Sama dengan Program Kurma dan Program UMKM Naik Kelas, Program Bedah Warung juga berdampak pada meningkatnya **Pertumbuhan Ekonomi**, dimana pada Tahun 2023 mencapai **6,16%**

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

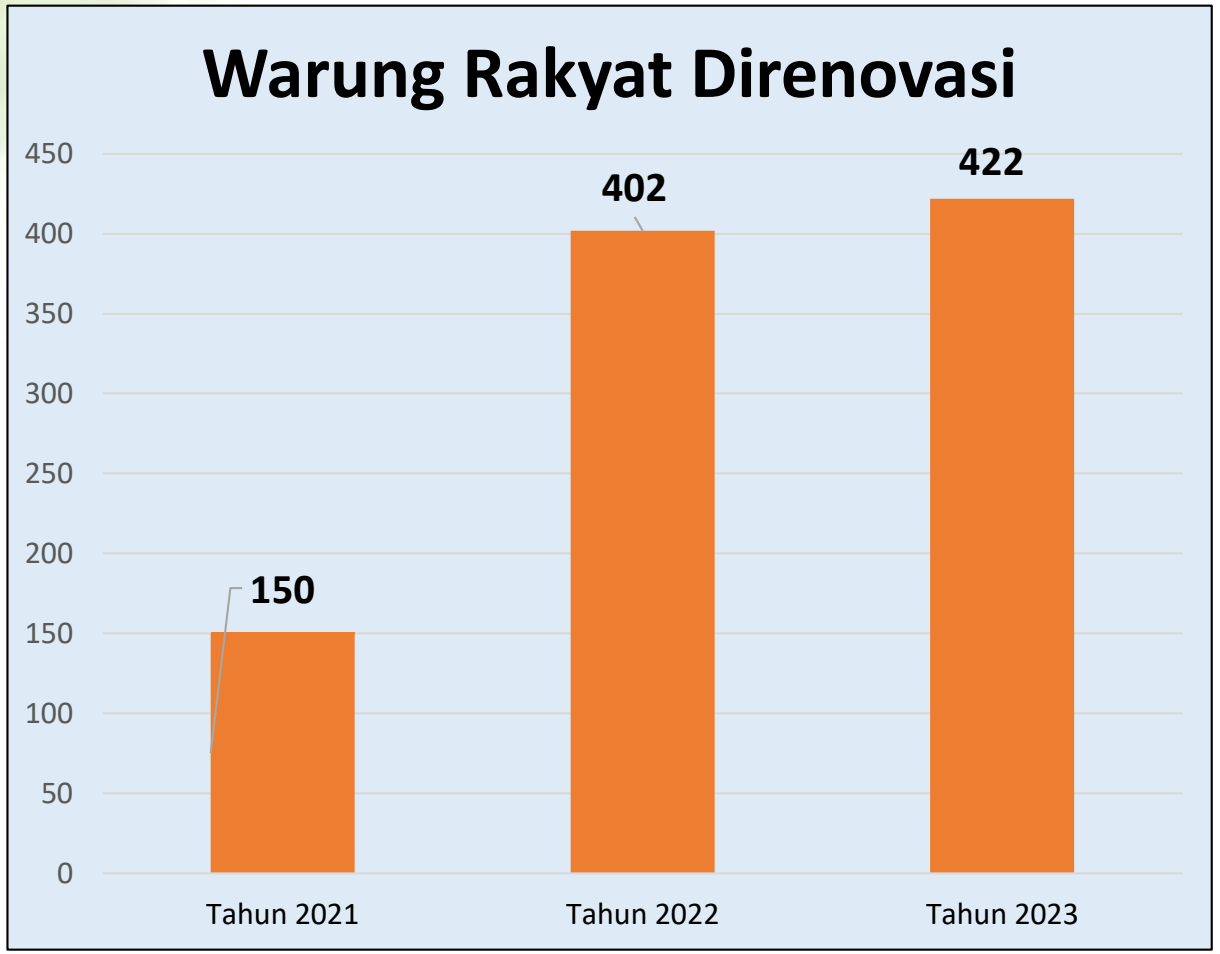

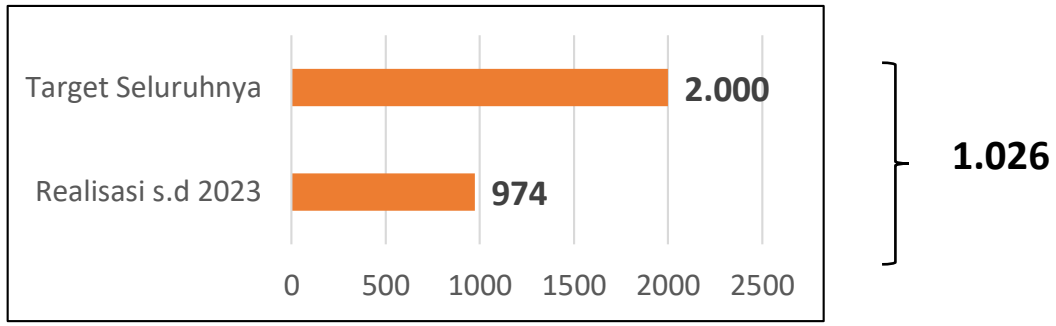

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 2.000 warung yang akan direnovasi, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 974 warung, sehingga masih ada Gap 1.026 warung yang direnovasi sampai sampai dengan Tahun 2026

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

Tingkatkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Sejahtera

Tingkatkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Sejahtera

Sumber Dana	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
ADD SILTAP	Rp 120.061.733.364,-	Rp 124. 942.712.235,-	Rp.126.403.322.463,-	Rp.127.251.512.856,-
ADD Bagi Hasil	Rp12.528.833.443,-	Rp13.036.176.834,-	Rp13.200.275.437,-	Rp13.200.275.437,-

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan status Desa menjadi Desa Mandiri melalui peningkatan operasional ADD (Alokasi Dana Desa)
- Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo**, yang pada tahun 2023 sudah mencapai **47,8%**
- Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat dari penambahan target ADD SILTAP dan ADD Bagi Hasil mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

15

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

Melalui Call Center 112 Sidoarjo

Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1.949 pengaduan	1.945 pengaduan	1.500 pengaduan

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan respon cepat terhadap pengaduan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo** yang pada tahun 2023 kategori **A- (Sangat Baik)**

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

SUMMARY LAPORAN CALL CENTER 112
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023

112 SIDOARJO CALL CENTER

TOTAL PANGGILAN DIJAWAB

Jumlah panggilan yang dijawab melalui *Call Center 112* berjumlah 48.902

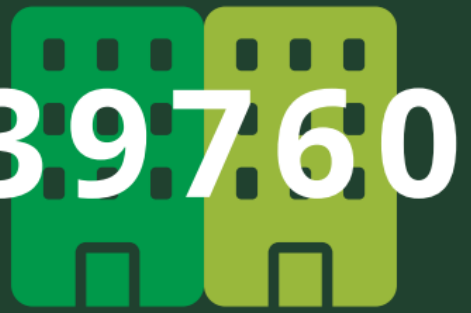

PRANK & GHOST CALL

Jumlah prank call dan ghost call yang masuk melalui *Call Center 112* berjumlah 39.760

TOTAL PELAPORAN

Jumlah pelaporan yang masuk melalui *Call Center 112* berjumlah 1945. Jumlah ini mencakup laporan melalui telepon dan Media sosial

LAPORAN BELUM DITINDAKLANJUTI

Dari 1945 laporan yang masuk dalam satu tahun. Sebanyak 81 laporan belum ditindaklanjuti

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

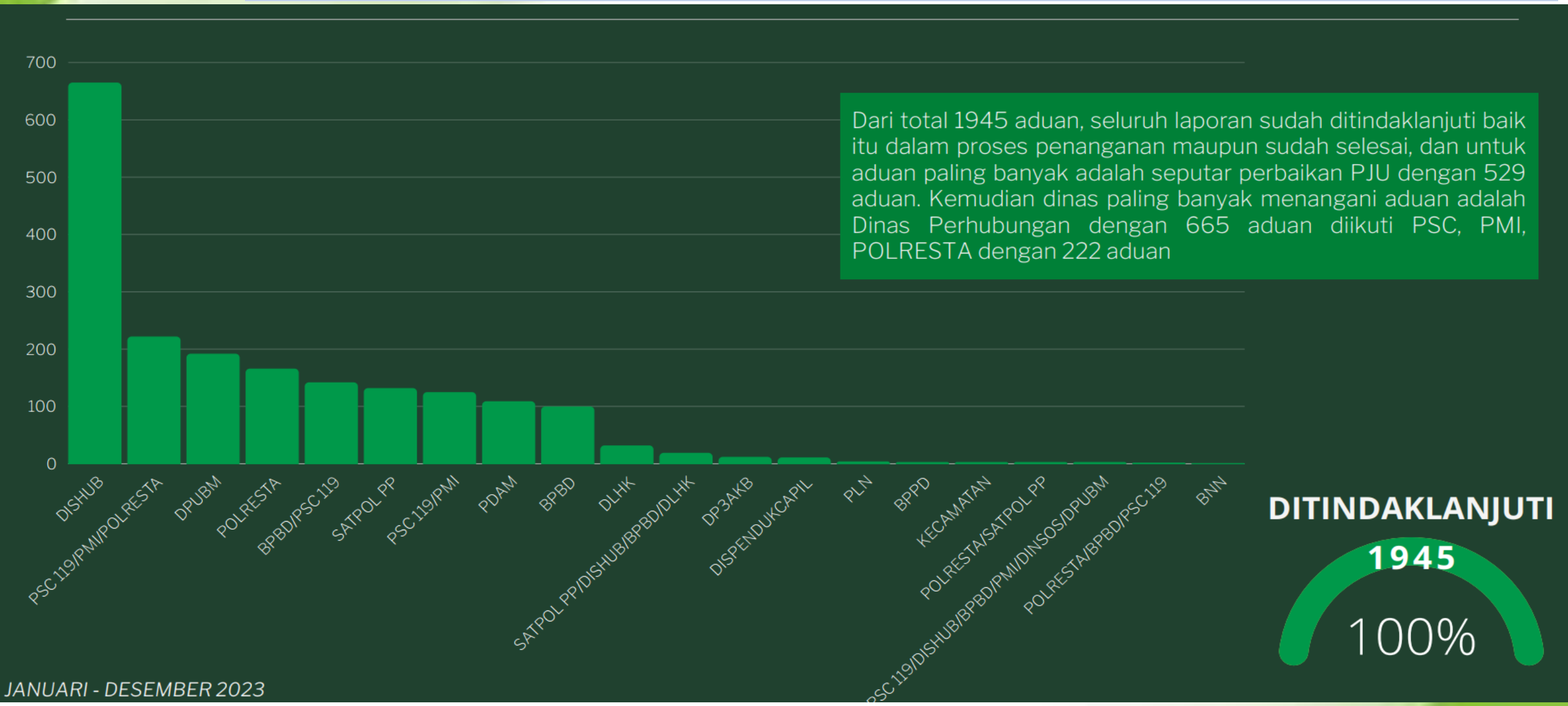

Dari total 1945 aduan, seluruh laporan sudah ditindaklanjuti baik itu dalam proses penanganan maupun sudah selesai, dan untuk aduan paling banyak adalah seputar perbaikan PJU dengan 529 aduan. Kemudian dinas paling banyak menangani aduan adalah Dinas Perhubungan dengan 665 aduan diikuti PSC, PMI, POLRESTA dengan 222 aduan

DITINDAKLANJUTI

1945

100%

JANUARI - DESEMBER 2023

16

Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Uraian Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur	-	1.611 ijin	1.158 ijin	1.318 ijin
Jumlah UM yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan	300 UM	300 UM	78 UM	300 UM

- ❑ Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan perijinan khususnya untuk pelaku usaha mikro.
- ❑ Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :
  - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ❑ Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **nilai investasi daerah**, dimana pada Tahun 2023 Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai **Rp.13.681.823.120.000,-**

Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Pelayanan Perijinan Jemput Bola

17

Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	837 ton/hari

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	2 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	7 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	905 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	39 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	5 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	800 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	2 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	886 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	30 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	9 titik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	5 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui : revitalisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau), Normalisasi Sungai, dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :

- DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR;
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
- DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Keberhasilan kinerja berdampak pada **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, yang pada tahun 2023 mencapai **59,99**

Perluasan RTH

Luas RTH Tahun 2023 sebesar 29,23 Hektar

Taman Tugu Babalayar

Taman Alun – Alun Sidoarjo

Taman Trotoar GOR Sidoarjo

Taman Median Jalan

Taman Pulau Gajah Mada

Revitalisasi Sungai

Ketersediaan air untuk irigasi sebesar 6.130 Liter/Detik

Rumah Pompa Banjarpanji

Rumah Pompa Kedungbanteng

Penataan Afvoer Kali Balong

Peningkatan Afvoer Kedungpeluk

Normalisasi Sistem Drainase

Revolusi Manajemen Sampah

Sampah yang terkelola 3R sebesar 77%

Revitalisasi TPST Kawasan Lingkar Timur

Revitalisasi TPST Barengkrajan - Krian

Revitalisasi TPST Kawasan Taman

Revitalisasi TPST Banjarbendo - Sidoarjo

KABUPATEN SIDOARJO
165
SIDOARJO 1859 - 2024
HARJASDA
"Sidoarjo Gemilang Melaju Berkelanjutan"
(31 Januari 1859 - 31 Januari 2024)

CAPAIAN IKU KABUPATEN SIDOARJO

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Periode Awal RPJMD (2020)	2021		2022		2023		2024	2025	2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	B	BB	B	BB	BB	A	A	A
2	Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	1	4,21	1,36	7,53	2,89	6,16	4,23	5,01	5,53
3	Indeks Gini	0,340	0,365	0,347	0,359	0,373	0,347	0,359	0,345	0,343	0,340
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,97	10,54	10,87	10,39	8,80	10,09	8,05	9,76	9,44	9,14
5	Tingkat Kemiskinan	5,59	5,71	5,93	6,00	5,36	5,40	5,00	5,30	5,20	5,00
6	Indeks Infrastruktur	0,747	0,755	0,793	0,762	0,792	0,772	0,843	0,780	0,788	0,796
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,78	59,79	59,81	59,80	57,54	59,81	58,99	59,82	59,83	59,84
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,29	80,41	80,65	80,77	81,02	80,92	81,88	81,17	81,40	81,62
9	Indeks Kesalehan Sosial	N / A	82,01	82,03	82,77	84,23	85,00	85,15	87,30	89,66	92,08

Indeks Reformasi Birokrasi

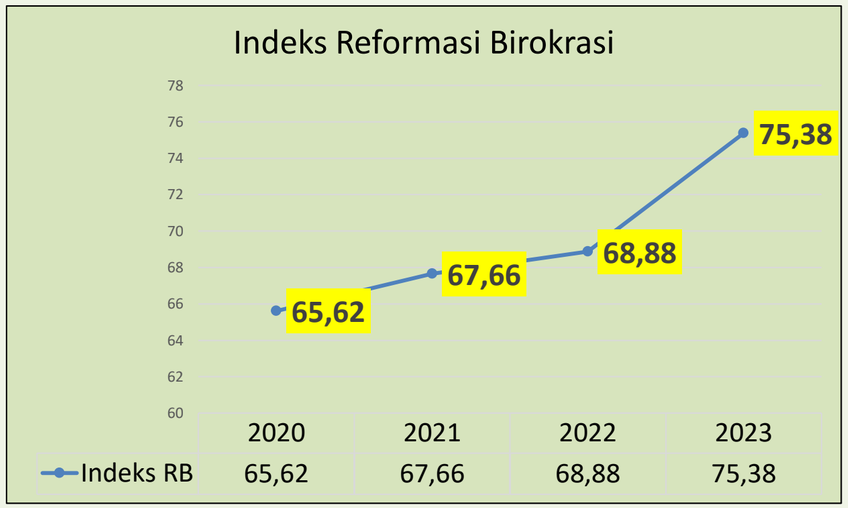

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan BB (Sangat Baik), sedangkan untuk capaiannya adalah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat BB (Sangat Baik) dengan Nilai 75,38. Capaian dimaksud meningkat dari tahun 2022 yang masih berada pada kategori B (Baik)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB, komponen penilaian tercapai sebagaimana tabel berikut :

RB General	65,86
RB Tematik	9,52
Total Nilai	75,38

Indeks Reformasi Birokrasi

Komponen Penilaian RB General

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,79	1,79
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	99,22	4,14
3	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	2	2	0,8
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,15	2,52
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	1,5	1,5
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	77,5	3,1
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5		0
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	33,27	0,83
10	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	4	2
11	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	68,18	1,7
12	Indeks Reformasi Hukum	2,5	67,56	1,69
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,3	1,15
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	60,17	1,5
15	Indeks Sistem Merit	4	320,5	3,13
16	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,43	1,33
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	95,95	1,44
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,11	5,6
19	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
20	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	58,33	3,62
21	Opini BPK	5	5	5
22	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	91,8	3,67
23	Indeks BerAkhlak	4		0
24	Survei Penilaian Integritas	10	75,31	7,53
25	Survei Kepuasan Masyarakat	8	97,75	7,82
26	Koefisien	10		

Komponen Penilaian RB Tematik

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,33	0,33
2	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,15	0,15
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,1	0,1
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
5	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,12	0,12
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	22,63	0,11
7	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	100	0,22
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	81,93	0,12
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6		
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	100	0,18
11	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2,05	2,05
12	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2	2
13	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,56	0,56
14	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	1,45	1,45
15	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1,73	1,73

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,89, dan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 6,16. Apabila dibandingkan dengan target 2,89 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sudah jauh melebihi target yang ditentukan. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 7,53 maka mengalami penurunan 1,37 poin atau sekitar 18,19%

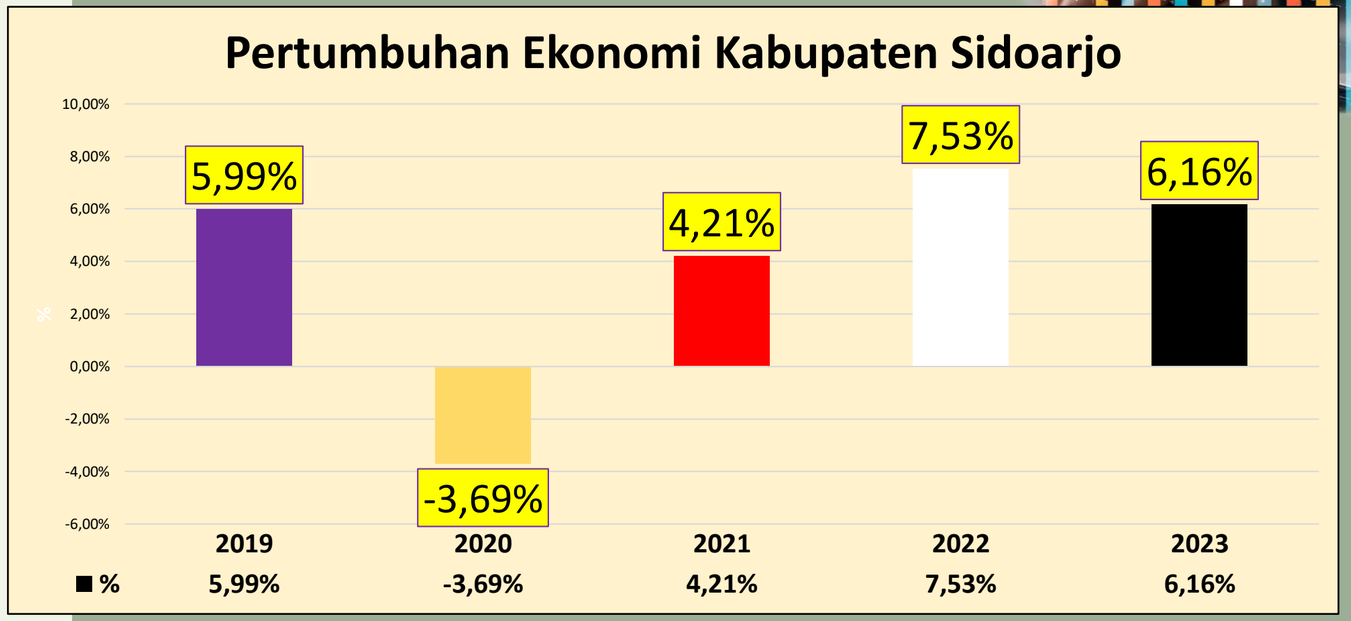

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.04
Jawa Timur	-2.39	4.59	5.34	4.95
Sidoarjo	-3.69	4.21	7.53	6.16

Indeks Gini

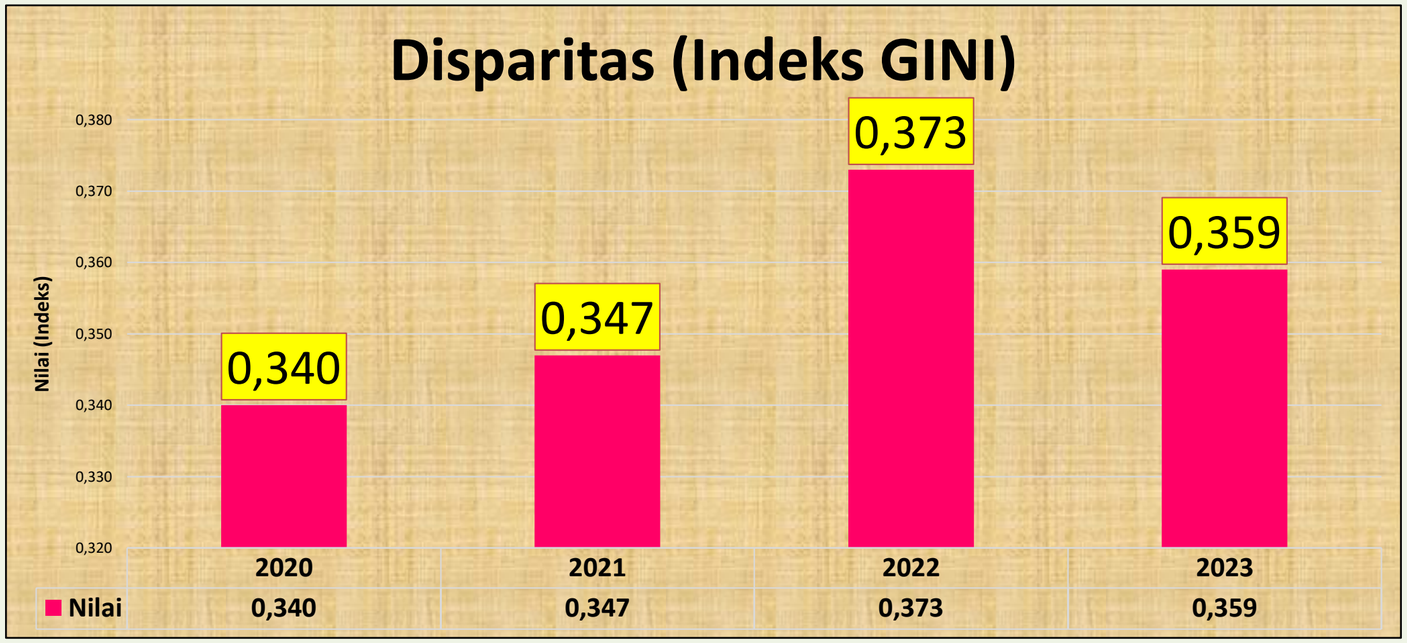

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 tercapai 0,359 dari target 0,347 sehingga masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian tahun 2023 lebih baik, yaitu menurun 0,014 angka atau sekitar 3,90%.

Penurunan Indeks GINI mencerminkan bahwa pemerataan pembangunan dan perekonomian belum merata untuk seluruh masyarakat Sidoarjo. Perlu penguatan kewilayahan, yaitu melalui partisipasi dari seluruh RT untuk mendukung percepatan pembangunan di masing – masing wilayahnya, salah satunya melalui Lomba RT.

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023
Nasional	0.385	0.381	0.402	0.388
Jawa Timur	0.364	0.364	0.381	0.387
Sidoarjo	0.340	0.347	0.373	0.359

Tingkat Kemiskinan

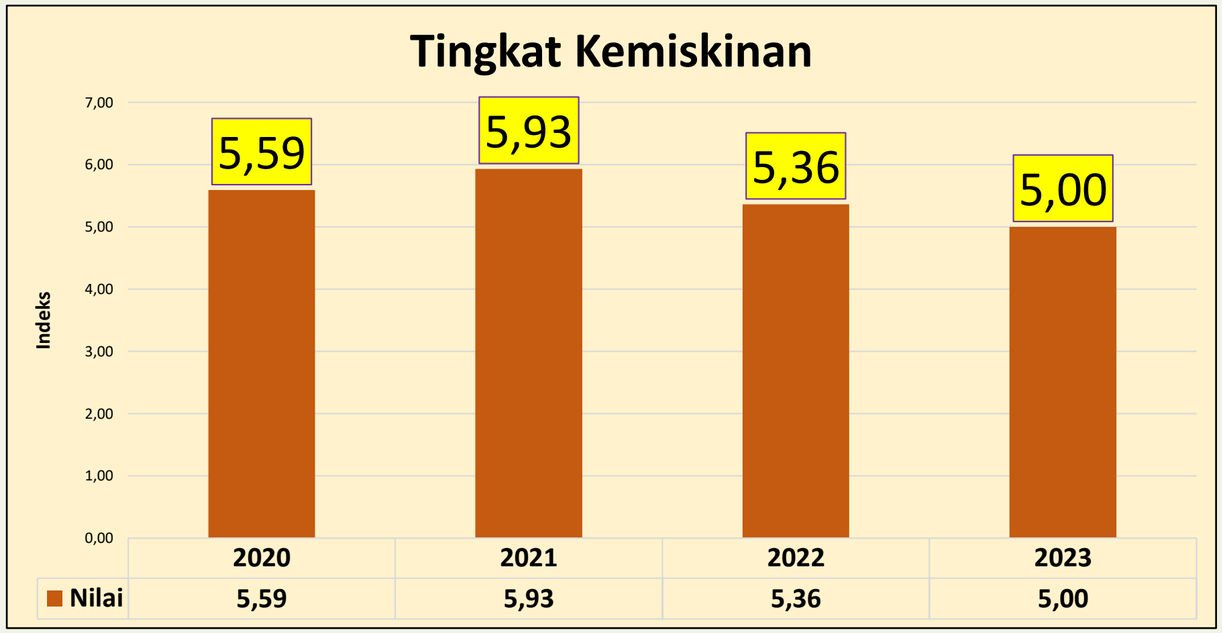

Setelah kenaikan di tahun 2021 (5,93) tingkat kemiskinan Sidoarjo membaik seiring dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dua tahun terakhir terus menunjukkan penurunan 2022 (5,36) dan 2023 (5,00)

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka Nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan mencapai 5,00 persen turun dari tahun 2022 yang masih berada pada angka 5,36%. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 5,40% maka capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 mencapai 119,15 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6,54 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 125,69 ribu jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 8,05 persen, turun 0,75 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang masih berada pada angka 8,80 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 10,09 persen, maka capaian tahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 berkurang 165,59 ribu orang menjadi sebanyak 1.176,48 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,62 persen, turun 3,25 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2022.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.081,72 ribu orang atau bertambah 142,30 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sektor Pertanian mengalami peningkatan jumlah pekerja yaitu bertambah sebesar 4,17 ribu orang, sedangkan sektor lapangan kerja paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa

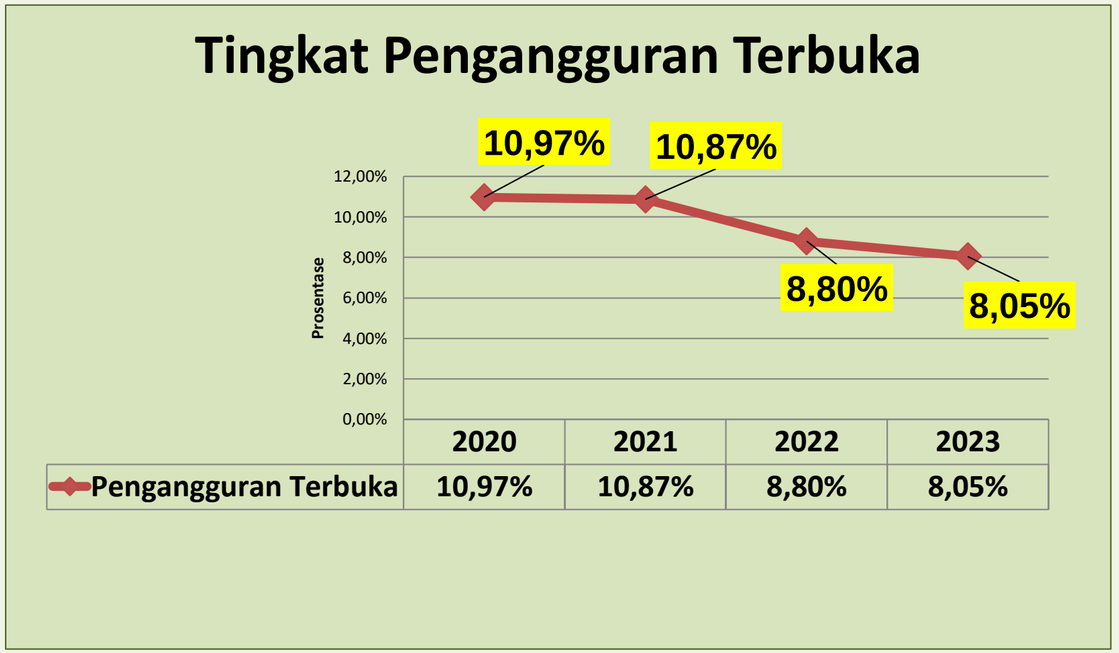

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidoarjo menurun tahun 2021 (10,87), 2022 (8,80) dan 2023 (8,05)

Indek Infrastruktur

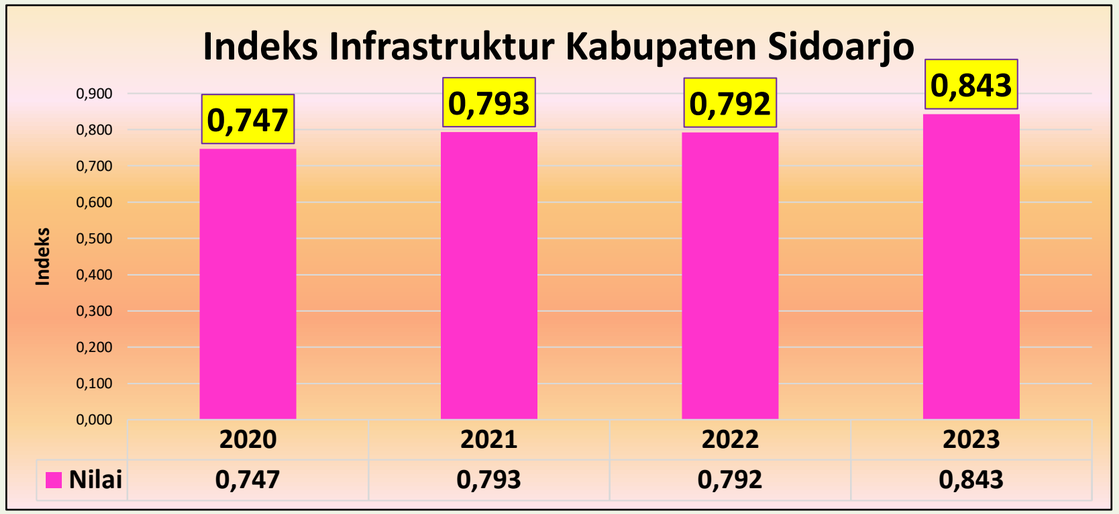

No.	Variabel	Target 2023	Realisasi 2023
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	31,18	33,34
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Keciptakaryaan	0,219	0,248
3	Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,0615	0,0663
4	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	80,91
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,66	86,67
Indeks Infrastruktur		0,772	0,843

Indeks Infrastruktur melewati target yang ditetapkan. Hal ini mencakup beberapa hal antaranya:

1. Jalan kondisi mantap sedang & baik
2. Saluran irigasi & drainase baik
3. Sarana dasar permukiman baik
4. Sarpras perhubungan baik
5. Fasilitas pendidikan baik
6. Fasilitas kesehatan baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 0,843 dari target 0,772 sehingga mencapai target dengan capaian 109,20%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,792 , maka terdapat kenaikan yang cukup tajam sebesar 0,051 atau 6,44%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator IKLH Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air	54,37
- Indeks Kualitas Udara	81,98
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	24,42

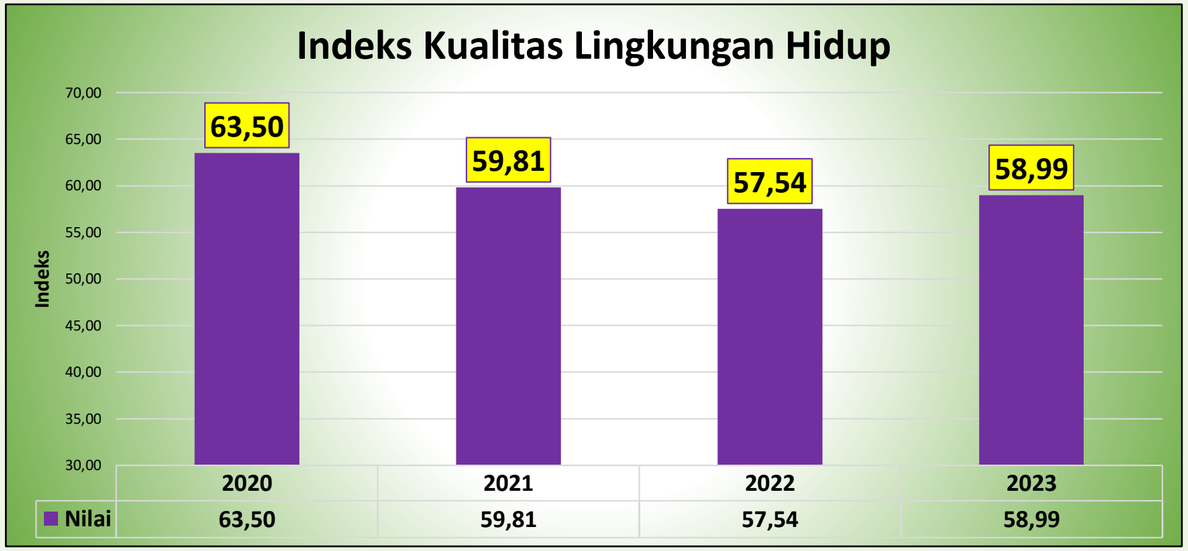

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 58,99 dari target 59,81 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun apabila dibanding dengan capaian tahun 2022 yaitu 57,54 maka terdapat peningkatan 1,45 poin atau sekitar 2,52%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurun di akhir tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 tetapi belum melewati target

Indeks Kualitas Air (IKA) **47,75 → 54,37 (2023)**

Indeks Kualitas Udara (IKU) **84,96 → 81.98 (2023)**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) **23,63 → 24,42 (2023)**

Indek Pembangunan Manusia

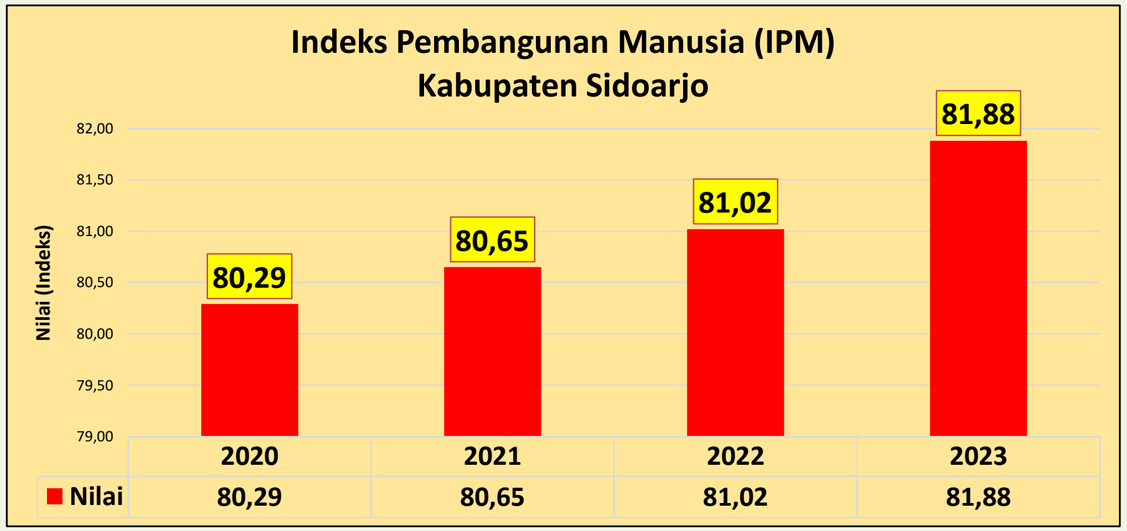

Indeks Pembangunan Manusia melewati target selama periode tahun 2020 – 2023.

1. Usia Harapan Hidup 75,36 tahun
2. Harapan Lama Sekolah 14,97 tahun
3. Rata-Rata Lama Sekolah 10,78 tahun
4. Pengeluaran per kapita Rp. 15.311.000 / tahun

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,78	74,80	75,06	75,36
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	14,94	14,95	14,97
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,50	10,72	10,77	10,78
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.458	14.578	14.808	15.311
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,64	81,01	81,37	81,88

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 81,88 dari target 80,91 atau mencapai target dengan capaian 101,20%. Apabila dibanding dengan capaia tahun 2022 yaitu 81,02 maka terdapat kenaikan 0,86 poin atau sekitar 1,06%.

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota.

Indeks Kesalehan Sosial

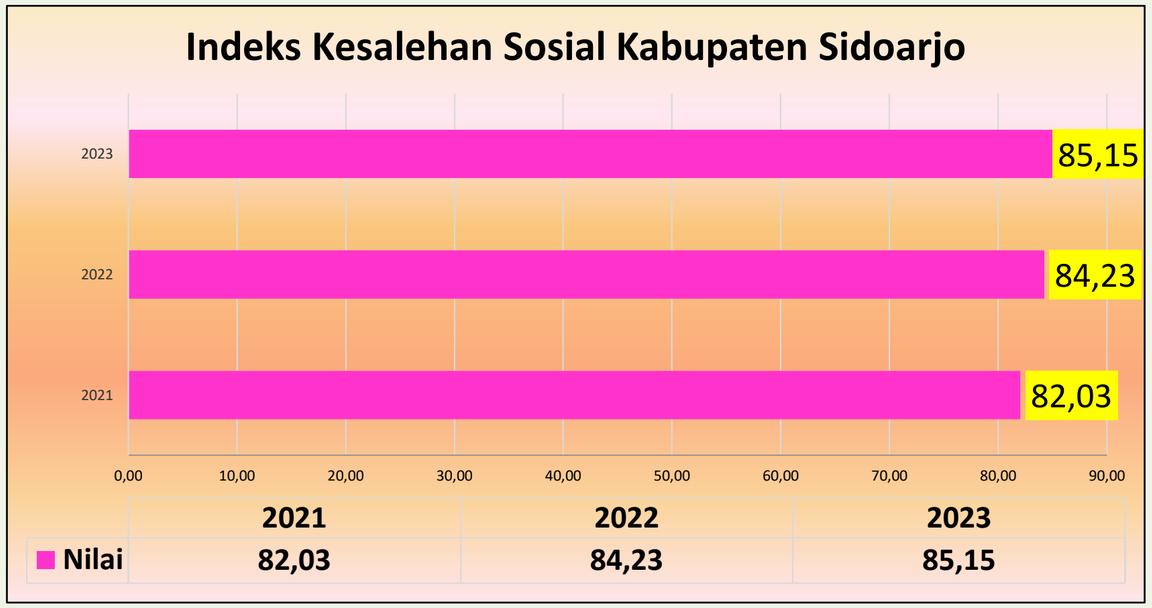

Indeks Kesalehan Sosial yang meliputi

a. Indeks Rasa Aman
b. Indeks Toleransi
c. Indeks Pelestarian Budaya

Semuanya mampu melewati target-target yang ditetapkan

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut :

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Indeks Toleransi	83,29	40%	33,32
Indeks rasa Aman	81,86	30%	24,56
Indeks pelestarian Budaya	90,92	30%	27,28
		100%	85,15

CAPAIAN IKU KABUPATEN SIDOARJO

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Periode Awal RPJMD (2020)	2021		2022		2023		2024	2025	2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	B	BB	B	BB	BB	A	A	A
2	Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	1	4,21	1,36	7,53	2,89	6,16	4,23	5,01	5,53
3	Indeks Gini	0,340	0,365	0,347	0,359	0,373	0,347	0,359	0,345	0,343	0,340
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,97	10,54	10,87	10,39	8,80	10,09	8,05	9,76	9,44	9,14
5	Tingkat Kemiskinan	5,59	5,71	5,93	6,00	5,36	5,40	5,00	5,30	5,20	5,00
6	Indeks Infrastruktur	0,747	0,755	0,793	0,762	0,792	0,772	0,843	0,780	0,788	0,796
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,78	59,79	59,81	59,80	57,54	59,81	58,99	59,82	59,83	59,84
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,29	80,41	80,65	80,77	81,02	80,92	81,88	81,17	81,40	81,62
9	Indeks Kesalehan Sosial	N / A	82,01	82,03	82,77	84,23	85,00	85,15	87,30	89,66	92,08

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.913.135.627.969,00	2.050.814.700.362,07	107,20
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.957.289.952.079,00	2.366.272.099.637,00	100,29
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.300.000.000,00	3.567.282.000,00	82,96
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.874.725.580.048,00**	**5.020.221.472.820,07**	**102.98**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	3.725.646.627.268,00	3.507.494.437.666,58	94,14
2.2.	BELANJA MODAL	846.634.465.375,00	715.198.635.441,00	84,48
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.970.200.000,00	9.610.233.290,00	60,18
2.4.	BELANJA TRANSFER	779.252.286.590,00	769.475.367.090,00	98,75
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**5.367.503.579.233,00**	**5.001.778.673.487,58**	**93,19**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	494.877.999.185,00	494.877.999.184,63	100,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	0,00	661.916.872,05	-
Jumlah	494.877.999.185,00	495.539.916.056,68	100,13
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	2.055.000.000,00	97,86
Pembiayaan Pokok Utang	0,00	0,00	-
Jumlah	2.100.000.000,00	2.055.000.000,00	97,86
	492.777.999.185,00	493.484.916.056,68	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	**511.927.597.548,05**	

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

CAPAIAN IKU KABUPATEN SIDOARJO

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Periode Awal RPJMD (2020)	2021		2022		2023		2024	2025	2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B B	B	B B	B	B B	BB	A	A	A
2	Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	1	4,21	1,36	7,53	2,89	6,16	4,23	5,01	5,53
3	Indeks Gini	0,340	0,365	0,347	0,359	0,373	0,347	0,359	0,345	0,343	0,340
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,97	10,54	10,87	10,39	8,80	10,09	8,05	9,76	9,44	9,14
5	Tingkat Kemiskinan	5,59	5,71	5,93	6,00	5,36	5,40	5,00	5,30	5,20	5,00
6	Indeks Infrastruktur	0,747	0,755	0,793	0,762	0,792	0,772	0,843	0,780	0,788	0,796
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,78	59,79	59,81	59,80	57,54	59,81	58,99	59,82	59,83	59,84
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,29	80,41	80,65	80,77	81,02	80,92	81,88	81,17	81,40	81,62
9	Indeks Kesalehan Sosial	N / A	82,01	82,03	82,77	84,23	85,00	85,15	87,30	89,66	92,08

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan BB (Sangat Baik), sedangkan untuk capaiannya adalah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat BB (Sangat Baik) dengan Nilai 75,38. Capaian dimaksud meningkat dari tahun 2022 yang masih berada pada kategori B (Baik)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB, komponen penilaian tercapai sebagaimana tabel berikut :

RB General	65,86
RB Tematik	9,52
Total Nilai	75,38

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,89, dan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 6,16. Apabila dibandingkan dengan target 2,89 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sudah jauh melebihi target yang ditentukan. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 7,53 maka mengalami penurunan 1,37 poin atau sekitar 18,19%

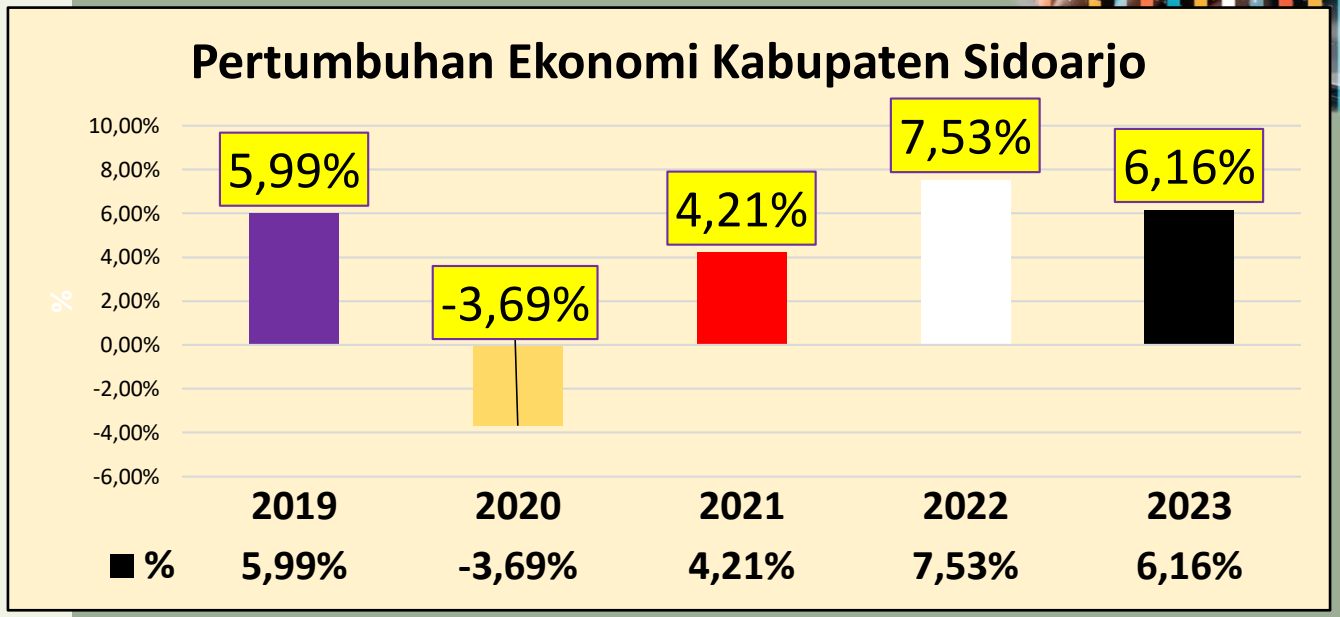

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.04
Jawa Timur	-2.39	4.59	5.34	4.95
Sidoarjo	-3.69	4.21	7.53	6.16

Indeks Gini

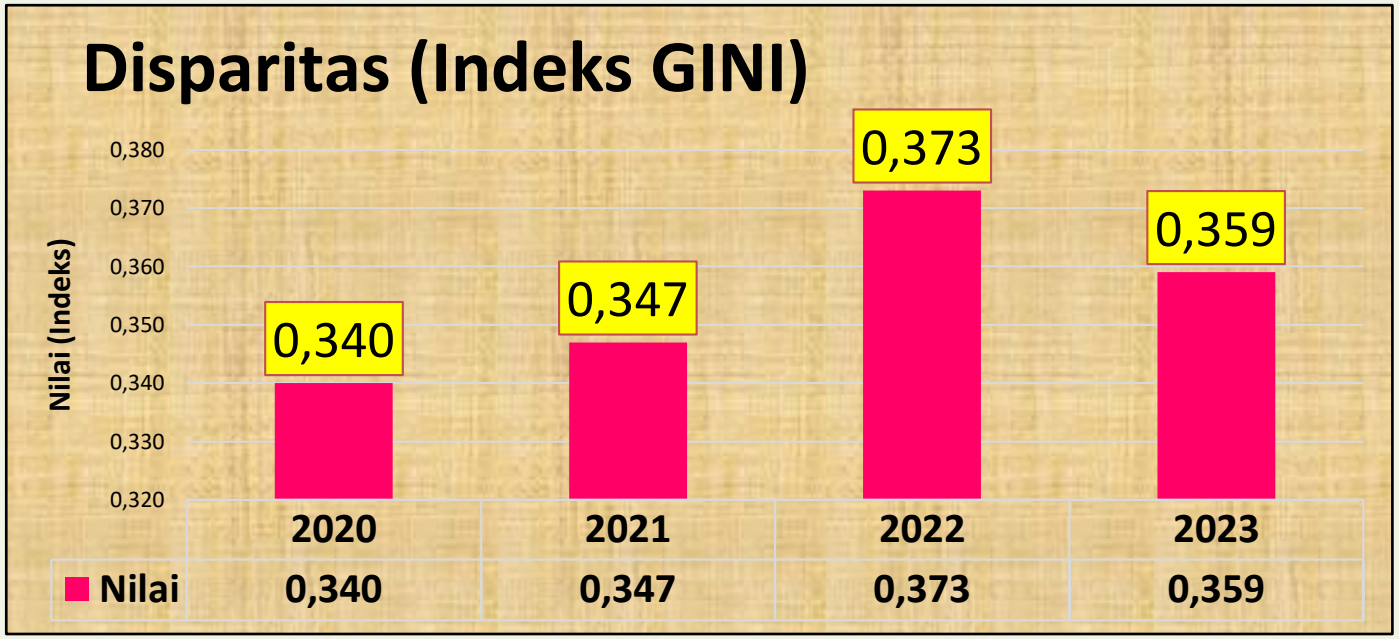

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 tercapai 0,359 dari target 0,347 sehingga masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian tahun 2023 lebih baik, yaitu menurun 0,014 angka atau sekitar 3,90%.

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023
Nasional	0.385	0.381	0.402	0.388
Jawa Timur	0.364	0.364	0.381	0.387
Sidoarjo	0.340	0.347	0.373	0.359

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 8,05 persen, turun 0,75 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang masih berada pada angka 8,80 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 10,09 persen, maka capaian tahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan.

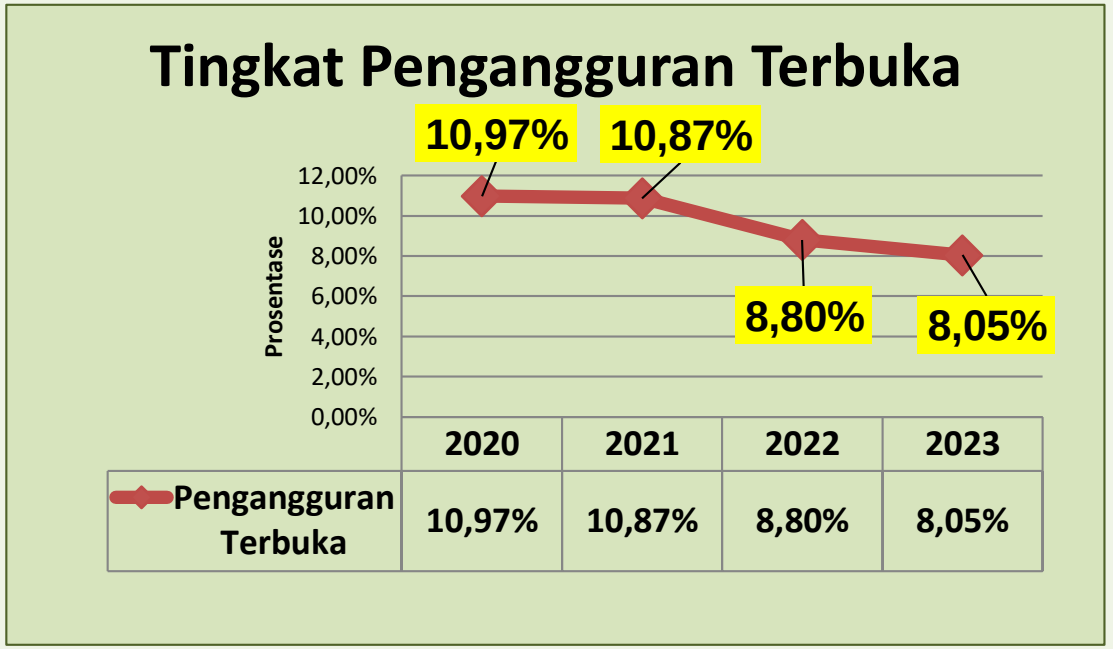

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidoarjo menurun tahun 2021 (10,87), 2022 (8,80) dan 2023 (8,05)

Tingkat Kemiskinan

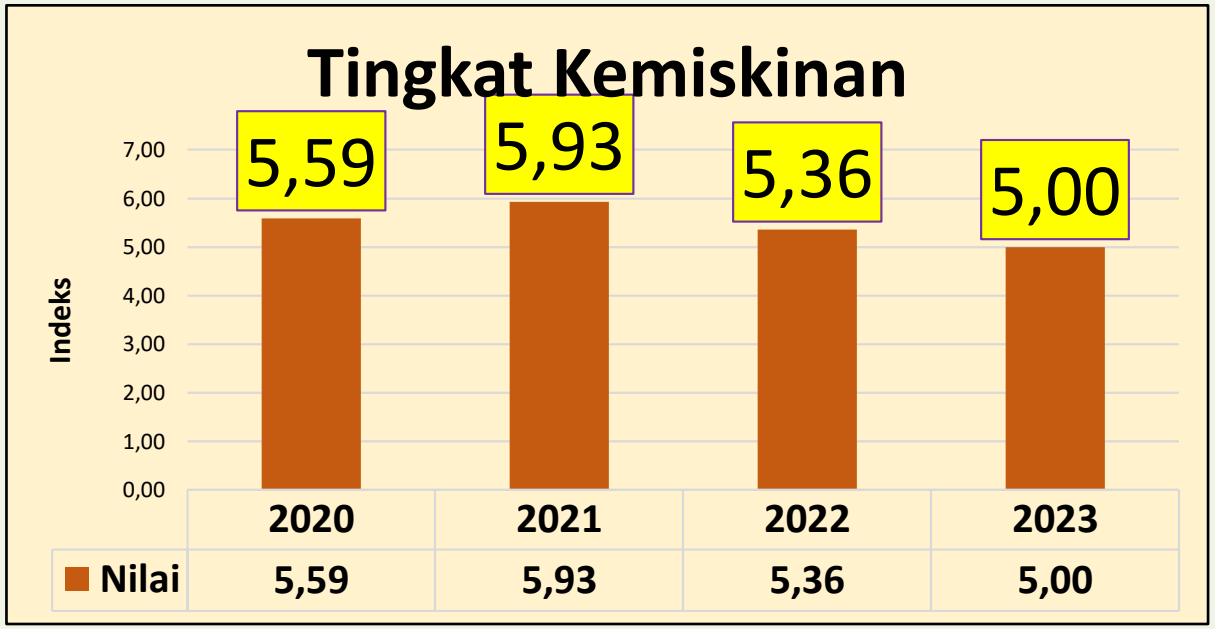

Setelah kenaikan di tahun 2021 (5,93) tingkat kemiskinan Sidoarjo membaik seiring dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dua tahun terakhir terus menunjukkan penurunan 2022 (5,36) dan 2023 (5,00)

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka Nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan mencapai 5,00 persen turun dari tahun 2022 yang masih berada pada angka 5,36%. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 5,40% maka capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Indek Infrastruktur

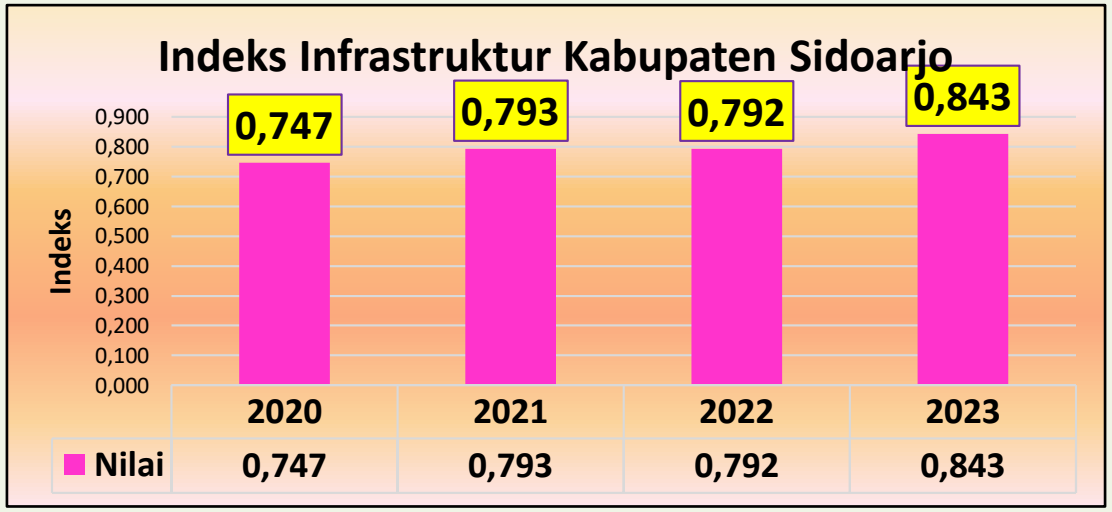

No.	Variabel	Target 2023	Realisasi 2023
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	31,18	33,34
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Keciptakaryaan	0,219	0,248
3	Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,0615	0,0663
4	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	80,91
5	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,66	86,67
Indeks Infrastruktur		0,772	0,843

Indeks Infrastruktur melewati target yang ditetapkan. Hal ini mencakup beberapa hal antaranya:

1. Jalan kondisi mantap sedang & baik
2. Saluran irigasi & drainase baik
3. Sarana dasar permukiman baik
4. Sarpras perhubungan baik
5. Fasilitas pendidikan baik
6. Fasilitas kesehatan baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 0,843 dari target 0,772 sehingga mencapai target dengan capaian 109,20%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,792 , maka terdapat kenaikan yang cukup tajam sebesar 0,051 atau 6,44%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator IKLH Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air	54,37
- Indeks Kualitas Udara	81,98
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	24,42

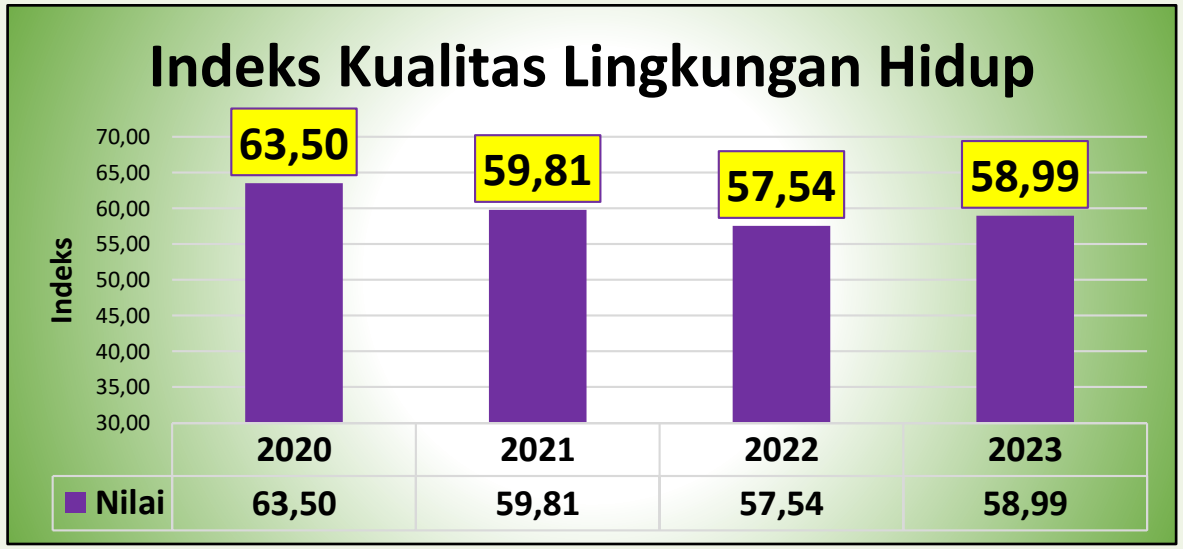

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu:
Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 58,99 dari target 59,81 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun apabila dibanding dengan capaian tahun 2022 yaitu 57,54 maka terdapat peningkatan 1,45 poin atau sekitar 2,52%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurun di akhir tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 tetapi belum melewati target

Indeks Kualitas Air (IKA) **47,75 → 54,37 (2023)**

Indeks Kualitas Udara (IKU) **84,96 → 81.98 (2023)**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) **23,63 → 24,42 (2023)**

Indek Pembangunan Manusia

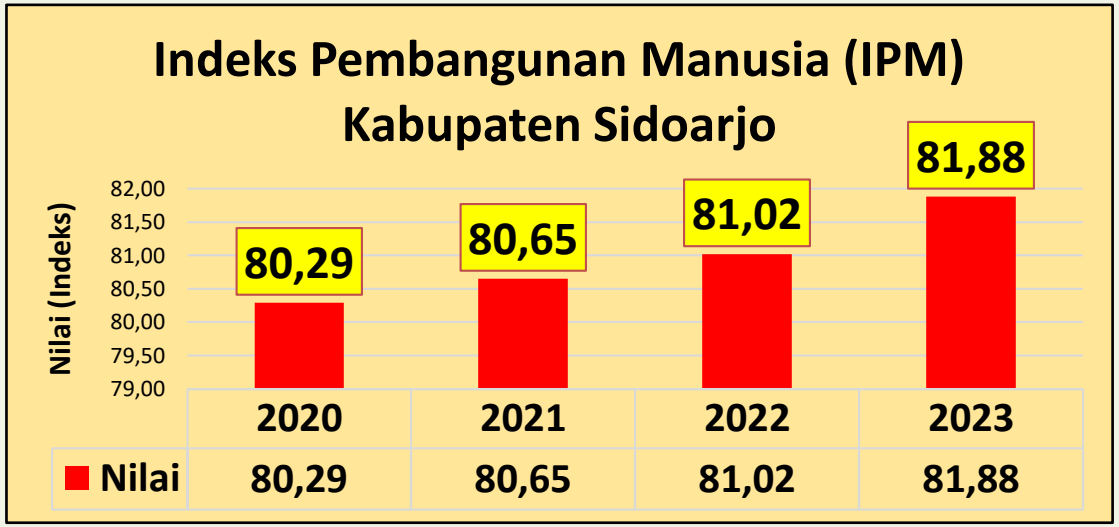

Indeks Pembangunan Manusia melewati target selama periode tahun 2020 – 2023.

1. Usia Harapan Hidup 75,36 tahun
2. Harapan Lama Sekolah 14,97 tahun
3. Rata-Rata Lama Sekolah 10,78 tahun
4. Pengeluaran per kapita Rp. 15.311.000 / tahun

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,78	74,80	75,06	75,36
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	14,94	14,95	14,97
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,50	10,72	10,77	10,78
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.458	14.578	14.808	15.311
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,64	81,01	81,37	81,88

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 81,88 dari target 80,91 atau mencapai target dengan capaian 101,20%. Apabila dibanding dengan capaia tahun 2022 yaitu 81,02 maka terdapat kenaikan 0,86 poin atau sekitar 1,06%.

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota.

Indeks Kesalehan Sosial

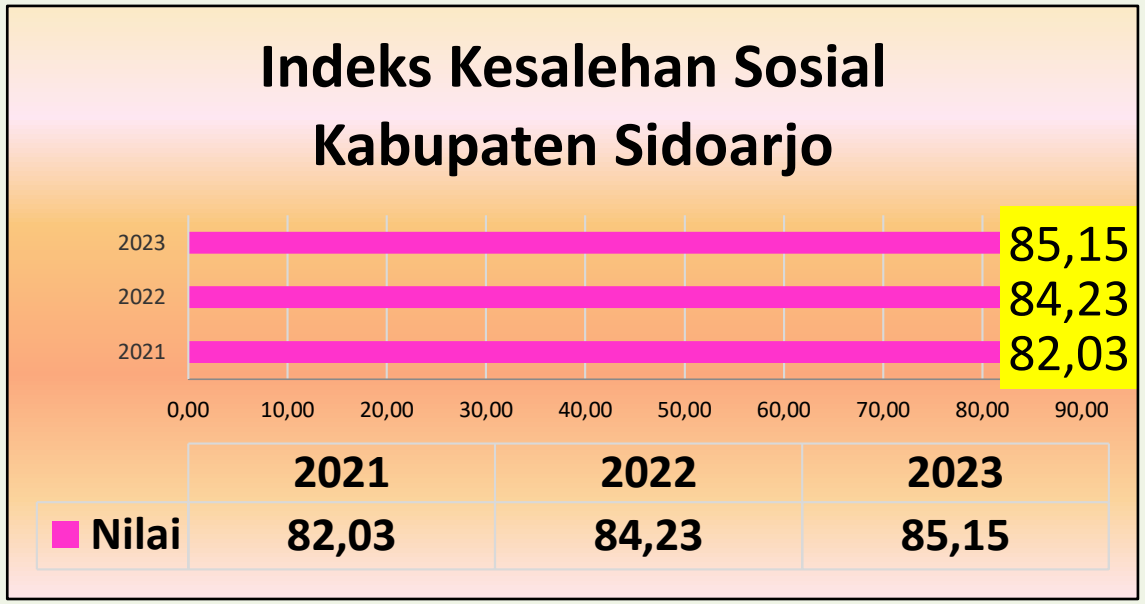

Indeks Kesalehan Sosial yang meliputi
a. Indeks Rasa Aman
b. Indeks Toleransi
c. Indeks Pelestarian Budaya

Semuanya mampu melewati target-target yang ditetapkan

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut :

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Indeks Toleransi	83,29	40%	33,32
Indeks rasa Aman	81,86	30%	24,56
Indeks pelestarian Budaya	90,92	30%	27,28
		100%	85,15

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HARAPAN LAMA SEKOLAH

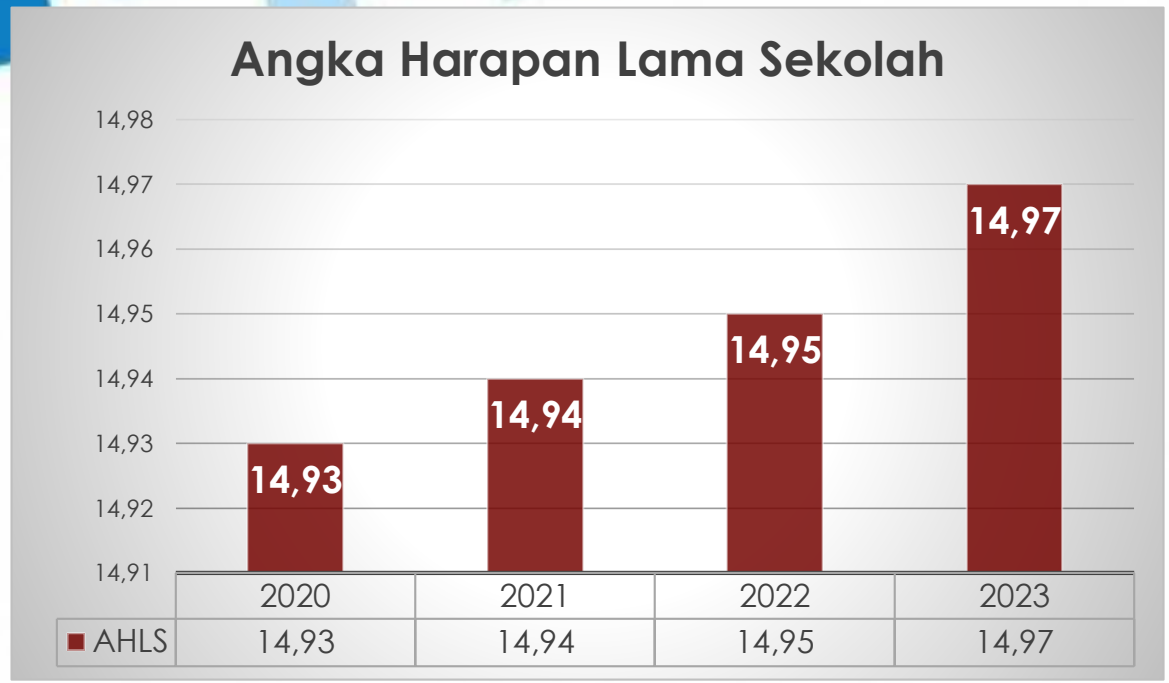

Target	Realisasi	Status
15,41 tahun	14,97 tahun	TIDAK TERCAPAI

RATA - RATA LAMA SEKOLAH

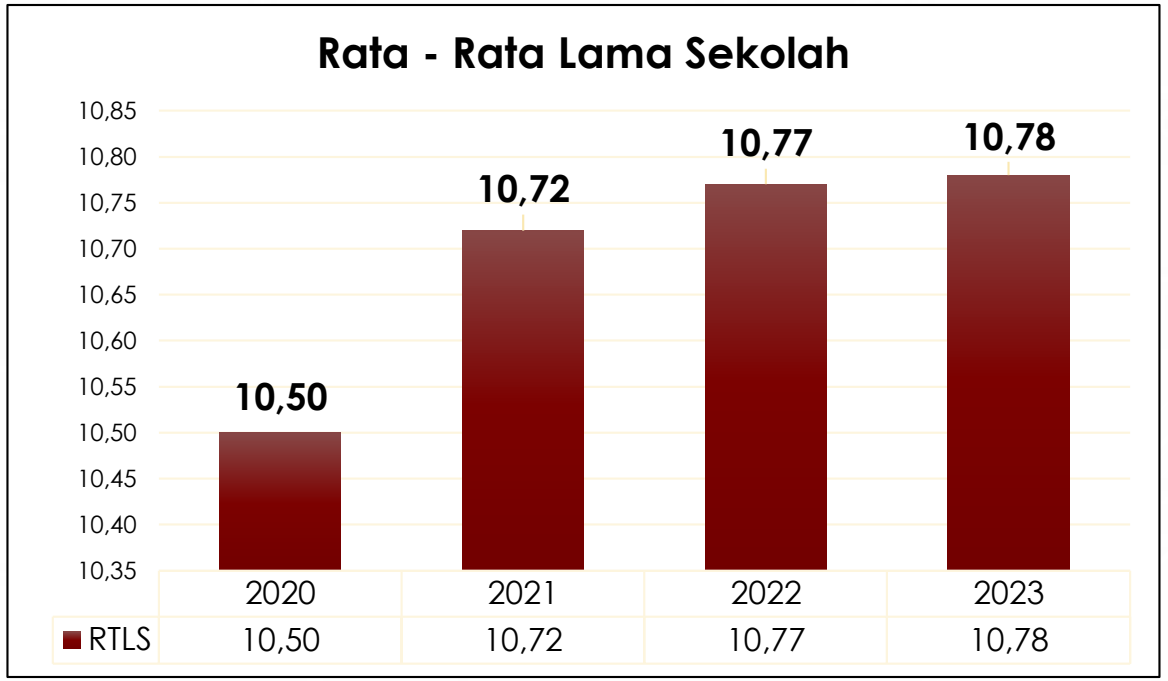

Target	Realisasi	Status
11,23 tahun	10,78 tahun	TIDAK TERCAPAI

USIA HARAPAN HIDUP

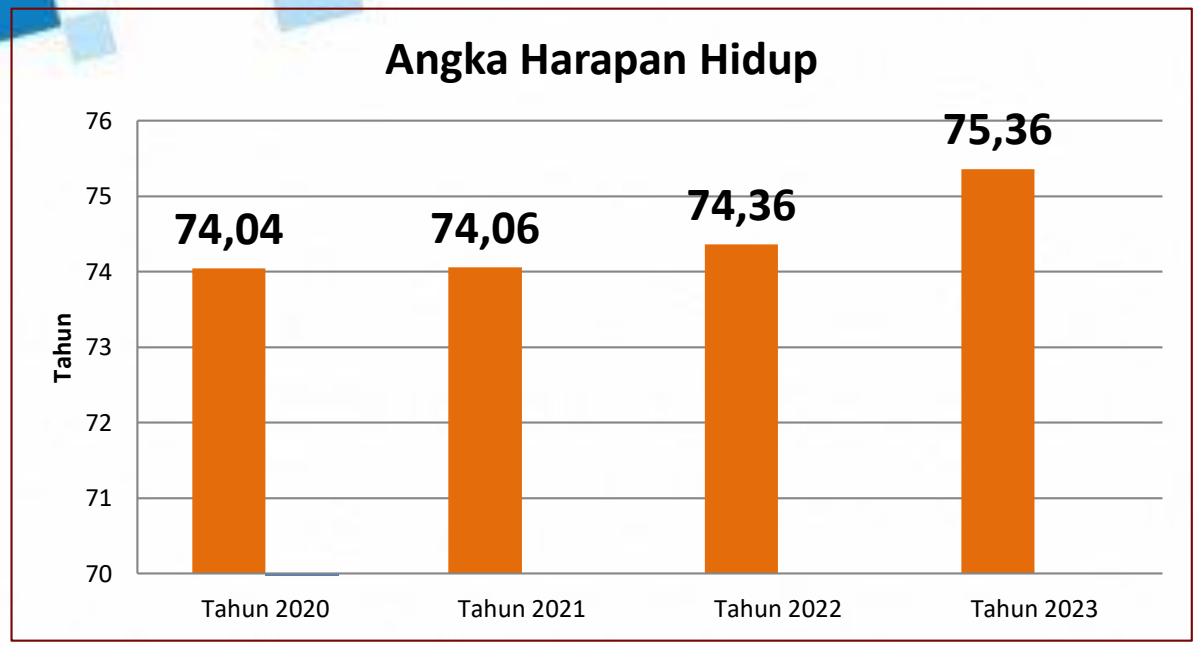

Target	Realisasi	Status
75,19 tahun	75,36 tahun	TERCAPAI

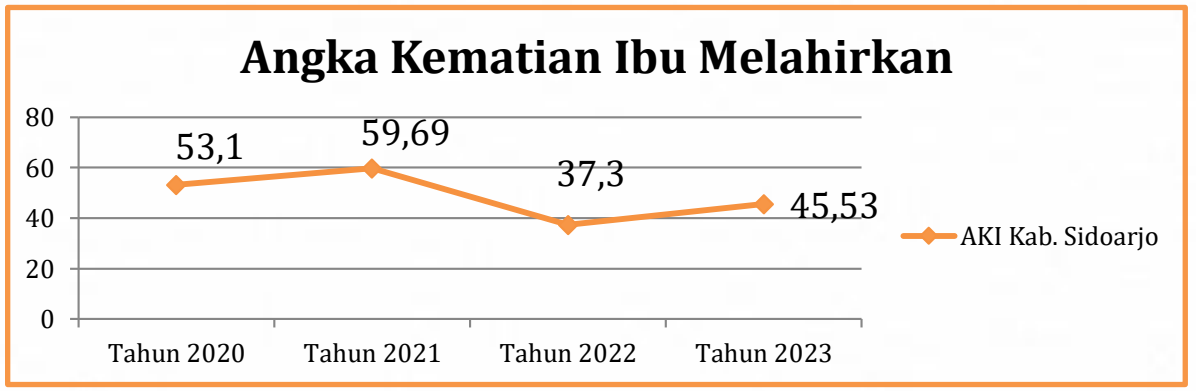

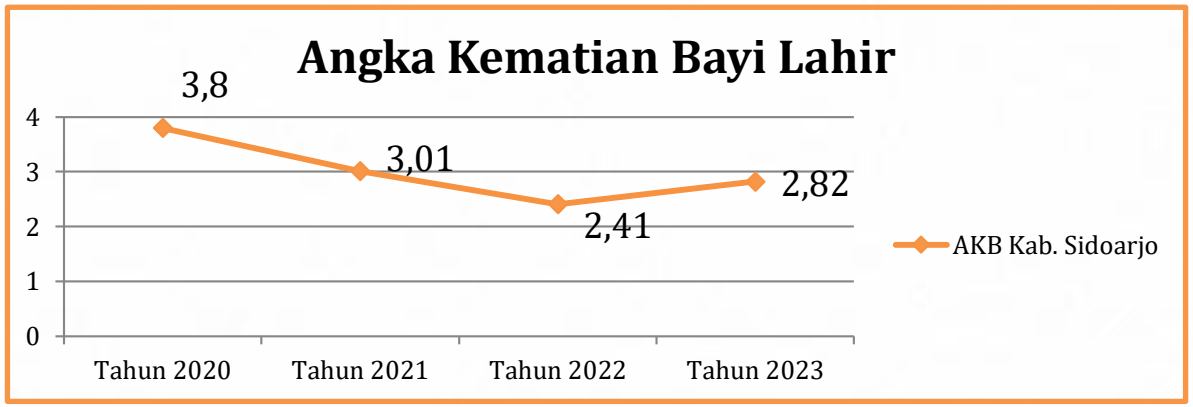

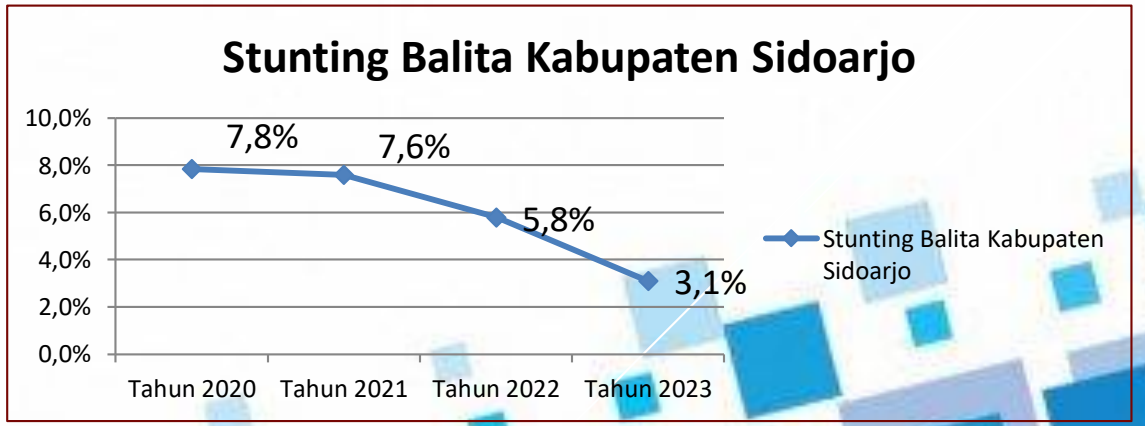

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Target	Realisasi	Status
0,760	0,823	TERCAPAI

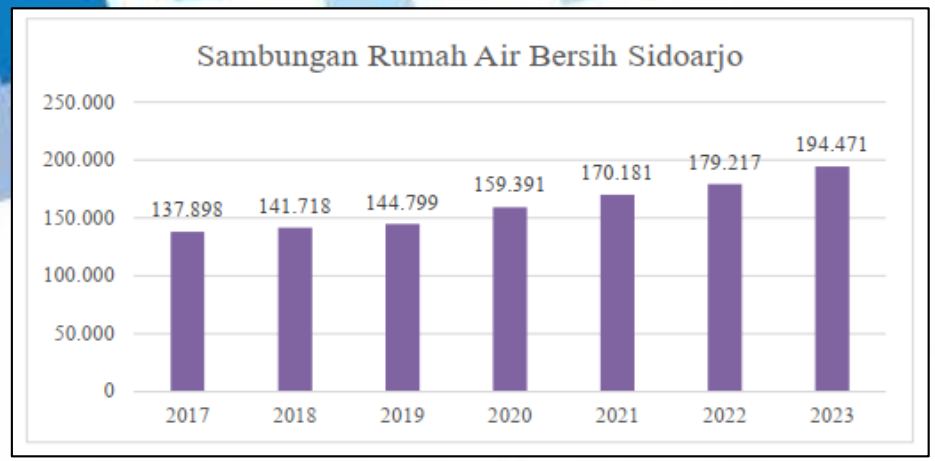

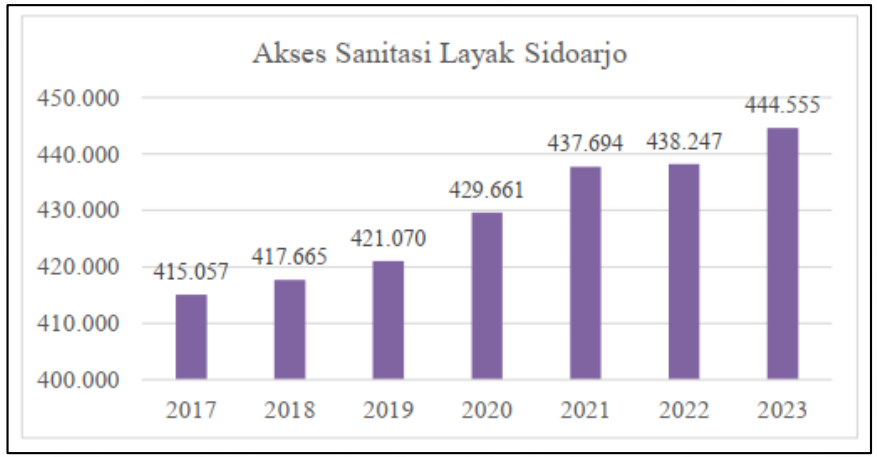

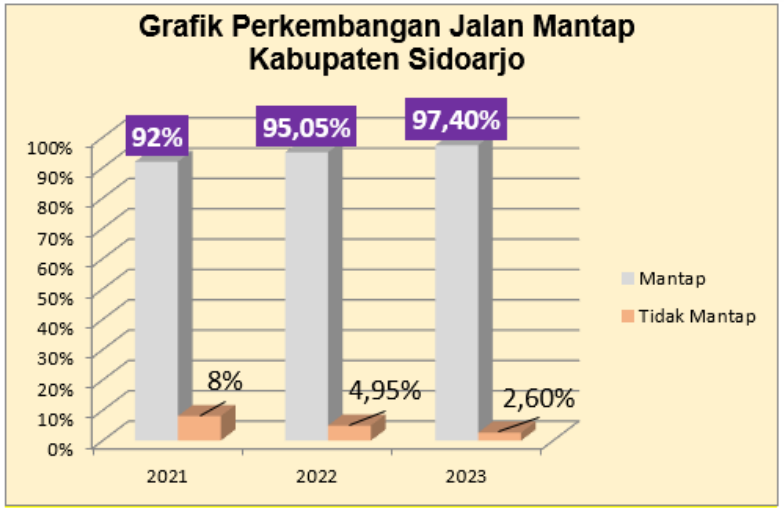

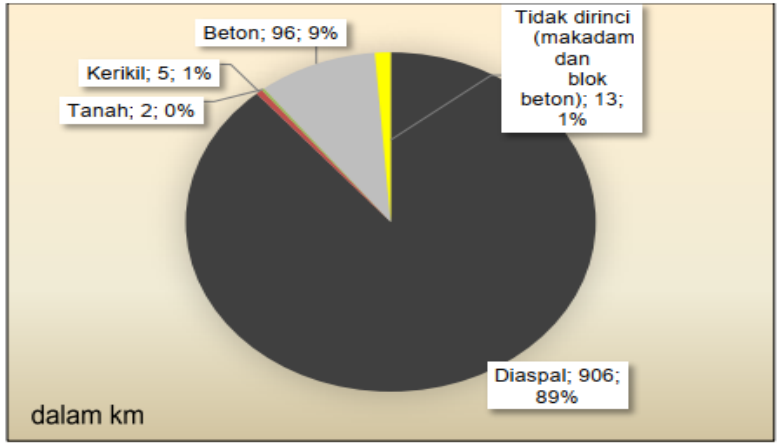

Sumber Data : Laporan Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2023

Indeks Infrastruktur Pendidikan

Target	Realisasi	Status
86,60	95,60	TERCAPAI

SD Negeri

Persentase Bangunan Ruang	Target 2023	Realisasi 2023
Kelas SD Kategori Baik	95,45%	95,59%

SMP Negeri

Persentase Bangunan Ruang	Target 2023	Realisasi 2023
Kelas SMP Kategori Baik	95,65%	95,67%

Indeks Infrastruktur Kesehatan

Target	Realisasi	Status
72,32	80,91	TERCAPAI

RSUD

Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 Rumah Sakit sampai dengan tahun 2023

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
2 bangunan	0 bangunan	0 bangunan
100 %	-	-

Puskesmas

Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 puskesmas sampai dengan tahun 2023

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
27 bangunan	4 bangunan	0 bangunan
90%	10%	-

Indeks Rasa Aman

Target	Realisasi	Status
78,97	81,86	TERCAPAI

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	80,43
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	84,51
Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	87,17
Keamanan dari Kekerasan	75,34
Indeks Rasa Aman	**81,86**

Indeks Toleransi

Target	Realisasi	Status
80,22	83,29	TERCAPAI

Variabel	Capaian
Persepsi terhadap toleransi	86,67
Sikap Terhadap Toleransi	83,15
Kerjasama Antar Suku dan agama yang berbeda	79,24
Sikap Pemerintah daerah Terhadap hubungan antar suku agama yang berbeda	83,23
Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah dalam rangka terciptanya Toleransi di Masyarakat	85,16
Indeks Toleransi	**83,29**

Indeks Resiko Bencana

Target	Realisasi	Status
92,53	98,12	TIDAK TERCAPAI

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Target	Realisasi	Status
94,60	95,00	TERCAPAI

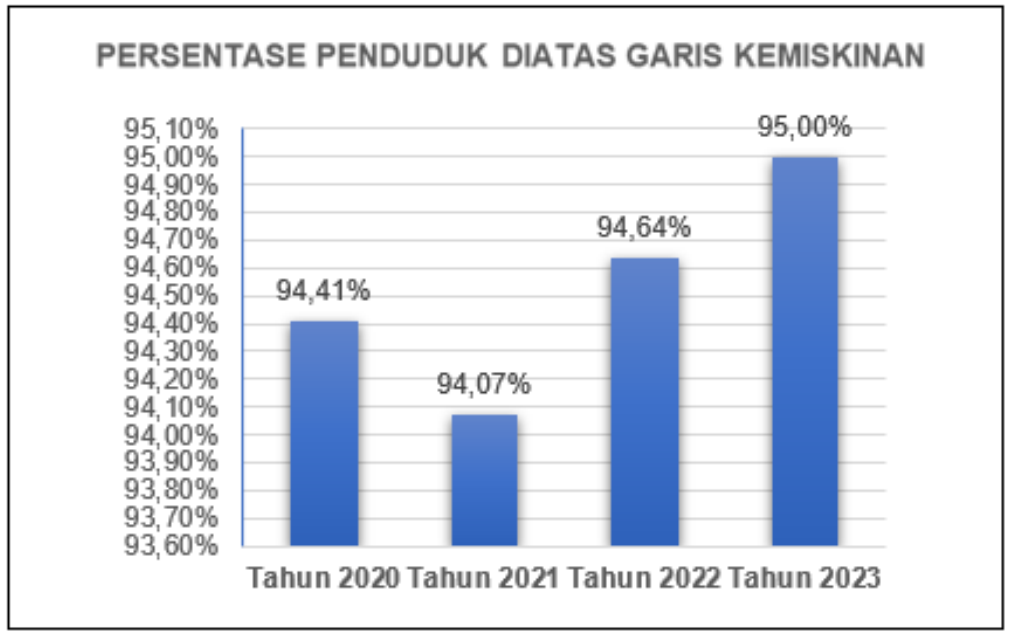

Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di 9 Sektor

Target	Realisasi	Status
89,91	91,95	TERCAPAI

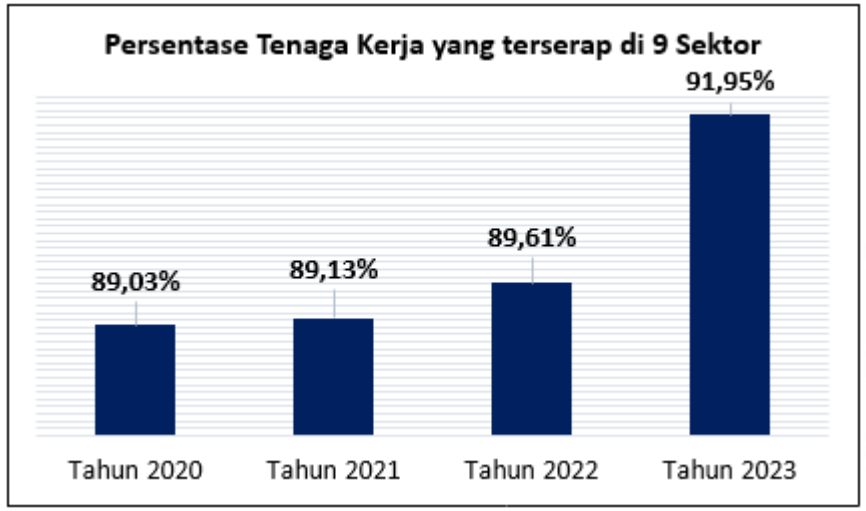

Indeks Pembangunan Gender

Target	Realisasi	Status
94,95	*Belum release*	*BELUM RELEASE*

INDEKS KUALITAS AIR

Target	Realisasi	Status
51,54	54,32	TERCAPAI

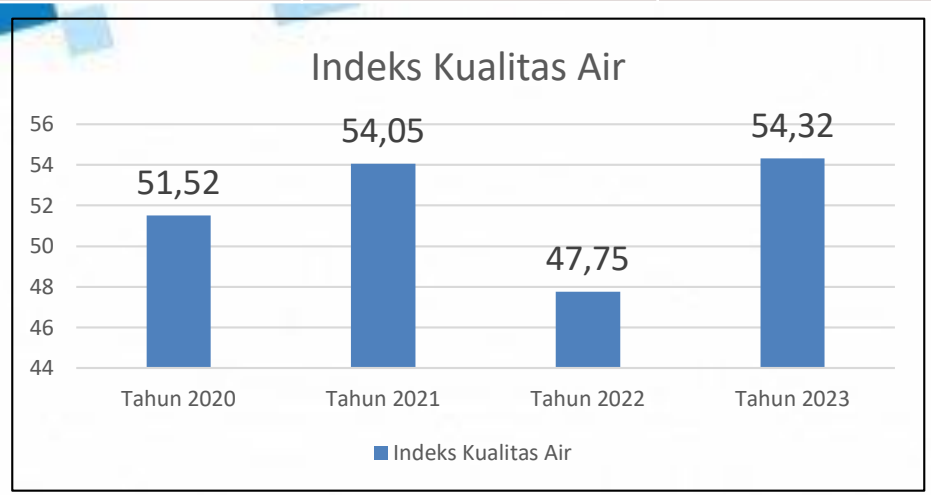

INDEKS KUALITAS UDARA

Target	Realisasi	Status
85,16	81,98	TIDAK TERCAPAI

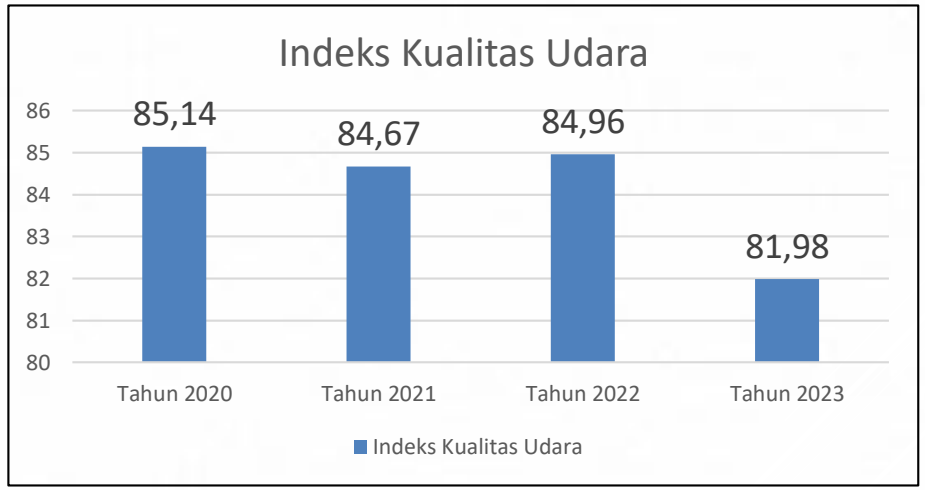

INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Target	Realisasi	Status
27,12	24,42	TIDAK TERCAPAI

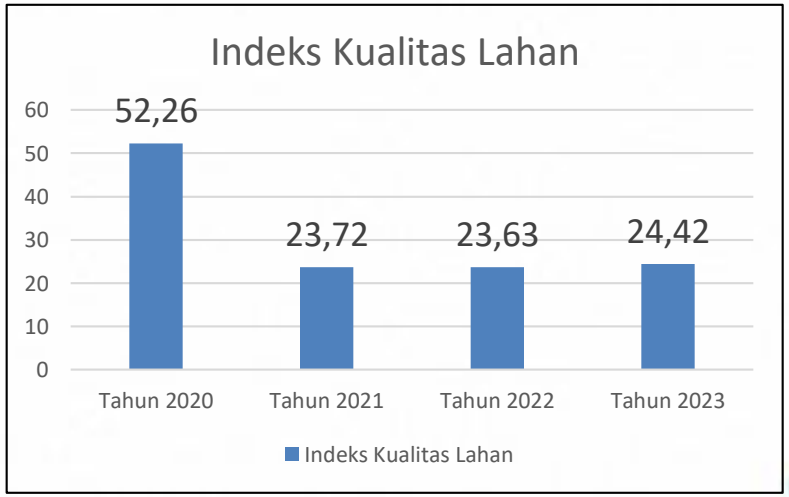

Persentase Desa Mandiri

Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
0 Desa	0 Desa	30 Desa	136 Desa	152 Desa

Target	Realisasi	Status
13,98	47,8	TERCAPAI

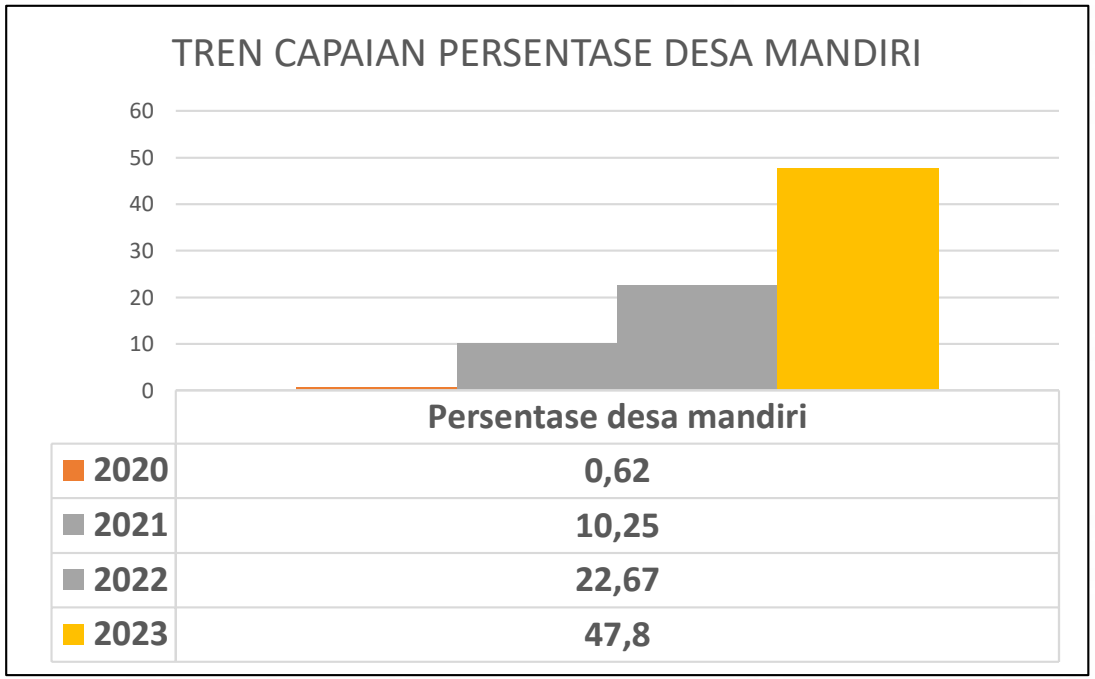

Nilai Indeks SPBE

Target	Realisasi	Status
3,45	3,11	TIDAK TERCAPAI

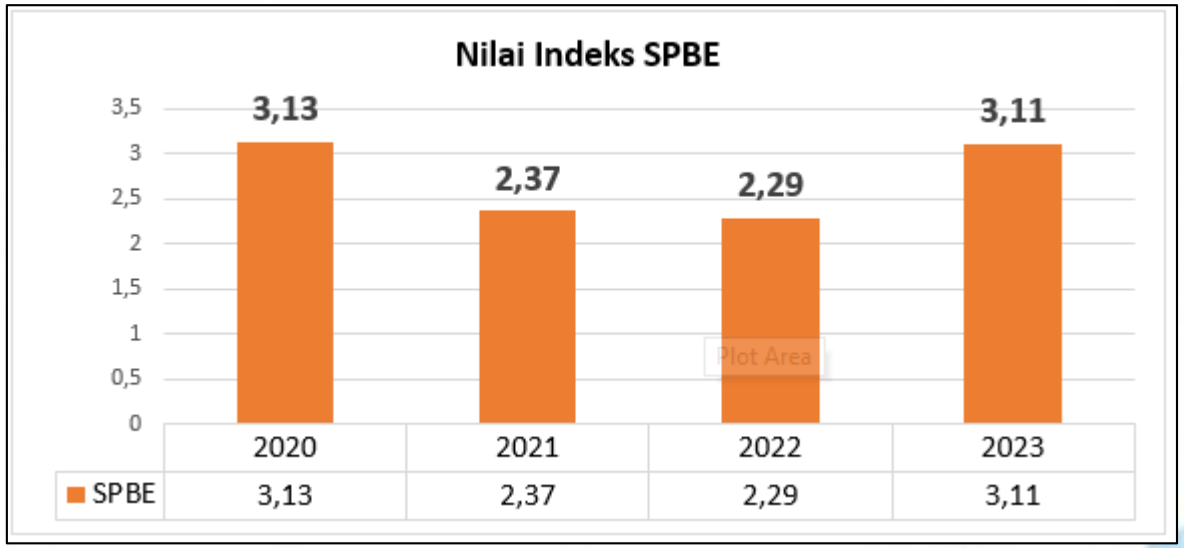

Persentase Koperasi Berkualitas

Target	Realisasi	Status
24,69	24,96	TERCAPAI

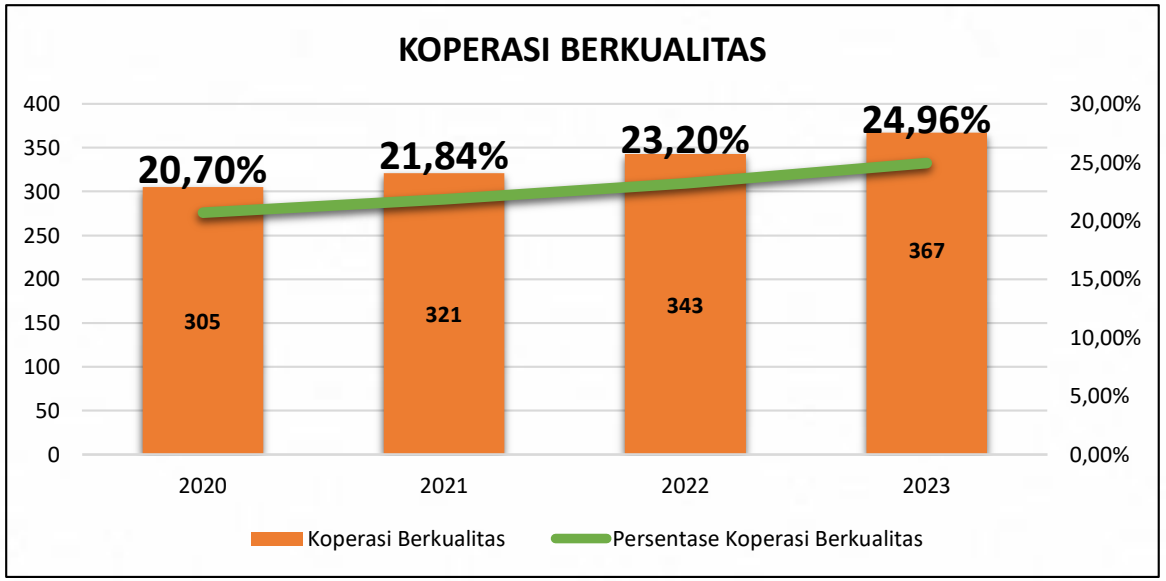

Persentase Usaha Mikro Mandiri

Target	Realisasi	Status
1,98	2,06	TERCAPAI

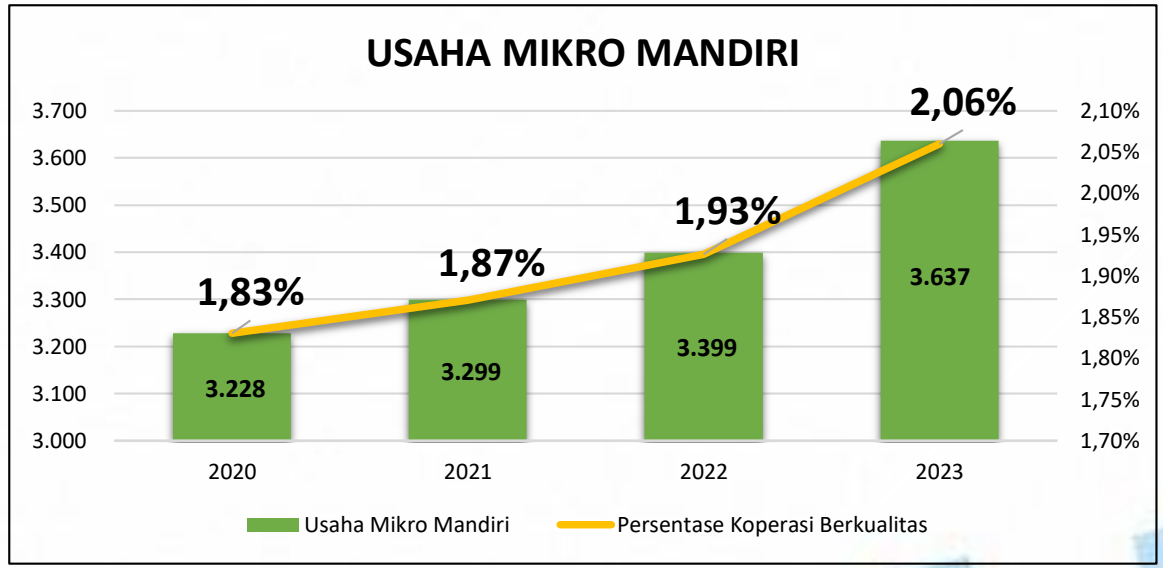

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Target	Realisasi	Status
1,25	-(2,87%)	TIDAK TERCAPAI

Indeks Pelestarian Budaya

Target	Realisasi	Status
63,58	90,92	TERCAPAI

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Seni dan Budaya	82,78	35%	28,973
Cagar Budaya	97,02	35%	33,957
Sikap masyarakat	93,29	30%	27,987
		100%	**90,92**

Indeks Pelayanan Publik

Target	Realisasi	Status
A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	TERCAPAI

Nilai SAKIP Kabupaten

Target	Realisasi	Status
A	BB	TIDAK TERCAPAI

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	26.31	26.31
b. Pengukuran Kinerja	30	23.81	23.18
c. Pelaporan Kinerja	15	12.34	11.45
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.50	16.56
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**78.96**	**77.50**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Opini Atas Laporan BPK

Target	Realisasi	Status
WTP	WTP	TERCAPAI

Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Target	Realisasi	Status
3,81	*Belum release*	*BELUM RELEASE*

Status Kinerja LPPD

Target	Realisasi	Status
Sangat Tinggi	Tinggi	TIDAK TERCAPAI

Tingkat Maturitas SPIP

Target	Realisasi	Status
Level 3	Level 3	TERCAPAI

Indeks Inovasi Daerah

Target	Realisasi	Status
Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	TERCAPAI

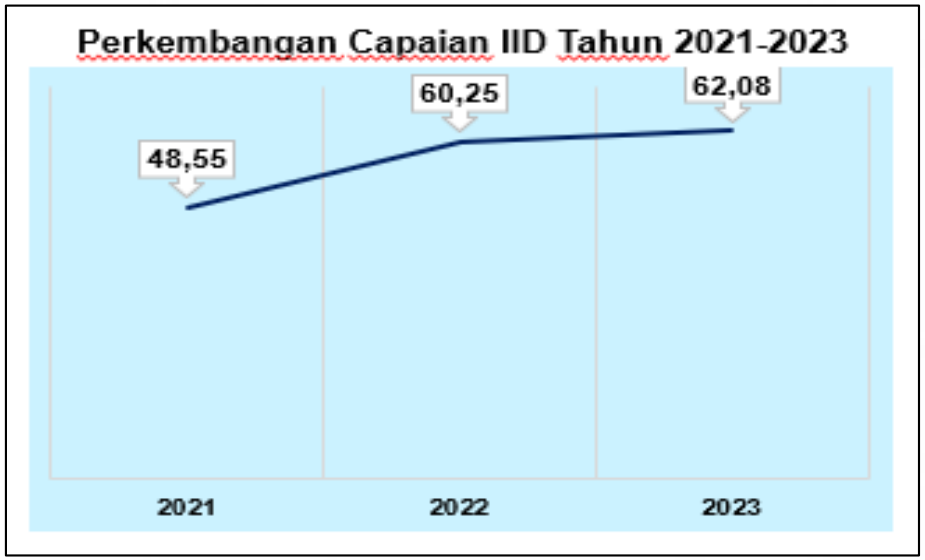

Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dalam Arti Luas

Target	Realisasi	Status
2,82	1,67	TIDAK TERCAPAI

Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Target	Realisasi	Status
16,22	16,08	TIDAK TERCAPAI

Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri

Target	Realisasi	Status
52,81	52,11	TIDAK TERCAPAI

Capaian Pelaksanaan 17 Program Prioritas s.d Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1
100.000 Lapangan
Kerja Baru
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

100.000 Lapangan Kerja Baru

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	AKUMULASI (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
18.447 Lapangan Kerja	31.701 Lapangan Kerja	41.649 Lapangan Kerja	91.797 Lapangan Kerja	25.300 Lapangan Kerja

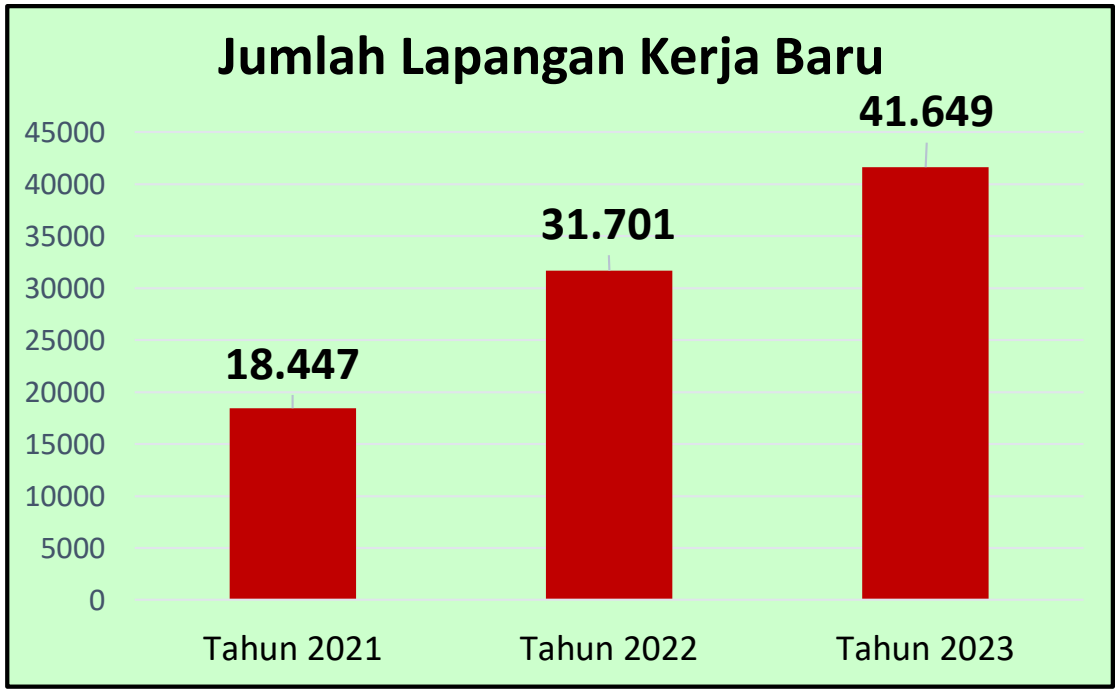

Prioritas dimaksud bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, baik melalui pencetakan wirausaha baru dari hasil pelatihan kerja, maupun penempatan tenaga kerja melalui lowongan usaha / bursa kerja / perjanjian kerja

Dengan adanya penciptaan Lapangan Kerja Baru maka berdampak pada menurunnya **Tingkat Pengangguran Terbuka** di Kabupaten Sidoarjo yang pada Tahun 2023 mencapai angka **8,05%** menurun dari Tahun 2021 10,87%

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS TENAGA KERJA; DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, dan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Adapun 41.649 Lapangan Kerja Baru di Tahun 2023, meliputi :

Lapangan Kerja Baru dari Pencetakan Wirausaha Baru Hasil Pelatihan	Lapangan Kerja Baru dari Penempatan Tenaga Kerja	Lapangan Kerja Baru dari Lowongan CASN
2.120 Lapangan Kerja	37.081 Lapangan Kerja	2.448 Lapangan Kerja

100.000 Lapangan Kerja Baru

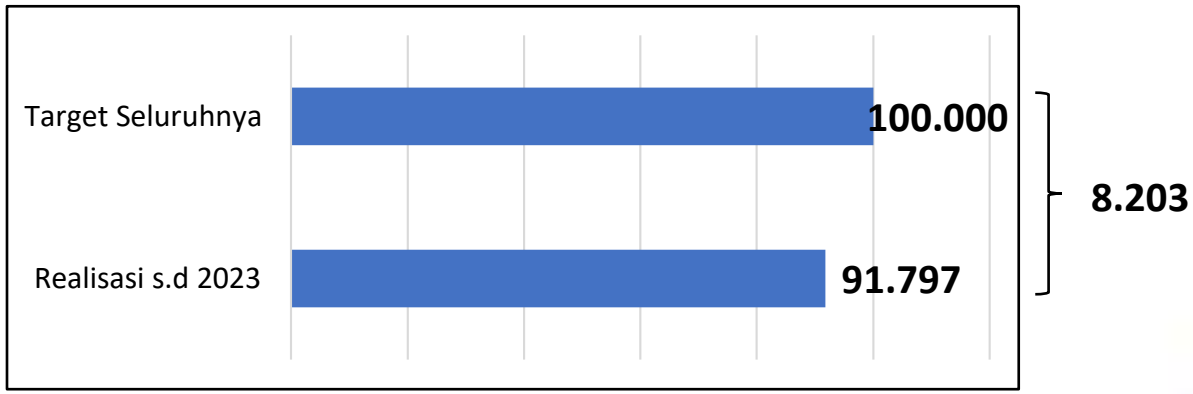

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 100.000 Lapangan Kerja Baru, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 91.797 Lapangan Kerja Baru, sehingga hanya ada Gap 8.203 Lapangan Kerja Baru.

BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

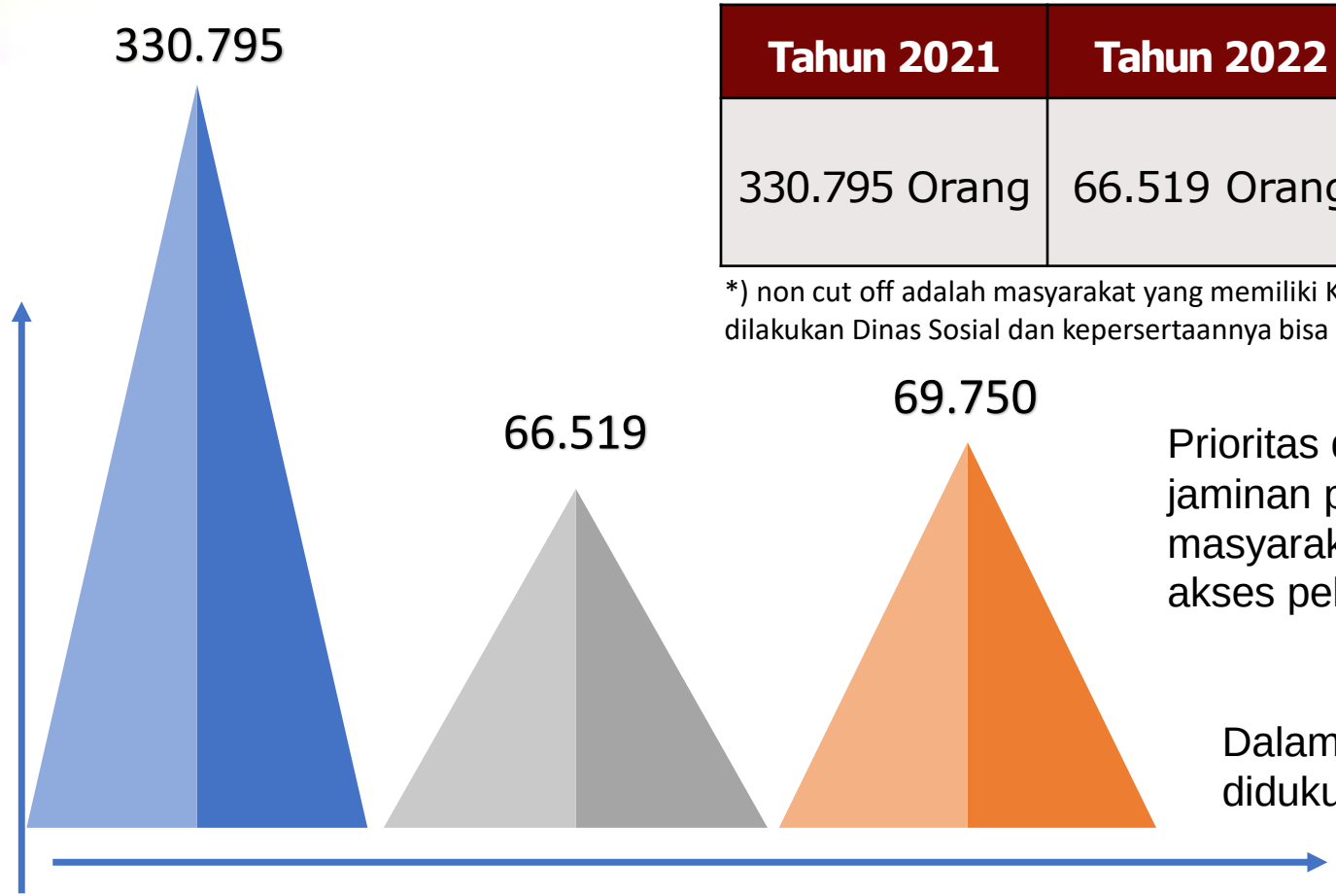

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
330.795 Orang	66.519 Orang	69.750 Orang	153.085 Orang (UHC non cut off)

*) non cut off adalah masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepersertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu

Prioritas dimaksud bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang merata

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS KESEHATAN

3
Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
730 orang per hari 2 kali makan	730 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan

Prioritas dimaksud bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berupa pemberian makanan dan minuman gratis yang diberikan kepada penduduk miskin (PMKS Lansia Terlantar).
Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Sosial

Keberhasilan kinerja berdampak pada menurunnya **Angka Kemiskinan**, yang selalu menurun dari Tahun 2021 5,93% pada Tahun 2023 menjadi **5,00%**

Pemberian makanan gratis diberikan kepada PMKS Lansia Terlantar yang terdata pada database Dinas Sosial melalui ***BERKAT SAYANG.***
Makanan yang disajikan sudah memenuhi unsur gizi dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

4

10.000 Beasiswa Kuliah

10.000 Beasiswa Kuliah

Target	Tahun 2022	Tahun 2023	AKUMULASI (2021 s.d 2023)	Target Tahun 2024
Jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	497 orang	493 orang	990 orang	503 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	1.000 orang	1.000 orang	2.000 orang	1.000 orang
Jumlah pemuda berprestasi bidang keagamaan yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	357 orang	650 orang	1.007 orang	500 orang
Jumlah pemuda berprestasi yang berkuliah di Luar Negeri, menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	-	-	-	30 orang
TOTAL	**1.854 orang**	**2.143 orang**	**3.997 orang**	**2.033 orang**

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pemberian beasiswa untuk : pemuda berprestasi, mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, dan mahasiswa dari keluarga miskin.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Sosial; dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

10.000 Beasiswa Kuliah

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dari Tahun 2021 mencapai 80,65 dan pada Tahun 2023 mencapai **81,88** yang merupakan angka tertinggi untuk Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2024 terdapat tambahan spesifikasi beasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang berprestasi yang kuliah di Luar Negeri yaitu sebanyak 30 beasiswa..

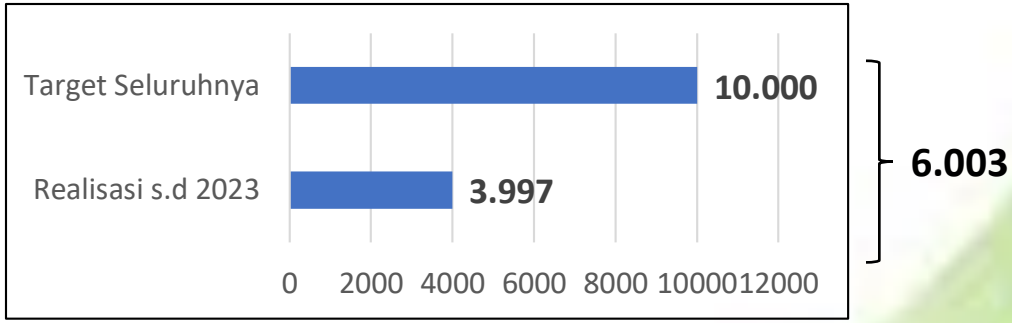

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 10.000 Beasiswa, sampai dengan Tahun 2023 sudah diberikan 3.997 Beasiswa, sehingga masih ada Gap 6.003 Beasiswa yang akan diberikan pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026

5

Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Tahun 2021 8.351 Orang

Tahun 2022 9.677 Orang

Tahun 2023 10.023 Orang

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
8.351 orang	9.677 orang	10.023 Orang	10.167 Orang

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Sidoarjo melalui peningkatan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Agama dengan memberikan insentif / tambahan penghasilan

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Keberhasilan kinerja berdampak meningkatnya **Indeks Kesalehan Sosial**, yang pada Tahun 2023 tercapai **85,15** meningkat dari Tahun 2021 82,03

Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta

Modal Usaha Mikro Perempuan

Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.891 kelompok	2.993 Kelompok	2.400 kelompok

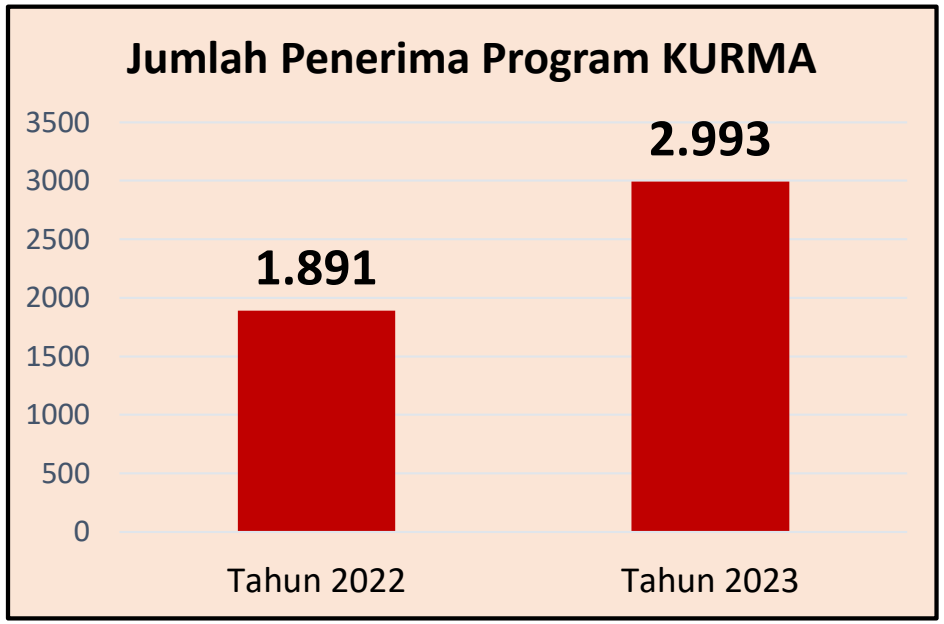

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro mandiri melalui pemberdayaan perempuan sebagai penggerak usaha mikro dengan pemberian modal usaha.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Pertumbuhan Ekonomi**, dimana pada Tahun 2023 mencapai **6,16%**

7

Rp. 6 Juta Operasional

Bagi RT

Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Tahun 2023	Target Tahun 2024
730 RT dari 4 Kecamatan	8.041 RT dan 1.902 RW dari 18 Kecamatan

Pemberian Insentif untuk Seluruh RT diberikan pada Tahun 2024 untuk total 8.041 RT dan 1.902 RW dari 18 Kecamatan di Kab. Sidoarjo

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga Desa / Kelurahan melalui peran aktif RT dengan memberikan biaya operasional.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Keberhasilan kinerja berdampak meningkatnya **Indeks Kesalehan Sosial**, yang pada Tahun 2023 tercapai **85,15** meningkat dari Tahun 2021 82,03

Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT

Pada Tahun 2023 dilaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi RT dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Penyerahan Bantuan Sound System

Sosialisasi Lomba RT

8

20.000 UMKM

Naik Kelas

20.000 UMKM Naik Kelas

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TOTAL (2021 + 2022 + 2023)	Target Tahun 2024
1.664 UMKM	5.533 UMKM Disperindag : 900 UMKM Diskop : 4.633 UMKM	5.185 UMKM Disperindag : 901 UMKM Diskop : 4.284 UMKM	12.382 UMKM	4.340 UMKM Disperindag : 340 UMKM Diskop : 4.000 UMKM

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan IKM agar naik kelas dengan memberi bekal pembinaan dan pelatihan
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Sama dengan Program Kurma, Program UMKM Naik Kelas juga berdampak pada meningkatnya **Pertumbuhan Ekonomi**, dimana pada Tahun 2023 mencapai **6,16%**

20.000 UMKM Naik Kelas

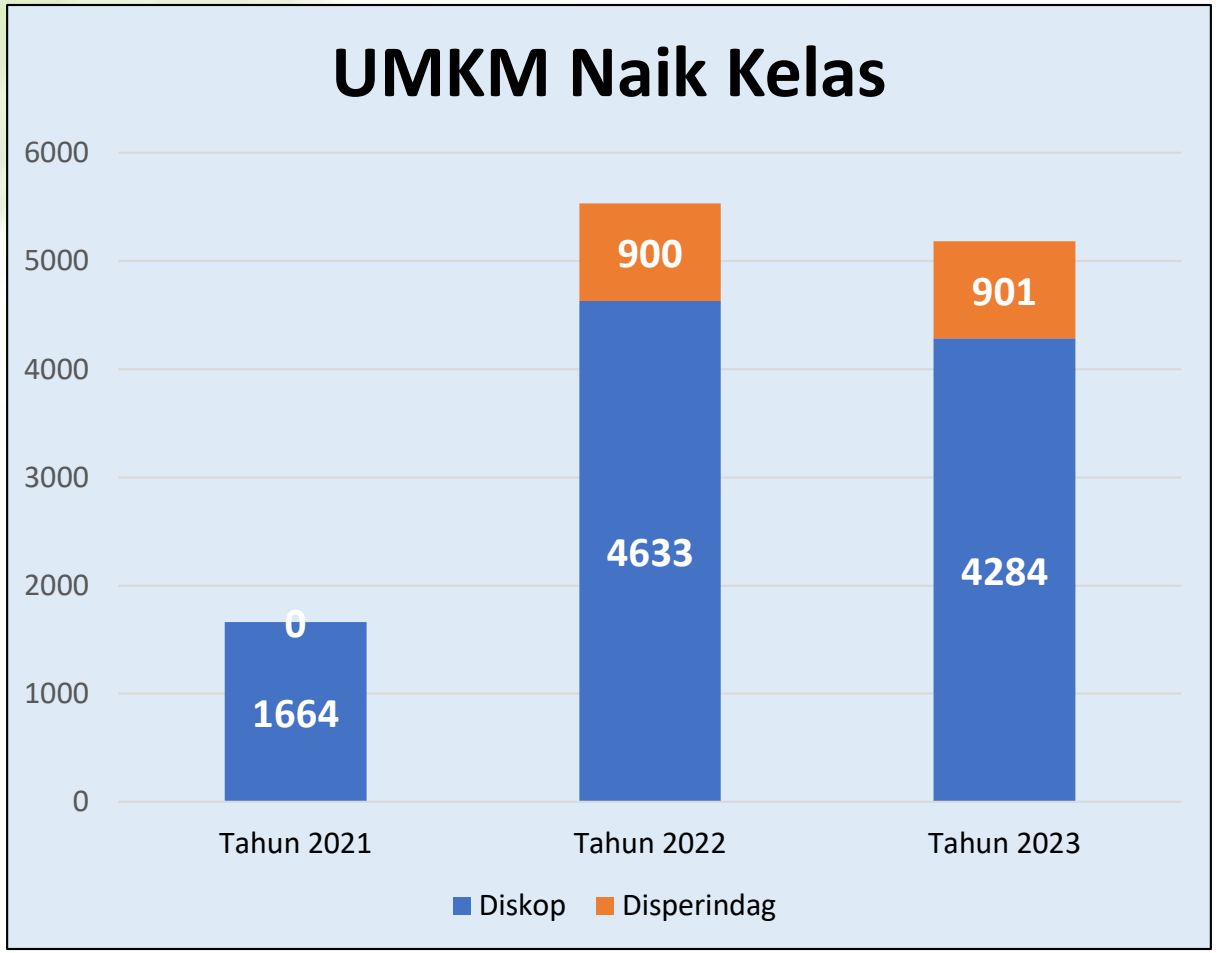

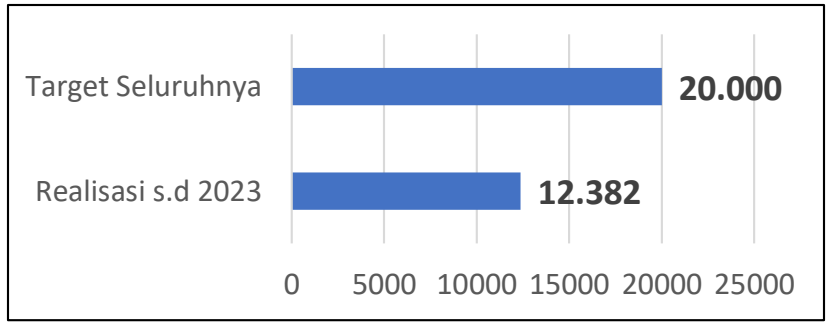

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 20.000 UMKM yang Naik Kelas, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 12.382 UMKM yang naik kelas, sehingga masih ada Gap 7.618 UMKM yang akan diupayakan untuk naik kelas sampai sampai dengan Tahun 2026

9

Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.290 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	16.132,20 meter

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	3.003,9 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	23.305 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	837 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.093 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	24.950,72 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	10 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	848 titik
Pembangunan Fly Over	- Fly Over Juanda - Fly Over Krian - Fly Over Tarik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	2.000 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	25.630 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	16 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	412 titik

Pembangunan Frontage Road Waru - Buduran

Pembebasan Lahan Frontage	
Tahun 2021	4.772 m2
Tahun 2022	5.637 m2
Tahun 2023	9.654 m2

Total Lahan Dibebaskan 20.063 m2

1.290 meter	3.003,9 meter	1.093 meter	2.000 meter
2021	2022	2023	Target 2024

Total dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dibangun Frontage Road sepanjang 5.386,9 meter

Betonisasi Jalan

Dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dilakukan Pembangunan Betonisasi Jalan sepanjang 64.387,92 meter

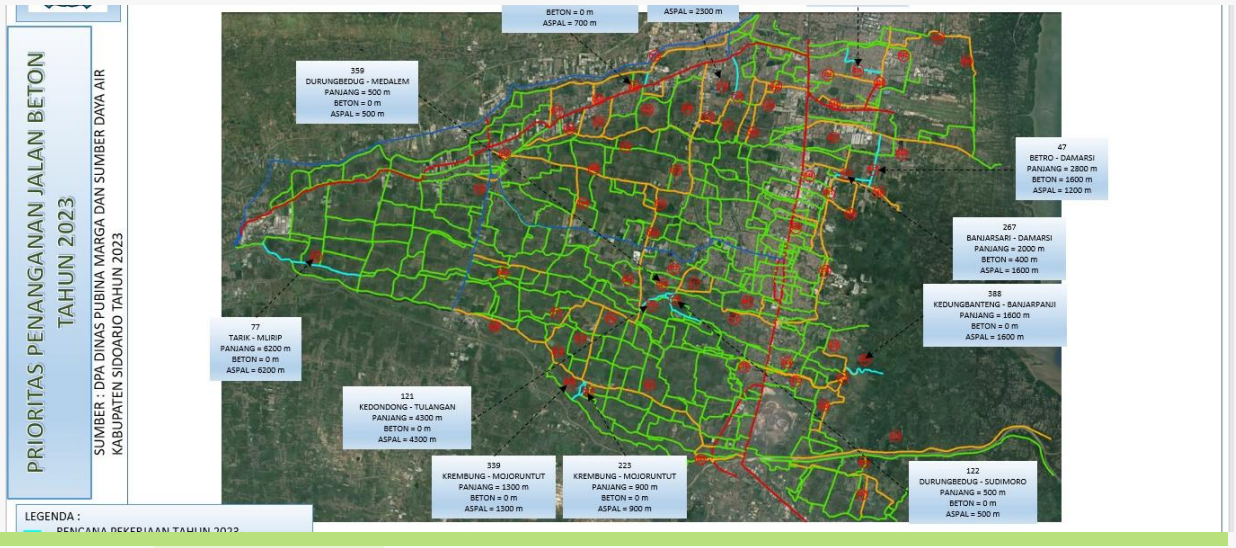

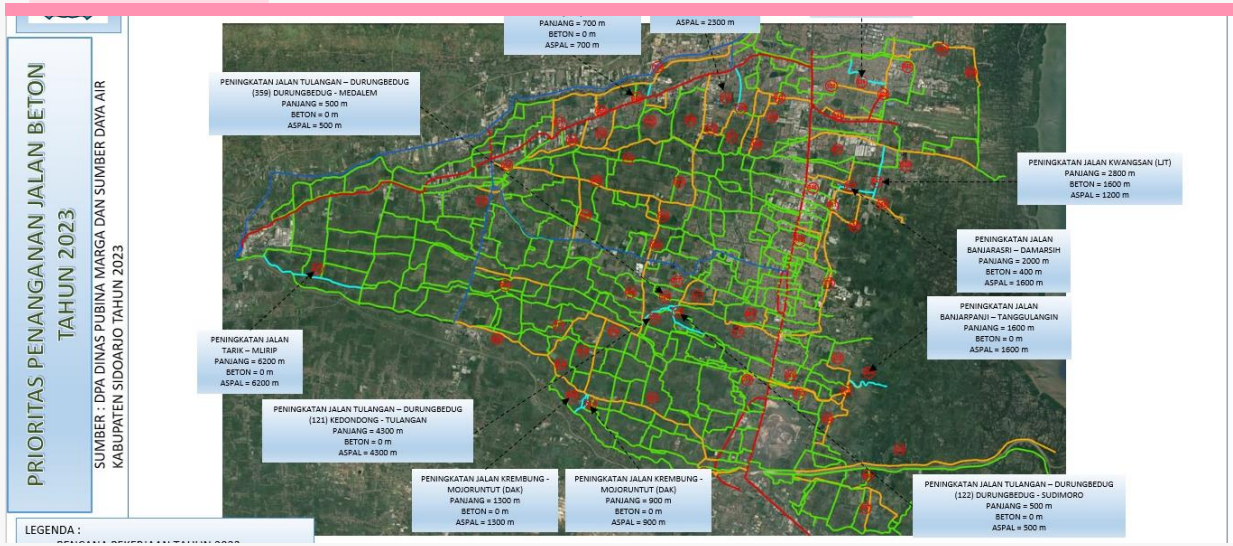

16.132,20 meter	23.305 meter	24.950,72 meter	25.630 meter
2021	2022	2023	Target 2024

Pembangunan Fly Over

Fly Over Tarik

Fly Over Juanda

Fly Over Krian

Pembangunan Fly Over bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi waktu tempuh. Dengan adanya Fly Over Juanda, Fly Over Tarik, dan Fly Over Krian diharapkan dapat mengurangi kemacetan terutama di area sekitar Gedangan, perlintasan kereta api Krian dan Tarik.

10

Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

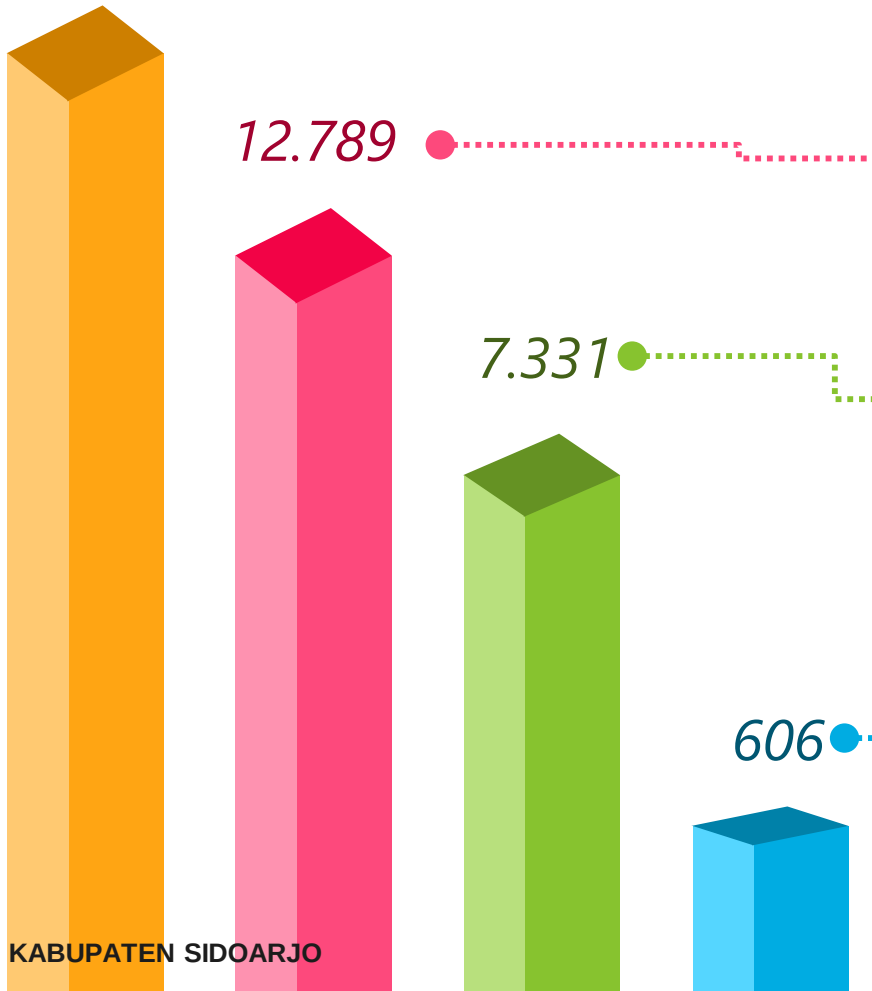

Target Tahun 2024

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
12.633 kader	225 nakes

Tahun 2023

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
12.579 kader	210 nakes

Tahun 2022

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
7.198 kader	133 nakes

Tahun 2021

Kader Posyandu	Tenaga Kesehatan
606 kader	(belum ada pemberian)

11

Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer

Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer

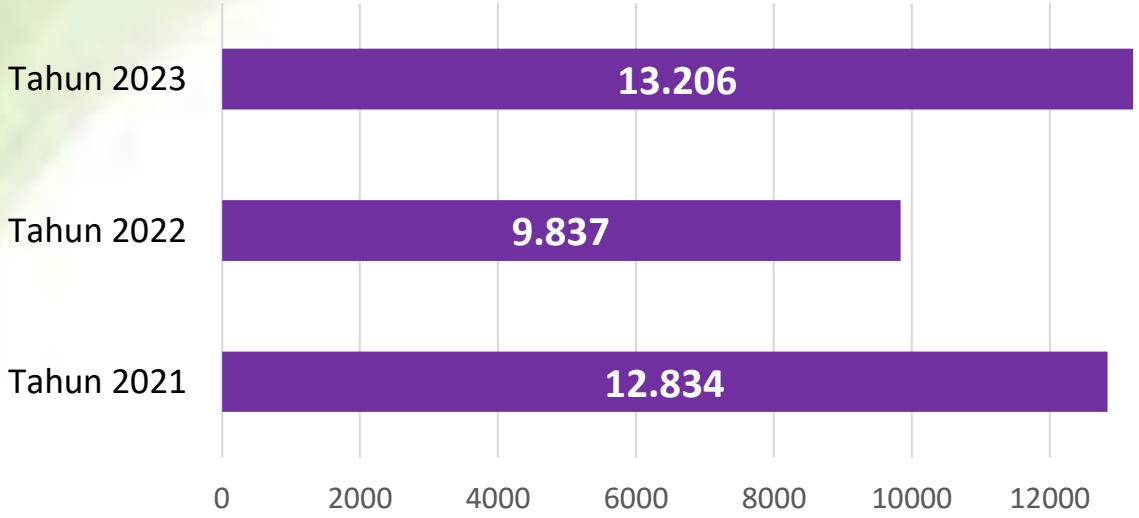

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer dengan memberikan honorarium bulanan dan insentif

Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
12.834 orang	9.837 orang	13.206 orang	14.605 orang

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan**, yang pada Tahun 2023 sudah mencapai **98,32%**

12

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan memfasilitasi kreativitas para pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni budaya.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- Keberhasilan kinerja berdampak pada **meningkatnya jumlah prestasi pemuda yang diperoleh**, sebagai berikut :
  - Tahun 2021 : 464 Prestasi
  - Tahun 2022 : 613 Prestasi
  - Tahun 2023 : 501 Prestasi

Event Kepemudaan yang diselenggarakan :

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
❑ POPDA XIII & PEPARPEDA I Jawa Timur ❑ Jayandaru Youth Night Paradise	❑ PORPROV VIII Jawa Timur ❑ Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)	❑ Aksi Gemilang (Lomba Inovasi Pemuda Desa)

Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Sebagai wadah komunitas pemuda di Kabupaten Sidoarjo dalam mengkoordinasikan kegiatannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memfasilitasi Youth Center, yang dibangun satu lokasi dengan kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

13

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TOTAL (2021 + 2022 + 2023)	Target Tahun 2024
150 Warung	402 Warung	422 Warung	974 Warung	400 Warung

Program Bedah Warung Pemkab Sidoarjo

Semi Minimarket, Warung Warga Kebanjiran Pembeli

Warung milik Sumayah warga Dusun Guyangan RT 16/RW 8, Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung ini lebih tertata rapi. Awal Januari lalu, warung kelontong miliknya terpilih jadi salah satu prototipe program bedah warung dari Pemkab Sidoarjo.

RIZKY PUTRI PRATIMI,
Wartawan Radar Sidoarjo

KONDISI warung itu kini lebih bersih. Produk yang dijual tertata rapi pada rak khusus. Konsumen lebih leluasa memilih sendiri barang yang diinginkan. Jika diperhatikan, konsepnya semi minimarket. Seperti yang dikehendaki oleh pemkab.

Dimana bedah warung ini dilakukan agar toko kecil mampu bertahan di tengah persaingan dengan minimarket yang tumbuh subur hingga pelosok desa.

Perempuan yang sudah 15 tahun membuka toko kelontong ini merasa bersyukur. Dengan tampilan baru tersebut, warungnya kini lebih ramai pembeli. "Iya, pembeli jadi senang belanja di sini," katanya.

Selain bahagia karena warungnya dibedah, kebahagiaan Sumayah bertambah dengan hadirnya Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor ke tempatnya berjualan Rabu (9/2). Gus Muhdlor panggilan akrab bupati meninjau langsung hasil bedah warung yang menjadi program prioritasnya itu.

• Ke Halaman 10

BERSYUKUR: Bupati Sidoarjo Ahmad Muthlor berbincang dengan Sumayah salah satu penerima program bedah warung.

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan warung / usaha perdagangan rakyat dengan memberikan pendampingan, bantuan dan renovasi.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Sama dengan Program Kurma dan Program UMKM Naik Kelas, Program Bedah Warung juga berdampak pada meningkatnya **Pertumbuhan Ekonomi**, dimana pada Tahun 2023 mencapai **6,16%**

2.000 Warung Rakyat Direnovasi

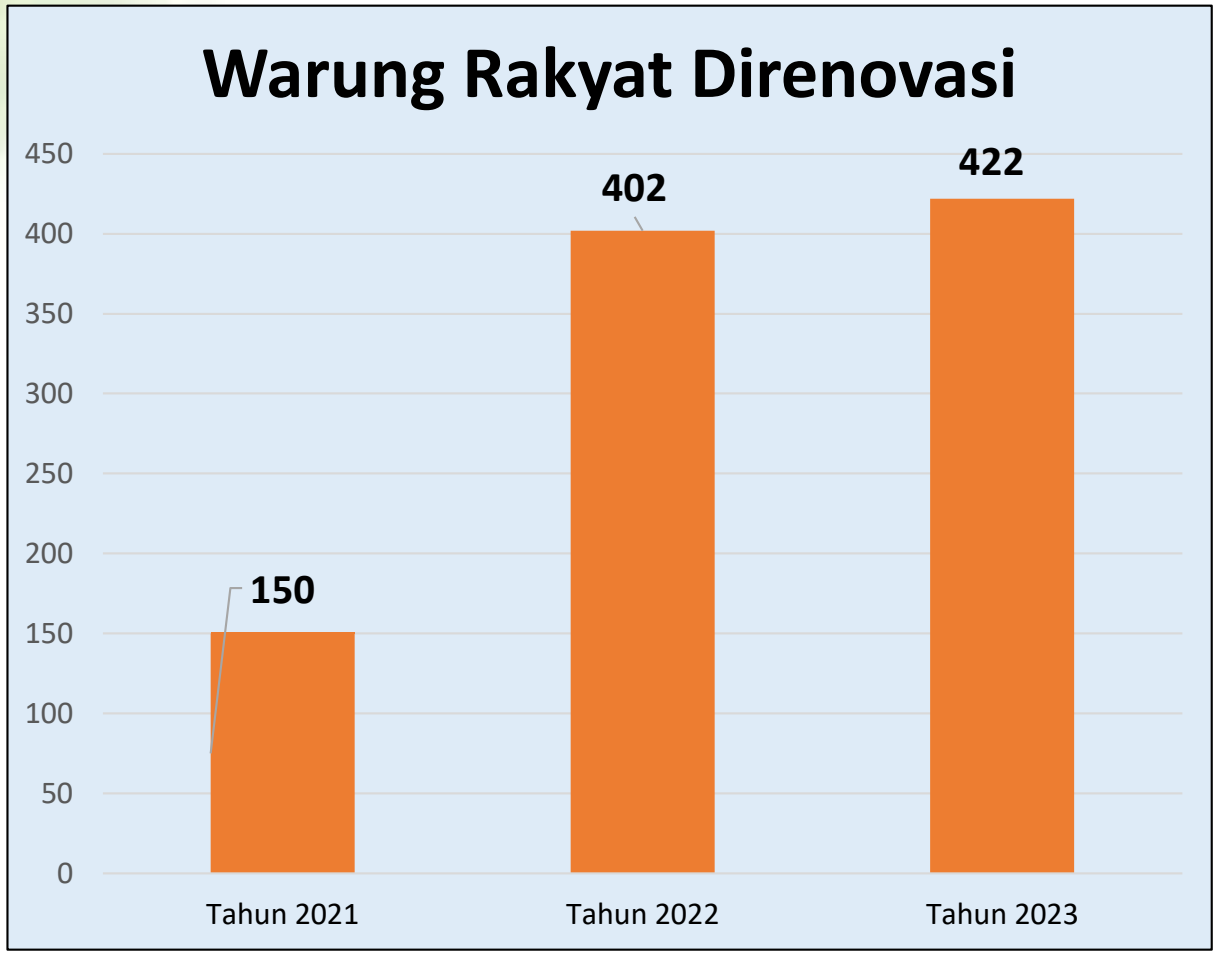

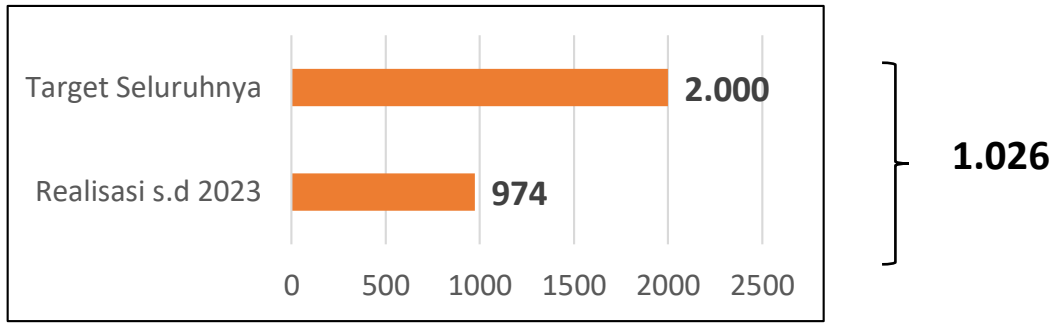

Adapun dari target yang dijanjikan sebanyak 2.000 warung yang akan direnovasi, sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 974 warung, sehingga masih ada Gap 1.026 warung yang direnovasi sampai sampai dengan Tahun 2026

Tingkatkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Sejahtera

Tingkatkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Sejahtera

Sumber Dana	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
ADD SILTAP	Rp 120.061.733.364,-	Rp 124. 942.712.235,-	Rp.126.403.322.463,-	Rp.127.251.512.856,-
ADD Bagi Hasil	Rp12.528.833.443,-	Rp13.036.176.834,-	Rp13.200.275.437,-	Rp13.200.275.437,-

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan status Desa menjadi Desa Mandiri melalui peningkatan operasional ADD (Alokasi Dana Desa)
- Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo**, yang pada tahun 2023 sudah mencapai **47,8%**
- Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat dari penambahan target ADD SILTAP dan ADD Bagi Hasil mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

15

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

Melalui Call Center 112 Sidoarjo

Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1.949 pengaduan	1.945 pengaduan	1.500 pengaduan

- Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan respon cepat terhadap pengaduan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo** yang pada tahun 2023 kategori **A- (Sangat Baik)**

24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

SUMMARY LAPORAN CALL CENTER 112
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023

112 SIDOARJO CALL CENTER

TOTAL PANGGILAN DIJAWAB

Jumlah panggilan yang dijawab melalui *Call Center 112* berjumlah 48.902

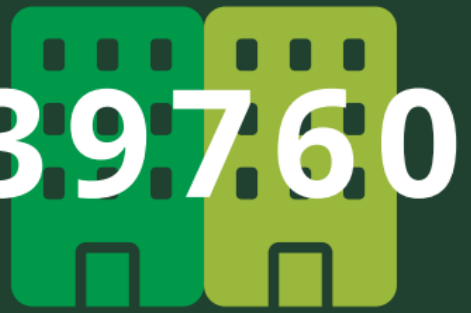

PRANK & GHOST CALL

Jumlah prank call dan ghost call yang masuk melalui *Call Center 112* berjumlah 39.760

TOTAL PELAPORAN

Jumlah pelaporan yang masuk melalui *Call Center 112* berjumlah 1945. Jumlah ini mencakup laporan melalui telepon dan Media sosial

LAPORAN BELUM DITINDAKLANJUTI

Dari 1945 laporan yang masuk dalam satu tahun. Sebanyak 81 laporan belum ditindaklanjuti

16

Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Uraian Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur	-	1.611 ijin	1.158 ijin	1.318 ijin
Jumlah UM yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan	300 UM	300 UM	78 UM	300 UM

- ❑ Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah dengan memberikan kemudahan pelayanan perijinan khususnya untuk pelaku usaha mikro.
- ❑ Dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Sidoarjo didukung oleh :
  - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ❑ Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya **nilai investasi daerah**, dimana pada Tahun 2023 Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai **Rp.13.681.823.120.000,-**

17

Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	837 ton/hari

Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	2 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	7 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	905 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	39 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	5 titik

Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	800 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	2 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	886 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	30 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	9 titik

Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah titik pembangunan vertical drain sumur resapan/ biopori	5 titik
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

Perluasan RTH

Luas RTH Tahun 2023 sebesar 29,23 Hektar

Taman Tugu Babalayar

Taman Alun – Alun Sidoarjo

Taman Trotoar GOR Sidoarjo

Taman Median Jalan

Taman Pulau Gajah Mada

Revolusi Manajemen Sampah

Sampah yang terkelola 3R sebesar 77%

Revitalisasi TPST Kawasan Lingkar Timur

Revitalisasi TPST Barengkrajan - Krian

Revitalisasi TPST Kawasan Taman

Revitalisasi TPST Banjarbendo - Sidoarjo

Revitalisasi Sungai

Ketersediaan air untuk irigasi sebesar 6.130 Liter/Detik

Rumah Pompa Banjarpanji

Rumah Pompa Kedungbanteng

Penataan Afvoer Kali Balong

Peningkatan Afvoer Kedungpeluk

Normalisasi Sistem Drainase

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

PADA TANGGAL 12 JANUARI 2023 MENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN KATEGORI TERBAIK KE-5 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3), DARI GUBERNUR JAWA TIMUR, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, DI LAPANGAN BOLA PRAPAT KURUNG, PERAK TIMUR, SURABAYA

PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023 MENERIMA PENGHARGAAN ADIPURA KATEGORI KOTA SEDANG DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DI JAKARTA

PADA TANGGAL 14 MARET 2023 MENDAPAT PENGHARGAAN UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) DARI WAPRES RI KARENA TELAH MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS), DI BALAI SUDIRMAN, JAKARTA

PADA TANGGAL 15 MARET 2023 MENDAPAT PENGHARGAAN DARI RADAR SIDOARJO SEBAGAI TOKOH PENGGERAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RADAR SIDOARJO AWARD 2023, DI PENDOPO DELTA WIBAWA, SIDOARJO

PADA TANGGAL 29 APRIL 2023 MENDAPAT PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH (PPD) KINERJA TERBAIK NASIONAL PERINGKAT KE – 5, PADA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH (OTODA) KE- 27, DI ANJUNGAN CITY OF MAKASSAR

PADA TANGGAL 25 MEI 2023 MERAIH PENGHARGAAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 10X BERTURUT-TURUT ATAS LHP LKPD T.A. 2022 DARI BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR, DITERIMA DI KANTOR BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR

PADA TANGGAL 29 MEI 2023 MERAIH PENGHARGAAN E-PURCHASING AWARD ATAS NILAI TRANSAKSI TERBANYAK DALAM PEMANFAATAN BARANG/JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL KABUPAETN/KOTA TAHUN 2023, DARI GUBERNUR JATIM, DI GRAND CITY, SURABAYA

PADA TANGGAL 16 JUNI 2023 MERAIH THE 1ST INDONESIA GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS AWARDS 2023 SEBAGAI PEMIMPIN TERPOPULER DI MEDIA PEMBERITAAN ONLINE DARI HUMAS INDONESIA, DIBERIKAN DI HOTEL CLORA, MAKASSAR

PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2023 MERAIH JASA BAKTI MEMAJUKAN KOPERASI DAN UKM DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI, DI JOGJAKARTA

PADA TANGGAL 29 OKTOBER 2023 MERAIH PENGHARGAAN "INSPIRATIONAL REGIONAL HEAD WHO MOBILIZIES YOUTH" SEBAGAI PIMPINAN DAERAH YANG MENGINSPIRASI DAN PENGGERAK PARA KAUM MUDA, DARI MEDIA KABARPAS, DI LUMINOR HOTEL, SIDOARJO

PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 MENDAPATKAN APRESIASI DARI YANKES KEMENKES DR. AZHAR JAYA, S.H., SKM., MARS ATAS PREDIKAT KELAS A RSUD SIDOARJO, DI SIDOARJO

PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2023 MERAIH JUARA I PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL YANG CEMERLANG, EFEKTIF, RESPONSIF, INOVATIF, DAN AKURAT TRADISIONAL (PELITA CERIA) SE – JATIM, DI BATU, PADA HARI KESEHATAN NASIONAL (HKN) KE-59

PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2023 MENDAPATKAN PENGHARGAAN DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) PEMPROV JAWA TIMUR, DI SURABAYA DENGAN KATEGORI PEMBINA TERBAIK PENERAPAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB).

PADA TANGGAL 12 DESEMBR 2023 KABUPATEN SIDOARJO DINOBATKAN SEBAGAI KABUPATEN SANGAT INOVATIF DALAM INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2023 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) RI, DI GEDUNG SASANA BHAKTI PRAJA (SBP), KANTOR PUSAT KEMENDAGRI, JAKARTA

Terima Kasih